



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

RPJPD





**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN**

Nomor : 1

Seri : D

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
TAHUN 2025-2045**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, dan Pasal 263 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah;

b. bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah;

c. bahwa berdasarkan pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 76);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN
dan
BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Bappeda, adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional Tahun 2025–2045, adalah dasar hukum perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2045.
8. Pembangunan Daerah adalah upaya yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, peningkatan akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang berpedoman pada RPJP Nasional.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJM Nasional.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah, adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arahan dan acuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan Pembangunan daerah sesuai visi dan misi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang rasional, proporsional, efektif, dan efisien dalam melaksanakan pembangunan;
- b. menjamin adanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat;
- c. menjadi pedoman bagi calon kepala daerah dalam menyusun visi dan misi kepala daerah; dan
- d. menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD.

Pasal 4

Ruang lingkup RPJPD Tahun 2025-2045 meliputi :

- a. visi pembangunan;
- b. misi Pembangunan;
- c. arah kebijakan pembangunan; dan
- d. sasaran pokok pembangunan.

Pasal 5

- (1) Sistematika RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I pendahuluan
 - b. BAB II gambaran umum kondisi daerah
 - c. BAB III permasalahan dan isu strategis
 - d. Bab IV visi dan misi daerah
 - e. Bab V arah kebijakan dan sasaran pokok daerah
 - f. Bab VI penutup
- (2) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan bertanggungjawab atas pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD Tahun 2025-2045.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila :
 - a. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disahkan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - d. terjadi perubahan yang mendasar.
- (3) Perubahan RPJPD Tahun 2025-2045 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan

Ditetapkan di Teluk Dalam
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

SOKHIATULO LAIA

Diundangkan di Teluk Dalam
Pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,

ttd

IKHTIAR DUHA

Pembina Utama Madya
NIP. 19660412 199203 1 022

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (1-39/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KAB. NIAS SELATAN,


ANTON NIUS TELAUMBANUA, SH
NIP. 19820403 200903 1 007



PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN TAHUN 2025–2045

I. PENJELASAN UMUM

Guna meningkatkan dan pemeratakan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja dan lapangan usaha, meningkatkan akses serta kualitas pelayanan publik, serta memperkuat daya saing daerah sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

Dalam konteks tersebut, perencanaan pembangunan daerah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan ini disusun dalam tiga tingkatan, yaitu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis dalam menentukan kebijakan masa depan guna memastikan arah dan tujuan pembangunan daerah yang selaras dengan visi, misi, serta kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk memberikan panduan yang jelas dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah, diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

RPJPD ini berfungsi sebagai pedoman dalam menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang berorientasi pada visi dan misi kepala daerah terpilih. Dengan demikian, meskipun terjadi pergantian kepemimpinan daerah setiap lima tahun sekali, kesinambungan pembangunan tetap terjaga sesuai dengan arah kebijakan jangka panjang yang telah disusun.

RPJPD Kabupaten Nias Selatan merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang mencakup visi, sasaran visi, misi, arah kebijakan, sasaran pokok, tahapan pembangunan, serta skala prioritas pembangunan daerah secara bertahap dalam periode 20 tahun ke depan. RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 bertujuan untuk:

1. Menjaga konsistensi arah kebijakan pembangunan daerah selama kurun waktu 2025–2045.
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan jangka panjang antara Kabupaten Nias Selatan dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Pusat.

3. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD.
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Visi RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 telah dirumuskan secara partisipatif bersama para pemangku kepentingan pembangunan daerah, yakni:

“Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan.”

Visi ini menjadi landasan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, berbasis kearifan lokal, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Daftar Gambar	vi
Daftar Tabel	vii
Daftar Grafik	xii
Bab I Pendahuluan	I-1
1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan lainnya	I-5
1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Nias Selatan dengan RPJPN	I-6
1.3.2. Hubungan RPJPD Kabupaten Nias Selatan dengan RPJPD Sumatera Utara	I-7
1.3.3. Hubungan RPJPD Kabupaten Nias Selatan dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan	I-7
1.4. Maksud dan Tujuan	I-9
1.5. Sistematika Penulisan	I-10
Bab II Gambaran Kondisi Umum Daerah	II-1
2.1. Aspek Geografi dan Demografi	II-1
2.1.1. Aspek Geografi	II-2
2.1.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah	II-2
2.1.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi	II-2
2.1.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis	II-5
2.1.1.1.3. Topografi	II-5
2.1.1.1.4. Geologi	II-6
2.1.1.1.4.1. Struktur dan Karakteristik	II-7
2.1.1.1.4.2. Potensi	II-7
2.1.1.1.5. Hidrologi	II-7
2.1.1.1.6. Klimatologi	II-8
2.1.1.1.7. Penggunaan Lahan	II-8
2.1.1.1.7.1. Kawasan Budidaya	II-8
2.1.1.1.7.2. Kawasan Lindung	II-16
2.1.1.2. Wilayah Rawan Bencana	II-16
2.1.1.3. Indeks Ketahanan Pangan	II-18
2.1.1.4. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	II-19
2.1.2. Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	II-21
2.1.3. Demografi	II-22
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat	II-28
2.2.1. Kesejahteraan Ekonomi	II-28
2.2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi	II-29
2.2.1.2. Indeks Gini	II-30
2.2.1.3. Nilai Tukar Nelayan	II-31
2.2.1.4. Angka Kemiskinan	II-32

2.2.1.5.	Tingkat Pengangguran Terbuka.....	II-35
2.2.1.6.	Indeks Pembangunan Manusia	II-35
2.2.2.	Kesejahteraan Sosial Budaya	II-37
2.2.2.1.	Indeks Pembangunan Gender	II-37
2.2.2.2.	Indeks Pemberdayaan Gender	II-39
2.2.2.3.	Indeks Ketimpangan Gender	II-40
2.3.	Aspek Daya Saing Daerah	II-41
2.3.1.	Daya Saing Ekonomi Daerah	II-42
2.3.1.1.	PDRB	II-42
2.3.1.2.	PDRB per Kapita	II-44
2.3.1.3.	Indeks Ekonomi Inklusif	II-45
2.3.1.4.	Laju Inflasi	II-46
2.3.1.5.	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita	II-47
2.3.1.6.	Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)	II-48
2.3.1.7.	Rasio kewirausahaan	II-48
2.3.2.	Daya Saing Sumber Daya Manusia	II-49
2.3.2.1.	Indeks Pendidikan.....	II-50
2.3.2.2.	Indeks Kesehatan.....	II-51
2.3.2.3.	Indeks Pengeluaran.....	II-52
2.3.2.4.	Kualitas Tenaga Kerja (Rasio DIII & S1).....	II-53
2.3.2.5.	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	II-53
2.3.2.6.	Angka Literasi masyarakat.....	II-55
2.3.2.7.	Rasio Ketergantungan	II-55
2.3.3.	Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah.....	II-56
2.3.3.1.	Indeks infrastruktur.....	II-57
2.3.3.2.	Jenis dan jumlah bank dan cabang	II-58
2.3.3.3.	Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran	II-58
2.3.3.4.	Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/hotel	II-59
2.3.3.5.	Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak	II-60
2.3.3.6.	Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik	II-61
2.3.4.	Daya Saing Iklim Investasi.....	II-62
2.3.4.1.	Indeks Daya Saing Daerah.....	II-62
2.3.4.2.	Indeks Kerukunan Umat Beragama	II-63
2.3.4.3.	Angka kriminalitas.....	II-64
2.3.4.4.	Persentase Desa Mandiri.....	II-65
2.4.	Aspek Pelayanan Umum.....	II-65
2.4.1.	Urusan Wajib Pelayanan Dasar	II-66
2.4.1.1.	Pendidikan	II-66
2.4.1.1.1.	Harapan Lama Sekolah	II-66
2.4.1.1.2.	Rata-Rata Lama Sekolah	II-67
2.4.1.1.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	II-68
2.4.1.1.4.	Angka Partisipasi Murni (APM)	II-69

2.4.1.1.5. Rasio Guru terhadap Murid.....	II-69
2.4.1.2. Kesehatan	II-70
2.4.1.2.1. Angka Harapan Hidup.....	II-70
2.4.1.2.2. Fasilitas kesehatan.....	II-71
2.4.1.2.3. Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk.....	II-71
2.4.1.2.4. Jumlah Kematian Ibu Hamil, Kematian Bayi / 1000 Kelahiran Hidup, balita kekurangan Gizi dan Persentase Prevelansi Stunting.....	II-72
2.4.1.3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	II-73
2.4.1.3.1. Pekerjaan umum	II-73
2.4.1.3.1.1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten.....	II-74
2.4.1.3.1.2. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola.....	II-75
2.4.1.3.1.3. Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan.....	II-76
2.4.1.3.1.4. Rasio jaringan irigasi.....	II-77
2.4.1.4. Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman	II-78
2.4.1.5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	II-79
2.4.1.6. Sosial	II-81
2.4.2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	II-83
2.4.2.1. Tenaga Kerja	II-83
2.4.2.2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-84
2.4.2.3. Pangan.....	II-85
2.4.2.4. Lingkungan Hidup	II-86
2.4.2.5. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	II-87
2.4.2.6. Pemberdayaan Masyarakat Desa.....	II-89
2.4.2.7. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ...	II-90
2.4.2.8. Perhubungan	II-90
2.4.2.9. Komunikasi dan Informatika.....	II-91
2.4.2.10. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	II-92
2.4.2.11. Penanaman Modal	II-92
2.4.2.12. Kepemudaan dan Olahraga.....	II-94
2.4.2.13. Statistik	II-95
2.4.2.14. Persandian.....	II-95
2.4.2.15. Kebudayaan.....	II-96
2.4.2.16. Perpustakaan.....	II-96
2.4.2.17. Kearsipan.....	II-97
2.4.3. Urusan Pilihan.....	II-97
2.4.3.1. Kelautan dan Perikanan.....	II-98
2.4.3.2. Pariwisata	II-101
2.4.3.3. Pertanian	II-102

2.4.3.4.	Kehutanan	II-106
2.4.3.5.	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-106
2.4.3.6.	Perdagangan	II-111
2.4.3.7.	Perindustrian	II-111
2.4.4.	Urusan Penunjang	II-112
2.4.4.1.	Pemerintahan Umum	II-112
2.4.4.1.1.	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	II-113
2.4.4.1.2.	Indeks Pelayanan Publik	II-114
2.4.4.1.3.	Indeks Inovasi Daerah	II-115
2.4.4.1.4.	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	II-116
2.4.4.2.	Aparatur dan Kepegawaian	II-116
2.4.4.3.	Keuangan Daerah	II-117
2.4.4.4.	Perencanaan Pembangunan	II-119
2.4.4.5.	Penanggulangan Bencana Daerah	II-120
2.4.4.6.	Pengawasan	II-121
2.5.	Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2006-2026	II-121
2.5.1.	Refleksi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan	II-121
2.5.1.1.	Indeks Pembangunan Manusia	II-122
2.5.1.2.	Angka Kemiskinan	II-123
2.5.1.3.	Angka Penangguran	II-124
2.5.1.4.	Pertumbuhan ekonomi	II-126
2.5.1.5.	Ketimpangan Pendapatan	II-127
2.5.1.6.	PDRB per Kapita	II-128
2.5.2.	Evaluasi Arah Pembangunan RPJPD 2006-2026	II-128
2.5.3.	Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut	II-142
2.6.	Tren Demografi dan kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik	II-143
2.6.1.	Proyeksi Kependudukan	II-143
2.6.1.1.	Proyeksi Jumlah Penduduk	II-144
2.6.1.2.	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	II-145
2.6.1.3.	Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur	II-146
2.6.1.4.	Analisis Proyeksi Kependudukan dan Bonus Demografi	II-147
2.6.2.	Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik ...	II-149
2.6.2.1.	Kebutuhan Rumah atau Tempat Tinggal	II-150
2.6.2.2.	Kebutuhan Air Minum	II-151
2.6.2.3.	Kebutuhan Listrik	II-152
2.6.2.4.	Kebutuhan Pengelolaan Persampahan	II-153
2.6.2.5.	Kebutuhan Sarana Kesehatan	II-154
2.6.2.6.	Kebutuhan Sarana Pendidikan	II-155
2.7.	Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah	II-158
2.7.1.	Identifikasi dan Karakteristik Kawasan Strategis	II-160
2.7.2.	Program / Proyek Strategis Unggulan	II-162

Bab III	Permasalahan dan Isu-isu Strategis Daerah	III-1
3.1.	Permasalahan Pembangunan Daerah	III-1
3.2.	Isu Strategis	III-8
3.2.1.	Isu Global	III-15
3.2.2.	Isu Strategis Nasional	III-20
3.2.3.	Isu Strategis Sumatera Utara	III-26
3.2.4.	Isu Strategis Nias Selatan	III-33
Bab IV	Visi dan Misi Daerah	IV-1
4.1.	Visi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2025-2045	IV-1
4.2.	Sasaran Visi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2025-2045	IV-3
4.3.	Misi	IV-5
Bab V	Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok.....	V-1
5.1.	Arah Kebijakan	V-1
5.2.	Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045	V-9
5.2.1.	Arah Pembangunan Daerah	V-10
5.2.1.1.	Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun manusia yang sehat, berkualitas dan sejahtera	V-10
5.2.1.2.	Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui peningkatan produktivitas kegiatan perekonomian berbasis IPTEK, Inovasi dan berkelanjutan.....	V-14
5.2.1.3.	Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif	V-19
5.2.1.4.	Mewujudkan Keamanan lingkungan yang Tangguh dan stabilitas ekonomi	V-20
5.2.1.5.	Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya, Pangan dan Lingkungan Hidup	V-23
5.2.1.6.	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah	V-28
5.2.1.7.	Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.....	V-29
5.2.1.8.	Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan.....	V-30
5.2.2.	Arah Kebijakan Transformasi	V-35
5.3.	Indikator Utama Pembangunan Daerah	V-39
Bab VI	Penutup.....	VI-1
6.1	Kaidah Pelaksanaan	VI-1
6.1.1	konsistensi Perencanaan dan Pendanaan.	VI-1
6.1.2.	Kerangka Pengendalian	VI-5
6.1.3.	Insentif	VI-17
6.1.4.	Mekanisme Perubahan	V-18
6.1.5.	Komunikasi Publik	V-18
6.2.	Pembiayaan Pembangunan	VI-20
6.3.	Kesimpulan	VI-21
6.4.	Saran	VI-22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan LainnyaI-6

Gambar 1.2 Hubungan RPJPD Kabupaten dengan RTRW KabupatenI-9

Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nias SelatanII-2

Gambar 2.2 Peta Risiko Multi Bencana di Kabupaten Nias SelatanII-18

Gambar 2.3 Peta Rencana Kawasan Strategis Kabupaten Nias Selatan II-161

Gambar 5.1 Arah Kebijakan Pertahapan Pembangunan RPJPD
Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2026V-2

Gambar 6.1 Kerangka Kerja MRPN.....VI-7

Gambar 6.2 Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJPDVI-8

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, 2023	II-3
Tabel 2.2	Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan	II-4
Tabel 2.3	Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Nias Selatan....	II-7
Tabel 2.4	Pembagian Luas Satuan Rencana Pola Ruang Kabupaten Nias Selatan	II-9
Tabel 2.5	Pembagian Luas Satuan Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Nias Selatan.....	II-16
Tabel 2.6	Potensi Bencana Kabupaten Nias Selatan	II-17
Tabel 2.7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta komponen penyusunnya, yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air (IKA), 2019-2023	II-20
Tabel 2.8	Jumlah Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, 2023	II-23
Tabel 2.9	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis\ Kelamin di Kabupaten Nias Selatan, 2023	II-25
Tabel 2.10	Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Kartu Keluarga di Kabupaten Nias Selatan (orang), 2023	II-26
Tabel 2.11	Banyaknya Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Kematian yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, 2023	II-27
Tabel 2.12	Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-33
Tabel 2.13	DRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nias Selatan (Miliar Rupiah), 2016-2023	II-42
Tabel 2.14	Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-43
Tabel 2.15	PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nias Selatan (Miliar Rupiah), 2016-2023	II-43
Tabel 2.16	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen) Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023 ..	II-44
Tabel 2.17	PDRB per Kapita Kabupaten Nias Selatan ADHB dan ADHK 2010, 2016-2023 (Ribu Rupiah).....	II-45
Tabel 2.18	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-48
Tabel 2.19	Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-48
Tabel 2.20	Lulusan DIII dan S1 di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-53

Tabel 2.21	Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Nias Selatan, 2023.....	II-58
Tabel 2.22	Perkembangan Jumlah Restoran di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-58
Tabel 2.23	Jumlah Hotel dan Penginapan Lainnya di Kabupaten Nias Selatan, 2023	II-59
Tabel 2.24	Perkembangan Angka Kriminal yang tertangani di Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023	II-64
Tabel 2.25	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-68
Tabel 2.26	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-69
Tabel 2.27	Rasio Jumlah Guru dan Murid jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2024	II-69
Tabel 2.28	Rasio Jumlah Fasilitas Kesehatan Berbanding Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-71
Tabel 2.29	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-72
Tabel 2.30	Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2023	II-72
Tabel 2.31	Jumlah Kematian Ibu Hamil, Kematian Bayi / 1000 Kelahiran Hidup, balita kekurangan Gizi dan Persentase Prevalensi Stunting di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-73
Tabel 2.32	Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023 (Km).....	II-74
Tabel 2.33	Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023(Km)	II-75
Tabel 2.34	Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang berwenang mengelolanya Kabupaten Nias Selatan, 2023	II-75
Tabel 2.35	Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Nias Selatan, 2023	II-76
Tabel 2.36	Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-78
Tabel 2.37	Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-79
Tabel 2.38	Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Nias Selatan, 2019-2022.....	II-79
Tabel 2.39	Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) Di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-80
Tabel 2.40	Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-80
Tabel 2.41	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-80

Tabel 2.42	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-81
Tabel 2.43	Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-81
Tabel 2.44	Masalah Sosial Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-82
Tabel 2.45	Statistik Ketenagakerjaan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-83
Tabel 2.46	Besaran Pekerja/buruh Yang peserta Jamsostek Di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-84
Tabel 2.47	Rasio KDRT di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-85
Tabel 2.48	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-85
Tabel 2.49	Persentase Ketersediaan Pangan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-86
Tabel 2.50	Jumlah Kecamatan rawan pangan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-86
Tabel 2.51	Perkembangan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-87
Tabel 2.52	Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-88
Tabel 2.53	Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Nias Selatan Tahun, 2016-2023	II-88
Tabel 2.54	Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-88
Tabel 2.55	Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-88
Tabel 2.56	Indeks Desa Membangun Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023 ...	II-90
Tabel 2.57	Cakupan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-90
Tabel 2.58	Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-91
Tabel 2.59	Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-91
Tabel 2.60	Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-92
Tabel 2.61	Perkembangan Jumlah Koperasi, UKM Non BPR, LKM dan UKM di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-92
Tabel 2.62	Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-92
Tabel 2.63	Jumlah dan Nilai Investor di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-93
Tabel 2.64	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Nias Selatan,	

	2016-2023	II-94
Tabel 2.65	Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-94
Tabel 2.66	Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-95
Tabel 2.67	Cakupan Bidang Statistik di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-95
Tabel 2.68	Cakupan Perkembangan Kebudayaan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-96
Tabel 2.69	Cakupan Perkembangan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-96
Tabel 2.70	Perkembangan Produksi Perikanan Laut dan Darat di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-99
Tabel 2.71	Kecamatan Tujuan Pengembangan Budidaya Perikanan di Kabupaten Nias Selatan, 2023.....	II-100
Tabel 2.72	Jumlah Desa Nelayan di Kabupaten Nias Selatan.....	II-100
Tabel 2.73	Jumlah Kelompok Nelayan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-101
Tabel 2.74	Persentase Kunjungan Wisata di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-102
Tabel 2.75	Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-103
Tabel 2.76	Produksi Tanaman Sayur-sayuran Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-104
Tabel 2.77	Luas Tanaman Perkebunan Kabupaten Nias Selatan Tahun, 2016-2023	II-104
Tabel 2.78	Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-104
Tabel 2.79	Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023...	II-105
Tabel 2.80	Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-105
Tabel 2.81	Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-106
Tabel 2.82	Daftar Desa Yang Belum Dialiri Listrik Di Kabupaten Nias Selatan, 2023.....	II-107
Tabel 2.83	Nilai Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Nias Selatan Tahun, 2016-2023	II-111
Tabel 2.84	Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-111
Tabel 2.85	Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-112
Tabel 2.86	Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan menurut Jenis Kelamin, 2023	II-113
Tabel 2.87	Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023	II-114

Tabel 2.88	Perkembangan ASN di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-117
Tabel 2.89	Jumlah ASN di Kabupaten Nias Selatan menurut Eselon, 2016-2023	II-117
Tabel 2.90	Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023 (Juta Rupiah).....	II-118
Tabel 2.91	Cakupan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-120
Tabel 2.92	Indeks Resiko Bencana Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-121
Tabel 2.93	Cakupan Pengawasan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023 ..	II-121
Tabel 2.94	Evaluasi Pencapaian RPJPD Kab. Nias Selatan Tahun 2006-2026	II-137
Tabel 2.95	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045	II-144
Tabel 2.96	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2025-2045	II-145
Tabel 2.97	Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2025-2045	II-146
Tabel 2.98	Proyeksi Kebutuhan Rumah Atau Tempat Tinggal dan Backlog perumahan Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045.....	II-150
Tabel 2.99	Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045	II-152
Tabel 2.100	Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045	II-153
Tabel 2.101	Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045.....	II-154
Tabel 2.102	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045.....	II-155
Tabel 2.103	Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045	II-157
Tabel 4.2	Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045	IV-5
Tabel 5.1	Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045	V-9
Tabel 5.2	Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045	V-31
Tabel 5.3	Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 2045	V-35
Tabel 5.4	Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045	V-40

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1	Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Nias Selatan	II-5
Grafik 2.2	Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023	II-19
Grafik 2.3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023	II-20
Grafik 2.4	Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-30
Grafik 2.5	Perkembangan Gini Ratio Provinsi Sumatera utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-31
Grafik 2.6	Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Nias Selatan (Poin), 2016-2023	II-32
Grafik 2.7	Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-33
Grafik 2.8	Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-34
Grafik 2.9	Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-35
Grafik 2.10	Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-36
Grafik 2.11	Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-37
Grafik 2.12	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-38
Grafik 2.13	Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-39
Grafik 2.14	Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-40
Grafik 2.15	Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2018-2023	II-41
Grafik 2.16	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-46
Grafik 2.17	Perkembangan Laju Inflasi Kota Gunung Sitoli, 2016-2023	II-47
Grafik 2.18	Rasio Kewirausahaan Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023.....	II-49
Grafik 2.19	Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-50
Grafik 2.20	Perkembangan Indeks Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-51
Grafik 2.21	Perkembangan Indeks Pengeluaran Kabupaten Nias Selatan dan Provinsi Sumatera Utara, 2016-2023.....	II-52
Grafik 2.22	Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-54
Grafik 2.23	Perkembangan Angka Literasi Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-55

Grafik 2.24 Rasio Ketergantungan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-56
Grafik 2.25 Indeks Infrastruktur Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-57
Grafik 2.26 Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-61
Grafik 2.27 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik PLN Di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-62
Grafik 2.28 Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023	II-63
Grafik 2.29 Indeks Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023	II-64
Grafik 2.30 Status desa Kabupaten Nias Selatan, 2023.....	II-65
Grafik 2.31 Perkembangan Tingkat Harapan Lama Sekolah(HLS) Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-67
Grafik 2.32 Perkembangan Rata-rata Lama Sekolah(RLS) Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-68
Grafik 2.33 Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-70
Grafik 2.34 Persentase Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Nias Selatan, 2023 (%)	II-74
Grafik 2.35 Rasio Jaringan Irigasi di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023 (%)	II-77
Grafik 2.36 Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.....	II-102
Grafik 2.37 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023	II-107
Grafik 2.38 Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024	II-115
Grafik 2.39 Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023	II-115
Grafik 2.40 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023.....	II-116
Grafik 2.41 Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nias Selatan, 2010-2023 ...	II-123
Grafik 2.42 Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1), Indeks Keparahan Kemiskinan(P2), Persentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Nias Selatan, 2006-2023.....	II-124
Grafik 2.43 Angka Pengangguran Kabupaten Nias Selatan, 2006-2023.....	II-125
Grafik 2.44 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan, 2005-2023.....	II-126
Grafik 2.45 Ketimpangan Pendapatan Kabupaten Nias Selatan, 2010-2023	II-127
Grafik 2.46 PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Nias Selatan, 2005-2023	II-128
Grafik 2.47 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, persen	II-129
Grafik 2.48 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nias	

	Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Persen	II-130
Grafik 2.49	Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Persen	II-130
Grafik 2.50	Perkembangan Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Persen	II-131
Grafik 2.51	Perkembangan Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD.....	II-131
Grafik 2.52	Perkembangan Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik PLN di Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD	II-132
Grafik 2.53	Perkembangan IPM Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Poin	II-133
Grafik 2.54	Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Poin	II-133
Grafik 2.55	Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Poin	II-134
Grafik 2.56	Perkembangan Indeks Pengeluaran Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Poin	II-134
Grafik 2.57	Perkembangan Nilai Sakip Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD	II-135
Grafik 2.58	Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Nias Selatan Akhir Tahun Tahap Pelaksanaan RPJPD.....	II-136
Grafik 2.59	Kepadatan Penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045	II-145
Grafik 2.60	Piramida Penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2035	II-148
Grafik 2.61	Piramida Penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2045	II-148

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan kurun waktu sesuai dengan RPJPN, yaitu tahun 2025–2045. Selanjutnya, RPJPD ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap jangka waktu 5 (lima) tahun.

RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045 diarahkan sebagai upaya mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah yang berkeadilan, dengan menempatkan manusia sebagai objek dan subjek pembangunan. Penyusunan RPJPD ini menjadi semakin relevan mengingat masih tingginya ketimpangan antarwilayah, rendahnya kapasitas pelayanan dasar di wilayah kepulauan, serta kerentanan Kabupaten Nias Selatan terhadap berbagai jenis bencana. Oleh karena itu, dibutuhkan arah pembangunan jangka panjang yang mampu memperkuat ketangguhan wilayah, memastikan pemerataan layanan dasar bagi seluruh masyarakat, dan mendorong transformasi ekonomi maritim berbasis pulau-pulau kecil sebagai keunggulan komparatif daerah.

Kabupaten Nias Selatan merupakan daerah otonom yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai daerah otonom, Kabupaten Nias Selatan terus berupaya meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat, dan pelaksanaan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari cita-cita bangsa. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut serta mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan daerah yang terukur dan selaras dengan sistem perencanaan pembangunan nasional. Penyusunan ini dilakukan sesuai dengan kewenangan daerah

sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyusunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045 dilakukan secara transparan, responsif, efisien, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJPD ini adalah (a) Pendekatan Teknokratik; (b) Pendekatan Partisipatif; (c) Pendekatan Politis; (d) Pendekatan Atas-Bawah dan Bawah-Atas; (e) Pendekatan Holistik-Tematik; (f) Pendekatan Integratif; (g) Pendekatan Spasial.

Tahapan penyusunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045 meliputi: (a) Penyusunan Rancangan Awal; (b) Konsultasi Publik; (c) Konsultasi Rancangan Awal ke Gubernur; (d) Penyusunan Rancangan; (e) Musrenbang; (f) Penyusunan Rancangan Akhir; (g) Reviu APIP; (h) Pembahasan dengan DPRD; (i) Persetujuan Bersama; (j) Evaluasi Ranperda RPJPD Tahun 2025–2045 dan (k) Penetapan Perda RPJPD. Seluruh tahapan tersebut dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025–2045.

Perencanaan pembangunan jangka panjang ini diharapkan dapat mewujudkan keterpaduan, keberlanjutan, dan sinergitas pembangunan daerah. Oleh karena itu, RPJPD yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah wajib menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi, dan program calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Visi dan misi tersebut disampaikan kepada masyarakat, baik secara lisan maupun tertulis, dalam tahapan kampanye sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada publik.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 600.1/176/SJ dan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJPD Tahun 2025-2045.

Adapun dasar hukum penyusunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);

9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5887, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017 Nomor 33);

15. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024 Nomor 76);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2015 Nomor 5).

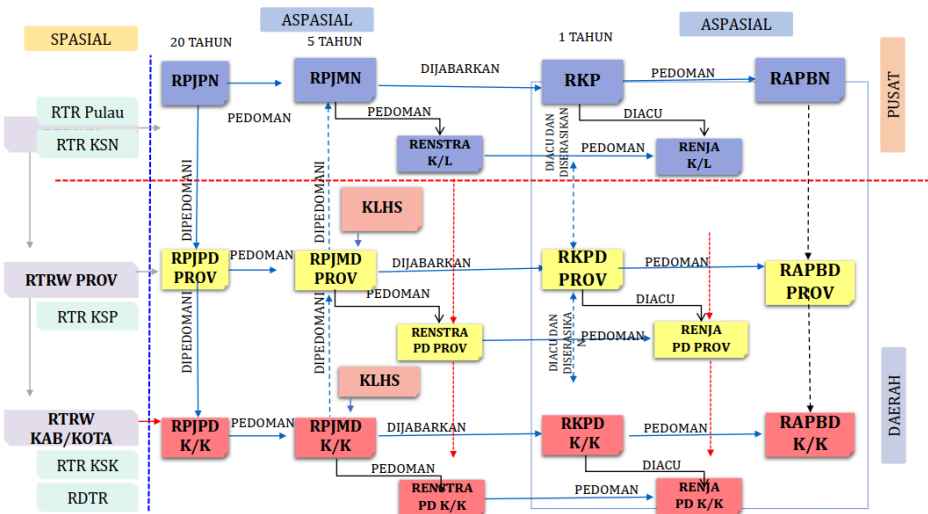
1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan lainnya

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan pembangunan daerah harus terintegrasi dan selaras dengan perencanaan pembangunan nasional. RPJPD berperan sebagai acuan utama dalam menentukan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah selama 20 tahun, yang mencakup arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan daerah.

Sebagai dokumen perencanaan jangka panjang dua puluh tahunan, penyusunan RPJPD harus berpedoman pada RPJPN dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional. Selanjutnya, RPJPD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD). RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 disusun dengan berpedoman pada RPJPN Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045, serta Revisi RTRW Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034.

RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 memiliki keterkaitan erat dengan dokumen perencanaan lainnya. Hal ini dikarenakan perencanaan pembangunan disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan responsif terhadap perubahan. Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan dengan dokumen perencanaan lain yang relevan. Hubungan antara dokumen RPJPD Kabupaten Nias Selatan dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 1.1
Hubungan RPJPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.3.1. Hubungan RPJPD Kabupaten Nias Selatan dengan RPJPN

Perencanaan pembangunan Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari hierarki perencanaan pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah diwajibkan untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang dengan periode 20 tahun.

Dalam rangka mengintegrasikan perencanaan pembangunan daerah dengan perencanaan pembangunan nasional, maka perumusan visi, misi daerah, arah kebijakan RPJPD, dan sasaran pokok lima tahunan diselaraskan dengan visi, misi, arah pembangunan, serta indikator utama pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045.

Secara lebih operasional, RPJPD Kabupaten Nias Selatan mengadopsi dan menerjemahkan indikator utama pembangunan nasional, antara lain melalui komitmen terhadap penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta penguatan kualitas pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selaras dengan arah pembangunan nasional, RPJPD ini juga mengutamakan pembangunan sumber daya manusia, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, penguatan tata kelola pemerintahan, serta ketahanan sosial budaya dan pelestarian lingkungan hidup. Dengan demikian, penyusunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan tidak hanya

menjawab kebutuhan lokal, tetapi juga menjadi bagian integral dari pencapaian agenda pembangunan nasional.

1.3.2. Hubungan RPJPD Kabupaten Nias Selatan dengan RPJPD Sumatera Utara

RPJPD juga harus berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Utara guna memastikan sinergitas dan sinkronisasi arsitektur kinerja, baik pada tingkat impact maupun outcome pembangunan antara Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan. Pada tingkat impact, indikator kinerja sasaran RPJPD harus selaras dengan sasaran yang ingin dicapai dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara. Sementara itu, pada tingkat outcome, prioritas pembangunan daerah harus mempertimbangkan isu-isu strategis serta kebijakan pembangunan Provinsi Sumatera Utara guna memastikan keselarasan arah pembangunan.

Secara lebih operasional, RPJPD Kabupaten Nias Selatan juga mengadopsi indikator utama pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara, seperti penurunan tingkat kemiskinan, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan peningkatan daya saing daerah. Langkah ini dilakukan untuk menjamin keterpaduan perencanaan dan kesesuaian arah kebijakan antara Kabupaten dan Provinsi, sehingga program pembangunan yang dijalankan di tingkat kabupaten dapat menjadi bagian integral dari pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Utara.

Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan tidak hanya merumuskan arah pembangunan yang kontekstual dengan kondisi dan potensi lokal, tetapi juga memberikan dukungan optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara serta pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan RPJPN Tahun 2025-2045.

1.3.3. Hubungan RPJPD Kabupaten Nias Selatan dengan RTRW Kabupaten Nias Selatan

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan wilayah serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah yang mendukung pembangunan secara

berkelanjutan dengan tetap berwawasan lingkungan, efisien dalam alokasi investasi, serta bersinergi dengan program pembangunan lainnya.

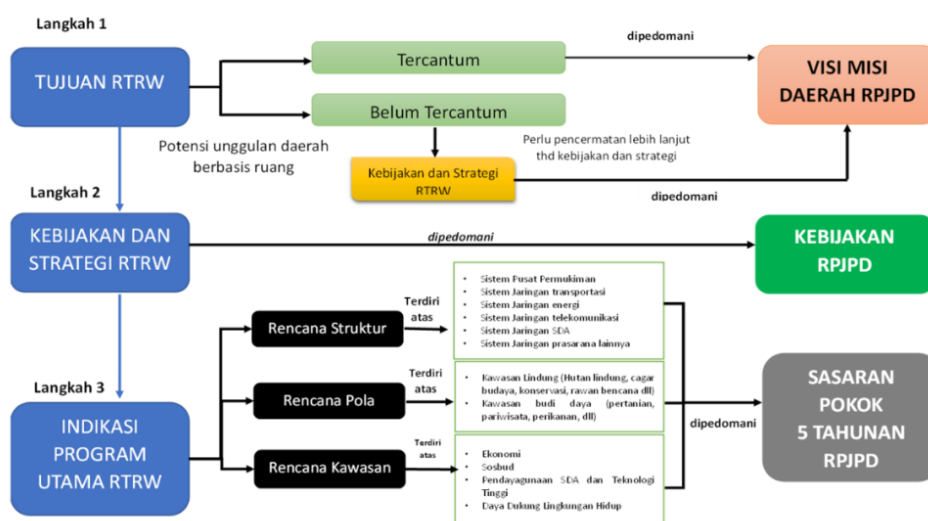
Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, terdapat dua dokumen utama yang menjadi acuan, yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Daerah, baik Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kedua dokumen ini harus selaras agar pembangunan dapat berjalan secara efektif dan terarah.

RTRW memberikan arahan pembangunan yang bersifat spasial dan berimplikasi pada keruangan. Dokumen ini mencakup arahan lokasi pemanfaatan ruang yang digambarkan dalam bentuk peta, sehingga menjadi acuan dalam implementasi pembangunan serta investasi di daerah. Sebagai produk hukum yang ditetapkan dalam peraturan daerah, RTRW memiliki kepastian hukum. Sementara itu, RPJPD dan RPJMD berperan sebagai payung konseptual yang mengarahkan pembangunan secara aspaspial. RPJPD dan RPJMD menentukan kelayakan pembangunan, sedangkan RTRW mengatur lokasi pelaksanaannya. Penerjemahan RTRW dalam rencana pembangunan dituangkan dalam indikasi program pemanfaatan ruang wilayah.

Kedua dokumen ini bersinergi dan saling mendukung dalam hal jenis program utama, pembiayaan, serta lokasi program. Penyelarasan antara RTRW dan RPJPD dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

1. Merumuskan visi dan misi daerah dalam RPJPD dengan memperhatikan tujuan penataan ruang dalam RTRW, melalui pencermatan substansi arah pengembangan wilayah.
2. Merumuskan arah kebijakan dalam RPJPD dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi dalam RTRW, melalui pencermatan substansi tata ruang wilayah.
3. Merumuskan sasaran pokok dalam RPJPD dengan memperhatikan indikasi program utama dalam RTRW yang menjadi program prioritas daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, periodisasi indikasi program utama dalam RTRW yang bersifat jangka menengah lima tahunan harus disesuaikan dengan periode rencana pembangunan.

Gambar 1.2
Hubungan RPJPD Kabupaten dengan RTRW Kabupaten



Sebagai contoh, jika dalam RTRW Kabupaten Nias Selatan ada rencana pengembangan kawasan pariwisata pantai, maka dalam RPJPD dan RPJMD perlu disusun kebijakan untuk mendukung pengembangan tersebut. Kebijakan ini bisa mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, penyediaan air bersih dan listrik, serta pelatihan untuk meningkatkan kemampuan SDM pariwisata di daerah tersebut. Dengan demikian, sinkronisasi antara RTRW dan RPJPD memastikan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan saling mendukung, sehingga tercapai pembangunan yang berkelanjutan dan adil di Kabupaten Nias Selatan

1.4. Maksud dan Tujuan

RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk memberikan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan selama 20 (dua puluh) tahun ke depan.

RPJPD bertujuan sebagai acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap periode 5 (lima) tahun, guna memastikan kesinambungan dan konsistensi pembangunan daerah. Tujuan RPJPD tidak hanya sebatas sebagai pedoman untuk menyusun RPJMD, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan visi, misi, arah kebijakan transformasi, serta sasaran pokok yang dapat diukur melalui indikator utama pembangunan daerah (IUP). Dengan demikian, RPJPD menjadi landasan yang

mengarahkan kebijakan pembangunan jangka panjang yang selaras dengan prioritas dan tujuan pembangunan daerah dalam setiap periode perencanaan.

1.5. Sistematika Penulisan

RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 terdiri atas 6 (enam) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang, dasar hukum, hubungan antar-dokumen perencanaan, maksud dan tujuan penyusunan RPJPD, serta sistematika penulisan dokumen.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah

Menggambarkan Kondisi Umum Daerah yang memuat sekurang-kurangnya Aspek Geografi dan Demografi, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Daya Saing, Aspek Pelayanan Umum, Hasil Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025, Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik dan Pusat Pertumbuhan Wilayah.

Bab III Permasalahan Dan Isu Strategis

Memuat permasalahan utama serta isu strategis yang dihadapi daerah sebagai dasar dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang

Bab IV Visi dan Misi Daerah

Memuat visi pembangunan jangka panjang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 serta misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut .

Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah

Memuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang serta sasaran pokok yang ingin dicapai dalam periode 2025-2045.

Bab VI Penutup

Merupakan bagian penutup yang berisi penjelasan mengenai kaidah umum pelaksanaan RPJPD, termasuk peran dan fungsi RPJPD dalam pembangunan daerah serta sebagai pedoman bagi dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH



BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi adalah suatu penginterpretasian dan gagasan serta hal-hal yang dipertimbangkan dalam kajian ilmu geografi. Karakteristik lokasi wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, serta kerentanan wilayah terhadap bencana disajikan dalam aspek geografi wilayah. Di sisi lain, perubahan jumlah dan komposisi penduduk secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu disajikan dalam aspek demografi.

Sebagai wilayah kepulauan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia, Kabupaten Nias Selatan memiliki peran strategis dalam dimensi geopolitik, ekonomi biru, pertahanan, dan ketahanan ekologi. Dengan lebih dari 100 pulau kecil dan garis pantai sepanjang ±470 km, wilayah ini menjadi garda terdepan dalam menjaga kedaulatan maritim nasional, menghadapi risiko bencana alam, serta mendukung pengembangan ekonomi kelautan. Salah satu aset strategis nasional adalah Pulau Simuk di Kecamatan Simuk, yang merupakan pulau terluar Indonesia. Letaknya yang berada di bagian barat daya menjadikan Pulau Simuk sebagai titik batas yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sekaligus memiliki nilai penting dalam sistem pertahanan nasional. Posisi ini menuntut penguatan pos pengamanan perbatasan, infrastruktur pertahanan sipil, serta integrasi kebijakan pertahanan dengan pembangunan lokal yang adaptif terhadap tantangan kawasan perbatasan.

Di sisi lain, potensi ekonomi biru Kabupaten Nias Selatan mencakup sektor perikanan tangkap, budidaya laut, dan pariwisata bahari yang terus berkembang dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, letak geografis yang berada di jalur cincin api serta paparan terhadap dampak perubahan iklim menjadikan wilayah ini sangat rentan terhadap bencana gempa bumi, tsunami, dan abrasi pantai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan tata ruang pesisir, sistem mitigasi bencana, serta perlindungan ekosistem laut yang berkelanjutan. Pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil ke depan harus diarahkan tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, tetapi juga untuk memperkuat ketahanan nasional dan sosial-ekologis sebagai bagian integral dari pembangunan jangka panjang.

2.1.1 Geografi

Aspek geografi berperan penting dalam pembangunan karena menentukan potensi, tantangan, dan strategi pengelolaan wilayah. Kebijakan tata ruang yang sesuai kondisi geografis penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Pemahaman aspek geografi dalam pembangunan diperlukan guna mewujudkan perencanaan wilayah yang efektif dan bermanfaat bagi masyarakat.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah menentukan arah, strategi, serta potensi pembangunan suatu daerah. Faktor-faktor seperti letak geografis, topografi, iklim dan hal lainnya menentukan potensi ekonomi, pola pemanfaatan lahan, dan strategi pengelolaan pembangunan yang berkelanjutan.

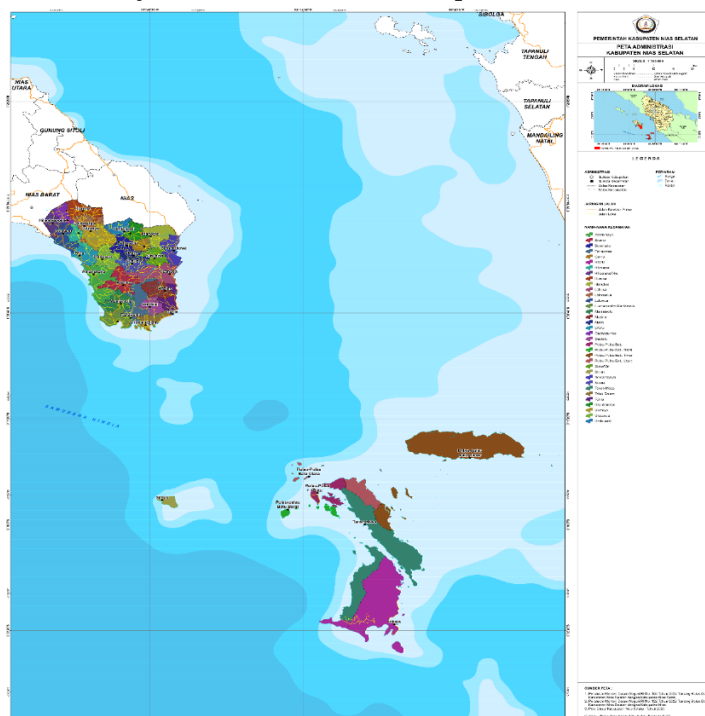
2.1.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Nias Selatan mempunyai luas wilayah 6.902,505 km² dengan luas daratan kurang lebih 2.452,1 km², luas lautan kurang lebih 4.450,409 km². Kabupaten Nias Selatan merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Kabupaten Nias Selatan memiliki luas wilayah administrasi 2.533,759 Km² dengan jumlah kecamatan 35 dan terdiri dari 459 Desa dan 2 kelurahan.

Adapun batas-batas wilayah kabupaten Nias Selatan terdiri dari:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Barat;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kepulauan Mentawai dan Sumatera Barat;
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Tapanuli Tengah; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Gambar 2.1
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Nias Selatan



Jumlah desa dan kelurahan menurut kecamatan di Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Desa dan Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, 2023

No	Kecamatan	Jumlah	
		Desa	Kelurahan
1	Amandraya	21	-
2	Aramo	18	-
3	Boronadu	10	-
4	Fanayama	17	-
5	Gomo	11	-
6	Hibala	17	-
7	Hilimegai	10	-
8	Hilisalawa'ahe	11	-
9	Huruna	17	-
10	Idanotae	12	-
11	Lahusa	23	-
12	Lolomatua	13	-
13	Lolowau	14	-
14	Luahagundre Maniamolo	10	-
15	Maniamolo	14	-
16	Mazino	11	-
17	Mazo	10	-
18	O'ou	11	-
19	Onohazumba	10	-
20	Onolalu	10	-
21	Pulau-pulau Batu	21	1
22	Pulau-pulau Batu Barat	9	-
23	Pulau-pulau Batu Timur	10	-
24	Pulau-pulau Batu Utara	12	-
25	Sidua'ori	11	-
26	Somambawa	14	-
27	Susua	18	-
28	Simuk	6	-
29	Tanah Masa	12	-
30	Teluk Dalam	15	1
31	Toma	14	-
32	Uluoyo	13	-
33	Ulu Idanotae	11	-
34	Ulususua	12	-
35	Umbunasi	11	-
Jumlah		459	2

Sumber: Nias Selatan Dalam Angka 2024

Setiap kecamatan di Kabupaten Nias Selatan memiliki luas wilayah yang berbeda-beda. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Tanah Masa, dengan total area mencapai 451,43 km², atau sekitar 18,14 persen dari luas

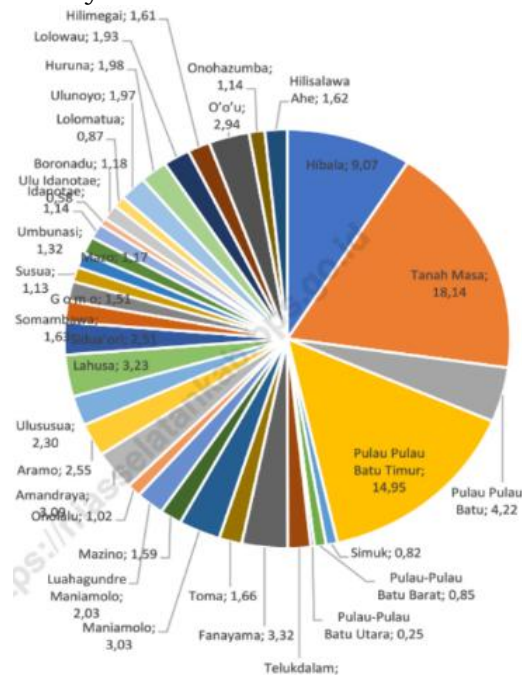
keseluruhan. Selanjutnya, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur memiliki luas 372 km² (14,94 Persen), diikuti oleh Kecamatan Hibala dengan luas 225,75 km² (9,07 Persen). Sementara itu, kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara, yang hanya memiliki total area 6,3 km², atau sekitar 0,25 persen dari luas keseluruhan. Berikut Tabel dan Grafik Persentase Luas Wilayah menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan:

Tabel 2.2
Luas Daerah Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Total Area(km ² /sq.km)
1	Hibala	Eho	225,75
2	Tanah Masa	Baluta	451,43
3	Pulau Pulau Batu	Pasar Pulau Tello	105,09
4	Pulau Pulau Batu Timur	Labuhan Hiu	372,05
5	Simuk	Gobo	20,42
6	Pulau-Pulau Batu Barat	Bawositora	21,06
7	Pulau-Pulau Batu Utara	Silima Banua Marit	6,3
8	Telukdalam	Pasar Telukdalam	41,3
9	Fanayama	Bawo Mataluo	82,49
10	Toma	Hilisataro	41,26
11	Maniamolo	Hilisimaetano	75,32
12	Mazino	Hilizalo'otano	39,49
13	Luahagundre Maniamolo	Botohili Silambo	50,39
14	Onolalu	Siholi	25,37
15	Amandraya	Tuindrao	76,76
16	Aramo	Hiliorudua	63,49
17	Ulususua	Fondrakoraya	57,18
18	Lahusa	Bawo'otalua	80,36
19	Sidua'ori	Hilialawa	62,4
20	Somambawa	Sihare'o	40,63
21	Gomo	Orahili Gomo	37,56
22	Susua	Sifalago Susua	28,23
23	Mazo	Tetegawaai	29,03
24	Umbunasi	Lawindra	32,81
25	Idanotae	Hilimbowo Idanotae	28,31
26	Ulu Idanotae	Fanedanu	14,33
27	Boronadu	Sifalago Gomo	29,33
28	Lolomatua	Hiliotalua	21,59
29	Ulunoyo	Orahili Ulunoyo	48,99
30	Huruna	Hilifalawu	49,29
31	Lolowau	Lolowau	48,03
32	Hilimegai	Togizita	40,15
33	O 'o' u	Simandraolo	73,16
34	Onohazumba	Hiliweto	28,45
35	Hilisalawa'ahe	Maluo	40,19

Sumber: Nias Selatan Dalam Angka 2023, Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 08 Tahun 2012, (data diolah)

Grafik 2.1
Persentase Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kabupaten Nias Selatan



Sumber: Nias Selatan Dalam Angka 2024

2.1.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis

Kabupaten Nias Selatan terletak disebelah barat Pulau Sumatera jaraknya ± 92 mil laut dari Kota Sibolga atau Kabupaten Tapanuli Tengah. Letak Kabupaten Nias Selatan berada di sebelah Selatan Kabupaten Nias yang berjarak ± 120 km dari Gunungsitoli ke Teluk Dalam (Ibu Kota Kabupaten Nias Selatan).

Secara astronomis, Kabupaten Nias Selatan terletak antara Antara $0^{\circ}33'25''$ Lintang Selatan (LS) hingga $1^{\circ}04'50''$ Lintang Utara (LU), dan antara $97^{\circ}25'59''$ hingga $98^{\circ}48'29''$ Bujur Timur (BT). Kondisi geografis Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 104 buah pulau besar dan kecil. Letak pulau-pulau di wilayah Kabupaten Nias Selatan memanjang sejajar Pulau Sumatera. Dari gugusan pulau tersebut terdapat 4 (empat) pulau besar, yakni Pulau Tanah Bala ($39,67 \text{ km}^2$), Pulau Tanah Masa ($32,16 \text{ km}^2$), Pulau Telo (18 km^2) dan Pulau Pini ($24,36 \text{ km}^2$). Jumlah pulau yang dihuni sebanyak 20 buah, yang tidak dihuni sebanyak 84 buah.

2.1.1.1.3 Topografi

Kondisi alam/topografi berbukit-bukit sempit dan terjal serta pegunungan, tingginya di atas permukaan laut bervariasi antara 0-800 m, terdiri dari dataran rendah sampai bergelombang mencapai 20%, dari tanah bergelombang sampai berbukit-bukit 28,8% dan dari berbukit-bukit sampai pegunungan 51,2% dari

keseluruhan luas daratan. Kondisi topografi demikian menyulitkan pembuatan jalan-jalan lurus dan lebar. Oleh karena itu, kota-kota utama terletak di tepi pantai.

Berdasarkan kondisi eksisting topografi dan kelerengan yang ada di Kabupaten Nias selatan yang selanjutnya disebut morfologi, sangat beragam dari landai, bergelombang, curam hingga sangat curam. Hal ini mengindikasikan potensi pengembangan wilayah jika dimanfaatkan secara optimal maka akan sangat menguntungkan. Morfologi adalah pengelompokan bentuk bentang alam berdasarkan rona, kemiringan lereng secara umum dan ketinggiannya pada beberapa satuan morfologi:

- a. Satuan morfologi dataran adalah bentuk bentang alam yang didominasi oleh daerah yang relatif datar atau sedikit bergelombang dengan kisaran kemiringan lereng 0% - 5%. Lebih rinci lagi satuan morfologi dataran ini dapat dibedakan atas dua subsatuan, yakni: sub satuan morfologi dataran berkisar antara 0% - 2%; dan sub satuan morfologi medan bergelombang dengan kisaran kemiringan lereng >2% - 5%.
- b. Satuan morfologi perbukitan adalah bentuk bentang alam yang memperlihatkan relief baik halus maupun kasar, membentuk bukit-bukit dengan kemiringan lereng yang bervariasi. Secara lebih rinci satuan morfologi perbukitan dapat dibagi atas tiga subsatuan, yakni: subsatuan morfologi perbukitan landai dengan kemiringan lereng antara 5% - 15%; sub satuan morfologi perbukitan sedang dengan kemiringan lereng antara 15%-40%; sub satuan morfologi perbukitan terjal dengan kemiringan lebih dari 40%.
- c. Satuan morfologi tubuh gunung berapi merupakan sub satuan perbukitan sedang hingga terjal, namun membentuk kerucut tubuh gunung berapi.

2.1.1.1.4 Geologi

Aspek geologi merupakan aspek yang mempunyai kaitan yang erat hubungannya dengan potensi sumberdaya tanah. Struktur geologi tertentu berasosiasi dengan ketersediaan air tanah, minyak bumi dan lain-lain. Selain itu struktur geologi selalu dijadikan dasar pertimbangan dalam pengembangan suatu wilayah misal pengembangan daerah dengan pembangunan jalan, permukiman, bendungan, selalu menghindari daerah yang berstruktur sesar, kekar, struktur yang miring dengan lapisan yang kedap air dan tidak kedap air.

2.1.1.1.4.1 Struktur dan Karakteristik

Jalur-jalur struktur geologi yang berkembang di kepulauan Nias, seperti jalur patahan merupakan bidang-bidang lemah yang apabila mengalami pergerakan dapat mengakibatkan terjadinya gempa bumi. Kabupaten Nias Selatan dilalui oleh dua jalur patahan utama yang tergolong aktif, yaitu jalur patahan utama yang melintasi Pulau Nias yang berarah barat laut tenggara, disebut sebagai jalur patahan Nias. Jalur patahan utama lainnya di bagian selatan Pulau Nias, mulai bagian barat Pulau Pini memanjang ke arah utara menerus memotong Pulau Sumatera atau yang dikenal dengan jalur patahan Nias-Ordi-Bahorok.

2.1.1.1.4.2 Potensi

Posisi kepulauan Nias yang berada dibagian depan dari batas interaksi lempeng mengakibatkan tingginya potensi gempa bumi yang juga dapat mengakibatkan bencana ikutan lainnya seperti bencana tsunami maupun bencana gerakan tanah atau longsor.

2.1.1.1.5 Hidrologi

Hidrologi memiliki peran penting dalam berbagai aspek pembangunan, terutama yang berkaitan dengan infrastruktur, pengelolaan sumber daya air, dan mitigasi bencana. Studi hidrologi digunakan untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya berkelanjutan tetapi juga aman dari risiko yang berkaitan dengan air.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018 tentang Penetapan Peta Daerah Aliran Sungai, Daftar Aliran Sungai Kabupaten Nias Selatan terdiri 8 DAS. Berikut daftar DAS Kabupaten Nias Selatan:

Tabel 2.3
Daerah Aliran Sungai (DAS) di wilayah Kabupaten Nias Selatan

No	Nama DAS	Luas (km ²)
1	DAS Za'ua	66,68
2	DAS Sialikhe	96,01
3	DAS Mejaya	109,74
4	DAS Eho	254,06
5	DAS Masio	82,63
6	DAS Hoya	42,28
7	DAS O'o'u	139,36
8	DAS Susua	250,63

Sumber: SK.304/MENLHK/PDASHL/DAS.0/7/2018

2.1.1.1.6 Klimatologi

Kabupaten Nias Selatan terletak di daerah khatulistiwa dan mempunyai curah hujan yang tinggi. Rata-rata curah hujan perbulan 254,7 mm dan banyaknya hari hujan dalam sebulan rata-rata 24 hari pada tahun 2023. Akibat banyaknya curah hujan maka kondisi alamnya sangat lembab dan basah. Musim kemarau dan hujan silih berganti dalam setahun.

Keadaan iklim dipengaruhi oleh Samudera Hindia. Pada tahun 2023, suhu udara berkisar antara 20°C-34,2°C dengan rata-rata presentase kelembaban udara berkisar antara 89,28 persen dan kecepatan rata-rata angin berkisar antara 2,3 knot. Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 104 buah pulau besar dan kecil.

2.1.1.1.7 Penggunaan Lahan

Dalam pembangunan wilayah, penggunaan lahan dibagi menjadi dua kategori utama yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Penggunaan lahan dalam pembangunan wilayah merupakan proses perencanaan dan pengelolaan ruang untuk berbagai kebutuhan pembangunan daerah. Pengelolaan lahan yang baik bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, serta menjaga keseimbangan lingkungan.

Berdasarkan perbandingan data penggunaan lahan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2014-2034, terlihat adanya perubahan signifikan dalam pola pemanfaatan ruang, khususnya terkait munculnya kategori Kawasan Permukiman dalam Rancangan Peraturan Daerah RTRW Kabupaten Nias Selatan tahun 2024-2044. Pada data sebelumnya, kawasan permukiman tidak tercatat secara eksplisit sebagai satuan pola ruang tersendiri, sementara pada data terbaru kawasan permukiman tercatat seluas 9.095,60 ha, atau sekitar 3,59 persen dari total luas wilayah 253.334 Ha. Hal ini mengindikasikan adanya alih fungsi lahan dari kategori lain kemungkinan besar dari Areal Penggunaan Lain (APL), kawasan hutan produksi, maupun lahan pertanian menjadi kawasan permukiman. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan arah perkembangan wilayah yang lebih mengarah pada pemanfaatan lahan untuk kepentingan budidaya intensif dan permukiman.

2.1.1.1.7.1 Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya merupakan bagian dari pola ruang yang diperuntukkan bagi kegiatan ekonomi produktif, seperti pertanian, perkebunan, perikanan,

peternakan, kehutanan produksi, permukiman, dan industri. Dalam konteks pembangunan, kawasan ini memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta keseimbangan ekologi. Berikut pembagian luas satuan rencana pola ruang kawasan budidaya Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2.4
Pembagian Luas Satuan Rencana Pola Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Nias Selatan

No	Satuan Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase
1	Kawasan Hutan Produksi		
	a. Kawasan Hutan Produksi Tetap	72.371,36	43,02
	b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas	22.670,42	13,48
2	Kawasan Pertanian		0,00
	a. Kawasan Tanaman Pangan	4.323,39	2,57
	b. Kawasan Perkebunan	59.006,44	35,08
3	Kawasan Perikanan	-	-
4	Kawasan Pertambangan dan Energi	-	-
5	Kawasan Peruntukan Industri	102,17	0,06
6	Kawasan Peruntukan Pariwisata	572,7	0,34
7	Kawasan Permukiman	9.095,60	5,41
8	Kawasan Transportasi	79,43	0,05
9	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	-	-
Total		168.221,51	100,00

Sumber : Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan 2024-2044

Pembagian Rencana Pola Tata Ruang Kawasan Budidaya Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

1. Rencana Kawasan Hutan Produksi

Dalam arahan tata ruang, kawasan budidaya hutan memiliki fungsi antara lain sebagai penghasil kayu. Kayu untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri dan pengolahan kayu, sebagai daerah resapan air hujan untuk kawasan sekitarnya, membantu penyediaan lapangan kerja bagi masyarakat setempat disamping fungsi lindung dan konservasi, serta mendukung kehidupan dan ekosistem. Kawasan budidaya kehutanan meliputi kawasan hutan produksi (HP), hutan produksi terbatas (HPT) dan hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK).

Kawasan Hutan Produksi Terbatas berada di Kecamatan Hibala, Pulau-Pulau Batu Timur, Tanah Masa.

Kawasan Hutan Produksi Tetap berada di Kecamatan Hibala, Pulau-Pulau Batu Timur, Pulau-Pulau Batu Utara, dan Tanah Masa.

2. Rencana Kawasan Pertanian

a. Rencana Kawasan Tanaman Pangan

Rencana kawasan pertanian tanaman pangan yang tersebar di Seluruh Kecamatan (35 Kecamatan).

b. Rencana Kawasan Perkebunan

Rencana kawasan perkebunan di Kabupaten Nias Selatan sebesar 59.006,44 Ha yang tersebar di seluruh kecamatan. Pada kawasan ini direncanakan juga untuk kawasan pengembalaan dan pengembangan peternakan.

3. Rencana Kawasan Perikanan

Kawasan peruntukan perikanan terdiri dari perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Kegiatan perikanan di Kabupaten Nias Selatan selama ini didominasi oleh perikanan tangkap dibandingkan perikanan budidaya.

Rencana kawasan perikanan tangkap berada di seluruh kecamatan yang berada pada pesisir dan di pulau-pulau di Kabupaten Nias Selatan. Pada kawasan perikanan akan dikembangkan pelabuhan perikanan yang telah ada seperti PPI Lahusa, PPI Telukdalam, dan PPI Pulau Telo.

Rencana kawasan perikanan tangkap dapat dikembangkan di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Nias Selatan, meliputi:

- a. Kecamatan Lolowau.
- b. Kecamatan Amandraya.
- c. Kecamatan Maniamolo.
- d. Kecamatan Telukdalam.
- e. Kecamatan Fanayama.
- f. Kecamatan Toma.
- g. Kecamatan Lahusa.
- h. Kecamatan Somambawa.
- i. Kecamatan Luahagundre Maniamolo.
- j. Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
- k. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur.
- l. Kecamatan Hibala.
- m. Kecamatan Tanah Masa.
- n. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara.
- o. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat.
- p. Kecamatan Simuk.

Rencana kawasan perikanan budidaya meliputi:

A. Budidaya air laut meliputi:

- a. Kecamatan Lolowau.
- b. Kecamatan Amandraya.
- c. Kecamatan Maniamolo.
- d. Kecamatan Telukdalam.
- e. Kecamatan Fanayama.
- f. Kecamatan Toma.
- g. Kecamatan Lahusa.
- h. Kecamatan Somambawa.
- i. Kecamatan Luahagundre Maniamolo.
- j. Kecamatan Pulau-Pulau Batu.
- k. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur.
- l. Kecamatan Hibala.
- m. Kecamatan Tanah Masa.
- n. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Utara.
- o. Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat.
- p. Kecamatan Simuk.

B. Budidaya air tawar meliputi:

- a. Kecamatan Telukdalam.
- b. Kecamatan Onolalu.
- c. Kecamatan Lahusa.
- d. Kecamatan Gomo.
- e. Kecamatan Mazino.
- f. Kecamatan Fanayama.
- g. Kecamatan Maniamolo.
- h. Kecamatan Toma.
- i. Kecamatan Aramo.
- j. Kecamatan Amandraya.
- k. Kecamatan Lolowau.
- l. Kecamatan Luahagundre Maniamolo.
- m. Kecamatan Ulususua.
- n. Kecamatan O'o'u.

- o. Kecamatan Onohazumba.
- p. Kecamatan Hilisalawa'ahe.
- q. Kecamatan Lolomatua.
- r. Kecamatan Huruna.
- s. Kecamatan lainnya.

4. Kawasan Pertambangan dan Energi

Rencana kawasan potensi pertambangan dan energi di Kabupaten Nias Selatan berupa bahan tambang galian C meliputi Kecamatan Gomo, Lahusa, Amandraya, Lolomatua, Lolowau, Mazo, Susua, dan Umbunasi. Sedangkan kegiatan penambangan pasir di seluruh kecamatan yang mengganggu lingkungan hidup akan diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

5. Rencana Kawasan Peruntukan Industri

Kegiatan industri di Kabupaten Nias Selatan berfokus pada pengembangan industri mikro dan kecil, terutama dalam bentuk industri pengolahan hasil pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta berbagai jenis industri rumah tangga lainnya. Pengembangan industri ini dilakukan di wilayah yang memiliki potensi sumber daya dan sesuai dengan peruntukan lahan dalam kawasan sentra produksi. Saat ini, rencana kawasan peruntukan industri sementara berada di Kecamatan Amandraya dan Kecamatan Aramo, dengan luas area mencapai 102,17 Ha. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa di masa mendatang, kawasan peruntukan industri akan diperluas ke kecamatan lain yang memiliki potensi untuk mendukung pengembangan sektor industri di Kabupaten Nias Selatan.

6. Rencana Pengembangan Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan peruntukan pariwisata sebesar 572,70 Ha terdiri atas objek wisata alam dan buatan, yang memiliki fungsi antara lain untuk memperkenalkan, mendayagunakan dan melestarikan nilai-nilai sejarah budaya lokal dan keindahan alam.

Pengembangan kawasan budidaya pariwisata dilakukan pada kawasan yang memiliki potensi dan sesuai untuk pengembangan pariwisata dengan memperhatikan Destinasi Pengembangan Pariwisata (DPP) pada kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya serta kawasan lainnya. Arahan Pengembangan kawasan pariwisata antara lain:

1. Wisata kepulauan: Pulau-Pulau Batu, Pulau Sigata, Bintuang, Tello, Sibaranun, Simuk.
2. Kawasan wisata perkotaan: Teluk Dalam, Lagundri, Sorake, Rock Star Toma, Air Terjun Gumbu Park Toma dan sekitarnya.
3. Kawasan wisata perdesaan tradisional: Desa Tradisional Bawomataluo, Desa Adat Hiliamoudula, Sifituewali, Silimaewali, Botolihitano, Hiliameataniha, Namo Sifelendrua, Hilimondregeraya, Hilisimaetano, Orahili Fau, Lahusa Fau, Siwalawa, Onohondro, Hilinawalo mazino, Hilinawalo Fau, Sifalogo Susua, Hiliana'a, Tuhegewo, Simandraolo, Hililaza, Koendrafo, Olayama dan Sifalago Gomo dan Lahusa Idanotae.
4. Kawasan wisata megalit: Gomo, Lahusa Idanotae, Lahusa Satua, Tundrumbaho, Tetegewo, Bawamenewi, Baluko, Loloana'a Ulunoyo.
5. Wisata pantai: Mo'ale, Ladeha, Lahusa, Pantai Lorang, Memong, Sebuasi, Sibaranun, Sibolo, Garamba, Lumijo, Serba Angin, Saruru, Sijewali, Karang Anjing, Sifaremo, Cekeh, Hele Arena, Nuja Wofu, Sibuya Dolo, Sihamela, Tano Makino, Sifaruhu, Duru-duru, Bojo, Pulau Pinang, Baloho, Lagundri, Sorake, Walo Hiu-hiu, Sehe, Sombagiboho, Hilisataro, Mogae, Somambawa.
6. Ekowisata alam: Lolomatua, Hili Dete Huruna dan Puncak Lolomatua di Kecamatan Ulunoyo dan sekitarnya.
7. Wisata air terjun: Gogosa Baluta, Lahusa Sobatu Baluta, Zumali, Sidua'ori, Helaowo, Mondrowe, Katawaena, Samiri, Air Terjun Gumbu, Air Terjun Hando-hando Desa Hiliwaebu Kecamatan Ulunoyo, Namozabeto, Namodagaule, Togihenu.
8. Lainnya seperti Taman Buru Pulau Pini, Goa Fatolasa, Tugu Tuada Hia, dan Kolam Renang Genasi Hill, dan Pengrajin Baluse, Puncak Genasi, Lolomatua, Hili Dete Huruna, Mohili, Bukit Soliga

Kawasan wisata ini dikemas menjadi kawasan strategis pariwisata (KSPK) Kabupaten Nias Selatan dalam Peraturan Daerah Rencana Induk Pariwisata Daerah Kabupaten Nias Selatan No 05 tahun 2018, yang secara garis besar dikelompokkan dalam beberapa kawasan yaitu:

1. Kawasan strategis ekowisata bahari kepulauan bahari dan sekitarnya.
2. Kawasan strategis pariwisata perkotaan pesisir Telukdalam-Lagundri-Sorake dan sekitarnya.

3. Kawasan strategis pariwisata perdesaan Tradisional Bawomataluo dan sekitarnya.
4. Kawasan strategis pariwisata megalit Gomo dan sekitarnya.

Selain itu juga dikemas dalam rencana pengembangan pariwisata (KPPK) Kabupaten Nias Selatan yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kawasan pengembangan pariwisata pantai Mo'ale, Pantai Ladeha dan sekitarnya.
2. Kawasan pengembangan ekowisata alam Lolomatua, Hili Dete Huruna dan sekitarnya.
3. Kawasan pengembangan rekreasi Pantai Lahusa dan sekitarnya.

Rencana agrowisata direncanakan di kawasan Nanio yang berada di Kecamatan Luahagundre Maniamolo.

7. Rencana Kawasan Permukiman

Kawasan peruntukan permukiman di Kabupaten Nias Selatan sementara ini sebesar 9.095,60 Ha, terdiri dari kawasan permukiman perkotaan dan non perkotaan atau pedesaan di dataran rendah dan dataran tinggi, kawasan pesisir pantai dan pulau kecil. Sebagaimana peruntukannya, kawasan permukiman memiliki fungsi antara lain sebagai pusat pelayanan dalam skala yang dilayaninya, sebagai tempat tinggal bermukim dan pusat kegiatan kehidupan dan penghidupan masyarakat dalam interaksi sosialnya. Pada kawasan ini terdapat juga fasilitas umum dan sosial yang mendukung kegiatan masyarakat.

a. Rencana Kawasan Permukiman Perkotaan

Arahan pengembangan kawasan perkotaan di Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

- Pengembangan sistem perkotaan diarahkan mengikuti hirarki fungsional yang ditetapkan dalam rencana struktur ruang dan pusat pelayanan wilayah Kabupaten Nias Selatan.
- Kawasan perkotaan Telukdalam dikembangkan sebagai Pusat Kegiatan Kabupaten Nias Selatan yaitu kawasan perkantoran pemerintah dan swasta, perdagangan dan jasa, dan fasilitas sosial dan fasilitas umum. Kawasan ini dikembangkan dengan intensitas tertinggi sebagai pusat pelayanan distribusi dan koleksi barang dan jasa regional. Aktivitas utama yang diprioritaskan untuk dikembangkan adalah aktivitas sektor tersier dengan

jenis kegiatan yang relatif fleksibel, namun tetap diupayakan mendukung pengembangan sektor primer dan sekunder yang ada.

- Kawasan permukiman perkotaan lainnya di setiap kecamatan (ibu kota kecamatan) yang didominasi oleh kegiatan non agraris dengan tatanan kawasan permukiman yang terdiri dari sumberdaya buatan seperti perumahan, fasilitas umum, prasarana dan sarana perkotaan.
- Penyediaan prasarana dan sarana pada permukiman perkotaan ditujukan untuk mendukung berbagai kegiatan penduduk di wilayah tersebut dan disesuaikan dengan skala pelayanannya.

b. Rencana Kawasan Permukiman Pedesaan

Kawasan permukiman pedesaan adalah kawasan permukiman skala kecil yang ditujukan sebagai pusat kegiatan dalam suatu wilayah pertanian tertentu. Kawasan ini berfungsi sebagai pusat koleksi pertama dalam rantai produksi pertanian. Oleh karena itu, kawasan permukiman pedesaan berfungsi sebagai pusat kegiatan pertanian skala lokal.

Pengembangan kawasan permukiman pedesaan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produktifitas hasil pertanian. Pengembangan ini juga dimaksudkan untuk menurunkan tingkat urbanisasi. Oleh karena itu, pada kawasan ini perlu didukung dengan sarana dan prasarana dasar pemenuhan kebutuhan hidup berupa fasilitas sosial dan ekonomi dengan skala pelayanan lokal. Disamping itu, diperlukan fasilitas yang mendukung perkembangan teknologi dan kelembagaan pertanian perikanan yang mampu mendukung daya saing komoditas pertanian.

Rencana kawasan permukiman perdesaan di Kabupaten Nias Selatan adalah kawasan permukiman diluar kawasan permukiman perkotaan, dan masih pada kawasan pengembangan permukiman yang diarahkan, dan bila kawasan permukiman tersebut berada pada kawasan hutan, maka diusulkan untuk dikeluarkan dari kawasan hutan.

Untuk kebutuhan sarana umum dan sosial sebagai pendukung kegiataan masyarakat dipermukiman, maka akan diarahkan beberapa rencana kebutuhan sarana sosial dan umum yaitu sebagai berikut:

Rencana kebutuhan rumah di Kabupaten Nias Selatan, meliputi rumah tipe besar, sedang dan kecil, dengan konsep penyediaan 1:3:5.

8. Rencana Kawasan Transportasi

Rencana kawasan transportasi di kabupaten Nias selatan adalah pada kawasan terminal angkutan darat, pelabuhan, dan bandar udara yang ada di Kabupaten Nias Selatan dengan luas sebesar 79,43 Ha.

9. Rencana Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Rencana kawasan pertahanan dan keamanan di kabupaten Nias Selatan adalah berupa kawasan perkantoran kepolisian dan militer yang ada meliputi:

- a. Markas Komando Angkatan Laut diarahkan di Kecamatan Telukdalam.
- b. Markas Komando Angkatan Darat diarahkan di Kecamatan Telukdalam dan Kecamatan Fanayama.
- c. Markas Kepolisian Resort berada di Ibu Kota Kecamatan Telukdalam.
- d. Komando Rayon Militer tersebar diseluruh Wilayah Kecamatan dan Ibu Kota Kecamatan.
- e. Kantor Bakamla diarahkan di Kecamatan Fanayama.
- f. Kantor Polisi Sektor tersebar diseluruh Wilayah Ibu Kota Kecamatan.
- g. Kantor Polisi Airut di Kecamatan Telukdalam dan Kepulauan.

2.1.1.1.7.2 Kawasan Lindung

Dalam tata ruang wilayah kawasan lindung mencakup beberapa jenis, seperti Kawasan Badan Air, Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya, Kawasan Perlindungan Setempat, Kawasan Konservasi, Kawasan Lindung Geologi, Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Hutan Mangrove. Berikut Pembagian Luas Satuan Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2.5
Pembagian Luas Satuan Rencana Pola Ruang Kawasan Lindung Kabupaten Nias Selatan

No	Satuan Pola Ruang	Luas (Ha)	Persentase
1	Kawasan Badan Air	1.425,23	1,66
2	Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahnya	72.716,57	84,60
3	Kawasan Perlindungan Setempat	3.244,75	3,77
4	Kawasan Konservasi	8.174,10	9,51
5	Kawasan Lindung Geologi	-	-
6	Kawasan Cagar Budaya	17,02	0,02
7	Kawasan Hutan Mangrove	380,55	0,44
Total		85.112,71	100,00

Sumber : Ranperda Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan 2024-2044

2.1.1.2 Wilayah Rawan Bencana

Berdasarkan uraian identifikasi risiko dalam Kajian Resiko Bencana Nias Selatan 2019-2023, hasil rekapitulasi seluruh bahaya yang berpotensi di Kabupaten Nias Selatan ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya yang diperoleh berdasarkan nilai indeks bahaya. Untuk bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, dan tsunami Kabupaten Nias Selatan berada pada kelas bahaya tinggi. Untuk bahaya kekeringan dan tanah longsor Kabupaten Nias Selatan berada pada kelas bahaya sedang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.6
Potensi Bencana Kabupaten Nias Selatan

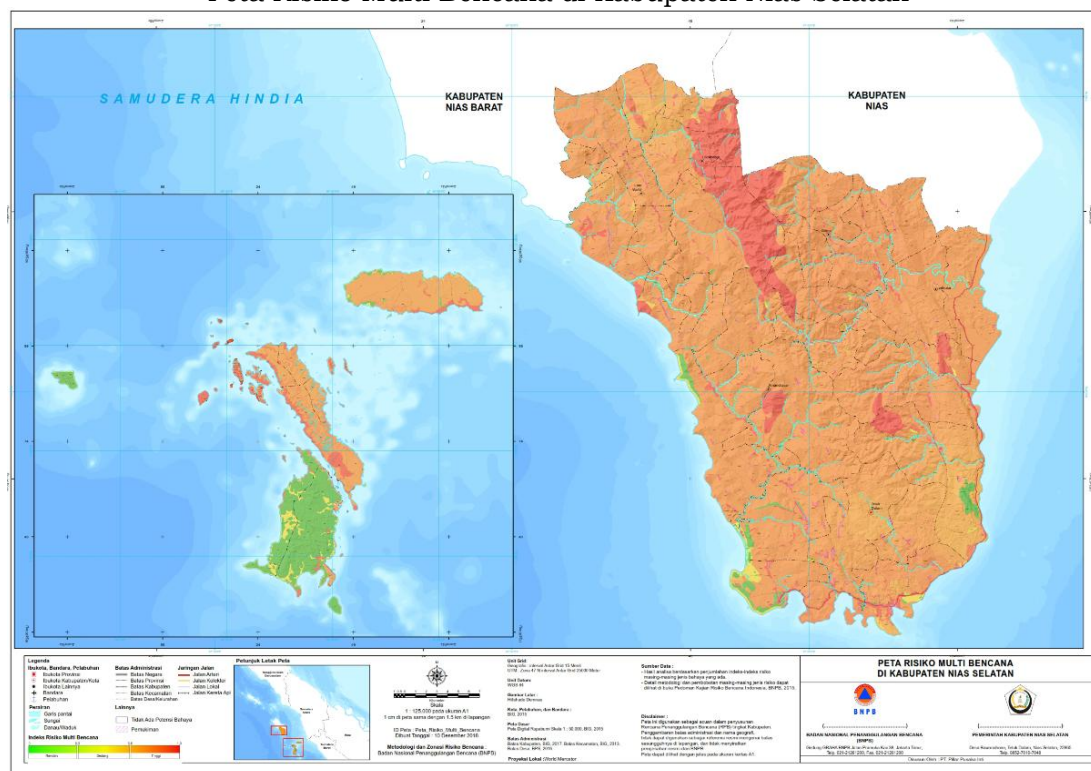
No.	Jenis Bencana	Bahaya	
		Total Luas	Kelas
1	Banjir	39.640,60	Tinggi
2	Banjir Bandang	8.239,78	Tinggi
3	Cuaca Ekstrem	134.205,29	Tinggi
4	Gelombang Ekstrem dan Abrasi	15.244,99	Tinggi
5	Gempa Bumi	248.799,00	Tinggi
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	243.872,35	Sedang
7	Kekeringan	248.799,00	Rendah
8	Longsor	135.291,31	Tinggi
9	Tsunami	20.699,95	Tinggi

Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019-2023.

Tingkat risiko bencana di Kabupaten Nias Selatan pada tabel di atas menunjukkan berada pada tingkat tinggi untuk seluruh jenis bencana yang berpotensi terjadi. Tingkat risiko tersebut diperoleh dari penggabungan tingkat bahaya, tingkat kerentanan, dan tingkat kapasitas berdasarkan hasil pengkajian risiko bencana di Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan hasil kesepakatan tim teknis dokumen KRB dan perwakilan masyarakat Kabupaten Nias Selatan, prioritas penanggulangan bencana tingkat kabupaten ditujukan untuk jenis bahaya banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrim dan abrasi. Pertimbangan dimasukkannya jenis bahaya banjir dan kebakaran hutan dan lahan ke dalam aksi prioritas penanggulangan bencana di Kabupaten Nias Selatan adalah karena terjadi hampir setiap tahun di Kabupaten Nias Selatan dengan dampak kerugian yang besar.

Di bawah ini disajikan peta risiko multi bencana Kabupaten Nias Selatan yang diperoleh dari penggabungan kelas bahaya, kelas kerentanan, kelas kapasitas, serta kelas risiko untuk seluruh jenis bencana berpotensi.

Gambar 2.2
Peta Risiko Multi Bencana di Kabupaten Nias Selatan



Sumber : Kajian Resiko Bencana Kabupaten Nias Selatan Tahun 2019-2023.

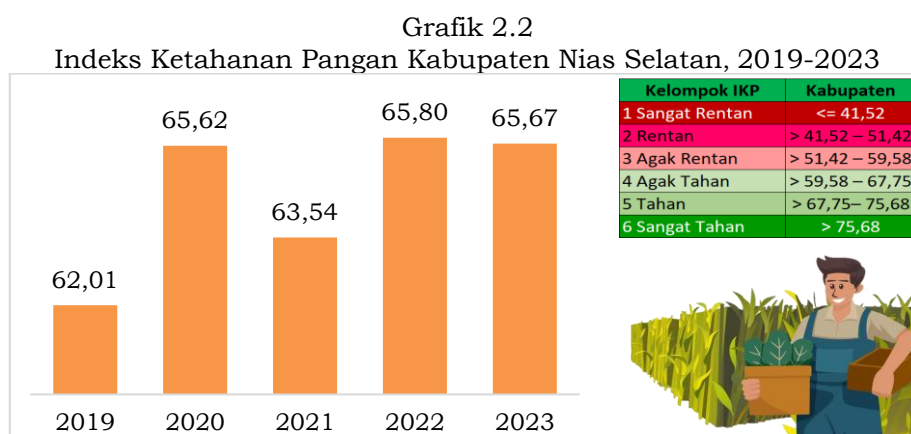
Berdasarkan *Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) 2023* yang dirilis oleh BNPB, Kabupaten Nias Selatan mencatat skor sebesar 196,18 yang tergolong dalam kategori risiko tinggi. Skor ini mencerminkan tingkat kerentanan yang signifikan terhadap berbagai bencana, baik geologis maupun hidrometeorologis. Dalam konteks perubahan iklim, ancaman banjir pesisir dan abrasi pantai diperkirakan akan semakin meningkat, terutama di wilayah-wilayah rawan seperti Pulau Tanah Masa dan Pulau Tello. Kedua pulau ini memiliki topografi rendah dan berada dekat garis pantai, sehingga sangat rentan terhadap naiknya permukaan laut, peningkatan intensitas badai tropis, serta degradasi ekosistem pesisir seperti *mangrove* dan terumbu karang.

2.1.1.3 Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor.

Dalam rangka mengetahui tingkat ketahanan pangan suatu wilayah beserta faktor-faktor pendukungnya, telah dikembangkan suatu sistem penilaian dalam bentuk Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang mengacu pada definisi ketahanan pangan dan subsistem yang membentuk sistem ketahanan pangan. IKP dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memetakan wilayah rentan pangan. Identifikasi ini bertujuan untuk mengetahui situasi pangan wilayah agar dapat dilakukan tindakan intervensi dan penanganan daerah yang termasuk kategori rentan pangan.

Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan selama lima tahun terakhir berada dalam kelompok agak tahan. Hal ini terlihat dari nilai Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan yang berada di angka terendah 62,01 poin pada tahun 2019 dan angka tertinggi berada di 65,87 poin di tahun 2024.



Sumber: Buku Indeks Ketahanan Pangan 2020-2024

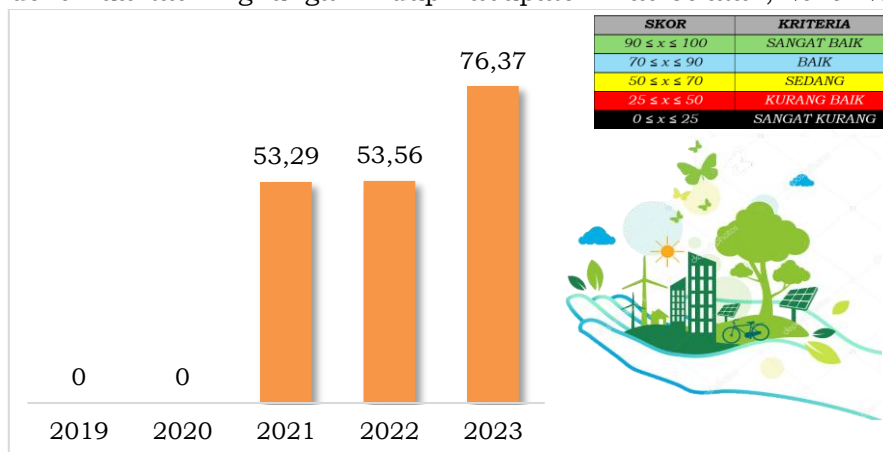
2.1.1.4 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup memiliki pengaruh langsung terhadap nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH adalah indikator yang digunakan untuk menggambarkan sejauh mana kualitas lingkungan di suatu wilayah atau negara. IKLH dapat mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi keadaan lingkungan, seperti kualitas udara, air, tanah, serta kerusakan ekosistem atau dampak perubahan iklim. IKLH juga berfungsi sebagai salah satu instrumen bagi pemangku kepentingan dalam mengambil kebijakan di bidang lingkungan hidup.

Skor Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 dan 2022 relatif stabil, masing-masing sebesar 53,29 dan 53,56, yang masuk dalam kategori "sedang." Namun pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan menjadi 76,37, yang menempatkannya dalam kategori "baik." Peningkatan ini mencerminkan

adanya perbaikan dalam pengelolaan lingkungan, seperti pengendalian polusi, pelestarian sumber daya alam, atau peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan.

Grafik 2.3
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023



Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, 2024

Berikut data mengenai indeks kualitas lingkungan hidup yang mencakup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta komponen penyusunnya, yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air (IKA) tahun 2019-2023.

Tabel 2.7
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) serta komponen penyusunnya, yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Lahan (IKL), dan Indeks Kualitas Air (IKA), 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	-	53,29	53,56	76,37
Indeks Kualitas Udara	-	-	93,25	96,59	96,67
Indeks Kualitas Lahan	-	-	65,91	65,91	66,92
Indeks Kualitas Air	-	-	-	-	66

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, 2024

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mengalami lonjakan signifikan dari 53,56 pada 2022 menjadi 76,37 pada 2023. Kenaikan tajam ini kemungkinan besar dipicu oleh mulai dimasukkannya Indeks Kualitas Air (IKA) dalam perhitungan IKLH, yang pada 2023 tercatat sebesar 66. Indeks Kualitas Udara (IKU) sudah sangat tinggi dan stabil sejak 2021, naik dari 93,25 menjadi 96,67 pada 2023, sehingga bukan menjadi penyebab utama lonjakan IKLH. Sementara itu, Indeks Kualitas Lahan (IKL) stagnan di angka 65,91 pada 2021-2022 dan hanya sedikit naik ke 66,92 pada 2023, menunjukkan kontribusi yang minim. Dengan demikian, peningkatan IKLH 2023 terutama didorong oleh kualitas udara

yang tetap tinggi dan kehadiran data kualitas air, sedangkan kualitas lahan masih menjadi titik lemah yang perlu dibenahi.

2.1.2 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup merupakan dua konsep utama dalam pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Daya dukung mengacu pada kemampuan lingkungan dalam mendukung kehidupan dan aktivitas manusia tanpa merusak keseimbangan ekosistem, sedangkan daya tampung menunjukkan kemampuan lingkungan untuk menyerap limbah atau zat buangan tanpa menimbulkan pencemaran atau kerusakan. Kedua konsep ini menjadi dasar penting dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan agar tidak melampaui kapasitas alam, sehingga dapat mencegah degradasi lingkungan dan menjamin keberlanjutan sumber daya bagi generasi mendatang.

Status daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat berdasarkan apakah daya dukung telah terlampaui atau belum, serta berdasarkan status pemanfaatan jasa lingkungan hidup. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana kondisi lingkungan mampu mendukung aktivitas manusia dan pembangunan, tanpa menimbulkan penurunan kualitas atau kerusakan fungsi ekosistem di wilayah tersebut. Berikut analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang bersumber dari KLHS RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025-2045:

1. Kapasitas daya dukung daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
 - a. ketersediaan air di akhir tahun perencanaan Kabupaten Nias Selatan mengalami status Surplus.
 - b. Ketersediaan pangan di akhir tahun perencanaan Kabupaten Nias Selatan mengalami defisit.
2. Kinerja layanan/ jasa ekosistem
 - a. Jasa penyediaan pangan berkategori tinggi hingga sangat rendah
 - b. Jasa lingkungan penyediaan air kategori sangat tinggi
 - c. Jasa lingkungan pengaturan tata aliran air dan banjir berkategori sangat tinggi
 - d. Jasa lingkungan pengaturan iklim rendah hingga sangat tinggi
 - e. Jasa lingkungan pencegahan dan perlindungan dari bencana alam yang sangat tinggi

3. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
 - a. Timbulan sampah yang tinggi sebagian besar tersebar di wilayah perkotaan dan sekitarnya.
 - b. Timbulan lumpur tinja yang tinggi sebagian besar tersebar pada wilayah perkotaan disebabkan tingginya tingkat kepadatan penduduk.
 - c. Bencana alam potensi rawan banjir dengan intensitas tinggi diketahui memiliki luas sebesar 10.032 Ha atau sebesar 11,75 % dari luas wilayah Kabupaten Nias Selatan.
 - d. Bencana alam rawan gempa bumi mendominasi pada kelas tinggi berada di Kabupaten Nias Selatan.
 - e. Bencana alam rawan tanah longsor mendominasi pada kelas tidak rawan mendominasi tinggi di Kabupaten Nias Selatan.
 - f. Bencana alam tsunami yang mendominasi terjadi pada kelas tidak rawan di Kecamatan Nias Selatan.
4. Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam
 - a. Di Kabupaten Nias Selatan di lihat dari sisi dari kawasan hutan menurut SK 6609 yang mendominasi yaitu hutan lahan kering primer.
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas terhadap adaptasi perubahan iklim
 - a. Berdasarkan data SIDIK KLHK Kabupaten Nias Selatan berada pada wilayah sangat tinggi perubahan iklim.
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
 - a. Kabupaten Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh shape index rendah dengan ukuran yang besar, sehingga memberikan ancaman bagi fauna didalamnya.

2.1.3 Demografi

Pembangunan pada dasarnya dilakukan dengan tujuan untuk mensejahterakan penduduk baik secara fisik maupun non-fisik. Dalam pembangunan, penduduk menjadi subjek sekaligus objek. Penduduk menjadi subjek karena penduduk menjadi sasaran yang dibangun, yang meliputi peningkatan kemampuan (*empowered*) dan makin meluasnya berbagai kesempatan (*opportunity*) sehingga penduduk menikmati pembangunan yang telah dilakukan. Sebagai sasaran dan penikmat hasil pembangunan diperlukan jumlah,

struktur dan laju pertumbuhan penduduk serta persebarannya untuk mencapai pemerataan dan keadilan.

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023, jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan tahun 2023 adalah 382.539 jiwa, terdiri dari 192.344 laki-laki (50,28 persen) dan 190.195 perempuan (49,72 persen), dengan rasio jenis kelamin 101 dan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 270,95 jiwa/km². Menurut persebaran penduduk tiap kecamatan, penduduk yang paling banyak adalah di Kecamatan Teluk Dalam, yaitu 26.708 jiwa (7,01 persen), dengan rata-rata kepadatan penduduk mencapai 646,68 jiwa/ km², sedangkan penduduk yang paling sedikit adalah di Kecamatan Simuk, yaitu 1.961 jiwa (0,52 persen), dengan rata-rata kepadatan penduduk hanya 96,03 jiwa/km². Berikut data-data terkait kondisi demografi Kabupaten Nias Selatan di tahun 2023.

Tabel 2.8

Jumlah Penduduk, Laju pertumbuhan penduduk, Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, 2023

Kecamatan	Penduduk jiwa	Laju Pertumbuhan Penduduk, 2020–2023 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Hibala	8.242	2,22	2,15	36,51	100
Tanah Masa	5.134	2,22	1,34	11,37	103
Pulau Pulau Batu	9.866	0,46	2,58	93,88	100
Pulau Pulau Batu Timur	3.258	1,77	0,85	8,76	105
Simuk	1.961	0,46	0,51	96,03	92
Pulau-Pulau Batu Barat	2.352	0,46	0,61	111,68	98
Pulau-Pulau Batu Utara	3.948	0,46	1,03	626,67	99
Telukdalam	26.708	1,58	6,98	646,68	99
Fanayama	20.028	3,23	5,24	242,79	107
Toma	15.295	4,73	4,00	370,7	102
Maniamolo	13.809	-0,11	3,61	183,34	103
Mazino	8.767	0,12	2,29	222,01	102
Luahagundre Maniamolo	11.337	3,23	2,96	224,99	104
Onolalu	8.880	1,57	2,32	350,02	108
Amandraya	15.494	3,29	4,05	201,85	102
Aramo	10.617	2,09	2,78	167,22	104
Ulususua	11.756	3,29	3,07	205,6	101
Lahusa	22.404	2,41	5,86	278,8	103
Sidua'ori	12.196	2,41	3,19	195,45	102
Somambawa	15.148	2,41	3,96	372,83	103
Gomo	11.529	3,02	3,01	306,95	101
Susua	17.186	0,74	4,49	608,78	99
Mazo	12.516	-0,42	3,27	431,14	103
Umbunasi	7.489	-0,41	1,96	228,25	98
Idanotae	11.046	3,02	2,89	390,18	102

Kecamatan	Penduduk jiwa	Laju Pertumbuhan Penduduk, 2020-2023 (%)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²	Rasio Jenis Kelamin Penduduk
Ulu Idanotae	7.856	3,02	2,05	548,22	100
Boronadu	8.182	3,02	2,14	278,96	99
Lolomatua	12.282	3,52	3,21	568,87	99
Ulunoyo	14.460	3,52	3,78	295,16	99
Huruna	14.570	3,52	3,81	295,6	93
Lolowau	9.619	-0,09	2,51	200,27	101
Hilimegai	7.211	1,35	1,89	179,6	101
O 'o' u	8.801	-0,09	2,30	120,3	103
Onohazumba	6.864	-0,09	1,79	241,27	97
Hilisalawa Ahe	5.728	-0,09	1,50	142,52	99
Nias Selatan	382.539	1,99	100,00	270,45	101

Sumber: Nias Selatan Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat di lihat bahwa pertumbuhan dan distribusi penduduk di Nias Selatan sangat bervariasi antar kecamatan. Tantangan utama meliputi ketimpangan akses antar wilayah, pengelolaan daerah berpenduduk padat, serta revitalisasi kawasan berpenduduk rendah. Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Telukdalam (26.708 jiwa atau 6,99% dari total penduduk), sedangkan yang paling sedikit adalah Simuk (1.961 jiwa).

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Nias Selatan sebesar 1,99%. Kecamatan dengan laju pertumbuhan tertinggi adalah Lolomatua, Ulunoyo, dan Huruna (masing-masing 3,52%), sedangkan kecamatan dengan laju pertumbuhan negatif terbesar adalah Umbunasi (-0,41%). Pertumbuhan positif tinggi di kecamatan-kecamatan seperti Lolomatua, Ulunoyo, Huruna, dan Amandraya menunjukkan adanya faktor pendorong lokal seperti ketersediaan lahan, pembangunan infrastruktur, atau migrasi masuk. Pertumbuhan negatif di Mazo, Umbunasi, dan beberapa kecamatan kecil lain mengindikasikan adanya potensi migrasi keluar, dikarenakan faktor ekonomi, kurangnya peluang kerja, atau faktor geografis (aksesibilitas rendah).

Rata-rata kepadatan penduduk adalah 270,45 jiwa/km². Kecamatan dengan kepadatan tertinggi adalah Susua (608,78 jiwa/km²) dan terendah adalah Tanah Masa (11,37 jiwa/km²). Kepadatan yang sangat tinggi di Kecamatan Susua, Mazo, dan Idanotae, kepadatan di atas 400 jiwa/km² bisa meningkatkan tekanan pada layanan publik (air bersih, pendidikan, kesehatan). Sementara kepadatan penduduk yang sangat rendah di Kecamatan Tanah Masa, Pulau-Pulau Kecil yang ada di Kepulauan Batu dan juga di Kecamatan Simuk

memberikan tantangan tersendiri terkait pembangunan berupa aksesibilitas dan layanan dasar.

Kemudian Rasio jenis kelamin relatif seimbang, rata-rata sekitar 101 laki-laki per 100 perempuan, dengan variasi kecil antar kecamatan (terendah di Kecamatan Huruna yaitu 93 dan tertinggi di Kecamatan Onolalu yaitu 108). Rasio mendekati normal. Namun, di rasio di Kecamatan Huruna (93) dan Umbunasi (98), memiliki rasio yang lebih rendah menunjukkan tren migrasi laki-laki keluar untuk bekerja (urbanisasi atau migrasi tenaga kerja).

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin
di Kabupaten Nias Selatan, 2023

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0-4	21.444	20.280	41.724
5-9	14.986	14.533	29.519
10-14	17.792	16.963	34.775
15-19	21.471	19.803	41.274
20-24	22.208	20.131	42.339
25-29	19.921	19.325	39.857
30-34	15.704	16.123	31.827
35-39	12.492	13.282	25.774
40-44	10.494	11.337	21.831
45-49	9.575	10.383	19.958
50-54	7.893	8.434	16.327
55-59	6.406	6.978	13.384
60-64	4.843	4.964	9.807
65-69	3.292	3.447	6.739
70-74	1.998	2.145	4.143
75+	1.825	2.067	3.892
Nias Selatan	192.344	192.195	382.539

Sumber: Nias Selatan Dalam Angka 2024

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Kabupaten Nias Selatan saat ini berada dalam fase demografi yang menguntungkan, dengan mayoritas penduduk berusia produktif dan tingginya kelompok usia muda. Mayoritas penduduk berada di rentang usia kerja (15-64 tahun), menunjukkan potensi besar untuk pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan tenaga kerja, industri lokal, dan sektor produktif lainnya. Sekitar 21% penduduk berada dalam kelompok usia sekolah dasar hingga menengah. Ini mengindikasikan kebutuhan akan investasi besar dalam sektor pendidikan dan kesehatan anak.

Dengan demikian, hal ini akan membuka peluang besar untuk pembangunan ekonomi daerah, tetapi juga menuntut perhatian pada penyediaan pendidikan, lapangan kerja, serta persiapan infrastruktur sosial di masa depan.

Tabel 2.10
Jumlah Keluarga yang sudah memiliki Kartu Keluarga
di Kabupaten Nias Selatan (orang), 2023

Kecamatan	Jumlah Keluarga
Hibala	2.332
Tanah Masa	1.349
Pulau Pulau Batu	3.000
Pulau Pulau Batu Timur	854
Simuk	625
Pulau-Pulau Batu Barat	742
Pulau-Pulau Batu Utara	1.219
Teluk Dalam	7.139
Fanayama	5.159
Toma	3.688
Maniamolo	3.915
Mazino	2.267
Luahagundre Maniamolo	2.985
Onolalu	2.460
Amandraya	3.479
Aramo	2.474
Ulususua	2.496
Lahusa	5.084
Sidua'ori	2.801
Somambawa	3.547
Gomo	2.653
Susua	3.772
Mazo	2.751
Umbunasi	1.729
Idanotae	2.399
Ulu Idanotae	1.724
Boronadu	1.778
Lolomatua	2.731
Uluoyo	2.870
Huruna	3.122
Lolowau	2.584
Hilimegai	1.717
O 'o' u	2.258
Onohazumba	1.733
Hilisalawa Ahe	1.432
Nias Selatan	92.868

Sumber: Nias Selatan Dalam Angka 2024

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa cakupan administrasi keluarga secara umum menunjukkan bahwa pendataan penduduk berbasis keluarga sudah berjalan, tetapi pemerataan cakupan di kecamatan-kecamatan kecil dan terpencil

perlu dipastikan. Distribusi KK cukup baik, dengan konsentrasi tertinggi di kecamatan yang juga memiliki populasi besar seperti Telukdalam, Fanayama, dan Lahusa. Kecamatan di wilayah kepulauan seperti Simuk, Pulau-Pulau Batu Barat, dan Pulau-Pulau Batu Utara memiliki jumlah KK yang relatif sedikit, sejalan dengan jumlah penduduk mereka yang kecil.

Tabel 2.11

Banyaknya Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, dan Akta Kematian yang Dikeluarkan Menurut Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, 2023

Kecamatan	Akta Kelahiran	Akta Perkawinan	Akta Perceraian	Akta Kematian
Hibala	2.180	458	1	13
Tanah Masa	1.252	273	-	2
Pulau Pulau Batu	2.608	1161	2	67
Pulau Pulau Batu Timur	967	155	-	1
Simuk	449	122	2	9
Pulau-Pulau Batu Bar	542	249	-	9
Pulau-Pulau Batu Utar	830	396	1	11
Teluk Dalam	7.925	3.922	16	490
Fanayama	4.649	2.599	4	193
Toma	2.925	1.292	3	95
Maniamolo	3.953	1.768	6	126
Mazino	1.374	555	-	90
Luahagundre Maniamolo	2.578	1.524	5	107
Onolalu	2.165	1.001	1	86
Amandraya	4.444	1.381	2	103
Aramo	2.984	589	-	36
Ulususua	2.681	817	-	63
Lahusa	6.432	2.011	1	203
Sidua'ori	3.164	1.001	-	98
Somambawa	4,6	1.309	-	105
Gomo	3.108	1.021	-	146
Susua	3.985	767	-	95
Mazo	2.784	563	-	37
Umbunasi	2.171	515	1	36
Idanotae	2.835	1.004	-	46
Ulu Idanotae	2.077	729	2	47
Boronadu	2.012	654	-	34
Lolomatua	3.026	734	1	47
Uluoyo	3.708	571	1	51
Huruna	3.532	956	1	83
Lolowau	3.358	650	1	97
Hilimegai	1.754	672	-	46
O 'o' u	1.971	770	1	62
Onohazumba	2.112	421	-	30
Hilisalawa Ahe	1.795	329	-	45
Nias Selatan	98.930	32.939	52	2.809

Sumber: Nias Selatan Dalam Angka 2024

Dari tabel diatas, tingginya jumlah akta kelahiran yang diterbitkan (>25% dari total penduduk) menunjukkan layanan administrasi dasar cukup aktif, meskipun belum tentu semua anak memiliki akta (tergantung kebutuhan usia dan kelahiran baru). Kemudian distribusi akta kelahiran dan perkawinan cenderung tinggi di kecamatan dengan jumlah penduduk besar dan aksesibilitas layanan publik lebih baik (seperti Fanayama, Lahusa, dan Telukdalam), hal ini menandakan pemerataan layanan di wilayah pedesaan atau kepulauan kecil mungkin masih perlu ditingkatkan. Selain itu, dari administrasi kependudukan tersebut diatas terlihat rendahnya jumlah akta kematian dibandingkan kelahiran. Hal ini terdapat dua indikasi yaitu belum semua kematian dilaporkan/dicatat secara administratif atau kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan kematian. Begitu juga Akta Perceraian yang tercatat sangat rendah.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Masyarakat, kesejahteraan masyarakat adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Kebutuhan material dapat dihubungkan dengan pendapatan yang nanti akan mewujudkan kebutuhan akan pangan, sandang, papan dan kesehatan. Kemudian kebutuhan spiritual dihubungkan dengan pendidikan, kemudian keamanan dan ketentaraman hidup.

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

Aspek kesejahteraan ekonomi menjadi dasar serta alat ukur capaian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkualitas juga tercermin dari aktivitas perekonomian yang mampu memberikan pemerataan pendapatan masyarakat, serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru yang memiliki daya serap yang tinggi terhadap pertumbuhan tenaga kerja.

Secara sederhana kesejahteraan rakyat ditandai oleh tiga hal yang fundamental. Pertama, semakin berkurangnya jumlah penduduk miskin Kedua, semakin sedikit jumlah penduduk usia produktif yang masih menganggur. Ketiga, semakin mengecilnya kesenjangan ekonomi antar sesama penduduk suatu daerah.

Sektor pertanian, perkebunan dan perikanan di Kabupaten Nias Selatan terus menjadi tulang punggung ekonomi daerah dan memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah. Ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap perubahan iklim, harga pasar global, dan keterbatasan teknologi menuntut transformasi ekonomi yang lebih beragam dan dinamis. Diversifikasi ke sektor pariwisata dan industri pengolahan menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih dinamis dan berkelanjutan.

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu. Indikator ini merupakan indikator untuk menentukan arah kebijakan pembangunan yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi menjadi penentu tingkat kesejahteraan, keamanan serta kemajuan suatu daerah. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan, semakin tinggi pula tingkat stabilitas politik, ekonomi dan keamanan.

Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 tercatat sebesar 3,65 persen, dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi selama delapan tahun terakhir sebesar 3,57 persen. Capaian terendah terjadi pada tahun 2020, dengan pertumbuhan hanya sebesar 0,61 persen, akibat dampak pandemi *Covid-19* yang menyebabkan kontraksi perekonomian secara nasional hingga global.

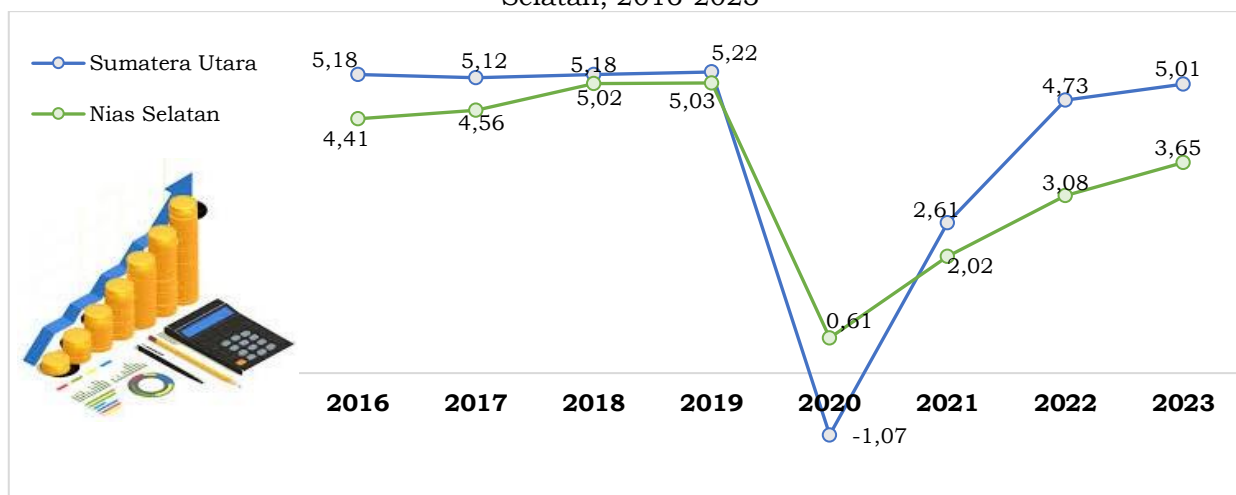
Meskipun terjadi pemulihan pascapandemi, pertumbuhan ekonomi Nias Selatan pada tahun 2023 menunjukkan tren peningkatan moderat. Namun demikian, capaian tersebut masih berada di bawah potensi optimal daerah, mengindikasikan perlunya akselerasi pembangunan dan diversifikasi ekonomi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Salah satu faktor utama yang menghambat percepatan pertumbuhan ekonomi adalah rendahnya konektivitas wilayah serta minimnya produktivitas sektor primer. Terbatasnya infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara menyebabkan distribusi barang serta mobilitas orang antarwilayah di Nias Selatan tidak berjalan optimal. Akibatnya, biaya logistik menjadi tinggi, pasar lokal sulit berkembang, dan peluang investasi baru pun terbatas.

Jika dibandingkan dengan Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara selama delapan tahun terakhir, Pertumbuhan ekonomi kabupaten Nias Selatan cenderung lebih rendah setiap tahunnya. Namun di tahun 2020, Provinsi Sumatera Utara sempat menyentuh angka -1,07 persen, sedangkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan pada tahun tersebut adalah 0,61 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan selama periode 2016-2023 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.4

Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

2.2.1.2 Indeks Gini

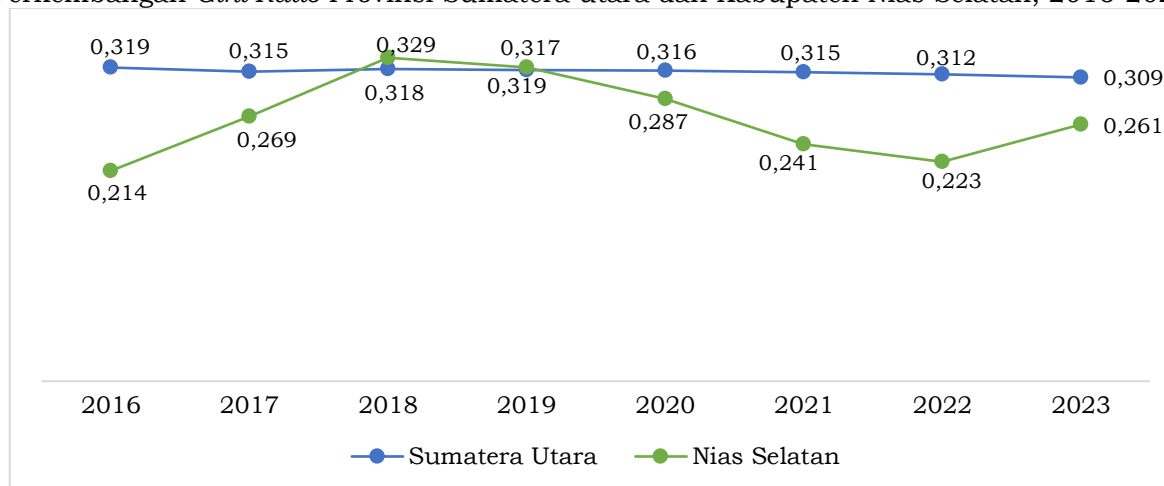
Indeks Gini menjadi permasalahan yang masih dialami di setiap daerah di Indonesia. Perlu dilakukan suatu upaya untuk menangani ketimpangan pendapatan dengan menurunkan nilai indeks gini ratio. Hal tersebut dapat dilakukan dengan meminimalisir faktor penyebab tingginya nilai indeks gini ratio. Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan ukuran ketidakmerataan (disparitas) pendapatan agregat. Indeks Gini merupakan suatu kondisi dimana distribusi pendapatan yang diterima masyarakat tidak merata. Indeks Gini dinyatakan dalam angka yang bernilai 0 sampai 1. Jika Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna, sedangkan jika bernilai 1 berarti ketimpangan sempurna.

Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Nias Selatan selama lima terakhir adalah fluktuatif. Pada tahun 2023, Indeks Gini Kabupaten Nias Selatan adalah 0,261. Hal ini menandakan Indeks Gini Kabupaten Nias Selatan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang berada di angka 0,223 dengan selisih 0,038 poin. Hal ini dikarenakan Ketimpangan sektoral dan spasial

di Kabupaten Nias Selatan yang saling memperkuat. Konsentrasi aktivitas ekonomi di pusat-pusat tertentu memperlebar kesenjangan antarwilayah. Fluktuasi pendapatan di kawasan pesisir memperburuk ketidakmerataan kesejahteraan.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, perkembangan indeks gini selama delapan tahun terakhir cenderung stagnan di angka 0,3. Dimana paling tinggi berada di angka 0,309 yaitu di tahun 2023. Artinya nilai Indeks gini Provinsi Sumatera Utara dibandingkan Kabupaten Nias selatan cenderung lebih stabil. Untuk lebih jelasnya berikut perkembangan Indeks Gini Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2023.

Grafik 2.5
Perkembangan *Gini Ratio* Provinsi Sumatera utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

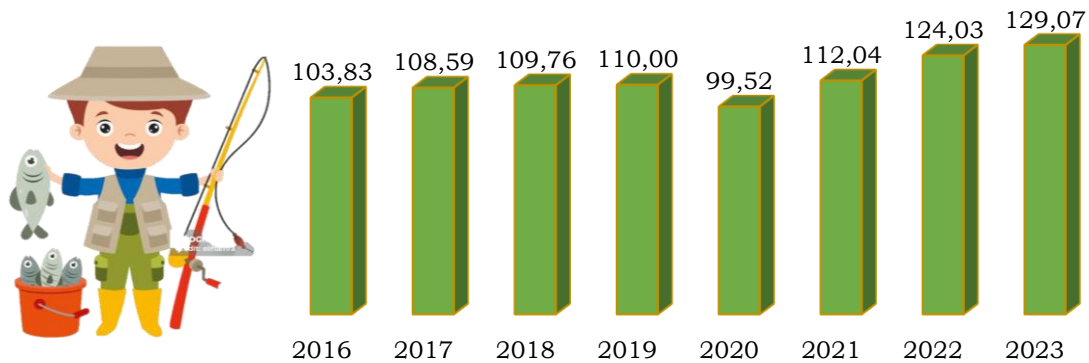


Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

2.2.1.3 Nilai Tukar Nelayan

Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2023 cenderung mengalami peningkatan. Jika dilihat dari Standar kesejahteraan nelayan adalah NTN sebesar 100, artinya pada tahun 2016-2023 pendapatan nelayan naik lebih besar dari pengeluarannya karena nilai NTN diatas 100. Namun pada tahun 2020 nilai NTN Kabupaten Nias Selatan mengalami penurunan sebesar 99,52 poin artinya pendapatan nelayan turun lebih kecil dari pengeluarannya sehingga nelayan mengalami defisit ($NTN < 100$). Pada tahun 2023, nilai tukar nelayan Kabupaten Nias Selatan mengalami kenaikan tertinggi yaitu menjadi 129,07 Poin.

Grafik 2.6
 Nilai Tukar Nelayan (NTN) Kabupaten Nias Selatan (Poin), 2016-2023



Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Nias Selatan, 2024 (data diolah)

2.2.1.4 Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah yang belum dapat teratasi. Hal ini sangat penting karena kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang kompleks baik dari faktor penyebabnya maupun dampak yang ditimbulkan. Kemiskinan juga merupakan tolak ukur terhadap kesejahteraan masyarakat.

Angka kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan karakteristik yang erat kaitannya dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kesempatan kerja yang layak. Kondisi ini terutama dirasakan oleh kelompok penduduk rentan yang tinggal di wilayah pesisir, pedalaman, dan pulau-pulau kecil, yang menghadapi ketidakstabilan ekonomi tinggi serta keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Terbatasnya akses terhadap layanan publik dan peluang ekonomi yang setara menghambat upaya peningkatan kesejahteraan, sehingga memperkuat siklus kemiskinan di wilayah-wilayah tersebut.

Penduduk Miskin Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 naik menjadi 54.290 Jiwa. Namun persentase penduduk Nias Selatan justru menurun ke angka 16,39 Persen dibanding tahun 2022 yang berada di angka 16,48 Persen. Artinya Jumlah penduduk miskin memang meningkat secara jumlah, namun dalam jumlah penduduk yang ada secara keseluruhan dibanding jumlah penduduk miskin semakin berkurang. Indeks kedalaman kemiskinan meningkat menjadi 3,04 persen dan indeks keparahan kemiskinan juga meningkat menjadi 0,85 persen di tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 2.12

Jumlah Penduduk Miskin, Garis Kemiskinan, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Penduduk Miskin	57,75	57,95	52,7	52,51	53,88	55,16	54,16	54,29
2	Garis Kemiskinan	238.119	249.225	261.104	279.468	312.453	329.308	350.452	379.929
3	Persentase Penduduk Miskin	18,6	18,48	16,61	16,41	16,71	16,92	16,48	16,39
4	Indeks Kedalaman Kemiskinan	3,32	2,94	2,49	2,28	2,82	2,38	2,71	3,04
5	Indeks Keparahan Kemiskinan	0,84	0,67	0,66	0,5	0,76	0,52	0,71	0,85

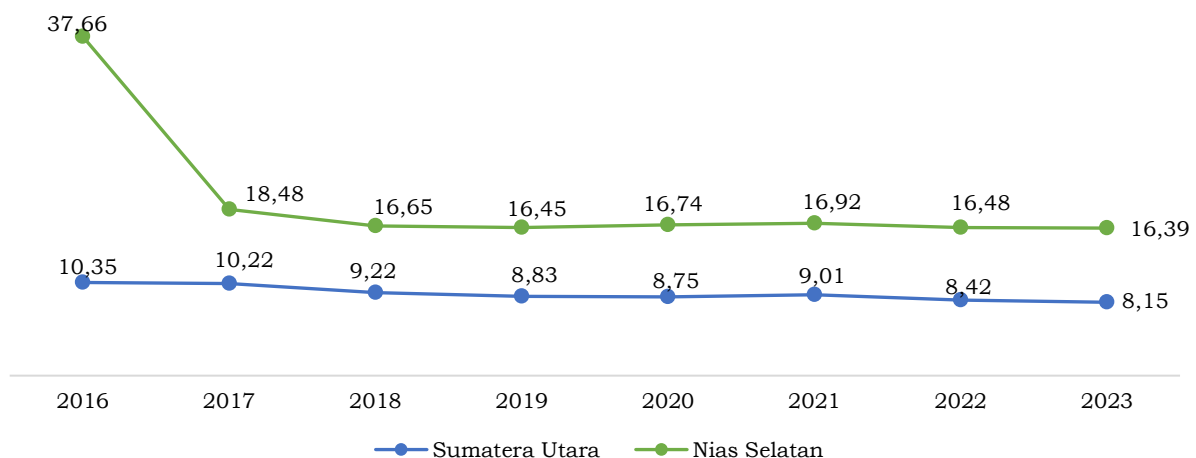
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, 2024 (data diolah)

1. Garis kemiskinan = Rupiah/Kapita/Bulan
2. Jumlah Penduduk Miskin dalam ribuan

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, persentase penduduk miskin Kabupaten Nias Selatan lebih tinggi hampir 50 persen dari persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara. Di tahun 2016, persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Utara adalah 10,35 Persen. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan lebih dari tiga kali lipat perolehan Provinsi Sumatera utara yaitu 37,66 Persen. Di tahun berikutnya, persentase penduduk miskin Kabupaten Nias Selatan berhasil ditekan ke angka 18,48 persen, dimana provinsi sumatera utara turun sedikit ke angka 10,22 persen. Di tahun-tahun berikutnya persentase penduduk miskin berada di angka 16 persen untuk kabupaten Nias Selatan dan dibawah 10 Persen untuk Provinsi Sumatera Utara. Berikut Grafik Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2023.

Grafik 2.7

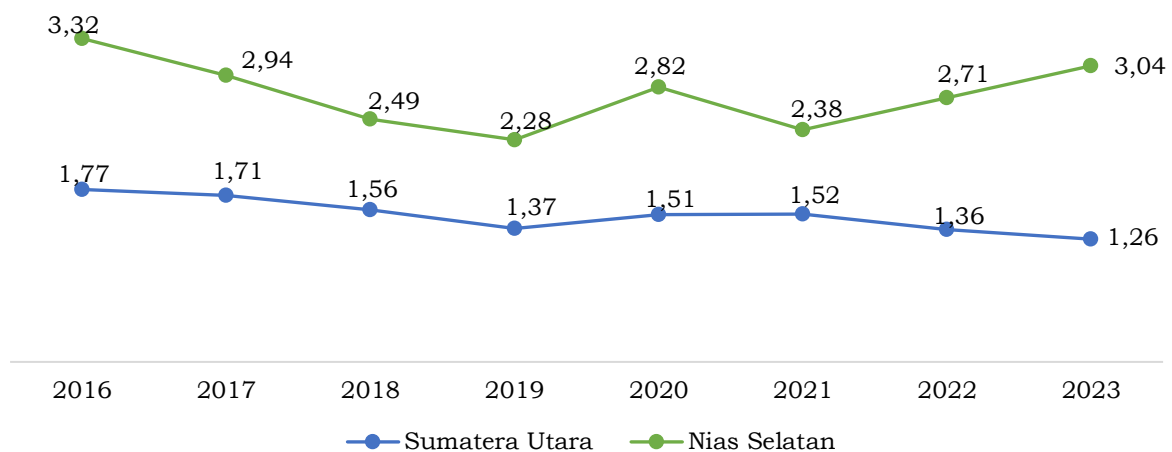
Perbandingan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Utara berada di *range* angka 1,77 persen sampai 1,26 persen. Dengan capaian tertinggi ada di angka 1,77 yaitu di tahun 2016. Sedangkan indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Nias Selatan berada di *range* angka 3,32 sampai 2,28 persen dengan capaian tertinggi di angka 3,32 persen yaitu 3,32 persen di tahun 2016. Di tahun 2023, Indeks kedalaman kemiskinan Provinsi Sumatera Utara adalah 1,26 persen merupakan capaian terbaik Provinsi Sumatera Utara selama delapan tahun terakhir. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan capaian di tahun 2023 adalah 3,04 persen dimana angka ini merupakan peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan di tahun 2022. Berikut Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2023.

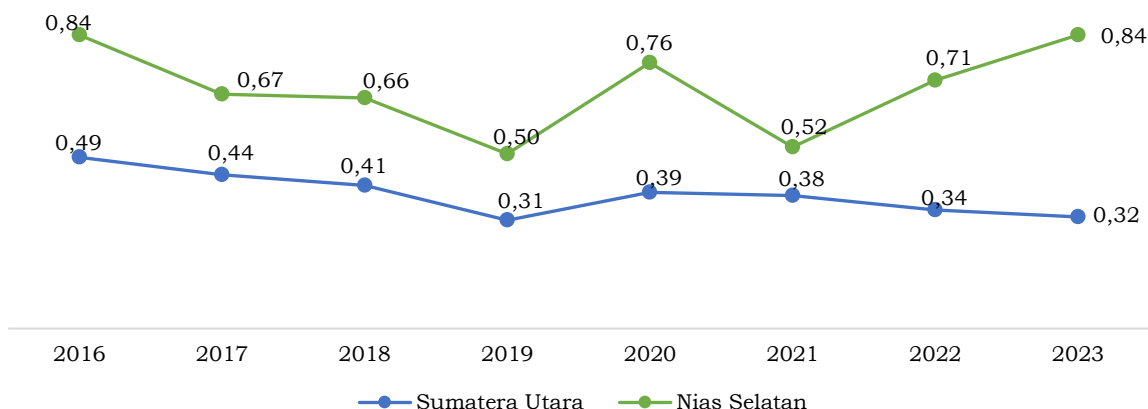
Grafik 2.8
Perbandingan Indeks Kedalaman Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Indeks keparahan kemiskinan Provinsi Sumatera Utara di tahun 2016 adalah 0,32 persen sedangkan indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Nias Selatan adalah 0,84 persen. Selama periode 2016 sampai dengan 2023, indeks keparahan kemiskinan provinsi sumatera utara yang berhasil di tekan adalah sebesar 0,17 persen. Sedangkan Kabupaten Nias Selatan masih berada di angka yang sama di tahun 2016 yaitu 0,84 persen. Berikut Perbandingan Indeks Keparahannya Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2023.

Grafik 2.9
Perbandingan Indeks Keparahan Kemiskinan Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

2.2.1.5 Tingkat Pengangguran Terbuka

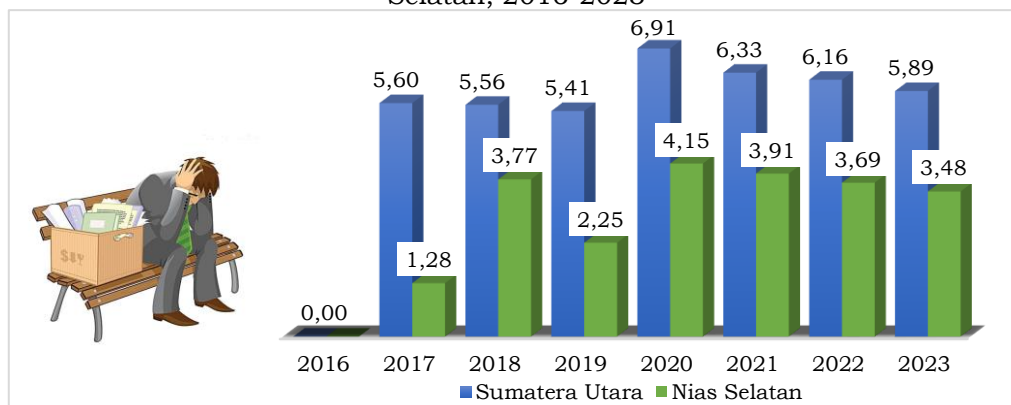
TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka ini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja

Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Nias Selatan selama delapan tahun terakhir paling tinggi berada di angka 4,15 persen yaitu di tahun 2020. Dimana di tahun sebelumnya berada di angka 2,25 persen. Angka tersebut berhasil terus di tekan ke angka 3,48 Persen di tahun 2023. Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Nias Selatan disebabkan oleh struktur ekonomi yang belum terdiversifikasi, keterbatasan kapasitas tenaga kerja, rendahnya investasi, dan minimnya peluang kerja formal. Selain itu, banyak penduduk yang bekerja di sektor berproduktivitas rendah seperti pertanian subsisten dan perikanan musiman, sehingga tidak berkontribusi optimal terhadap pertumbuhan ekonomi.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, tingkat pengangguran terbuka provinsi Sumatera Utara lebih tinggi dua kali lipat dari Kabupaten Nias Selatan. Dimana di tahun 2017 tingkat pengangguran terbuka Nias Selatan adalah 1,28 persen, Provinsi Sumatera Utara berada di angka 5,60 persen. Tingkat pengangguran terbuka yang berhasil di tekan selama delapan tahun terakhir adalah minus 0,29 persen untuk Provinsi Sumatera Utara dan minus 2,2 persen

untuk Kabupaten Nias Selatan. Artinya selama periode tahun 2016 sampai 2023, angka kemiskinan semakin turun di akhir periode tersebut. Berikut grafik Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2023.

Grafik 2.10
Perkembangan tingkat pengangguran terbuka Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

2.2.1.6 Indeks Pembangunan Manusia

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). Hal ini dikarenakan IPM mengukur pencapaian hasil pembangunan dari suatu daerah/wilayah dalam tiga dimensi dasar pembangunan yaitu: lamanya hidup, pengetahuan/tingkat pendidikan dan standard hidup layak. Selain itu, IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah dengan dibagi ke dalam beberapa kategori.

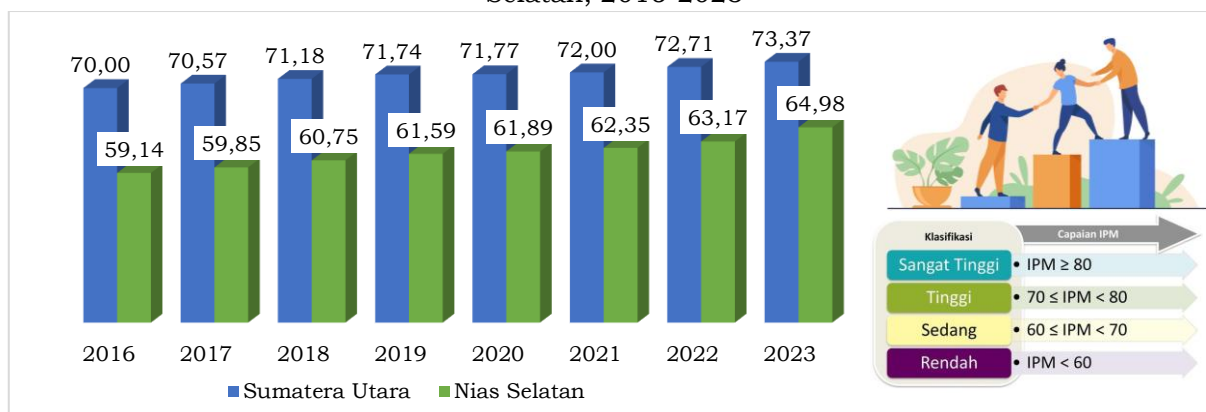
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. IPM Nias Selatan tahun 2023 tercatat sebesar 64,98 meningkat 1,81 poin dibandingkan capaian tahun 2022. Meskipun Kabupaten Nias Selatan menunjukkan percepatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada tahun 2023 di semua dimensi baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak, capaian ini masih menempatkan Kabupaten Nias Selatan dalam kategori sedang. Hal ini disebabkan oleh indikator-indikator pembentuk IPM yang masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah lain. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang baru mencapai 8,77 tahun menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk dewasa belum setara dengan standar nasional untuk pendidikan menengah atas (setara 12 tahun) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 13,15

tahun memang mengalami kenaikan, tetapi masih menunjukkan tantangan dalam realisasi akses dan kualitas pendidikan di masa depan. Begitu juga dengan Pengeluaran riil per kapita yang meningkat 3,66 persen mencerminkan pertumbuhan ekonomi rumah tangga, tetapi dari tingkat dasar yang masih rendah, sehingga belum cukup untuk mendorong lonjakan signifikan dalam standar hidup. Capaian Harapan hidup sebesar 73,93 tahun tergolong baik, namun tetap perlu dilakukan perbaikan layanan kesehatan di wilayah terpencil dan pesisir masih diperlukan untuk meratakan capaian ini.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara, IPM Kabupaten Nias Selatan masih tertinggal sekitar 20 poin setiap tahunnya. IPM Provinsi Sumatera Utara selama delapan tahun terakhir berada dalam kategori Tinggi, dengan capaian sebesar 73,37 pada tahun 2023. Berikut adalah perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan dalam rentang waktu 2016–2023.

Grafik 2.11

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan (data diolah)

2.2.2 Kesejahteraan Sosial Budaya

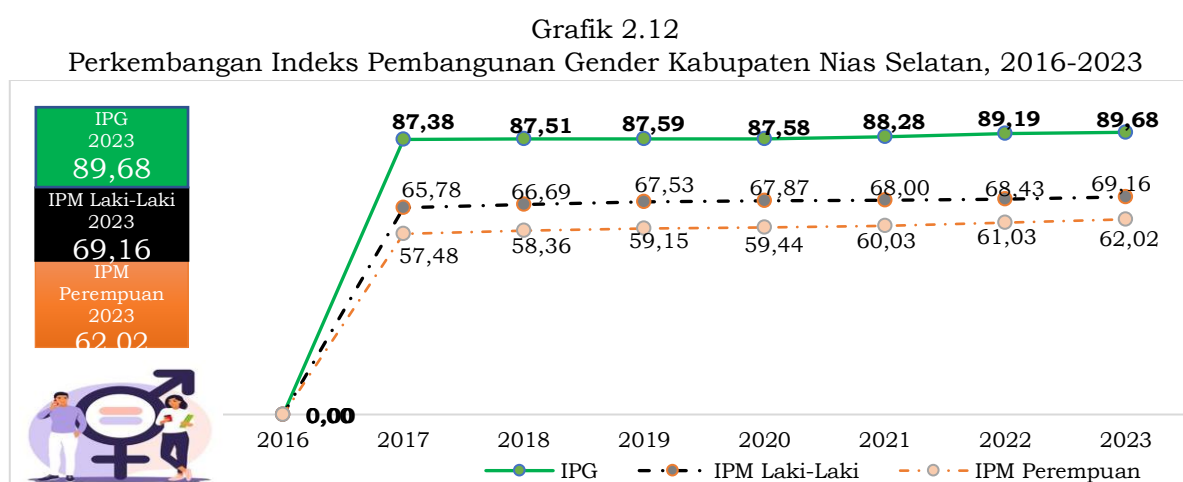
Kesejahteraan sosial budaya masyarakat dilihat dari sisi kesejahteraan sosial, ikatan sosial, dan tata nilai sosial dalam kehidupan masyarakat. Beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur kesejahteraan sosial budaya adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

2.2.2.1 Indeks Pembangunan Gender

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.

Indikator ini menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. Indeks ketimpangan gender dirancang untuk meningkatkan kesadaran akan adanya ketidaksetaraan gender yang selama ini ada di masyarakat, serta mengetahui kemajuan pembangunan manusia akibat adanya ketidaksetaraan gender. Selain itu indeks ini digunakan untuk mendukung aksi masyarakat dunia akan kesetaraan gender.

Tren yang terjadi dari tahun 2016-2023, Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2017 berada di angka 87,38 poin, terus meningkat hingga berada di angka 89,68 poin pada tahun 2023. Dengan selisih rata-rata antara IPM Laki-laki dan IPM Perempuan adalah 7,99 poin. Kesenjangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Nias Selatan dipengaruhi oleh rendahnya partisipasi perempuan di sektor publik, termasuk dunia kerja formal dan sektor kepemimpinan, serta adanya kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan. Partisipasi Angkatan Kerja (PAK) perempuan cenderung lebih rendah dibandingkan laki-laki, mempersempit kontribusi perempuan terhadap perekonomian daerah. Berikut grafik Indeks Pembangunan Gender Kabupaten Nias Selatan beserta dengan IPM laki-laki dan IPM perempuan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2023.

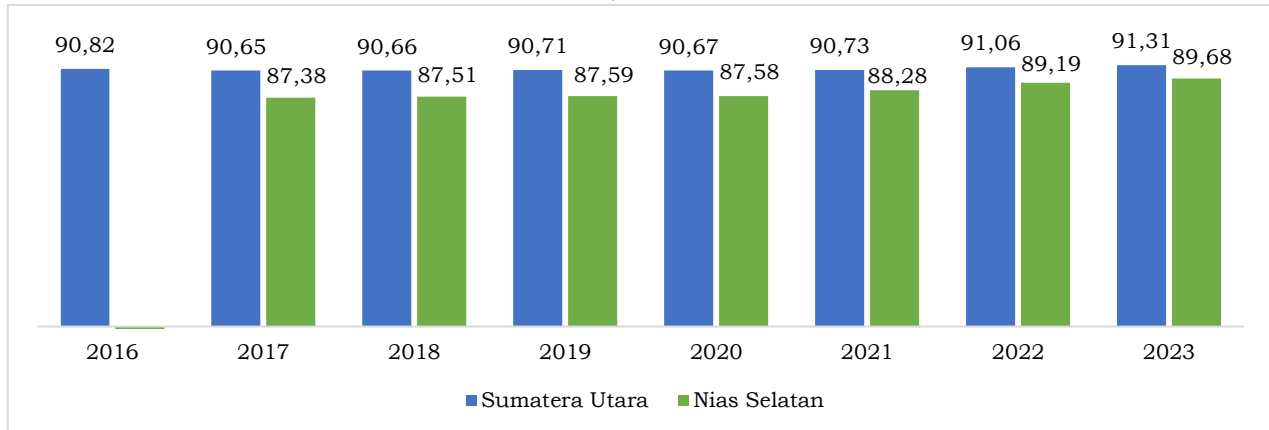


Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Utara berada diatas angka 90 persen setiap tahunnya. Perkembangan IPG dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Hal ini juga selaras dengan IPG Kabupaten Nias selatan yang terus mengalami peningkatan selama delapan tahun terakhir. Hanya saja,

indeks Ketimpangan Gender Kabupaten Nias Selatan Bergerak di angka 80 persen dengan capaian tertinggi di tahun 2023 yaitu 89,68 persen.

Grafik 2.13
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

2.2.2.2 Indeks Pemberdayaan Gender

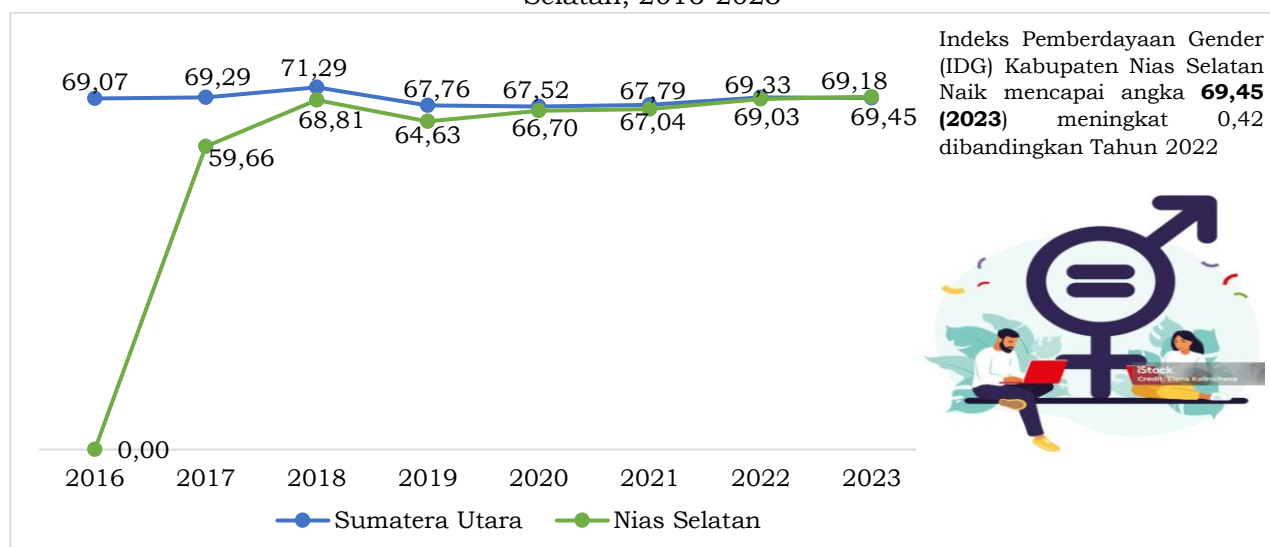
Indeks Pemberdayaan Gender (*Gender Empowerment Index*) yang selanjutnya disingkat IDG adalah salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur terlaksananya keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan pengambilan keputusan yang dilihat dari proporsi laki-laki dan perempuan dalam parlemen, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan yang dilihat dari 2 (dua) indikator yaitu proporsi laki-laki dan perempuan sebagai legislator, pejabat senior dan manager serta presentase laki-laki dalam posisi profesional dan teknis dan sumber ekonomi yang diukur dengan perkiraan pendapatan laki-laki dan perempuan.

Pada tahun 2016, IDG Kabupaten Nias Selatan belum tercatat (0,00), namun mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2017 menjadi 59,66. Setelah itu, tren pertumbuhan cenderung stabil dengan sedikit fluktuasi, mencapai angka tertinggi 68,81 pada tahun 2018 sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2023, IDG Kabupaten Nias Selatan mencapai 69,45, meningkat 0,42 poin dibandingkan tahun 2022. Rendahnya Indeks Pemberdayaan Gender di Nias Selatan merupakan akibat dari keterbatasan akses perempuan terhadap pendidikan berkualitas, peluang kerja formal, posisi kepemimpinan baik itu di pemerintahan, desa atau lembaga adat, serta pengaruh kuat norma sosial yang membatasi ruang gerak perempuan di ruang publik. Untuk meningkatkan IDG, diperlukan upaya yang lebih progresif dalam memperluas

akses pendidikan, memperkuat peran perempuan dalam ekonomi, serta mendorong keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan di semua tingkat.

Sementara itu, IDG Provinsi Sumatera Utara cenderung lebih stabil dengan nilai yang selalu berada di atas 67, dengan puncaknya pada tahun 2018 sebesar 71,29. Meskipun ada sedikit penurunan setelah tahun tersebut, IDG tetap berada dalam tren yang relatif tinggi dan konsisten dibandingkan dengan Kabupaten Nias Selatan. Berikut grafik perkembangan Indeks Pembangunan Gender Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 sampai dengan tahun 2023.

Grafik 2.14
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

2.2.2.3 Indeks Ketimpangan Gender

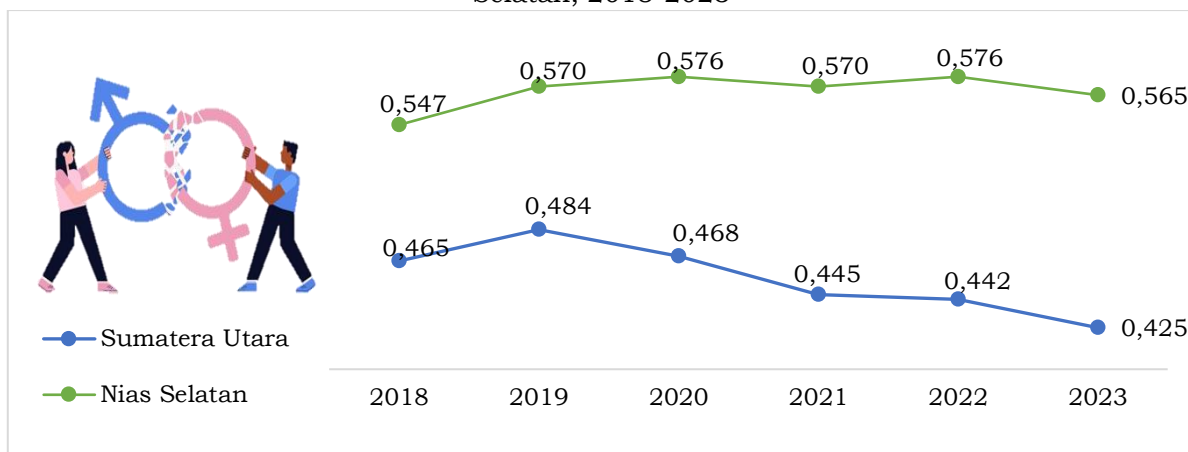
Salah satu permasalahan pembangunan di daerah di Indonesia adalah masih terjadinya kesenjangan gender. Kebijakan yang berupaya untuk mengurangi kesenjangan gender atau untuk mencapai kesetaraan gender memerlukan data dan langkah-langkah yang kuat. Salah satu indikator yang dapat melihat kesenjangan gender adalah Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IKG merujuk pada metodologi yang digunakan oleh *United Nation Development Programme (UNDP)*. IKG hanya berfokus mengukur kesenjangan pencapaian antara perempuan dan laki-laki dalam tiga dimensi yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan pasar tenaga kerja.

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kabupaten Nias Selatan menunjukkan tren stabil dengan nilai tinggi, berkisar antara 0,547-0,576 selama lima tahun terakhir. Meskipun sempat menurun ke 0,565 pada 2023, angka ini masih mencerminkan ketimpangan gender yang cukup besar, sehingga diperlukan langkah-langkah khusus untuk meningkatkan kesetaraan. Masih tingginya Indeks Ketimpangan Gender (IKG) di Kabupaten Nias Selatan disebabkan oleh dominasi laki-laki dalam struktur kerja, terutama di sektor informal berproduktivitas rendah seperti pertanian subsisten, perikanan musiman, dan perdagangan kecil. Hal ini mempersempit peluang perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam aktivitas ekonomi produktif.

Sementara itu, IKG Sumatera Utara mengalami tren penurunan, dari 0,465 pada tahun 2018 menjadi 0,425 pada tahun 2023, menandakan peningkatan kesetaraan gender di tingkat provinsi. Dibandingkan Sumatera Utara, Nias Selatan masih memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dan membutuhkan perhatian lebih untuk memperbaiki kondisi gender di wilayahnya. Berikut Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan selama tahun 2018 sampai tahun 2023.

Grafik 2.15

Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2018-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah menjelaskan posisi relatif suatu daerah terhadap daerah lainnya dengan memperhatikan semua faktor-faktor pembentuk daya saing yang dimilikinya serta seberapa jauh daerah tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor tersebut. Aspek ini juga merupakan profil kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang

dimilikinya melalui peningkatan produktifitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 PDRB

PDRB Kabupaten Nias Selatan Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) pada tahun 2023 sebesar 8.574,98 milyar rupiah. Sektor pertanian masih sebagai kontributor utama dengan peranan mencapai 44,72 persen. Selanjutnya di ikuti oleh sektor konstruksi sebesar 14,87 persen dan sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sektor sebesar 9,07 persen. Sementara sektor-sektor lain memberikan total kontribusi sebesar 31,34 persen terhadap perekonomian di Nias Selatan. Berikut perkembangan pertumbuhan PDRB ADHB menurut Lapangan usaha tahun 2016-2023.

Tabel 2.13
PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nias Selatan (Miliar Rupiah),
2016-2023

	Lapangan Usaha	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2 391,20	2.600,34	2.822,21	3.044,02	3.196,25	3.307,45	3.619,28	3.834,58
B	Pertambangan dan Penggalian	312,67	334,15	357,6	382,6	408,72	435,59	459,28	491,55
C	Industri Pengolahan	8,74	9,61	10,44	11,32	11,79	12,55	13,35	14,26
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,49	2,77	3,11	3,5	3,8	4,06	4,29	4,58
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,81	1,99	2,14	2,31	2,29	2,28	2,33	2,41
F	Konstruksi	705,43	787,78	885,53	1.017,53	1.009,97	1.065,26	1.167,97	1.275,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	412,06	466,78	524,35	586,85	625,48	656,90	722,26	777,86
H	Transportasi dan Pergudangan	184,98	209,06	235,79	267,27	287,46	288,51	318,4	359,17
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	112,15	123,89	137,44	152,24	160,69	159,74	173,89	188,46
J	Informasi dan Komunikasi	36,27	39,6	43,53	47,53	49,93	56,59	62,39	66,76
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	76,52	81,79	87,45	93,14	97,81	102,09	105,56	113,08
L	Real Estat	257,06	290,4	322,04	357,54	372,74	387,06	403,14	425,09
M,N	Jasa Perusahaan	1,74	1,93	2,07	2,22	2,23	2,34	2,46	2,71
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	510,73	551,18	601,3	661,3	689,41	686,79	690,91	732,34
P	Jasa Pendidikan	132,73	144,28	157,26	171,26	178,55	184,73	193,12	203,73
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	40,37	43,73	47,88	52,88	58,7	60,01	66,5	72,85
R,S TU	Jasa Lainnya	5,82	6,46	7,18	7,98	8,44	8,7	9,39	10,18
Produk Domestik Regional Bruto		5 192,77	5.695,74	6.247,31	6.861,48	7.164,27	7.420,63	8.014,50	8.574,98

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka, 2016-2024 (data diolah)

Tabel 2.14
Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nias Selatan,
2016-2023

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	46,05	45,65	45,17	44,36	44,61	44,57	45,16	44,72
B	Pertambangan dan Penggalian	6,02	5,87	5,72	5,58	5,7	5,87	5,73	5,73
C	Industri Pengolahan	0,17	0,17	0,17	0,16	0,16	0,17	0,17	0,17
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	13,58	13,83	14,17	14,83	14,1	14,36	14,57	14,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,94	8,20	8,39	8,55	8,73	8,85	9,01	9,07
H	Transportasi dan Pergudangan	3,56	3,67	3,77	3,9	4,01	3,89	3,97	4,19
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,16	2,18	2,2	2,22	2,24	2,15	2,17	2,20
J	Informasi dan Komunikasi	0,7	0,70	0,7	0,69	0,7	0,76	0,78	0,78
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,47	1,44	1,4	1,36	1,37	1,38	1,32	1,32
L	Real Estat	4,95	5,10	5,15	5,21	5,2	5,22	5,03	4,96
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	9,84	9,68	9,62	9,64	9,62	9,26	8,62	8,54
P	Jasa Pendidikan	2,56	2,53	2,52	2,5	2,49	2,49	2,41	2,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,78	0,77	0,77	0,77	0,82	0,81	0,83	0,85
R,S, T,U	Jasa Lainnya	0,11	0,11	0,11	0,12	0,12	0,12	0,12	0,12
Produk Domestik Regional Bruto		100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka, 2016-2024 (data diolah)

Nilai PDRB ADHK Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 0,57 persen. Kondisi tersebut dapat dilihat pada ADHK tahun 2010, PDRB Nias Selatan pada tahun 2022 sebesar 2.105,63 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2022 sebesar 2.162,85 milyar rupiah. Berikut pertumbuhan PDRB ADHK menurut Lapangan usaha dari tahun 2016-2023.

Tabel 2.15
PDRB ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Nias Selatan (Miliar Rupiah),
2016-2023

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 751,46	1.825,42	1.908,21	1.982,40	2.002,93	2038,29	2.105,63	2.162,85
B	Pertambangan dan Penggalian	211,95	226,69	238,08	250,88	258,29	269,35	278,21	288,70
C	Industri Pengolahan	6,05	6,3	6,51	6,75	6,75	7,01	7,12	7,35
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,78	2,95	3,14	3,33	3,55	3,76	3,93	4,09
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	1,07	1,1	1,14	1,18	1,16	1,14	1,16	1,19
F	Konstruksi	467,04	493,43	523,91	563,17	538,03	551,9	564,75	591,04
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	288,19	303,26	320,57	338,9	349,82	368,51	387,22	407,46
H	Transportasi dan Pergudangan	119,99	127,48	135,71	146,18	148,69	146,68	154,34	161,60
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	74,6	77,86	81,79	86,48	87,21	86,55	92,51	97,56
J	Informasi dan Komunikasi	35,61	37,58	39,69	42,01	43,6	46,86	50,08	52,83
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	53,67	54,94	57,15	59,43	61,46	62,98	63,64	67,09

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
L	Real Estat	165,72	173,84	183,29	193,87	197,48	198,82	200,22	208,03
M,N	Jasa Perusahaan	1,28	1,34	1,41	1,48	1,47	1,51	1,55	1,63
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	346,7	354,43	371,21	390,1	388,03	387,21	387,67	403,09
P	Jasa Pendidikan	98,58	103,45	108,66	114,37	116,26	119,86	124,22	128,38
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	30,69	31,93	33,44	35,4	36,91	36,9	38,29	40,53
R,S, T,U	Jasa Lainnya	4,39	4,61	4,85	5,12	5,19	5,31	5,56	5,88
	Produk Domestik Regional Bruto	3 659,77	3.826,62	4.018,74	4.221,04	4.246,83	4.332,63	4.466,09	4.629,30

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka, 2016-2024 (data diolah)

Tabel 2.16

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto ADHK 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)
Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,83	4,22	4,54	3,89	1,04	1,77	3,3	2,72
B	Pertambangan dan Penggalian	6,9	6,95	5,03	5,38	2,96	4,28	3,29	3,77
C	Industri Pengolahan	4,8	4,15	3,4	3,67	0,04	3,82	1,59	3,15
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,51	6,23	6,23	6,34	6,61	5,91	4,49	3,94
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,96	3,12	3,07	3,99	-2,01	-1,32	1,35	2,89
F	Konstruksi	5,59	5,65	6,18	7,49	-4,46	2,58	2,33	4,66
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,2	5,23	5,71	5,72	3,22	5,34	5,08	5,23
H	Transportasi dan Pergudangan	6,97	6,24	6,46	7,71	1,72	-1,35	5,22	4,70
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,33	4,36	5,06	5,73	0,84	-0,75	6,88	5,47
J	Informasi dan Komunikasi	6,91	5,54	5,62	5,84	3,79	7,49	6,88	5,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,47	2,37	4,03	3,98	3,42	2,46	1,06	5,42
L	Real Estat	4,67	4,9	5,43	5,78	1,86	0,68	0,7	3,90
M,N	Jasa Perusahaan	4,87	4,88	5,03	5,16	-0,79	2,51	2,78	5,45
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2,05	2,23	4,73	5,09	-0,53	-0,21	0,12	3,98
P	Jasa Pendidikan	5,07	4,93	5,04	5,25	1,65	3,09	3,64	3,35
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,16	4,05	4,71	5,86	4,26	-0,03	3,78	5,85
R,S, T,U	Jasa Lainnya	4,91	5,05	5,12	5,55	1,54	2,15	4,78	5,74
	Produk Domestik Regional Bruto	4,41	4,56	5,02	5,03	0,61	2,02	3,08	3,65

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka, 2016-2024 (data diolah)

2.3.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per Kapita menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Nias Selatan rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai per kapita di masing-masing tahun tersebut. Pada tahun 2021 dan tahun 2022, PDRB per kapita baik ADHB maupun ADHK mengalami peningkatan dibanding tahun 2020.

Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB pada tahun 2016 adalah 7,89 persen dan mengalami peningkatan hingga pada tahun 2019 pertumbuhan berada di angka 8.95 persen. pada tahun 2021, pertumbuhan PDRB per Kapita tersebut

anjlok hingga berada di angka 2,02 persen. Hingga pada tahun 2023 pertumbuhan PDRB per Kapita ADHB mengalami kenaikan menjadi 3,65 persen.

Pertumbuhan PDRB per kapita ADHK pada tahun 2020, sempat anjlok dimana terkoreksi hingga mencapai minus 10,73 persen. Hal ini tentunya sangat berdampak terhadap perekonomian Kabupaten Nias Selatan pada saat itu. Namun, pada tahun 2021 mengalami sedikit peningkatan menjadi 0,45 persen dan terus mengalami kenaikan hingga pada tahun 2023 dengan angka pertumbuhan sebesar 1,24 Persen.

Tabel 2.17

PDRB per Kapita Kabupaten Nias Selatan ADHB dan ADHK 2010, 2016-2023 (Ribu Rupiah)

Tahun	ADH Berlaku		ADH Konstan	
	Nilai	Pertumbuhan	Nilai	Pertumbuhan
2016	16.686,38	7,89	11.763,47	3,35
2017	18.116,50	8,57	12.171,30	3,53
2018	19.694,70	8,71	12.669,10	4,09
2019	21.448,70	8,91	13.194,80	4,14
2020	19.871,43	3,55	11.779,39	-10,73
2021	20.265,92	2,02	11.832,15	0,45
2022	21.447,80	3,08	11.951,80	1,00
2023	22.415,96	3,65	12.101,51	1,24

Sumber: PDRB Kabupaten Nias Selatan Menurut Lapangan Usaha, 2016-2023 (data diolah)

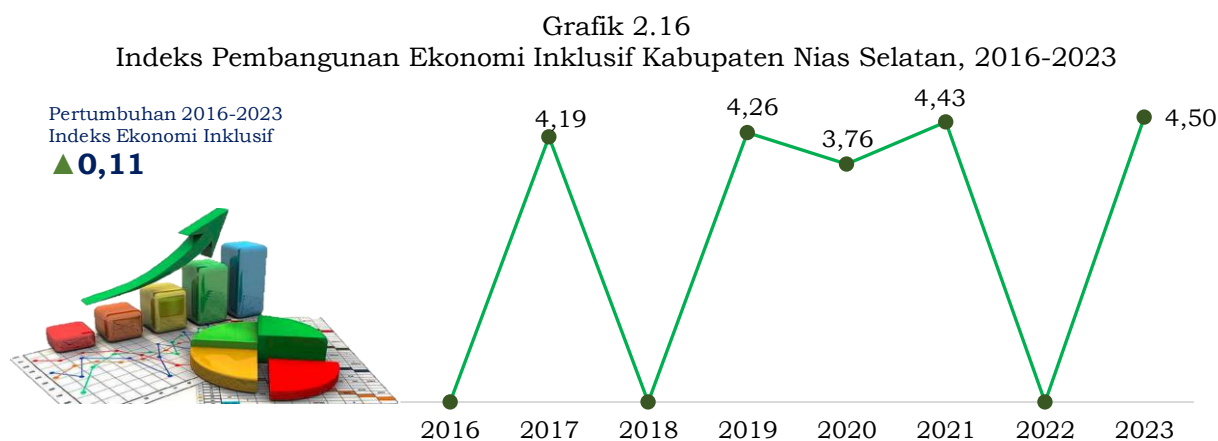
2.3.1.3 Indeks Ekonomi Inklusif

Pertumbuhan inklusif sering dimaknai sebagai pertumbuhan ekonomi yang difokuskan pada penciptaan peluang ekonomi dan dapat diakses oleh semua (Ali dan Zhuang 2007). Menurut Chakrabarty (2009), pendekatan pertumbuhan yang inklusif mengambil perspektif jangka panjang. Oleh karena itu, pertumbuhan inklusif seharusnya bersifat inheren, berkelanjutan, serta mengurangi kesenjangan antara miskin dan kaya. Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif merupakan alat untuk mengukur dan memantau sejauh mana tingkat inklusivitas pembangunan Indonesia baik pada level nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Pertumbuhan inklusif memungkinkan setiap individu untuk berkontribusi dan mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi. Strategi pencapaian pertumbuhan yang inklusif dapat dicapai melalui beberapa cara, antara lain percepatan pertumbuhan yang dibarengi dengan pemerataan pertumbuhan, menghilangkan ketimpangan dengan menjamin kesetaraan terhadap peluang, peningkatan jumlah tenaga kerja produktif, penguatan kapasitas produksi, dan juga mewujudkan sistem perlindungan sosial (*social safety nets*).

Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Kabupaten Nias Selatan tercatat 4,19 poin pada tahun 2017. Terjadi peningkatan sebesar 0,31 poin dalam periode tujuh tahun terakhir. Pertumbuhan indeks pembangunan ekonomi inklusif dari tahun 2016-2023 adalah sebesar 0,11 poin. Indeks Ekonomi Inklusif Kabupaten Nias Selatan sebesar 4,50 pada tahun 2023 masih tergolong rendah, mencerminkan ketimpangan akses dan manfaat pembangunan yang belum merata. Kondisi ini utamanya dirasakan oleh kelompok masyarakat rentan di wilayah kepulauan, pedesaan, dan daerah terpencil.

Pengaruh capaian Indeks Ekonomi Inklusif yang rendah terhadap ekonomi lokal di Kabupaten Nias Selatan terlihat dalam lambatnya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Akses terbatas terhadap infrastruktur, layanan dasar, dan peluang usaha membuat produktivitas masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan kepulauan, tetap rendah. Akibatnya, potensi ekonomi lokal, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, tidak berkembang optimal. Ketimpangan ini juga mempersempit basis konsumsi dan investasi lokal, sehingga memperlambat akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah secara keseluruhan.



Sumber: Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif Bappenas (data diolah)

2.3.1.4 Laju Inflasi

Laju Inflasi adalah persentase kenaikan harga yang pengukurannya dilakukan berdasarkan Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan harga barang atau jasa tersebut bisa menurunkan daya beli masyarakat karena nilai mata uang yang rendah tidak seimbang dengan kenaikan harga barang yang tajam.

Di Provinsi Sumatera Utara, lima kota telah rutin merilis angka inflasi, yakni Medan, Pematangsiantar, Sibolga, Padangsidempuan, dan Gunungsitoli. Namun, mulai tahun 2024, akan ada penambahan tiga kabupaten yang juga akan

merilis angka inflasi, yaitu Karo, Deli Serdang, dan Labuhan Batu. Dengan demikian, total akan ada delapan kabupaten dan kota di Sumatera Utara.

Laju inflasi Kota Gunungsitoli, yang digunakan sebagai acuan regional untuk kawasan Kepulauan Nias termasuk Kabupaten Nias Selatan, menunjukkan penurunan dari 5,74 persen menjadi 3,98 persen pada tahun 2023. Penurunan inflasi ini berpotensi mendorong penguatan konsumsi rumah tangga di Nias Selatan, mengingat struktur perekonomian daerah yang sangat bergantung pada konsumsi masyarakat. Namun demikian, mengingat karakteristik geografis Nias Selatan yang terdiri dari wilayah kepulauan dan daerah pedalaman, volatilitas harga komoditas pangan dan barang kebutuhan pokok tetap menjadi risiko yang perlu diwaspadai. Keterbatasan infrastruktur logistik, ketergantungan pada pasokan luar daerah, serta fluktuasi musiman produksi lokal dapat menyebabkan ketidakstabilan harga di tingkat konsumen, terutama di pulau-pulau kecil. Berikut Grafik Laju inflasi Kota Gunung Sitoli dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Gunung Sitoli (data diolah)

2.3.1.5 Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Kesejahteraan penduduk salah satunya dapat diukur melalui perkembangan tingkat pengeluaran. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita Kabupaten Nias Selatan cenderung meningkat dari tahun 2016-2023, namun pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 666.745 kemudian pada tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi Rp. 671.751 dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi Rp. 666.409 Pada tahun 2023. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Nias Selatan adalah Rp. 734.370. Untuk lebih jelasnya

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.18

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Pengeluaran RT	418.616	484.707	618.245	729.396	666.745	6771.751	666.409	734.370
Jumlah RT	64.864	65.505	66.091	66.653	67.725	76.585	89.104	90.292
Persentase (%)	6,45	7,4	9,35	10,94	9,84	8,77	7,48	7,48

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024 (data diolah)

2.3.1.6 Pengeluaran Konsumsi Non Pangan Perkapita (Persentase Konsumsi RT Non-Pangan)

Selain Pengeluaran Konsumsi pangan, tolak ukur lainnya dalam menentukan kesejahteraan Masyarakat adalah pengeluaran konsumsi non pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita pada tahun 2022 adalah sebesar Rp 253.573, naik sebanyak 38,49 Persen atau sekitar Rp. 28.969 di tahun 2023 yaitu sebesar Rp 282.722. Kenaikan konsumsi non-pangan sebesar 38,49% di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan adanya pergeseran pola konsumsi masyarakat dari kebutuhan primer ke kebutuhan sekunder dan tersier. Pergeseran ini menjadi indikasi positif terhadap potensi perbaikan daya beli, peningkatan standar hidup, serta pertumbuhan kelas menengah lokal. Tren ini juga mencerminkan mulai meluasnya akses masyarakat terhadap berbagai layanan, barang konsumsi, dan teknologi, seiring dengan membaiknya pendapatan rumah tangga.

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga per Kapita dan Pengeluaran Konsumsi Non Pangan per kapita Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2023 dapat terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.19

Persentase Pengeluaran Konsumsi non Pangan per Kapita di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total Pengeluaran Non Pangan	155.733	484.707	245.860	314.262	256.434	255.323	253.573	282.722
Total Pengeluaran	418.616	65.505	618.245	729.396	666.745	671.751	666.409	734.370
Persentase (%)	37,2	7,4	39,77	43,09	38,46	38	38,05	38,49

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024 (data diolah)

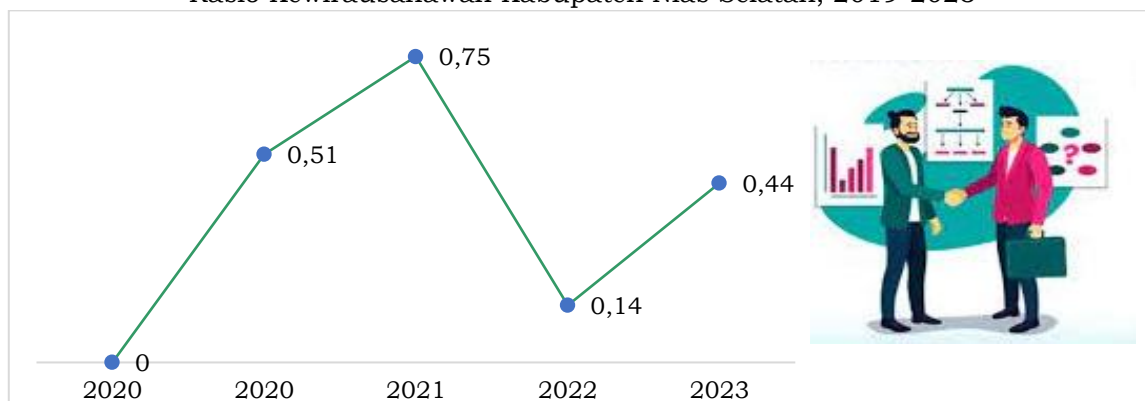
2.3.1.7 Rasio Kewirausahaan

Rasio kewirausahaan dalam pembangunan daerah merujuk pada ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kontribusi dan peran kewirausahaan dalam mendorong perkembangan ekonomi dan sosial suatu wilayah. Kewirausahaan memiliki dampak besar terhadap pembangunan daerah,

karena dapat menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong inovasi dan daya saing.

Rasio kewirausahaan di Kabupaten Nias Selatan selama periode tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi signifikan. Pada tahun 2020, rasio kewirausahaan tercatat sebesar 0,51, kemudian meningkat tajam menjadi 0,75 pada tahun 2021. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan drastis hingga 0,14, yang disebabkan oleh faktor ekonomi atau kebijakan tertentu. Pada tahun 2023, rasio kembali naik menjadi 0,44. Pola naik-turun ini mengindikasikan adanya faktor eksternal atau internal yang memengaruhi pertumbuhan kewirausahaan seperti akses permodalan, regulasi pemerintah, atau kondisi ekonomi lokal.

Grafik 2.18
Rasio Kewirausahaan Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, (data diolah)

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan.

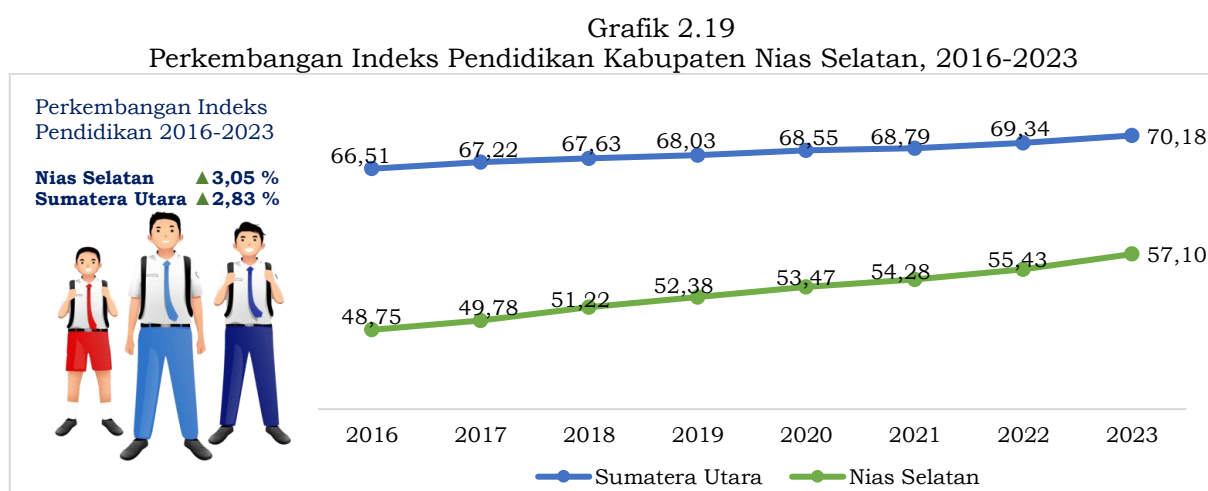
Kualitas sumber daya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumber daya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari Indeks pendidikan, indeks kesehatan, indeks pengeluaran kualitas tenaga kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja, Angka

literasi masyarakat dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan ini merupakan pencerminan hasil pembangunan di bidang Pendidikan yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas sumber daya manusia yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu daerah. Pendidikan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap indeks pembangunan manusia. Hal ini dikarenakan semakin berpendidikan seseorang maka semakin banyak pengetahuannya sehingga mereka memiliki pekerjaan yang bagus dengan tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan maka dari itu semakin banyak orang yang berpendidikan tinggi maka akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Indikator pembentuk indeks Pendidikan adalah harapan lama sekolah dan Rata-rata lama Sekolah.

Selama delapan tahun terakhir, Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan naik 3,05 poin dan Provinsi Sumatera Utara naik sebesar 2,83 poin. Artinya Peningkatan yang terjadi lebih tinggi di Kabupaten Nias Selatan dibandingkan dengan Provinsi Sumatera Utara. Walaupun sebenarnya Nilai Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan. Pada Tahun 2023 Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan adalah 57,10 poin dan Provinsi Sumatera Utara adalah 70,18 poin. Untuk lebih jelasnya berikut Grafik perkembangan Indeks Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dengan Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2023.



Sumber : Badan Pusat Statistik, (data diolah)

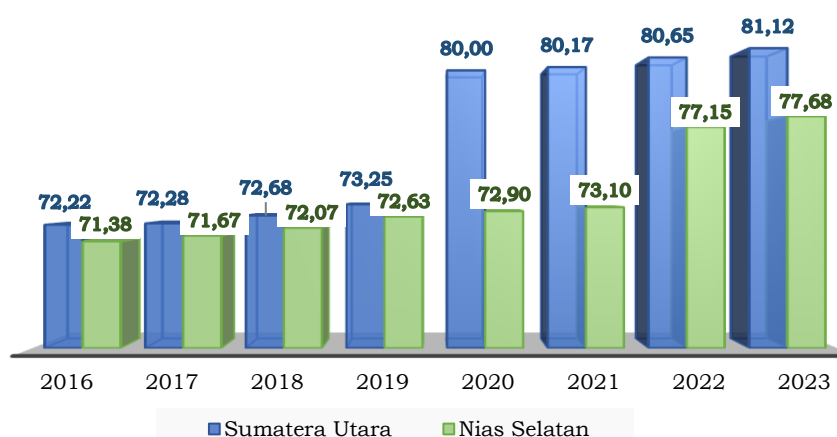
2.3.2.2 Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan adalah istilah, nilai, dan atau tingkatan sebagai variabel yang membantu untuk menganalisis atau mengukur status kesehatan atau perubahan baik langsung maupun tidak langsung. Sebagai salah satu dari tiga komposit utama Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Kesehatan diukur berdasarkan angka usia harapan hidup. Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Indeks Kesehatan Kabupaten Nias Selatan selama delapan tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Begitu juga indeks Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Pada Tahun 2016 indeks kesehatan kabupaten nias selatan adalah 71,38 poin sedangkan provinsi Sumatera Utara adalah 72,22 poin. Pada tahun 2023 Indeks Kesehatan kabupaten Nias Selatan adalah 77,68 poin sedangkan Provinsi Sumatera Utara adalah 81,12 poin. Artinya selama dari tahun 2016-2023, Indeks Kesehatan Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan sebesar 6,3 poin dan Provinsi Sumatera Utara mengalami peningkatan sebesar 8,9 poin.

Peningkatan indeks kesehatan Kabupaten Nias Selatan menjadi 77,68 poin mencerminkan membaiknya harapan hidup dan kondisi kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Implikasinya, peningkatan kondisi kesehatan ini berpotensi mendorong produktivitas tenaga kerja lokal, memperpanjang usia kerja aktif, serta meningkatkan kontribusi masyarakat terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.20
Perkembangan Indeks Kesehatan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Angka Harapan Hidup
2016 ▲ 2023

	68,33	73,67
	67,83	71,81

Sumber : Badan Pusat Statistik, (data diolah)

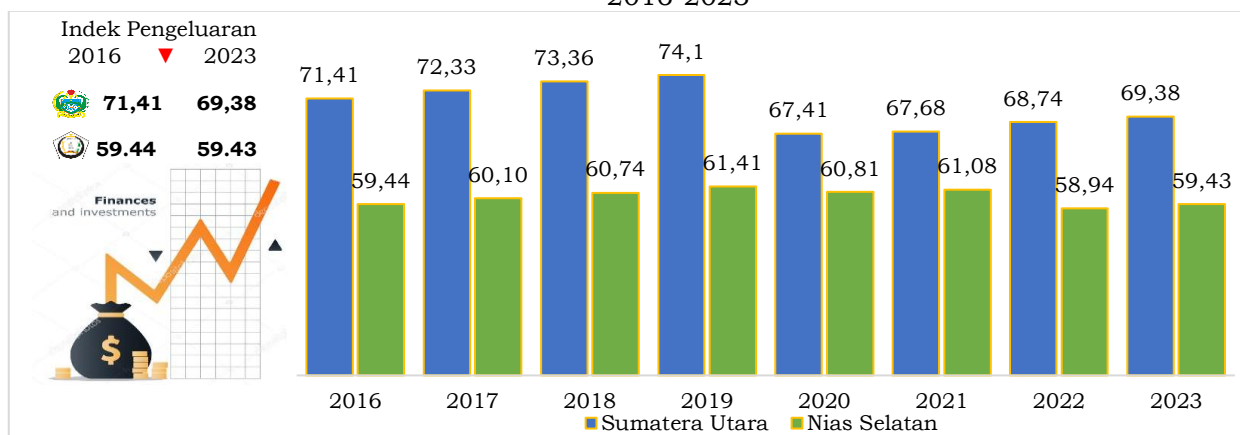
2.3.2.3 Indeks Pengeluaran

Indeks Pengeluaran atau sering disebut dengan merupakan komponen ketiga yang menjadi dasar dalam pembangunan sumber daya manusia. Angka standar hidup layak bisa menggunakan indikator GDP perkapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) atau menggunakan indikator rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan (*adjusted real per capita expenditure*).

Indeks Pengeluaran Kabupaten Nias Selatan di tahun 2023 adalah sebesar 59,43 poin atau naik 0,49 poin jika dibandingkan dengan capaian di tahun 2022 yang berada di angka 58,94 poin. Indeks pengeluaran Kabupaten Nias Selatan sedikit turun 0,01 poin jika dibandingkan dengan indeks pengeluaran di tahun 2016 yang sebesar 59,44 poin. Begitu juga dengan Indeks Pengeluaran Provinsi Sumatera Utara, naik 0,64 jika dibandingkan tahun 2022 namun turun sebanyak 2,03 poin jika dibandingkan tahun 2016.

Stagnannya indeks pengeluaran di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan bahwa peningkatan standar hidup belum merata, terutama di wilayah desa sangat tertinggal. Kondisi ini mencerminkan masih terbatasnya akses terhadap sumber-sumber ekonomi produktif, infrastruktur dasar, dan layanan publik di banyak kawasan pedesaan dan kepulauan. Ketimpangan ini memperlebar kesenjangan kesejahteraan antarwilayah, sehingga sebagian besar penduduk di daerah tertinggal belum mampu menikmati perbaikan daya beli maupun kualitas hidup yang setara dengan daerah yang lebih berkembang. Hal yang berbeda dibandingkan Provinsi Sumatera Utara. Berikut perkembangan indeks pengeluaran Kabupaten Nias Selatan dan Provinsi Sumatera Utara 2016-2023.

Grafik 2.21
Perkembangan Indeks Pengeluaran Kabupaten Nias Selatan dan Provinsi Sumatera Utara, 2016-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik, (data diolah)

2.3.2.4 Kualitas Tenaga Kerja (Rasio DIII & S1)

Masalah ketenagakerjaan dapat timbul karena beberapa faktor seperti pendidikan, kesempatan kerja maupun pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah. Hal ini dialami oleh banyak negara yang termasuk Indonesia, karena hingga saat ini masih banyak pengangguran atau lebih tepatnya lagi orang yang tidak dapat bekerja karena minimnya lapangan pekerjaan.

Selama delapan tahun terakhir lulusan tenaga kerja di Kabupaten Nias selatan terus mengalami peningkatan. Lulusan DIII di tahun 2021 adalah 22 orang. Naik sebanyak 3 orang di tahun 2022. Kemudian naik lagi sebanyak 17 orang di tahun 2023 menjadi 42 orang. Perkembangan Lulusan S1 cenderung turun jika dilihat dari tahun 2016 yang berakhir di angka 225 orang. Kemudian terus mengalami peningkatan hingga pada tahun 2023 lulusan S1 adalah sebanyak 699 orang.

Meskipun rasio lulusan pendidikan tinggi (S1) di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan peningkatan, hal ini masih belum sepenuhnya menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor-sektor strategis seperti pertanian modern dan jasa pariwisata. Sebagian besar lulusan belum memiliki kompetensi teknis spesifik yang dibutuhkan untuk mendukung transformasi ekonomi daerah. Kesenjangan antara output pendidikan dan kebutuhan pasar kerja ini menghambat upaya peningkatan produktivitas sektor unggulan lokal. Kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasi, perguruan tinggi, dan dunia industri perlu diperkuat, baik melalui program magang, kurikulum berbasis kebutuhan industri, maupun pengembangan pusat pelatihan keterampilan berbasis komunitas. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.20
Lulusan DIII dan S1 di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Lulusan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
DIII	-	-	-	-	-	22	25	42
S1	1039	737	609	225	332	583	612	699
Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531	366.163	373.674	382.539
Rasio DIII Per Jumlah Penduduk	-	-	-	-	-	0,006	0,007	0,011
Rasio S1 Per Jumlah Penduduk	33,37	23,44	19,20	7,03	9,21	15,92	16,38	18,27

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan 2024

2.3.2.5 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

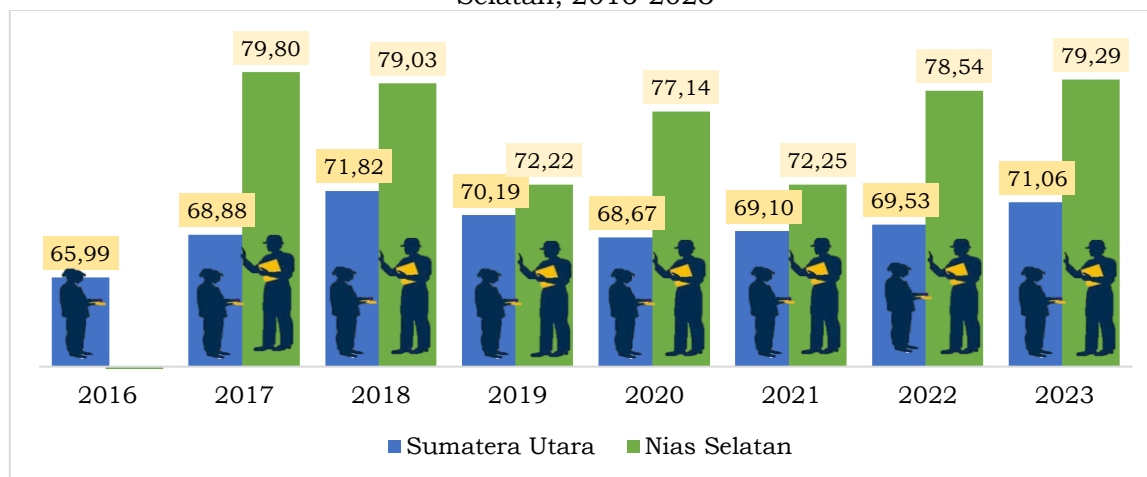
TPAK merupakan persentase penduduk usia 15 tahun keatas yang merupakan angkatan kerja. TPAK mengindikasikan besarnya persentase

penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu daerah. Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2023 tercatat sebesar 79,29 Persen, kondisi ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan kondisi pada tahun 2022 yaitu sebesar 78,54. Peningkatan yang terjadi adalah sebesar 0,75 Persen. Untuk Provinsi Sumatera Utara, tingkat partisipasi angkatan kerja di tahun 2023 adalah 71,06 persen, dimana angka ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2022 yang berada di angka 69,53 persen yaitu sebesar 1,53 persen. Berikut grafik perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan 2016-2023.

Grafik 2.22

Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan (data diolah)

2.3.2.6 Angka Literasi Masyarakat

Untuk mengukur angka literasi masyarakat, indikator yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/ kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

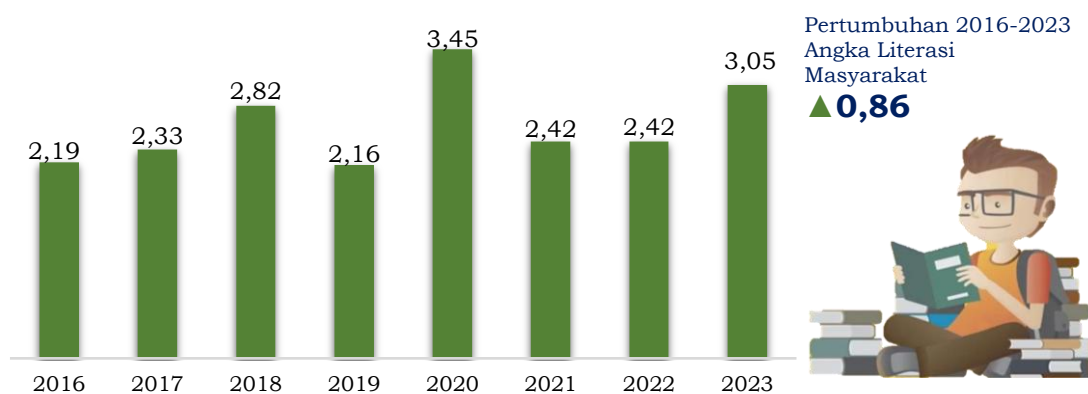
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan masih tergolong rendah. Hal ini dikarenakan di beberapa unsur pembangunan literasi masyarakat yang telah disebutkan di atas, tidak terdata sehingga nilai yang

diperoleh adalah nol. Seperti Partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosialisasi yang memang belum pernah dilakukan, ketercukupan tenaga perpustakaan dan juga perpustakaan-perpusatakaan di Kabupaten Nias Selatan yang belum bersertifikat SNP.

Di tahun 2016, perkembangan angka literasi masyarakat kabupaten nias Selatan bersifat fluktuatif dengan capaian di tahun 2016 adalah 2,19. Angka terendah yang dicapai selama periode delapan tahun terakhir adalah 2,16. Penurunan ini terjadi dikarenakan jumlah koleksi buku yang berkurang. Namun melesat tinggi hingga ke angka 3,45 pada tahun berikutnya yaitu tahun 2020. Penurunan terjadi lagi di tahun 2021 dengan capaian 2,42. Angka ini juga bertahan di tahun 2022. Angka Literasi masyarakat Nias Selatan Tahun 2023 adalah 3,05.

Indeks literasi masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang masih tergolong rendah menunjukkan perlunya upaya serius dalam penguatan literasi, khususnya literasi digital dan literasi finansial. Peningkatan kapasitas literasi ini menjadi kunci untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tantangan ekonomi berbasis informasi dan teknologi. Rendahnya literasi digital membatasi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi baru, seperti *e-commerce*, layanan keuangan digital, serta inovasi sektor pariwisata dan pertanian berbasis teknologi. Berikut Perkembangan Angka Literasi Masyarakat Kabupaten Nias Selatan.

Grafik 2.23
Perkembangan Angka Literasi Masyarakat Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



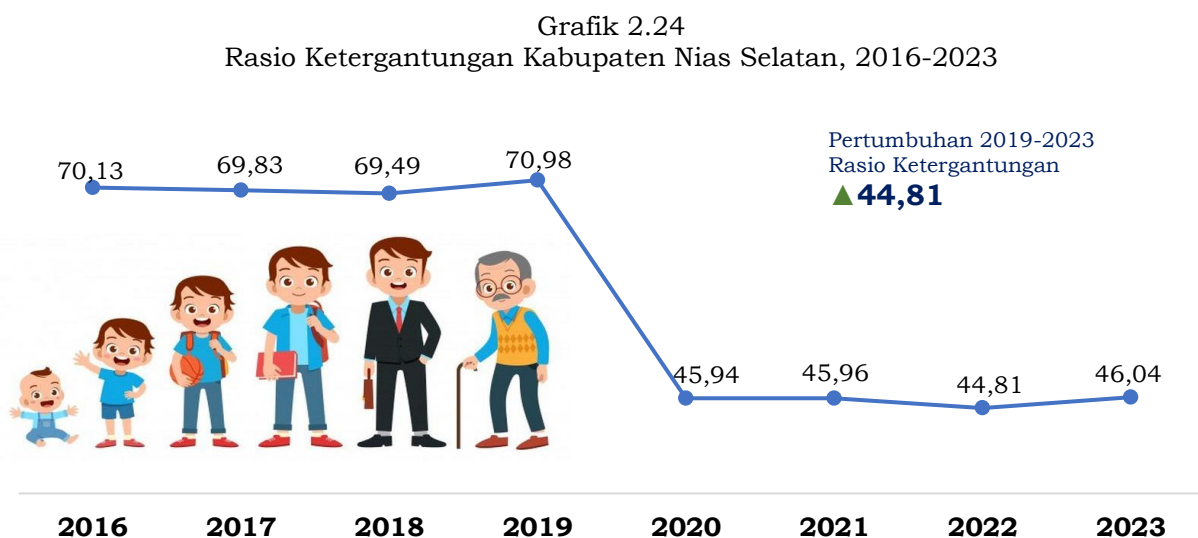
Sumber : Dinas Perpustakaan kabupaten Nias Selatan 2024, (data diolah)

2.3.2.7 Rasio Ketergantungan

Rasio Ketergantungan atau Rasio Beban Tanggungan adalah angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk usia non produktif (penduduk usia dibawah 15 tahun/penduduk muda dan penduduk usia 65 tahun

atau lebih/penduduk tua) dengan banyaknya penduduk usia produktif (penduduk usia 15 sampai 64 tahun). Rasio ketergantungan menunjukkan beban yang harus ditanggung oleh penduduk usia produktif terhadap penduduk usia non produktif. Semakin tinggi persentase rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Sebaliknya, jika semakin rendah persentase rasio ketergantungan, maka semakin rendah pula beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non produktif.

Rasio ketergantungan Kabupaten Nias Selatan tahun 2016 sebesar 70,13 persen. Pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 45,94 persen. artinya ada sekitar 45-46 per 100 orang usia non-produktif di Kabupaten Nias Selatan bergantung kepada mereka yang berusia produktif. Selanjutnya rasio ketergantungan yang diperoleh di tahun 2021 hampir sama dengan tahun 2022, yaitu sebesar 45,96 dengan selisih 0,02. Namun di tahun 2022, rasio ketergantungan kembali turun ke angka 44,81 dan meningkat kembali ke angka 46,04 di tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada grafik dibawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, 2024 (data diolah)

2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah

Infrastruktur adalah bagian dari prasarana atau fasilitas yang dibutuhkan publik guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan sosial. Terutama dalam meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Contoh keberadaan infrastruktur

adalah adanya jalan tol, tempat kumuh yang menjadi tempat wisata, bendungan baru, fasilitas kesehatan baru, dan masih banyak lagi.

Melalui pembangunan infrastruktur yang terpadu diharapkan dapat meningkatkan daya saing, menjamin keadilan sosial, dan memperkuat persatuan nasional.

2.3.3.1 Indeks Infrastruktur

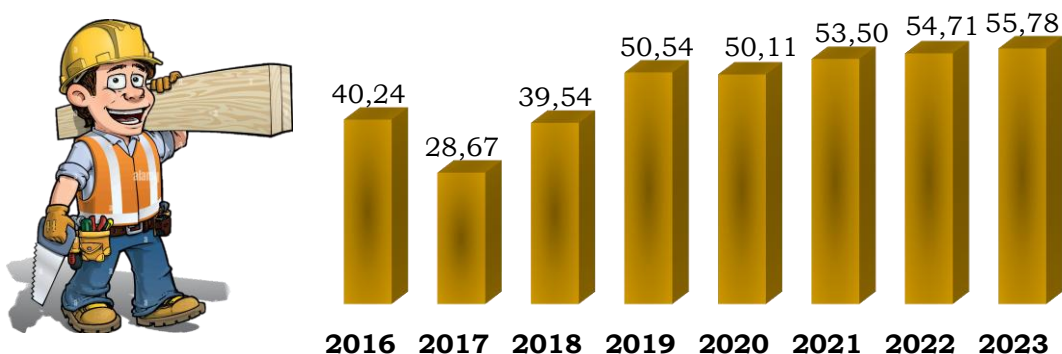
Indeks infrastruktur merupakan salah satu komponen *City Development Index (CDI)* yang menilai kinerja kota berdasarkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada fasilitas-fasilitas mendasar ini.

Indeks infrastruktur didapatkan dengan cara menjumlahkan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada air bersih, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada sanitasi, persentase rumah tangga yang memiliki akses pada listrik dan persentase rumah tangga yang memiliki akses pada telepon.

Indeks Infrastruktur Kabupaten Nias Selatan selama delapan tahun terakhir mengalami peningkatan. Di tahun 2016, Indeks Infrastruktur Kabupaten Nias Selatan adalah 40,24 poin. Turun menjadi 28,67 poin di tahun berikutnya. Kemudian perlahan naik kembali hingga pada tahun 2023 indeks infrastruktur kabupaten nias selatan berada di angka 55,78 poin.

Meskipun ada peningkatan di beberapa area, masih terdapat ketimpangan akses terhadap infrastruktur dasar di daerah-daerah terpencil. Hal ini terlihat dari rendahnya akses terhadap air bersih, sanitasi yang layak, dan layanan internet di beberapa kecamatan, khususnya di pulau-pulau kecil dan daerah pedalaman. Keterbatasan infrastruktur ini menghambat peningkatan kualitas hidup masyarakat, mengurangi efektivitas sektor pendidikan dan kesehatan, serta membatasi akses masyarakat terhadap peluang ekonomi baru.

Grafik 2.25
Indeks Infrastruktur Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2024 (data diolah)

2.3.3.2 Jenis dan jumlah bank dan cabang

Fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat serta bertujuan untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, kearah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Ada beberapa kantor bank di Kabupaten Nias Selatan. Bank-bank tersebut adalah Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (BPDSU). Berikut adalah jumlah Kantor Bank menurut Kelompok yang ada di Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2.21
Jumlah Kantor Bank Menurut Kelompok Bank di Kabupaten Nias Selatan, 2023

Kelompok Bank	Kantor Pusat	Kantor Cabang	Kantor Cabang Pembantu	Kantor Kas	Jumlah
Bank Persero	-	-	5	-	5
Bank Pembangunan Daerah	-	1	1	1	3
Bank Swasta	-	-	-	-	0
Bank Umum Syariah	-	-	-	-	0
Nias Selatan	0	1	6	1	8

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2024

2.3.3.3 Jenis, Kelas, dan Jumlah Restoran

Perkembangan jumlah restoran yang ada di Kabupaten Nias Selatan menurut Kecamatan dapat dilihat pada tabel sebagaimana dibawah ini:

Tabel 2.22
Perkembangan Jumlah Restoran di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
1	Hibala	-	-	-	-	-
2	Tanah Masa	-	-	-	-	-
3	Pulau-Pulau Batu	2	5	14	14	14
4	Pulau-Pulau Batu Timur	-	-	-	-	-
5	Simuk	-	-	-	-	-
6	Pulau-Pulau Batu Barat	-	-	-	-	-
7	Pulau-Pulau Batu Utara	-	-	-	-	-
8	Telukdalam	16	47	72	69	69
9	Fanayama	4	-	2	2	2
10	Toma	2	-	2	2	2
11	Maniamolo	-	-	-	-	-
12	Mazino	-	-	-	-	-
13	Luahagundre Maniamolo	1	-	8	8	8
14	Onolalu	-	-	-	-	-
15	Amandraya	-	-	1	1	1
16	Aramo	-	-	-	-	-
17	Ulususua	-	-	-	-	-
18	Lahusa	-	1	5	5	5
19	Sidua'ori	-	-	-	-	-

No.	Kecamatan	2019	2020	2021	2022	2023
20	Somambawa	-	-	1	1	1
21	Gomo	-	-	3	3	3
22	Susua	1	-	-	-	-
23	Mazo	-	-	-	-	-
24	Umbunasi	-	-	-	-	-
25	Idanotae	-	-	-	-	-
26	Uluidanotae	-	-	-	-	-
27	Boronadu	-	-	-	-	-
28	Lolomatua	1	1	1	1	1
29	Ulunoyo	-	-	-	-	-
30	Huruna	2	-	-	-	-
31	Lolowau	-	-	2	2	2
32	Hilimegai	-	-	-	-	-
33	O'ou	-	-	-	-	-
34	Onohazumba	-	-	-	-	-
35	Hilisalawa'ahe	-	-	-	-	-
	Nias Selatan	29	54	111	108	108

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2024

2.3.3.4 Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/hotel

Sebaran infrastruktur ekonomi, seperti restoran dan penginapan, masih terkonsentrasi di kawasan Telukdalam dan Luahagundre Maniamolo, yang merupakan dua wilayah utama dengan aktivitas pariwisata yang lebih berkembang. Sementara itu, wilayah potensial lainnya di Kabupaten Nias Selatan, terutama di daerah pesisir dan pedalaman, belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam pengembangan infrastruktur ekonomi. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam pengembangan ekosistem ekonomi lokal, membatasi peluang usaha, dan menghambat pemerataan manfaat pariwisata serta sektor lainnya jumlah hotel dan akomodasi lainnya yang ada di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.23
Jumlah Hotel dan Penginapan Lainnya di Kabupaten Nias Selatan, 2023

No	Kecamatan	Hotel dan Akomodasi Lainnya	Kamar	Tempat Tidur
1	Hibala	-	-	-
2	Tanah Masa	-	-	-
3	Pulau-Pulau Batu	17	132	146
4	Pulau-Pulau Batu Timur	-	-	-
5	Simuk	-	-	-
6	Pulau-Pulau Batu Barat	-	-	-
7	Pulau-Pulau Batu Utara	-	-	-
8	Telukdalam	15	217	354
9	Fanayama	2	14	14
10	Toma	-	-	-
11	Maniamolo	1	5	8

No	Kecamatan	Hotel dan Akomodasi Lainnya	Kamar	Tempat Tidur
12	Mazino	-	-	-
13	Luahagundre Maniamolo	30	161	205
14	Onolalu	-	-	-
15	Amandraya	-	-	-
16	Aramo	-	-	-
17	Ulususua	-	-	-
18	Lahusa	-	-	-
19	Sidua'ori	-	-	-
20	Somambawa	-	-	-
21	Gomo	3	10	10
22	Susua	-	-	-
23	Mazo	-	-	-
24	Umbunasi	-	-	-
25	Idanotae	-	-	-
26	Uluidanotae	-	-	-
27	Boronadu	-	-	-
28	Lolomatua	-	-	-
29	Uluoyo	-	-	-
30	Huruna	-	-	-
31	Lolowau	-	-	-
32	Hilimegai	-	-	-
33	O'ou	-	-	-
34	Onohazumba	-	-	-
35	Hilisalawa'ahe	-	-	-
	Nias Selatan	68	539	737

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kab. Nias Selatan 2024

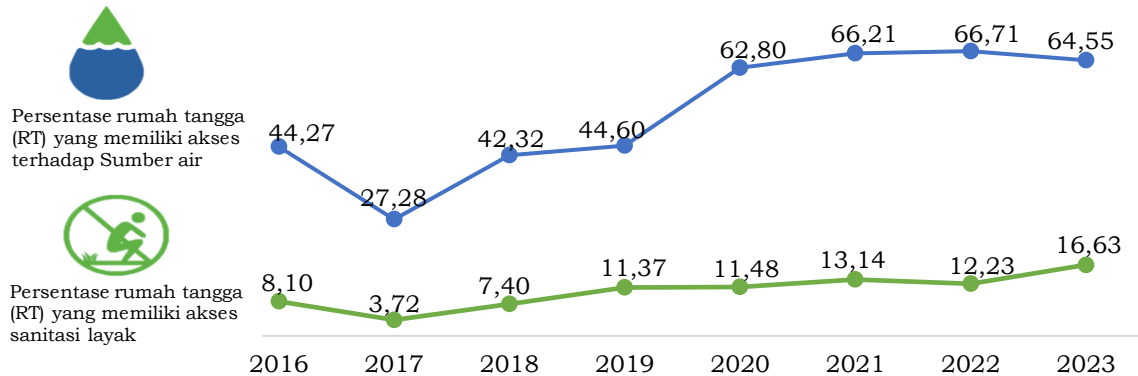
2.3.3.5 Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak

Akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua merupakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) Tujuan 6. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tujuan 6 menargetkan jaminan ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua pada akhir tahun 2030.

Masih banyak masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang belum memiliki akses air minum dan sanitasi yang layak. Padahal, keduanya penting untuk kelangsungan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan terus berupaya untuk meningkatkan persentase Rumah Tangga Yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum Layak maupun Sanitasi layak. Berikut ini merupakan data-data terkait Persentase

Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak:

Grafik 2.26
Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum dan Sanitasi Layak di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2024

Grafik di atas menunjukkan bahwa akses terhadap sumber air minum layak mengalami fluktuasi, dengan penurunan tajam pada tahun 2017 menjadi 27,28 persen, sebelum meningkat secara signifikan hingga mencapai 66,71 persen pada tahun 2022. Meskipun demikian, angka ini mengalami sedikit penurunan menjadi 64,55 persen pada tahun 2023. Sementara itu, akses terhadap sanitasi layak mengalami peningkatan bertahap, dari 8,10 persen pada tahun 2016 menjadi 16,63 persen pada tahun 2023. Namun, pertumbuhan akses sanitasi layak terjadi lebih lambat dibandingkan dengan peningkatan akses terhadap sumber air minum layak.

Secara keseluruhan, akses air minum layak mengalami kemajuan pesat, sementara akses sanitasi layak masih relatif rendah, menunjukkan perlunya upaya lebih lanjut dalam penyediaan fasilitas sanitasi yang lebih baik.

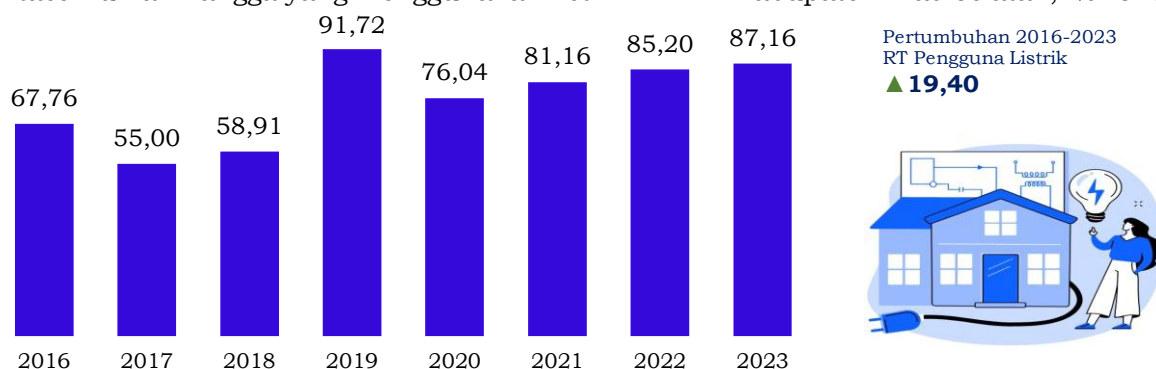
2.3.3.6 Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), sumber penerangan utama rumah tangga di Kabupaten Nias Selatan yang menggunakan listrik PLN pada tahun 2023 mencapai 87,16 persen, mengalami kenaikan sebesar 1,96 persen dibandingkan tahun 2022.

Jika melihat kembali ke tahun 2016, persentase pengguna listrik berada di angka 67,76 persen, sehingga terjadi peningkatan sebesar 19,40 persen hingga tahun 2023. Namun, tren pengguna listrik sempat mengalami fluktuasi, dengan peningkatan signifikan pada 2019 hingga mencapai 91,72 persen, sebelum

kembali turun ke 76,04 persen pada tahun 2020. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.27
Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik PLN Di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik (data diolah)

2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

Tingkat daya saing investasi menjadi salah satu parameter yang memperlihatkan iklim investasi suatu daerah. Semakin tinggi tingkat daya saing suatu daerah, maka semakin kondusif pula iklim investasi yang tercipta yang pada akhirnya akan mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, memperbaiki iklim investasi merupakan suatu tugas yang penting bagi setiap pemerintahan.

2.3.4.1 Indeks Daya Saing Daerah

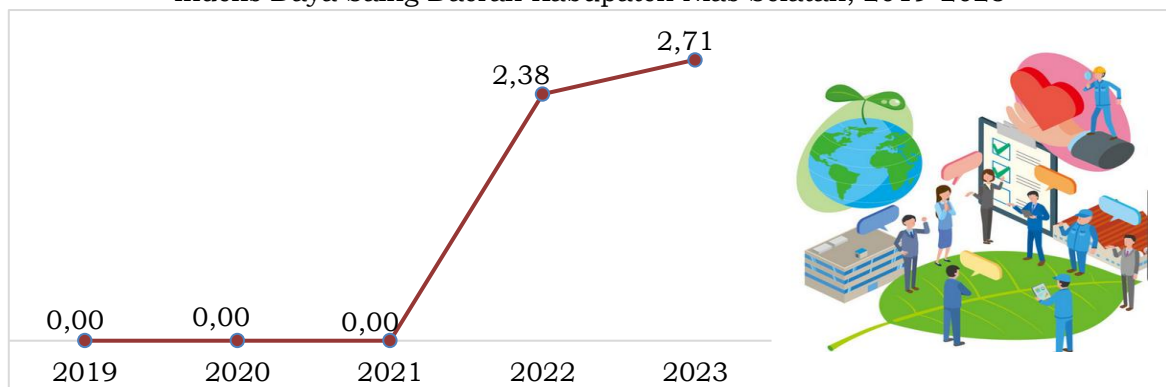
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) merupakan instrumen pengukuran daya saing pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk dapat merefleksikan tingkat produktivitas daerah. IDSD juga dapat menggambarkan tingkat produktivitas, perkembangan, persaingan, dan kemandirian suatu daerah.

IDSD menggunakan empat aspek utama, yaitu: Lingkungan penguat, Sumber daya manusia, Pasar, Ekosistem inovasi. IDSD juga memiliki 12 pilar, yaitu: Kelembagaan, Infrastruktur, Perekonomian Daerah, Kesehatan, Pendidikan, Efisiensi Pasar Produk, Ketenagakerjaan, Akses Keuangan, Ukuran Pasar, Adopsi Teknologi, Dinamika Bisnis, Kapasitas Inovasi.

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan signifikan dalam periode 2019-2023. Pada tahun 2019-2021, nilai indeks daya saing masih 0,00, yang mengindikasikan belum adanya pencatatan dan belum terpenuhinya indikator daya saing daerah. Namun, pada tahun 2022, terjadi lonjakan tajam ke angka 2,38, menandakan adanya perbaikan dalam berbagai aspek yang mendukung daya saing daerah, seperti infrastruktur,

ekonomi, sumber daya manusia, dan inovasi. Tren positif ini terus berlanjut dengan peningkatan indeks menjadi 2,71 pada tahun 2023. Peningkatan tersebut mencerminkan adanya upaya yang lebih sistematis dalam meningkatkan daya saing daerah, baik melalui kebijakan pembangunan, peningkatan kualitas layanan publik, maupun kolaborasi dengan berbagai pihak. Namun, meskipun mengalami pertumbuhan, indeks daya saing ini masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju, sehingga diperlukan strategi berkelanjutan untuk mempercepat peningkatan daya saing Kabupaten Nias Selatan di masa mendatang.

Grafik 2.28
Indeks Daya Saing Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023



Sumber : Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) (data diolah)

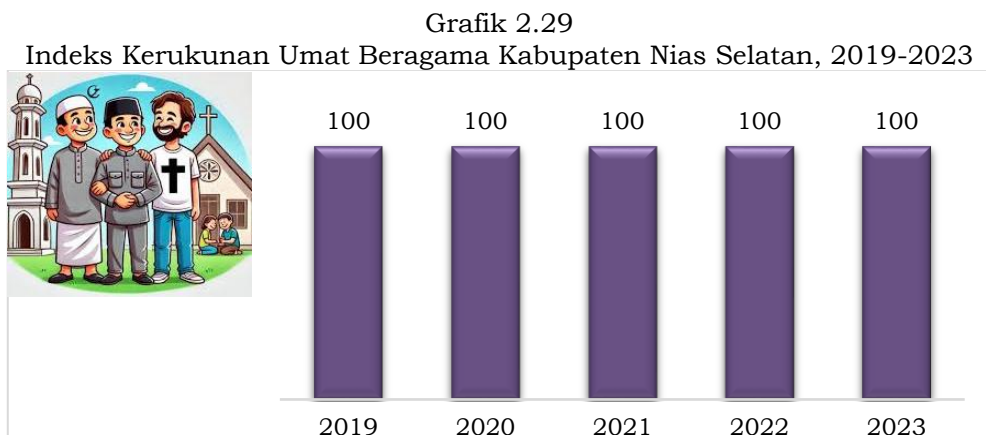
2.3.4.2 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) adalah indikator yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kerukunan umat beragama di suatu wilayah. IKUB digunakan sebagai tolak ukur untuk mengukur capaian program-program kerukunan. Indeks Kerukunan Umat Beragama memiliki tiga dimensi utama yakni: toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Indeks Kerukunan Umat Beragama terdiri dari tiga dimensi utama, yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja sama. Di Kabupaten Nias Selatan, kerukunan umat beragama telah terjalin dengan baik, tercermin dalam sikap saling menghargai, menghormati, dan bekerja sama dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini terlihat dari pelaksanaan peringatan hari besar keagamaan yang berlangsung khidmat serta adanya partisipasi lintas agama dalam berbagai kegiatan sosial dan budaya.

Selain itu, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan telah membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah strategis untuk memperkuat

dialog antarumat beragama, menyelesaikan potensi konflik secara damai, serta mendorong harmoni sosial. Dengan adanya FKUB dan komitmen bersama, kerukunan umat beragama di daerah ini terus dipelihara, menciptakan lingkungan yang damai, inklusif, dan kondusif bagi pembangunan daerah.



Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.3.4.3 Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas sangat mempengaruhi iklim berinvestasi disuatu daerah, semakin rendahnya jumlah angka kriminalitas disuatu daerah, maka akan memberikan dampak rasa aman kepada investor dalam maupun luar daerah untuk berinvestasi.

Crime rate merupakan angka yang dapat menunjukkan tingkat kerawanan suatu kejahatan pada suatu kota tertentu dalam waktu tertentu. Semakin tinggi angka *crime rate*, maka tingkat kerawanan akan kejahatan suatu daerah semakin tinggi pula.

Pada tahun 2022, tercatat angka kriminal yang dilaporkan adalah 354 kasus, dimana yang terselesaikan adalah sebanyak 167 kasus. Dengan jumlah penduduk nias selatan sebanyak 373.674 orang, maka *crime rate* Kabupaten Nias Selatan berada di angka 9,47. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan di tahun 2021 yang berada di angka 8,27. Berikut Perkembangan angka kriminal di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2019-2023.

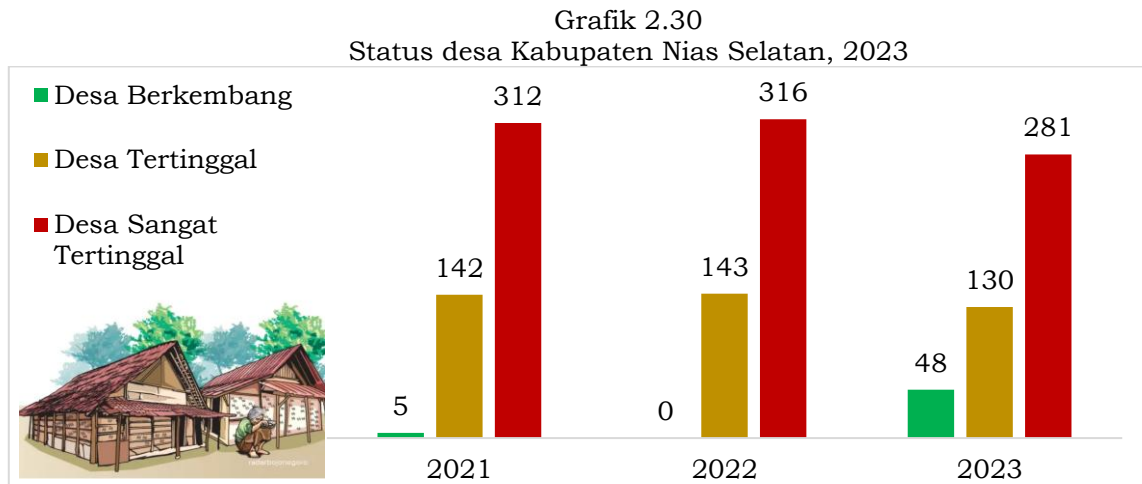
Tabel 2.24
Perkembangan Angka Kriminal yang tertangani di Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023

Indikator	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah tindak kriminal yang dilaporkan	322	-	303	354	-
Jumlah tindak kriminal yang diselesaikan	254	-	185	167	-
Jumlah Penduduk	319.902	360.531	366.163	373.674	382.539
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana	78,88		61,06	47,18	-
<i>Crime Rate</i> (per 10.000 Penduduk)	10,07	-	8,28	9,47	-

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2023

2.3.4.4 Persentase Desa Mandiri

Jumlah desa di Kabupaten Nias Selatan tercatat sebanyak 459 desa, di mana 312 desa masih berstatus "Desa Sangat Tertinggal", 142 desa berstatus "Tertinggal", dan hanya 48 desa berstatus "Desa Berkembang". Data ini diperoleh dari Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2023 yang dirilis oleh Kementerian Desa PDTT. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Nias Selatan sebagai kabupaten dengan jumlah desa sangat tertinggal terbanyak di Provinsi Sumatera Utara.



Sumber : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2023

Dengan banyaknya status desa sangat tertinggal, hal ini juga menandakan bahwa Kabupaten Nias Selatan tidak memiliki desa yang berstatus mandiri.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan umum merupakan wujud nyata dari tanggung jawab konstitusional pemerintah daerah untuk memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelayanan umum merupakan salah satu fungsi dasar pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik yang berkualitas dan merata. Pelayanan ini harus diselenggarakan melalui sistem tata kelola pemerintahan yang efisien, responsif, transparan, dan akuntabel. Kualitas pelayanan publik tidak hanya mencerminkan kinerja pemerintah daerah, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam memperkuat kepercayaan masyarakat, mendorong partisipasi publik, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 4 (empat) kategori urusan yang diselenggarakan di Pemerintah Daerah yaitu urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib non

pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan penunjang. Berikut gambaran pelayanan umum di Kabupaten Nias Selatan.

2.4.1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pasal 3 disebutkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar terdiri atas beberapa urusan yaitu: Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum dan Penataan ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan Sosial.

Keenam pelayanan dasar tersebut diatas merupakan hal wajib yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen perencanaan sebagai bentuk upaya penerapan SPM yang baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Capaian Pembangunan dalam urusan pelayanan wajib pelayanan dasar meningkat di beberapa unsur pelayanan seperti Pendidikan, Kesehatan dan sosial. Hal ini terlihat dari meningkatnya angka harapan dan rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup dan berkurangnya urusan sosial yang tertangani pada tahun sebelumnya. Untuk urusan infrastruktur baik itu PUPR dan PRKP mengalami penurunan, dimana Panjang jalan yang tertangani semakin sedikit dan tingkat jalan rusak berat bertambah, begitu juga urusan PRKP mengalami penurunan dalam hal rasio kawasan kumuh, walaupun jumlah rumah layak huni yang tertangani meningkat.

2.4.1.1 Pendidikan

Strategi pembangunan pendidikan dijabarkan melalui empat sendi pokok yaitu pemerataan kesempatan, relevansi pendidikan dengan pembangunan, kualitas pendidikan dan efisiensi pengelolaan. Pemerataan kesempatan pendidikan diupayakan melalui penyediaan sarana dan prasarana belajar seperti gudang sekolah baru dan penambahan tenaga pengajar mulai dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.

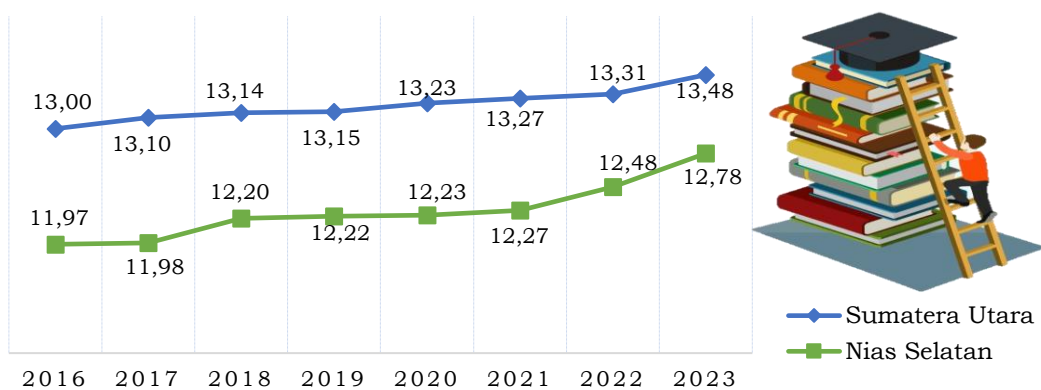
2.4.1.1.1 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah perjumlah penduduk

untuk umur yang sama saat ini. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas. Harapan Lama Sekolah (HLS) digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Tingkat Harapan Lama Sekolah Kabupaten Nias Selatan terus mengalami peningkatan. Dari yang semula berada di angka 11,97 persen pada tahun 2016, di tahun 2023 naik menjadi 12,78 persen. Artinya terjadi pertumbuhan sebesar 0,81 persen selama delapan tahun terakhir. Begitu Juga dengan harapan lama sekolah provinsi sumatera utara. Pada tahun 2023 tingkat harapan lama sekolah provinsi sumatera utara adalah 13,48. Angka ini meningkat sebesar 0,48 persen jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Grafik 2.31
Perkembangan Tingkat Harapan Lama Sekolah(HLS) Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



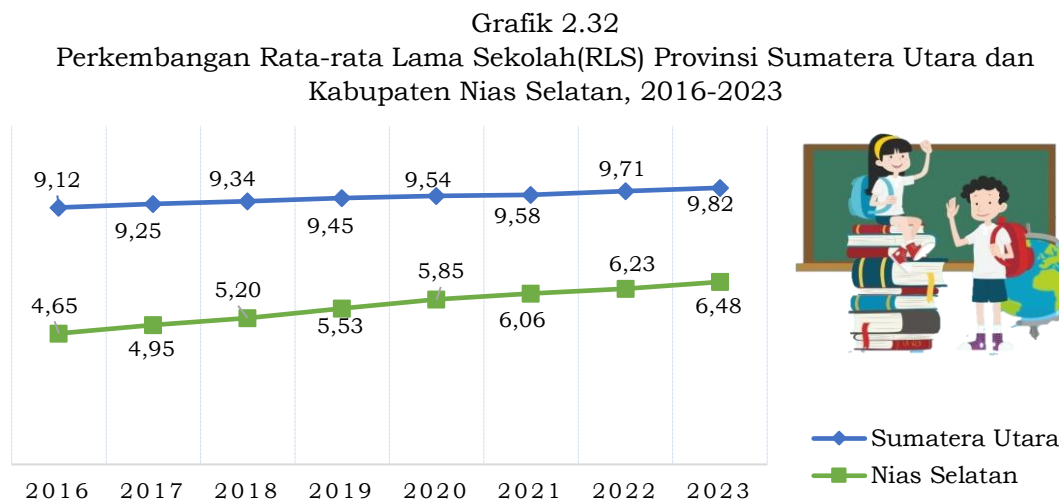
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

2.4.1.1.2 Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah adalah Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan yang pernah dijalani. Untuk mereka yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SM diperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak. Rata-rata lama sekolah menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia

Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Nias Selatan yang juga terus mengalami peningkatan. Dimana pada tahun 2016 adalah sebesar 4,65 persen, di

tahun 2023 naik menjadi 6,48 persen. Sedangkan Rata-rata lama sekolah provinsi sumatera utara berada di angka 9,12 persen di tahun 2016. Kemudian meningkat 0,7 persen di tahun 2023 sehingga Rata – rata lama sekolah provinsi sumatera utara adalah 9,82 persen.



— Sumatera Utara
— Nias Selatan

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara

2.4.1.1.3 Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan perbandingan antara jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Perhitungan APK yaitu jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu dibagi jumlah penduduk kelompok usia sekolah dikali 100%. Makin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan atau semakin banyak anak usia di luar kelompok usia sekolah tertentu bersekolah ditingkat pendidikan tertentu

APK adalah perbandingan antara siswa pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah dan dinyatakan dalam persentase. Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dari Tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.25
Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan,
2016-2023

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	109,34	105,07	105,47	109,39	111,59	108,6	90,78	109,70
2	SMP/MTs	82,98	83,05	78,07	85,25	80,78	87,05	82,78	95,08
3	SMA/SMK/MA	73,67	77,68	98,41	87,81	85,29	87,19	86,62	85,74
4	Perguruan Tinggi	12,18	15,46	15,25	16,7	16,5	16,65	23,89	27,59

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, 2024 (data diolah)

2.4.1.1.4 Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan antara jumlah penduduk kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai. Semakin tinggi APM maka menunjukkan semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang tertentu. Angka Partisipasi Murni (APM) menurut jenjang pendidikan di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.26

Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No.	Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM)							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI	95,83	95,55	96,02	95,91	96,08	96,04	77,9	94,24
2	SMP/MTs	74,1	72,27	69,16	70,74	70,44	71,59	65,79	75,22
3	SMA/SMK/MA	57,92	61,43	64,92	66,73	66,63	66,6	66,62	56,94
4	Perguruan Tinggi	8,8	11,01	11,33	10,86	14,27	13,7	22,72	15,08

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Nias Selatan, 2024 (data diolah)

2.4.1.1.5 Rasio Guru terhadap Murid

Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Selain itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran per kelas. Perhitungan Rasio guru terhadap murid dilakukan dengan membagi jumlah guru dengan jumlah murid dikali dengan 10.000 jumlah penduduk. Rasio guru terhadap murid di Kabupaten Nias Selatan masih jauh dari kata ideal. Pada tahun 2016 rasio guru terhadap murid adalah 698,46 sedangkan di tahun 2023 rasio guru terhadap murid tercatat 1130,55. Rasio guru terhadap murid dari tahun 2016-2023 dapat dilihat sebagaimana data yang terdapat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.27

Rasio Jumlah Guru dan Murid jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2024

No	Jenjang Pendidikan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	SD/MI								
	Jumlah Guru SD	3.681	3.379	3.204	3.659	4.058	3.824	6.203	4.274
	Jumlah Murid SD	55.071	49.585	47.502	45.561	42.754	40.142	40.142	38.764
2	SMP/MTs								
	Jumlah Guru SMP	1.830	1.546	1.475	1.689	2.204	1.908	3.556	2.265
	Jumlah Murid SMP	23.831	20.911	20.136	21.713	21.412	20.843	20.843	19.075
	Jumlah Guru (SD/MI+SMP/MTs)	5.511	5.511	4.925	4.679	5.348	5.732	9.759	6.539
	Jumlah Murid (SD.MI+SMP/MTS)	78.902	78.902	70.496	67.638	67.274	60.985	60.985	57.839
	Rasio Guru (SD/MI+SMP/MTs) Per Murid Per 10.000 penduduk	698,46	698,46	698,62	691,77	794,96	939,90	1600,23	1130,55

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.1.2 Kesehatan

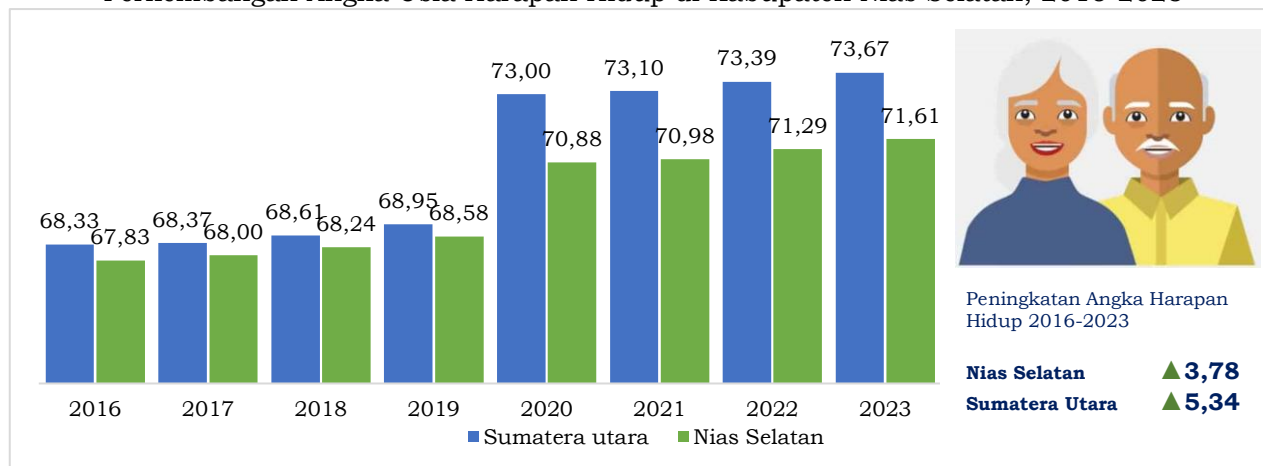
Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Pembangunan Kesehatan tersebut merupakan upaya seluruh potensi bangsa Indonesia, baik masyarakat, swasta maupun pemerintah.

2.4.1.2.1 Angka Harapan Hidup

Sumber daya manusia mencakup aspek fisik dan nonfisik yang saling berkaitan. Kualitas fisik penduduk tercermin dari derajat kesehatannya, yang salah satu indikator utamanya adalah angka harapan hidup saat lahir. Angka ini mencerminkan kondisi sistem kesehatan secara keseluruhan. Kebijakan peningkatan kesehatan bertujuan untuk menaikkan angka harapan hidup, yang menunjukkan tingginya derajat kesehatan masyarakat.

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah perkiraan rata-rata tambahan umur seseorang yang diharapkan dapat terus hidup. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 adalah 69,58 tahun lebih tinggi bila dibandingkan pada tahun 2022 yaitu 69,21 tahun dan meningkat sebesar 3,78 tahun selama delapan tahun terakhir. Sedangkan Usia Harapan Hidup Provinsi Sumatera Utara di tahun 2023 adalah 73,67 tahun lebih tinggi jika dibandingkan tahun 2022 yaitu 73,39 tahun dan meningkat sebesar 5,34 selama delapan tahun terakhir. Berikut grafik perkembangan angka usian harapan hidup Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2023.

Grafik 2.33
Perkembangan Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber: Sumatera Utara Dalam Angka, 2024

2.4.1.2.2 Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan (faskes) adalah salah satu fasilitas publik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Fungsinya sebagai tempat perawatan kesehatan membuat fasilitas publik yang satu ini sangat penting keberadaannya di setiap wilayah.

Peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat ditunjang oleh fasilitas kesehatan hal ini terwujud apabila adanya dukungan pemerintah dan swasta. Pada tahun 2022 telah selesai dibangun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Nias Selatan di Desa Hilianaa Kecamatan Teluk Dalam. Kemudian terdapat Rumah Sakit Lukas di Kecamatan Maniamolo yang merupakan rumah sakit milik pemerintah daerah dan Rumah Sakit Stella Maris yang merupakan rumah sakit milik Swasta di Kecamatan Teluk Dalam. Sehingga Jumlah Rumah Sakit di kabupaten Selatan pada tahun 2023 ada sebanyak 3 Unit Jumlah Puskesmas di Kabupaten Nias Selatan masih sama yaitu sebanyak 36 unit dan Jumlah Puskesmas Pembantu ada sebanyak 66 Unit. Berikut Jumlah Fasilitas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan beserta dengan Rasionya.

Tabel 2.28
Rasio Jumlah Fasilitas Kesehatan Berbanding Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Sakit	1	1	1	1	1	1	3	3
	Jumlah Penduduk	311.319	319.902	319.902	360.531	314.395	366.163	373.674	382.539
	Rasio per 1000 Penduduk	0,0032	0,0031	0,0031	0,0028	0,0032	0,0027	0,0054	0,0052
2	Jumlah Puskesmas	2	36	36	36	36	36	36	36
	Jumlah Penduduk	311.319	319.902	319.902	360.531	314.395	366.163	373.674	382.539
	Rasio per 1000 Penduduk	0,0064	0,1125	0,1125	0,0999	0,1145	0,0983	0,0963	0,0941
3	Jumlah Pustu	40	68	68	68	59	66	67	67
	Jumlah Penduduk	311.319	319.902	319.902	360.531	314.395	366.163	373.674	382.539
	Rasio Per 1000 Penduduk	0,1285	0,2126	0,2126	0,1886	0,1877	0,1802	0,1793	0,1751

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.1.2.3 Rasio Dokter dan Tenaga Kesehatan Per Satuan Penduduk

Rasio dokter per satuan penduduk adalah merupakan perbandingan ideal antara jumlah ketersediaan tenaga dokter berbanding jumlah penduduk. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal idealnya rasio tenaga dokter per satuan penduduk adalah 1:1000. Rasio Dokter Umum di tahun 2023 adalah 0,14 dimana rasio ini dapat dikatakan jauh dari ideal. Adapun Rasio Dokter Gigi dan Dokter Spesial adalah 0,0183 dan 0,0078. Angka ini juga tergolong jauh dari kata ideal.

Untuk lebih jelasnya rasio dokter per satuan penduduk di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.29
Rasio Dokter Per Satuan Penduduk di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Dokter Umum	30	25	31	36	43	50	50	53
	Jumlah Penduduk	311.319	314.395	319.902	360.531	314.395	366.163	373.674	382.539
	Rasio	0,10	0,08	0,10	0,10	0,14	0,14	0,13	0,14
2	Jumlah Dokter Gigi	2	3	1	3	5	5	9	7
	Jumlah Penduduk	311.319	314.395	319.902	360.531	314.395	366.163	373.674	382.539
	Rasio	0,0064	0,0095	0,0031	0,0083	0,0159	0,0137	0,0241	0,0183
3	Jumlah Dokter Spesialis	1	1	2	2	3	3	2	3
	Jumlah Penduduk	311.319	314.395	319.902	360.531	314.395	366.163	373.674	382.539
	Rasio	0,0032	0,0032	0,0063	0,0055	0,0095	0,0082	0,0054	0,0078

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2024

Jumlah tenaga Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan dari Tahun 2016-2021 mengalami peningkatan. Sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebanyak 500 orang bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sehingga rasio yang diperoleh ditahun 2023 adalah 4,5. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.30
Jumlah Tenaga Kesehatan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Tenaga Kesehatan	1.186	1.209	1.596	1.696	1.911	2.185	1.685	1.612
2	Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531	322.520	373.674	382.539
3	Rasio	3,81	3,85	5,03	5,30	5,30	6,77	4,51	4,21

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.1.2.4 Jumlah Kematian Ibu Hamil, Kematian Bayi / 1000 Kelahiran Hidup, balita kekurangan Gizi dan Persentase Prevelansi Stunting

Beberapa hal penting yang perlu menjadi perhatian di bidang Kesehatan adalah Jumlah kematian Ibu Hamil, Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup, Jumlah Balita kekurangan Gizi dan Persentasi Pravelensi Stunting.

Pada tahun 2023, tercatat 4 kasus kematian ibu di Kabupaten Nias Selatan. Kematian ini terkait dengan komplikasi kehamilan, persalinan, atau masa nifas (42 hari pascamelahirkan), dan menunjukkan masih perlunya penguatan program kesehatan ibu..

Angka Kematian Bayi adalah jumlah kematian bayi (0-11 bulan) per 1.000 kelahiran hidup yang mencerminkan kondisi kesehatan masyarakat, termasuk faktor pelayanan antenatal, gizi ibu, program KIA dan KB, serta kondisi lingkungan

dan sosial ekonomi. Pada tahun 2023, Angka Kematian Bayi tercatat sebesar 3,1 per 1.000 kelahiran hidup.

Prevalensi balita gizi buruk adalah persentase balita yang mengalami gizi buruk berdasarkan berat badan menurut umur. Gizi buruk merupakan bentuk paling parah dari kekurangan gizi menahun dan dipantau melalui kegiatan Pemantauan Status Gizi (PSG) setiap tahun di Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2023, jumlah balita dengan gizi buruk tercatat sebanyak 55 orang.

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita (bayi di bawah lima tahun) akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Seorang anak dikatakan stunting apabila panjang badan saat lahir dibawah empat puluh delapan centimeter untuk bayi laki-laki dan kurang dari empat puluh tujuh centimeter untuk bayi perempuan. Persentase Pravelensi Stunting di tahun 2023 diperoleh sebesar 31,8 persen.

Tabel dibawah ini merupakan data-data terkait beberapa indikator permasalahan Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan tersebut diatas.

Tabel 2.31

Jumlah Kematian Ibu Hamil, Kematian Bayi / 1000 Kelahiran Hidup, balita kekurangan Gizi dan Persentase Prevelansi Stunting di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Kematian Ibu Hamil	-	4	6	7	4	6	1	4
2	Jumlah Kematian Bayi/1000 Kelahiran Hidup	-	8.81	6,24	6,40	1,70	3,4	2,7	3,1
3	Jumlah Balita Kekurangan Gizi	25	81	31	52	68	79	55	55
4	Persentasi Prevelensi Stunting	-	-	-	-	26,67	34,4	27,2	31,8

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.4.1.3.1 Pekerjaan Umum

Pekerjaan umum adalah berbagai macam proyek infrastruktur yang didanai dan dibangun oleh pemerintah, untuk meningkatkan ekonomi, kesehatan, maupun keamanan masyarakat. Pekerjaan umum meliputi pembangunan fasilitas umum (kantor pemerintah daerah, sekolah, rumah sakit), infrastruktur transportasi (jalan, rel, jembatan, jalur pipa, terusan, pelabuhan, bandara), ruang publik (alun-alun, taman, pantai), layanan umum (penyediaan dan pengolahan air, pengolahan limbah, sistem kelistrikan, bendungan), dan lain-lain, yang biasanya berupa aset dan bangunan fisik yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Proyek pekerjaan umum tidak selalu membawa dampak ekonomi

langsung bagi pemerintah, namun membawa dampak ekonomi tidak langsung dalam jangka panjang.

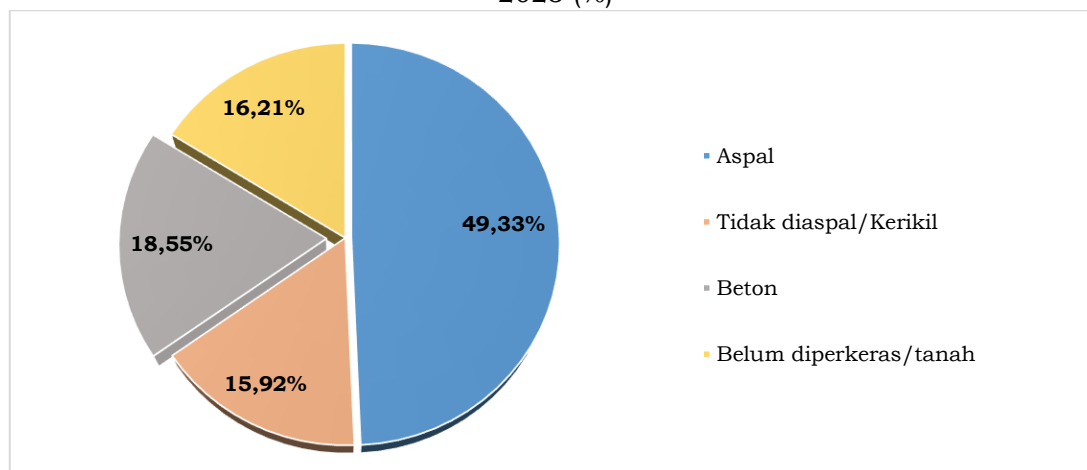
2.4.1.3.1.1 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Kabupaten

Panjang jalan di seluruh Nias Selatan pada tahun 2023 mencapai 857,41 km yang terbagi atas jalan negara 90,09 km, propinsi 23,7 km dan jalan kabupaten/kota 743,63 km. Kemudian dari kondisi jalannya, jalan Kabupaten terbagi menjadi 4 kategori, yaitu kondisi baik sepanjang 111,103 km, kondisi sedang sepanjang 171,35 km, kondisi rusak ringan sepanjang 100,398 dan yang terakhir adalah kondisi rusak berat sepanjang 360,77 km.

Jalan Kabupaten Nias Selatan memiliki tiga jenis permukaan jalan yaitu permukaan jalan aspal, tidak diaspal, dan lainnya. Permukaan jalan aspal terukur sepanjang 366,793 km, permukaan jalan tidak diaspal/kerikil sepanjang 118,353 km, permukaan jalan diperkeras beton sepanjang 137,937 km dan permukaan jalan belum diperkeras/tanah sepanjang 120,538 km. Berikut grafik persentase panjang jalan menurut jenis permukaan di tahun 2023 dan tabel panjang jalan Kabupaten Nias Selatan menurut jenis dan kondisi permukaan jalan.

Grafik 2.34

Persentase Panjang Jalan Kabupaten Menurut Jenis Permukaan di Kabupaten Nias Selatan, 2023 (%)



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan 2024

Tabel 2.32

Panjang Jalan Kabupaten menurut Jenis Permukaan Jalan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023 (Km)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Aspal	359,05	371,25	398,36	452,98	428,51	-	377,62	366,793
2	Tidak diaspal /kerikil	115,04	109,35	116,39	229,05	100,7	-	132,58	118,353
3	Beton	0	1,84	5,14	62,5	122,38	-	115,06	137,937
4	Belum diperkeras /tanah	396,8	393,44	357,49	132,85	225,8	-	104,09	120,538
Jumlah		870,89	875,88	877,38	877,38	877,39	-	729,35	743,621

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, 2024

Tabel 2.33

Panjang Jalan Kabupaten menurut Kondisi Jalan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023(Km)

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kondisi Baik	276,97	309.73	348.39	433.18	467,54	-	220,59	111,103
2	Kondisi Sedang	170,51	175.08	127.69	8.99	34,71	-	84,12	171,35
3	Kondisi Rusak ringan	213,41	198.32	184.55	88.09	36,71	-	141,5	100,398
4	Kondisi Rusak Berat	210,05	192.75	216.75	347.12	338,42	-	278,93	360,77

Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.1.3.1.2 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang Berwenang Mengelola

Panjang jalan di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 adalah 743,63 Km. Jalan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten adalah sepanjang 877,38 km. Jalan yang menjadi kewenangan negara adalah 90,9 km. Sementara jalan yang menjadi kewenangan Provinsi di Kabupaten Nias Selatan hanya sepanjang 23,7 km.

Tabel 2.34

Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Pemerintahan yang berwenang mengelolanya Kabupaten Nias Selatan, 2023

No	Kecamatan	Panjang Jalan (km)			
		Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
1	Hibala	-	-	19,957	19,957
2	Tanah Masa	-	-	-	0
3	Pulau Pulau Batu	-	-	33,713	33,713
4	Pulau Pulau Batu Timur	-	-	12,500	12,5
5	Simuk	-	-	-	0
6	Pulau Pulau Batu Barat	-	-	-	0
7	Pulau Pulau Batu Utara	-	-	8,000	8
8	Teluk Dalam	12,6	-	73,822	86,422
9	Fanayama	-	-	36,759	36,759
10	Toma	10,6	-	29,703	40,303
11	Maniamolo	-	-	39,934	39,934
12	Mazino	-	-	32,631	32,631
13	Luahagundre Maniamolo	-	-	24,937	24,937
14	Onolalu	-	-	-	0
15	Amandraya	26,12	-	30,106	56,226
16	Aramo	-	-	29,266	29,266
17	Ulususua	-	-	24,668	24,668
18	Lahusa	5,8	-	40,913	46,713
19	Sidua'ori	-	-	-	0
20	Somambawa	11,77	-	35,679	47,449
21	Gomo	-	-	24,461	24,461
22	Susua	-	-	23,492	23,492
23	Mazo	-	-	21,631	21,631
24	Umbunasi	-	-	14,770	14,77
25	Idanotae	-	-	8,415	8,415

No	Kecamatan	Panjang Jalan (km)			
		Negara	Provinsi	Kab/Kota	Jumlah
26	Ulu Idanotae	-	-	-	0
27	Boronadu	-	-	4,242	4,242
28	Lolomatua	-	-	45,490	45,49
29	Ulunoyo	-	-	24,432	24,432
30	Huruna	-	8,5	18,437	26,937
31	Lolowau	11,8	6,7	20,939	39,439
32	Hilimegai	-	-	35,984	35,984
33	O'o'u	11,4	-	0,500	11,9
34	Onohazumba	-	8,5	9,575	18,075
35	Hilisalawa'ahe	-	-	18,665	18,665
Jumlah		90,09	23,7	743,621	857,411

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.1.3.1.3 Panjang Jalan Menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan

Jalan kabupaten dengan jenis permukaan aspal hampir seluruhnya di wilayah daratan Pulau Nias, yaitu sepanjang 428,51 km. Di kepulauan batu umumnya jenis permukaan jalan yang ada adalah jalan beton, yaitu sepanjang 34,26 km pada tahun 2022. Jalan aspal adalah sepanjang 16,36 km. Terdapat beberapa kecamatan yang memiliki jalan permukaan tanah dan kerikil lebih dari 20 km, yaitu kecamatan Amandraya, Susua, Mazino, Ulunoyo, Somambawa dan Teluk Dalam.

Tabel 2.35

Panjang Jalan menurut Kecamatan dan Jenis Permukaan Jalan Kabupaten Nias Selatan, 2023

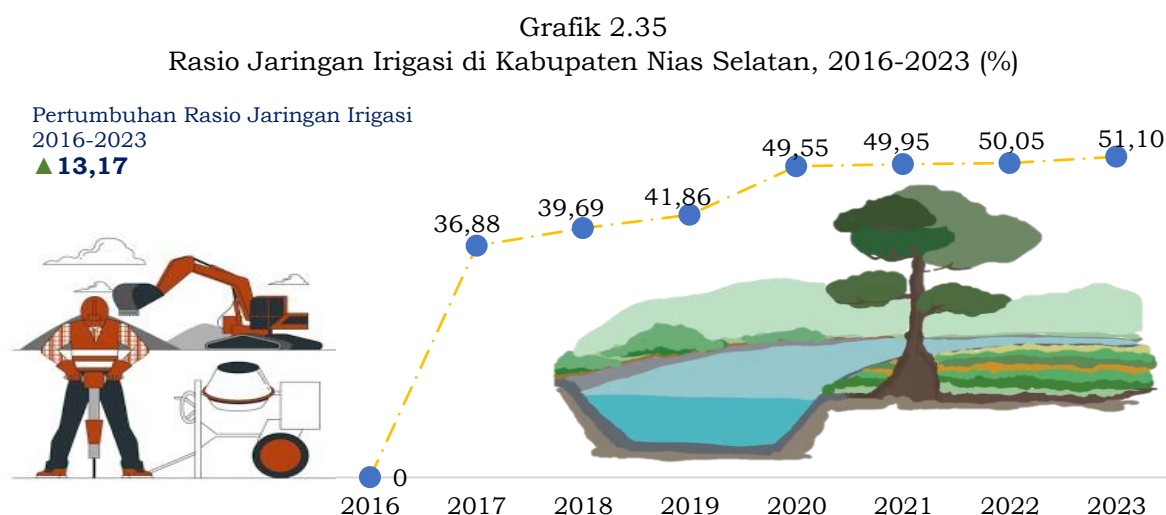
No	Kecamatan	Panjang Jalan (km)				
		Aspal	Kerikil	Tanah	Beton	Jumlah
1	Hibala	0	0	5,302	14,655	19,957
2	Tanah Masa					0
3	Pulau-Pulau Batu	1,862	0	4,604	27,247	33,713
4	Pulau-Pulau Batu Timur	2	0	9,8	0,7	12,5
5	Simuk					0
6	Pulau-Pulau Batu Barat					0
7	Pulau-Pulau Batu Utara	0	0	0	8	8
8	Telukdalam	41,94	4,705	22,437	4,74	73,822
9	Fanayama	16,317	1,45	14,09	4,902	36,759
10	Toma	14,199	1,044	7,753	6,707	29,703
11	Maniamolo	31,107	4,592	0,899	3,336	39,934
12	Mazino	10,105	1	14,257	7,269	32,631
13	Luahagundre Maniamolo	9,681	4,289	8,967	2	24,937
14	Onolalu					0
15	Amandraya	15,425	6,826	1,723	6,132	30,106
16	Aramo	5,183	10,201	3	10,882	29,266
17	Ulususua	16,842	6,626	0	1,2	24,668
18	Lahusa	32,83	2,993	0	5,09	40,913

No	Kecamatan	Panjang Jalan (km)				
		Aspal	Kerikil	Tanah	Beton	Jumlah
19	Sidua'ori					0
20	Somambawa	10,917	14,764	8,398	1,6	35,679
21	Gomo	24,461	0	0	0	24,461
22	Susua	5,532	7,5	7,66	2,8	23,492
23	Mazo	9,2	3,684	2,607	6,14	21,631
24	Umbunasi	2,2	9,459	2,8	0,311	14,77
25	Idanotae	5,465	2,55	0	0,4	8,415
26	Uluidanotae					0
27	Boronadu	4,242	0	0	0	4,242
28	Lolomatua	28,491	12,062	4,516	0,421	45,49
29	Ulunoyo	7,891	11,616	0,925	4	24,432
30	Huruna	11,167	3,575	0	3,695	18,437
31	Lolowau	8,922	2,74	0,8	8,477	20,939
32	Hilimegai	24,018	6,677	0	5,289	35,984
33	O'ou	0,5	0	0	0	0,5
34	Onohazumba	7,631	0	0	1,944	9,575
35	Hilisalawa'ahe	18,665	0	0	0	18,665
Jumlah		366,793	118,353	120,538	137,937	743,621

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.1.3.1.4 Rasio Jaringan Irigasi

Rasio jaringan irigasi di Kabupaten Nias Selatan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya pembangunan jaringan irigasi di beberapa lokasi di Kabupaten Nias Selatan. Pada tahun 2019, rasio jaringan irigasi Kabupaten Nias Selatan adalah 41,86 Persen meningkat 7,69 persen di tahun 2019 dengan rasio sebesar 49.95 Persen. Pada tahun 2023, rasio jaringan irigasi Kabupaten Nias Selatan adalah 51,10 persen atau meningkat sebesar 1,05 persen jika dibandingkan pada tahun 2022 yang berada di angka 50,05 Persen.



Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Perkembangan dalam urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dimana luas kumuh berdasarkan Keputusan Bupati Nias Selatan Nomor 04.4_689 tahun 2019 adalah sebesar 8463.96 Ha yang tersebar di 21 Kawasan. Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016 s/d 2023 dapat dilihat sebagaimana pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.36
Rasio Rumah Layak Huni di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah Rumah Layak Huni (Unit)	-	16.308	16.745	17.020	17.433	17.558	41.181	41.200
	Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531	366.163	373.674	382.539
	Rasio	-	0,052	0,053	0,053	0,048	0,049	0,114	0,1143
2	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (Unit)	-	46.923	46.486	46.211	45.798	45.673	22.175	22.156
	Jumlah Penduduk	-	314.395	317.207	319.902	360.531	366.163	373.674	382.539
	Rasio	-	0,15	0,15	0,14	0,13	0,12	0,062	0,0615
3	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang ditangani (Unit)	-	n/a	437	275	413	125	329	569
	Jumlah Penduduk	-	314.395	317.207	319.902	360.531	366.163	373.674	382.539
	Rasio	-	n/a	0,001	0,001	0,001	0,0003	0,0009	0,0016
4	Luas Pemukiman Layak huni	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	Luas Wilayah pemukiman	-	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : Dinas PRKP Kabupaten Nias Selatan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Nias Selatan masih mencapai 22.156 unit hingga tahun 2023. Pada tahun yang sama, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melakukan intervensi dengan menangani 19 unit rumah tidak layak huni. Sehingga jumlah rumah tidak layak huni yang sebelumnya sebanyak 22.175 unit pada tahun 2022 berkurang menjadi 22.156 unit pada tahun 2023. Intervensi ini juga berdampak pada peningkatan jumlah rumah layak huni, yang bertambah 19 unit, dari 41.181 unit pada tahun 2022 menjadi 41.200 unit pada tahun 2023.

Namun, dengan rata-rata penanganan rumah tidak layak huni sebanyak 315 unit per tahun, jumlah intervensi pada tahun 2023 tergolong sangat rendah dibandingkan tren tahunan sebelumnya. Hal ini menunjukkan perlunya upaya yang lebih besar dalam menangani permasalahan perumahan di Kabupaten Nias Selatan.

Persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Nias Selatan tidak mengalami perubahan yang signifikan dari tahun ke tahun. Satu-satunya

perbedaan yang tercatat adalah jumlah total rumah, yang mengalami sedikit selisih setiap tahunnya. Pada tahun 2021, jumlah rumah tercatat sebanyak 63.393 unit, sementara pada tahun 2022 jumlahnya sedikit berkurang menjadi 63.356 unit, dengan selisih 37 unit.

Berikut adalah persentase lingkungan permukiman kumuh di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016 hingga 2023.

Tabel 2.37
Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Kawasan Kumuh (Ha)	-	n/a	n/a	8463.96	8463.96	8463.96	8463.96	8463.96
Luas Wilayah (km ²)	-	n/a	n/a	6.902.505	6.902.505	6.902.505	6.902.505	6.902.505
Luas lingkungan permukiman kumuh (Ha)	-	n/a	n/a	833.771	833.771	833.771	833,77	833,77
Jumlah rumah tangga kumuh perkotaan (RT)	-	n/a	n/a	1.267	1.267	1.267	1.267	1.267
Jumlah seluruh rumah (Unit)	-	63.231	632.512	63.356	63.356	63.393	63.356	63.356

Sumber: Dinas PRKP Kabupaten Nias Selatan 2024

2.4.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Ketentraman dan ketertiban adalah suatu keadaan agar pemerintah dan rakyat dapat melakukan kegiatan secara aman, tertib dan teratur. Ketenteraman dan ketertiban ini dapat terganggu oleh berbagai sebab dan keadaan diantaranya oleh pelanggaran Hukum yang berlaku, yang menyebabkan terganggunya ketenteraman dan ketertiban masyarakat, bencana alam maupun bencana yang ditimbulkan oleh manusia atau organisasi lainnya, dan faktor dari bidang Ekonomi dan Keuangan.

Dibawah ini dapat dilihat beberapa cakupan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2.38
Cakupan Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten Nias Selatan, 2019-2022

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
100 Orang petugas Linmas di Kabupaten	-	160	155	157	177	125	125	125
Wilayah Kerja Kabupaten (Desa)	-	459	459	459	459	459	459	459
Persentase (%)	-	34,86	33,77	34,2	38,56	27,23	27,23	27,23
Jumlah Petugas Linmas di Kabupaten	-	779	848	862	825	825	825	825
Jumlah Pos Siskamling berdasarkan Desa/Kelurahan	-	459	459	459	459	459	459	459

Sumber : Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2024

Persentase penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di Kabupaten Nias Selatan setiap tahunnya mengalami kenaikan. Namun terjadi penurunan di tahun 2021 menjadi 13,07 persen dari semula berada di angka

17,56 persen di tahun 2019. Pada tahun 2022 kembali terjadi kenaikan yaitu sebesar 19,42 Persen dan tahun 2023 melonjak naik ke angka 51,78 persen.

Tabel 2.39
Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) di
Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pelanggaran K3 yang terselesaikan	-	18	27	23	25	23	54	204
Jumlah Pelanggaran K3 yang dilaporkan	-	117	156	131	138	176	278	394
Persentase (%)	-	15,38	17,31	17,56	18,12	13,07	19,42	51,78

Sumber : Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2024

Sementara untuk cakupan pelayanan bencana kebakaran di Kabupaten Nias Selatan, jangkauan luas wilayah manajemen dan luas wilayah kabupaten masih belum mengalami perubahan dari tahun 2016 ke tahun 2023.

Tabel 2.40
Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (Kecamatan)	-	1	3	7	7	7	7	7
Luas wilayah Kabupaten Kecamatan)	-	3	5	35	35	35	35	35
Persentase (%)	-	33	60	20	20	20	20	20

Sumber : Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2024

Persentase tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah manajemen kebakaran di Kabupaten Nias Selatan terus mengalami kenaikan hingga mencapai 80 persen di tahun 2020. Namun di tahun 2021, terjadi penurunan sekitar 17 persen. Hal ini dikarenakan jumlah kebakaran yang juga meningkat sementara jumlah kasus kebakaran tertangani lebih sedikit. Selanjutnya terjadi naik turun persentase penanganan kebakaran. Hingga pada tahun 2023 persentase penanganan kebakaran adalah 80 persen. Untuk lebih jelasnya terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.41
Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kasus kebakaran yang tertangani	-	16	19	3	4	5	7	4
Jumlah Kasus kebakaran	-	144	136	4	5	8	8	5
Persentase (%)	-	160	155	75	80	63	88	80

Sumber : Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2024

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) merupakan bagian dari perangkat daerah. Ini jelas tertuang dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Namun masih terdapat banyak permasalahan yang

kemudian menghambat kinerja aparaturnya sendiri. Permasalahan adalah kurangnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dialokasikan serta rendahnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki. Apalagi cakupan wilayah Kabupaten Nias Selatan yang cukup luas untuk ditangani. Rasio Jumlah Satpol PP per 1000 penduduk menurun tahun 2021 menjadi 2,98 namun kembali naik di tahun 2022 menjadi 3,35. Pada tahun 2023 rasio jumlah Satpol PP per 1000 penduduk 3,27. Berikut tabel terkait rasio jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nias Selatan 2016-2023:

Tabel 2.42
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	Status	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Pol PP	PNS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	Honorer	-	16	19	16	12	14	17	19
Jumlah		-	144	136	141	165	109	125	125
Jumlah Penduduk		-	160	155	157	177	123	142	144
Rasio Jumlah Pol. PP per 10000 penduduk	PNS	-	314.395	317.207	319.902	360.531	366.163	373.674	382.539
	Honorer	-	0,51	0,60	0,50	0,33	0,38	0,45	0,50
Total		-	4,58	4,29	4,41	4,58	2,98	3,35	3,27

Sumber : Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2024

Selain dari data diatas, ada beberapa indikator yang menjadi realisasi kinerja urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. Seperti cakupan patroli petugas Satpol PP yang tercatat mencapai 82,86 persen di tahun 2023, cakupan pelayanan bencana kebakaran masih terus berada di angka 57 Persen dan Tingkat waktu tanggap (*response time rate*/15 menit setelah pengaduan) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK) masih sama di setiap tahunnya yaitu 5 menit. Berikut Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2023.

Tabel 2.43
Realisasi Kinerja Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk	-		4,25	4,22	4,79	3,33	3,84	3,85
2	Rasio Pos siskamling per jumlah kelurahan	-	459	459	459	459	459	459	459
3	Rasio penegakan Perda	-	2	2	2	2	2	3	3
4	Cakupan patroli petugas Satpol PP(%)	-		80	81,67	86,33	74,33	90,27	82,86
5	Cakupan pelayanan bencana kebakaran (%)	-		48	57	57	57	57	57
6	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i> /15 menit setelah pengaduan) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	-	5	5	5	5	5	5	5

Sumber : Satpol PP dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Nias Selatan 2024

2.4.1.6 Sosial

Pembangunan bidang sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan pembangunan nasional. Sasaran utama pembangunan kesejahteraan sosial adalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) disamping itu juga memberdayakan sumber potensi kesejahteraan sosial. Beberapa masalah yang masih perlu mendapat perhatian diantaranya masih rendahnya kualitas penyandang masalah kesejahteraan sosial dan belum terpenuhinya kebutuhan dasar manusia khususnya bagi mereka yang memiliki keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan sosial dasar. Pada tabel dibawah ini merupakan cakupan bidang Sosial.

Tabel 2.44
Masalah Sosial Masyarakat di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Jenis PMKS	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Balita Terlantar	654	654	-	360	360	360	360	360
Anak Terlantar	1472	1472	-	2.294	197	2294	347	2.294
Anak Jalanan	153	135	-	-	170	-	12	-
Anak Jermal	-	-	18	-	15	-	85	15
Anak Nakal	-	-	-	-	24	-	38	-
Korban Tindak kekerasan	91	91	1	-	-	-	-	-
Korban Narkotika	90	90	-	-	101	-	-	878
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1695	1695	420	-	-	-	-	79
Wanita Korban Tindak Kekerasan	91	-	-	-	85	-	-	-
Tuna Susila	82	82	-	-	102	-	-	3.056
Penyandang Disabilitas	-	-	430	79	1.873	79	79	-
Gelandangan	53	53	-	3.056	-	3056	3056	-
Pengemis	101	101	-	-	120	-	-	-
Bekas Narapidana	60	60	-	-	75	-	-	-
Korban Bencana Alam	122	122	25	-	120	-	-	-
Fakir Miskin	3372	-	812	-	64.480	-	-	-
Trafiking	-	-	-	-	-	-	-	-
Komunitas Adat Terpencil	202	202	1	-	-	-	-	-
Pekerja Migran Bermasalah	-	-	-	-	-	-	-	-
Korban Bencana Sosial	52	52	-	-	-	-	-	-
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	118	118	-	-	-	-	-	-
Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
Penderita HIV/AIDS	15	15	-	-	20	-	-	-
Anak memerlukan perlindungan khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
Lanjut Usia	1320	1320	230	878	20	-	878	-
Jumlah	9743	6262	1937	6667	67762	5789	4855	6682

Sumber : Provinsi Sumatera Utara Dalam Angka 2019-2024

Dari tabel di atas dapat diketahui masalah sosial yang ada di Kabupaten Nias Selatan antara lain: balita terlantar, anak terlantar, anak jermal, korban narkoba, wanita rawan sosial ekonomi dan tuna susila. Tuna susila menjadi masalah yang utama yang dihadapi di Kabupaten Nias Selatan, dimana jumlah tuna susila pada tahun 2023 sebanyak 3056 orang.

2.4.2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, antara lain tenaga kerja; pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; pangan; pertanahan; lingkungan hidup; administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; pemberdayaan masyarakat dan desa; pengendalian penduduk dan keluarga berencana; perhubungan; komunikasi dan informatika; koperasi, usaha kecil, dan menengah; maupun penanaman modal.

2.4.2.1 Tenaga Kerja

Tenaga kerja merupakan keseluruhan penduduk dalam usia kerja yang memiliki kemampuan dan kesiapan untuk terlibat dalam kegiatan produksi barang dan jasa, sepanjang terdapat permintaan terhadap tenaga mereka serta adanya kemauan untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi tersebut.

Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2023 meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2022. Dimana capaian di tahun 2023 adalah 79,29 persen dengan komposisi Bekerja 76,53 Persen, Bukan Angkatan kerja 20,71 Persen dan lainnya sebanyak 3,06 persen. Perbandingan dengan tahun 2022 terlihat pada Komposisi bukan angkatan kerja dimana mengurus rumah tangga ada di angka 8,40 persen atau turun 1,89 dibanding tahun sebelumnya. Sementara untuk tingkat pengangguran terbuka berhasil di tekan ke angka 3,48 Persen atau turun 0,21 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.45
Statistik Ketenagakerjaan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	TPAK (%)	-	79,8	79,03	72,22	77,14	72,25	78,54	79,29
2	Bekerja (%)	-	78,78	76,05	70,59	73,94	69,42	75,63	76,53
3	Bukan Angkatan Kerja (%)	-	20,2	20,97	27,78	22,86	27,75	21,46	20,71
	a. Sekolah (%)	-	10,73	11,05	14,82	n/a	9,48	8,71	9,24
	b. Mengurus Rumah Tangga (%)	-	7,66	6,85	8,48	n/a	11,7	10,29	8,40
	c. Lainnya	-	1,81	3,07	4,49	n/a	6,57	2,45	3,06
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	-	1,28	3,77	2,25	4,15	3,91	3,69	3,48

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka, 2024

Sementara besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan, terkecuali di tahun 2021. Hal ini disebabkan oleh pemutusan hubungan kerja oleh beberapa perusahaan karena dampak pandemi *Covid-19*. Jika di tahun 2021 persentase besaran pekerja atau buruh yang menjadi jamsostek adalah 65,50 persen, maka di tahun 2022 meningkat sebesar 24 persen sehingga persentasenya menjadi 89,50 persen dan di tahun 2023 terjun ke angka 0,78 persen di tahun 2023. Hal ini dikarenakan jumlah pekerja yang meningkat drastis.

Tabel 2.46
Besaran Pekerja/buruh Yang peserta Jamsostek Di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pekerja/buruh Jamsostek	35	35	10.570	10.789	11.465	12.897	21.986	1.294
Jumlah pekerja/buruh	6.201	7.200	16.457	16.718	16.242	19.689	24.564	164.869
Persentase (%)	56	49	64,23	64,54	70,59	65,50	89,50	0,78

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Nias Selatan 2024

2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan perempuan adalah upaya pemampuan perempuan untuk memperoleh akses dan kontrol terhadap sumber daya, ekonomi, politik, sosial, budaya, agar perempuan dapat mengatur diri dan meningkatkan rasa percaya diri untuk mampu berperan dan berpartisipasi aktif dalam memecahkan masalah, sehingga mampu membangun kemampuan dan konsep diri.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fakta sosial yang bersifat universal karena dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga tanpa pembedaan budaya, agama, suku bangsa, dan umur pelaku maupun korbannya. Karena itu, ia dapat terjadi dalam rumah tangga keluarga sederhana, miskin dan terkebelakang maupun rumah tangga keluarga kaya, terdidik, terkenal, dan terpandang. Tindak kekerasan ini dapat dilakukan oleh suami atau istri terhadap pasangan masing-masing, atau terhadap anak-anak, anggota keluarga yang lain, dan terhadap pembantu mereka secara berlainan maupun bersamaan. Perilaku merusak ini berpotensi kuat menggoyahkan sendi-sendi kehidupan rumah tangga dengan sederetan akibat di belakangnya, termasuk yang terburuk seperti bercerai-berainya suatu rumah tangga. Berikut data rasio Rasio KDRT di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023.

Tabel 2.47
Rasio KDRT di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah KDRT	1	0	0	5	15	6	8	10
Jumlah Rumah Tangga	64.864	65.505	66.091	66.823	69.915	88.406	89.104	90.292
Rasio	0,001542	-	-	0,0075	0,0215	0,00679	0,009	0,011

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan 2024

Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses sekaligus tujuan dalam pembangunan. Oleh karena itu, upaya pemberdayaan perempuan tidak dapat dipisahkan dari pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan. Pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk menciptakan kemandirian, mendorong pemanfaatan potensi lokal, serta membantu masyarakat keluar dari kondisi keterbelakangan dan kemiskinan. Dalam konteks ini, partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintahan menjadi indikator penting. Berikut disajikan data mengenai persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan selama periode 2016–2023.

Tabel 2.48
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah perempuan di lembaga legislatif	-	9	9	8	9	6	6	6
Persentase Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	-	74.001	72.914	-	-	17	30	6
Persentase Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di Lembaga eksekutif	-	1	1	-	-	11,76	17,24	17,24
Jumlah pekerja perempuan	-	1	1	66.457	72.215	76.596	73.205	77.955

Sumber : Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan 2024

2.4.2.3 Pangan

Ketersediaan Pangan adalah ketersediaan pangan secara fisik di suatu wilayah dari segala sumber, baik itu produksi pangan domestik (netto), perdagangan pangan dan bantuan pangan. Ketersediaan pangan ditentukan oleh produksi pangan di wilayah tersebut, perdagangan pangan melalui mekanisme pasar di wilayah tersebut, stok yang dimiliki oleh pedagang dan cadangan pemerintah, dan bantuan pangan dari pemerintah atau organisasi lainnya.

Pada tahun 2023, produksi beras petani mengalami peningkatan. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan penggunaan sarana dan prasarana pertanian yang semakin modern. Sehingga Rata-rata Jumlah ketersediaan pangan utama kabupaten Nias Selatan adalah 40.689,94 beras per ton. Peningkatan produksi pangan ini juga memberikan pengaruh pada ketersediaan energi dan protein per kapita di Kabupaten Nias Selatan yaitu 1.775

Kkal/Kapita/ Hari. Sehingga persentase pangan Utanna Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 94,03 Persen. Untuk lebih lengkapnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Persentase Ketersediaan Pangan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-Rata Jumlah ketersediaan pangan utama (Beras) per tahun (ton)	-	-	-	36.442,52	37.007,63	39.292,90	37.725,74	40.689,94
Ketersediaan Energi dan Protein perkapita	-	-	-	-	1.428 Kkal/kap/hr	-	-	1.775 Kkal/kap/hr
Jumlah Penduduk	311.319	314.395	314.395	319.902	360.531	360.131	367.970	382.539
Persentase (%) Pangan Utama	-	-	-	-	-	87,82	92,09	94,03

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan 2024

Kerawanan pangan dapat didefinisikan sebagai tidak meratanya akses pangan secara cukup jumlah dan kualitas. Artinya dalam kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangan tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi Pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya. Penyebab terjadinya kerawanan pangan pada suatu wilayah adalah adanya ketimpangan terhadap akses dan pemanfaatan pangan oleh masyarakat.

Karena konsumsi pangan masyarakat semakin terpenuhi sesuai dengan konsep B2SA (Beragam Bergizi Seimbang dan Aman), Skor Pola Pangan harapan meningkat menjadi 73,9 dimana pada tahun 2022 skor pola pangan harapan adalah 71,3. Jumlah Kecamatan Rawan Pangan juga turun menjadi 3 kecamatan dengan persentase kecamatan rawan pangan sebesar 8,57 persen. Artinya pemenuhan kebutuhan pangan semakin meningkat dan merata. Berikut jumlah desa rawan pangan di kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2023:

Tabel 2.50
Jumlah Kecamatan rawan pangan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	-	66,7	71,5	77,6	-	-	71,3	73,9
2	Jumlah Kecamatan	35	35	35	35	35	35	35	35
3	Jumlah Kecamatan Rawan pangan	4	4	4	4	4	4	4	3
4	Persentase Kecamatan Rawan Pangan	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	10,81	8,57

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Selatan 2024

2.4.2.4 Lingkungan Hidup

Permasalahan lingkungan saat ini yang sulit diatasi adalah masalah sampah. Sampah ialah suatu bahan terbuang atau dibuang dan merupakan hasil

aktivitas manusia maupun alam yang sudah tidak digunakan lagi karena sudah diambil unsur atau fungsi utamanya. Sumber sampah bisa berasal dari rumah tangga, pertanian, perkantoran, perusahaan, rumah sakit, pasar, dan sebagainya. Namun sampai saat ini, masih banyak masyarakat yang membuang sampah di perairan sugai ataupun laut, sehingga mengakibatkan rusaknya lingkungan perairan.

Dalam pengelolaan lingkungan harus memperhatikan daya dukung sumberdaya alam dan daya tampung lingkungan hidup, kerentanan bencana, perubahan iklim, kualitas lingkungan hidup, perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut dan rehabilitasi mangrove.

Pada tahun 2023, jumlah Tempat pembuangan sampah meningkat jauh yang semula hanya ada 2 buah di tahun 2022 menjadi 17 buah. Tempat pembuangan sampah tersebut ada di Teluk Dalam, Lagundri, Bawomataluo dan tempat lainnya. Hal ini juga berpengaruh terhadap rata-rata timbunan sampah yang meningkat menjadi 0,63 Kg/Orang dimana di tahun 2022 adalah 0,4 Kg/Orang. Untuk lebih lengkapnya perkembangan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.51
Perkembangan Pengelolaan Lingkungan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tempat pembuangan sampah (TPS)	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	2 buah	17 buah
Timbunan Sampah (m ³) / Ton	n/a	n/a	n/a	511	526	535	536	520
Rata-rata Timbunan Sampah dan Sampah	0,4 kg/org	0,4 kg/org	0,4 kg/org	0,4 kg/org	0,4 kg/org	0,4 kg/org	0,4 kg/org	0,63 kg/org
Jumlah sampah yang tertangani (Kg)	46.312	46.312	46.312	17.520	18.520	17.520	17.520	210.000

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.2.5 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Administrasi kependudukan pada hakikatnya memiliki peran strategis dalam mewujudkan Visi pemerintah menuju masyarakat yang sejahtera dan bahagia. Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan yang diundangkan pada 21 April 2022. Maksud dan tujuan diterbitkannya Permendagri tersebut adalah sebagai pedoman bagi penduduk dan pejabat yang berwenang dalam melakukan pencatatan untuk memudahkan pelayanan publik.

Tujuan administrasi kependudukan juga digunakan untuk menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran

Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya, mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Dari tabel-tabel berikut ini dapat dijelaskan bahwa terjadi peningkatan Jumlah penduduk usia >17 tahun yg ber KTP, Jumlah Bayi berakta kelahiran, Jumlah pasangan nikah berakta nikah dan Jumlah KTP ber NIK yg diterbitkan selama tahun 2016-2023 di Kabupaten Nias Selatan disebabkan karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen-dokumen kependudukan, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Tabel 2.52

Rasio Penduduk Ber KTP per Satuan Penduduk di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah penduduk usia >17 tahun yg ber KTP	-	-	-	137.358	164.532	172.792	183,271	192.968
Jumlah Penduduk usia >17 tahun atau telah menikah	-	-	-	247.358	256.748	274.268	271,525	268.267
Rasio	-	-	-	0,56	0,64	0,63	0,67	0,71

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan 2024

Tabel 2.53

Rasio Bayi Berakte Kelahiran di Kabupaten Nias Selatan Tahun, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Bayi berakta kelahiran	-	-	-	97.864	113.566	142.898	100,208	98.776
Jumlah bayi	-	-	-	63.748	78.589	94.679	119,525	112.071
Rasio	-	-	-	1,54	1,45	1,51	0,84	0,88

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, 2024

Tabel 2.54

Rasio Pasangan Berakte Nikah di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pasangan nikah berakta nikah	-	-	-	8.974	11.032	12.560	24,984	32.937
Jumlah keseluruhan pasangan nikah	-	-	-	82.752	84.345	87.276	133,286	135.719
Rasio	-	-	-	0,11	0,13	0,14	0,19	0,24

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, 2024

Tabel 2.55

Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah KTP ber NIK yg diterbitkan	-	-	-	137.358	164.532	172.792	183,271	192.968
Jumlah Penduduk Wajib KTP	-	-	-	247.764	256.748	274.268	271,525	268.267
Jumlah Penduduk	-	314.395	317.207	319.902	360.531	367.583	367,970	368.484

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.2.6 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Indeks Desa Membangun atau yang disebut IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi Desa. Definisi ini termuat dalam Pasal 1 angka 8 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia (Permendesa PDTT-RI) Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun.

Konsepnya adalah untuk menuju desa maju dan mandiri memerlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan. Aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan Desa untuk kesejahteraan masyarakat Desa. Ketiga aspek tersebut merupakan dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, sehingga praktik kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan.

Klasifikasi status desa tersebut di atas dihasilkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dengan status kemajuan dan kemandirian Desa sebagai berikut:

- a. Desa Mandiri atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun lebih besar ($>$) dari 0,8155.
- b. Desa Maju atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,8155 dan lebih besar ($>$) dari 0,7072.
- c. Desa Berkembang atau Desa Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,7072 dan lebih besar ($>$) dari 0,5989.
- d. Desa Tertinggal atau Desa Pra-Madya adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan sama dengan ($\leq$) 0,5989 dan lebih besar ($>$) dari 0,4907.
- e. Desa Sangat Tertinggal atau Desa Pratama adalah Desa yang memiliki Indeks Desa Membangun kurang dan lebih kecil ($\leq$) dari 0,4907.

Pada tahun 2019, indeks desa membangun kabupaten Nias Selatan adalah 0,4960. Dengan indeks tersebut kabupaten nias selatan masih termasuk daerah yang sangat tertinggal dengan peringkat status IDM adalah peringkat 400. Di tahun 2023, nilai IDM Kabupaten Nias Selatan adalah 0,4934 dengan posisi peringkat adalah 415.

Tabel 2.56
Indeks Desa Membangun Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Desa Membangun (IDM)	0,4595	-	0,4483	0,4960	0,5040	0,4821	0,4941	0,4934
Peringkat Status IDM	400	-	407	407	407	416	415	415

Sumber: Peringkat Indeks Desa Membangun (IDM) 2016-2023

2.4.2.7 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dalam Penentuan perencanaan pembangunan, menjaga demografi dan jumlah penduduk secara ideal perlu untuk dilakukan agar lonjakan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatkan beban negara dalam memenuhi kebutuhan dan memastikan kesejahteraan masyarakat dapat dihindari. Selain itu manfaat lainnya yang diperoleh adalah untuk mengendalikan lingkungan aau Kawasan yang tersedia dan meminimalisir munculnya bencana alam.

Dari tabel dibawah ini dapat dijelaskan bahwa rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Nias Selatan setiap tahunnya bersifat stagnan, dimana pada tahun 2016-2023 rata-rata mempunyai anak 3 orang/keluarga. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi peningkatan berdasarkan data dari Aplikasi New SIGA BKKBN. Perbedaan data yang cukup jauh ini dibandingkan di tahun 2021 ke bawah dikarenakan pada tahun tahun tersebut belum menggunakan aplikasi New SIGA BKKBN. Sehingga data yang tercatat cenderung kecil. Berikut cakupan pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Selatan 2016-2023.

Tabel 2.57
Cakupan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata jumlah anak per keluarga	-	3	3	3	3	3	3	3
Cakupan peserta KB aktif	-	19.313	19.313	85.865	1.220	6.196	60.264	13.220

Sumber: Dinas P2KBP3A Kabupaten Nias Selatan 2024

2.4.2.8 Perhubungan

Tersedianya sarana dan prasarana transportasi disuatu daerah sangat berperan dalam perkembangan dan kemajuan suatu daerah terutama dalam meningkatkan perekonomian masyarakat. Kabupaten Nias Selatan sebagai salah

daerah tujuan wisata sangatlah memerlukan sarana dan prasarana transportasi yang memadai.

Untuk mencapai Kabupaten Nias Selatan bisa menggunakan transportasi darat, udara maupun laut. Transportasi Udara di Kabupaten Nias Selatan sampai saat ini masih mengandalkan Bandara Binaka Gunungsitoli dan Bandara Lasondre yang terdapat di Kecamatan Pulau-Pulau Batu sebagai akses untuk mencapai Kepulauan Batu di Kabupaten Nias Selatan. Walaupun sampai ini masih membutuhkan perhatian Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah dalam pembangunan sarana dan prasarananya agar menjadi lebih baik lagi.

Transportasi laut di Kabupaten Nias Selatan dapat diakses melalui Pelabuhan Teluk Dalam, yang berperan sebagai pintu utama keluar masuknya orang dan barang di wilayah tersebut. Selain di Kota Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan juga memiliki pelabuhan laut lainnya yang terletak di Pulau Tello dan Hibala, yang turut mendukung konektivitas dan distribusi logistik antar wilayah. Cakupan sarana dan prasarana perhubungan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.58
Cakupan Sarana dan Prasarana Perhubungan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Jenis Kendaraan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Truk	67	68	72	81	84	119	130	260
Mobil Penumpang	32	34	43	51	54	75	80	119
Becak Motor	12	17	21	32	35	55	65	251
Mobil Pick Up dan Sejenisnya	121	134	168	272	394	483	498	340

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Nias Selatan 2023

2.4.2.9 Komunikasi dan Informatika

Infrastruktur jaringan komunikasi diperlukan sebagai media penyebaran data dan informasi. Jaringan ini terdiri dari terminal, tautan, dan titik koneksi yang memungkinkan telekomunikasi antar pengguna. Meningkatnya pengguna dan penyelenggara jaringan telekomunikasi menimbulkan kebutuhan regulasi untuk mengatur penyelenggaraannya secara tepat.

Tabel 2.59
Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah KIM	-	2	5	6	6	7	7	7
Jumlah Kecamatan yang ada dalam Kab/Kota	35	35	35	35	35	35	35	35
Persentase (%)	-	5,71	14,29	17,14	17,14	20,00	20,00	20,00

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan, 2024

Tabel 2.60
Cakupan Layanan Telekomunikasi di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Luas Wilayah yang tercoverage	-	5.652	5.966	6.202	7.065	8.007	8.007	8.007
Luas Wilayah Keseluruhan	6.902.505	6.902.505	6.902.505	6.902.505	6.902.505	6.902.505	6.902.505	6.902.505
Persentase (%)	-	0,0819	0,0864	0,0898	0,1024	0,116	0,116	0,116

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.2.10 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Konsep dari ekonomi kerakyatan berbasis pada kekuatan ekonomi yang ada di rakyat. Pada ekonomi kerakyatan, menempatkan ekonomi rakyat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan. Hal ini populer dilakukan dengan secara swadaya, mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya. UKM dan koperasi mampu menjadi tulang punggung perekonomian yang makin handal mampu berkembang sebagai badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang sehat, tangguh, kuat dan mandiri serta menjadi wadah yang efektif untuk menggalang kekuatan ekonomi rakyat di semua kegiatan atau sektor perekonomian.

Untuk lebih lengkapnya Jumlah Koperasi, UKM Non BPR, LKM dan UKM serta perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.61
Perkembangan Jumlah Koperasi, UKM Non BPR, LKM dan UKM di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi aktif	3	7	17	18	23	26	26	23
Jumlah koperasi tidak aktif	121	120	59	58	57	57	83	2
Jumlah Seluruh Koperasi	124	127	76	76	80	83	31,33	25
Jumlah Seluruh UKM	316	655	751	2.608	10.678	22.725	32.914	10.635

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Nias Selatan 2024

Tabel 2.62
Perkembangan Persentase Koperasi Aktif di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koperasi Aktif	9	13	19	21	23	26	26	23
Jumlah Seluruh Koperasi	126	74	76	79	80	83	83	25
Persentase (%)	7,14	17,57	25,00	26,58	28,75	31,33	31,33	92,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab. Nias Selatan 2024

2.4.2.11 Penanaman Modal

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 4 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau badan usaha dalam rangka menanamkan

modalnya, yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanam Modal Asing (PMA).

Penanaman modal dalam negeri merupakan kegiatan penanaman modal guna menjalankan bisnis di Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal domestik baik perorangan maupun badan dengan mengandalkan modal dalam negeri. Kegiatan PMDN bisa dijalankan dalam bentuk badan usaha yang berbadan hukum, non badan hukum, atau usaha perseorangan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penanaman Modal Asing atau yang biasa disebut PMA adalah kegiatan menanam modal, yang dilakukan oleh penanam modal asing dan bertujuan agar dapat melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Jumlah investor PMDN/PMA dihitung dengan menjumlahkan banyaknya investor PMDN berskala nasional dengan banyaknya investor PMA berskala nasional yang aktif berinvestasi di daerah dan pada suatu periode tahun pengamatan. Semakin banyak jumlah investor maka akan semakin menggambarkan ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah berupa ketertarikan investor untuk meningkatkan investasinya di daerah.

Tabel 2.63
Jumlah dan Nilai Investor di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)								
a. PMDN	3	3	8	8	18	7.405	1.858	3.081
b. PMA	0	1	0	0	0	0	1	7
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	1.935.000.000	172.787.000.000	8.235.000.000	8.369.319.936	27.550.000.000	206.054.110.109	482.739.720.705	230.476.458.350

Sumber : DPMP2TSP Kabupaten Nias Selatan 2024

Jumlah investor dan nilai investasi di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2023 sifatnya fluktuasi atau naik turun setiap tahunnya. Di tahun 2023, jumlah PMDN ada sebanyak 3.801 PMDN atau naik sekitar 65 persen jika dibandingkan tahun 2022. Begitu juga dengan jumlah PMA di tahun 2023 ada sebanyak 7 PMA atau naik sebanyak 6 PMA di bandingkan pada tahun 2022. Namun kenaikan jumlah PMDN/PMA ini tidak beriringan dengan kenaikan jumlah investasi 2023. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023, jumlah investor yang bertambah adalah investor skala kecil sehingga jumlah investasinya juga semakin kecil.

Kehadiran investor skala kecil turut memengaruhi daya serap tenaga kerja, yang umumnya ditentukan oleh jumlah pekerja yang dipekerjakan di masing-masing perusahaan. Beberapa usaha dagang (UD) tercatat hanya mempekerjakan satu orang, sementara badan usaha berbentuk CV atau PT dapat mempekerjakan hingga empat orang atau lebih, tergantung pada skala dan jenis usahanya.

Tabel 2.64
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Tenaga Kerja bekerja pada perusahaan	9	24	24	24	54	14.810	6.217	5096
Jumlah Seluruh PMA/PMDN	3	4	8	8	18	7.443	1.859	3088
Rasio	0,33	0,17	0,33	0,33	0,33	2,00	3,30	1,65

Sumber : DPMP2TSP Kabupaten Nias Selatan 2024

2.4.2.12 Kepemudaan dan Olahraga

Kedudukan organisasi kepemudaan sangat penting sebagai wadah berhimpunnya pemuda dalam upaya melaksanakan kerja organisasi untuk mendukung cita-cita terbentuknya negara Indonesia yang adil, makmur, sejahtera lahir dan batin. Peran organisasi kepemudaan dalam memberikan pemahaman dan implementasi wawasan nusantara dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari yang mencakup kehidupan politik, sosial, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Dalam realitasnya, para pemuda dalam organisasi kepemudaan dapat mendorong pemuda pada khususnya dan masyarakat pada umumnya agar menciptakan demokrasi politik yang sehat, kemandirian ekonomi yang menguntungkan kehidupan rakyat Indonesia, mengutamakan kehidupan sosial-budaya yang sesuai kearifan lokal, serta berperan aktif menjaga keutuhan bangsa Indonesia.

Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif di Kabupaten Nias Selatan berjumlah 8 sampai 12 Unit dimana kegiatan kepemudaan yang dilaksanakan setiap tahunnya adalah 1 kegiatan. Berikut data mengenai organisasi Kepemudaan di Kabupaten Nias Selatan dari Tahun 2016-2023.

Tabel 2.65
Jumlah Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Kepemudaan aktif	-	-	8	10	10	12	12	12
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	-	-	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Nias Selatan 2024

Selain daripada itu, Olahraga sekarang ini sudah menjadi alat kebijakan untuk membangun *social capital* (institusi, hubungan, dan nilai yang membentuk kualitas dan kuantitas interaksi sosial di masyarakat), menjembatani perbedaan

sosial, serta melawan gaya hidup tidak sehat dan isolasi sosial. Perkembangan kegiatan olahraga di Kabupaten Nias Selatan cukup minim. Pada tahun 2018 kegiatan olahraga yang tercatat hanya dilakukan 2 Kali. Setelah itu tidak ada kegiatan olahraga yang dilakukan sampai pada tahun 2021. Untuk tahun 2022, jumlah kegiatan olahraga dilakukan sekali. Jumlah organisasi olahraga yang tercatat adalah 6 organisasi sampai pada tahun 2021. Peningkatan terjadi di tahun 2022 dan tahun 2023 dimana jumlah organisasi olahraga adalah sebanyak 22 organisasi. Berikut data mengenai Organisasi Olahraga di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2023.

Tabel 2.66
Jumlah Organisasi Olahraga di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Organisasi Olahraga	-	-	8	6	6	6	22	22
Jumlah Kegiatan Olahraga	-	-	1	0	0	0	1	0

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Nias Selatan 2024

2.4.2.13 Statistik

Kumpulan data, atau yang dikenal sebagai statistik, dapat berupa angka maupun non-angka yang disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, dan berfungsi sebagai gambaran dari suatu kondisi atau permasalahan tertentu. Data yang telah diolah selanjutnya dijabarkan dan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan. Selain itu, data tersebut juga menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan di masa mendatang. Oleh karena itu, penyediaan data yang cepat, tepat, dan akurat sangat diperlukan guna memudahkan perencanaan dalam merumuskan perencanaan pembangunan yang sejalan dengan kebijakan dan peraturan di masing-masing daerah.

Tabel 2.67
Cakupan Bidang Statistik di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada	Tidak Ada
Buku "Kabupaten Dalam Angka"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Buku "PDRB"	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nias Selatan 2024

2.4.2.14 Persandian

Adapun permasalahan bidang urusan persandian yang dihadapi saat ini antara lain rendahnya kualitas pengamanan informasi pemerintah daerah dan belum adanya penetapan standar komunikasi sandi antar perangkat daerah.

2.4.2.15 Kebudayaan

Pembangunan bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Nias Selatan masih merupakan tantangan. Kedepan diperlukan kegiatan yang lebih bisa mempromosikan Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu potensi atau nilai jual untuk pengembangan wisata. Perbaikan dan penyempurnaan di bidang sarana penyelenggaraan seni budaya juga dibutuhkan untuk mendukung promosi tersebut. Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian adalah pelestarian benda maupun bangunan cagar budaya yang dimiliki Kabupaten Nias Selatan dan perlu melibatkan semua pemangku kepentingan. Cakupan perkembangan kebudayaan di Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 2.68
Cakupan Perkembangan Kebudayaan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	-	1	1	1	0	1	2	2
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	10	10	10	8	6	23	19
Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	-	0	1	1	1	1	1	1
jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	-	1	1	1	1	1	2	4
Total benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	-	10	10	8	8	6	23	19

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Nias Selatan 2024

2.4.2.16 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan sarana penting dalam mendukung dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas proses belajar-mengajar. Perpustakaan yang terorganisir dengan baik dan sistematis, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat memberikan kemudahan dan dukungan bagi kegiatan pembelajaran di sekolah tempat perpustakaan tersebut berada. Peran perpustakaan juga sangat erat kaitannya dengan kemajuan dunia pendidikan, terutama dalam mendukung perbaikan metode belajar-mengajar yang tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan fasilitas dan sarana pendidikan yang memadai. Cakupan perkembangan bidang perpustakaan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini.

Tabel 2.69
Cakupan Perkembangan Bidang Perpustakaan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah pengunjung perpustakaan selama 1 tahun	2.690	2.262	2.616	4.810	4064	498	681	2851
Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani	n/a	4.771	5.000	5.100	5.200	5.300	5.400	5400
Jumlah Koleksi judul buku yang tersedia di perpustakaan daerah	900	1.107	773	527	1.260	1.260	1.260	1.260

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Koleksi jumlah buku yang tersedia di perpustakaan daerah	4.000	4.916	6.189	1.937	8.223	8.223	8.223	8.223
Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang bersertifikat	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	2	n/a	n/a
Jumlah Perpustakaan	136	149	149	149	149	149	149	275
Jumlah Penduduk	311.319	314.395	317.207	319.902	360.531	360.531	367.970	382.539

Sumber: Dinas Perpustakaan Kabupaten Nias Selatan 2024

Berdasarkan tabel di atas, terlihat adanya peningkatan signifikan jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2023, yakni lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun 2022. Peningkatan ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi *Covid-19* pada tahun 2022 yang menyebabkan pembatasan kunjungan dan penutupan sementara sejumlah perpustakaan. Selain itu, jumlah perpustakaan juga mengalami lonjakan, dari 149 unit pada tahun 2022 menjadi 275 unit pada tahun 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh dilakukannya pencatatan langsung ke lokasi-lokasi perpustakaan di setiap sekolah.

2.4.2.17 Kearsipan

Berdasarkan UU 43 Tahun 2009 kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Fungsi arsip sebagai tulang punggung manajemen dan bukti otentik adalah mendukung proses pengambilan keputusan, menunjang proses perencanaan, mendukung pengawasan, sebagai alat bukti, memori instansi dan sebagai rujukan historis.

2.4.3 Urusan Pilihan

Urusan pilihan dikembangkan berdasarkan potensi keunggulan lokal dan peluang penciptaan lapangan kerja yang tersedia. Namun, keberhasilan pengelolaan urusan pilihan ini sangat bergantung pada kemampuan tata kelola yang adaptif, kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang memadai, serta koordinasi lintas sektor yang efektif. Tanpa adanya sinergi yang kuat antarinstansi, pelibatan masyarakat, dan penerapan prinsip-prinsip good governance, pengembangan urusan pilihan berisiko tidak optimal dan gagal mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dilihat dari potensi perikanan, produksi perikanan Kabupaten Nias Selatan meningkat ke angka 8.743 ton. Untuk potensi pariwisata, jumlah wisatawan mancanegara melesat jauh ke angka 3.540 orang dan wisatawan lokal mencapai 55.750 orang. Untuk urusan pertanian, beberapa produksi tanaman yang meningkat adalah kacang Panjang, ketimun, kangkung, bayam dan terong. Sedangkan populasi hewan ternak cenderung menurun, hanya populasi babi dan itik yang meningkat.

2.4.3.1 Kelautan dan Perikanan

Sektor kelautan dan perikanan berperan sangat besar bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia, mengingat luas perairan yang lebih besar dibanding luas daratan dengan potensi perikanan yang sangat banyak dan beragam.

Potensi Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu potensi unggulan Kabupaten Nias Selatan. Wilayah perairan Kabupaten Nias Selatan termasuk dalam Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 572 yang meliputi Wilayah Pantai Barat Sumatera. Perairan Kabupaten Nias Selatan merupakan perairan kepulauan dimana salah satu ciri daerah penangkapan ikan yang baik yaitu terdiri dari gugusan pulau. Pulau-pulau tersebut tersebar di Wilayah Kabupaten Nias Selatan khususnya Kepulauan Batu. Selain merupakan gugusan kepulauan, perairan Kabupaten Nias Selatan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia dimana memiliki potensi yang sangat besar yang dapat dimanfaatkan untuk usaha perikanan.

Kabupaten Nias Selatan terdiri dari 104 pulau, dengan 21 pulau berpenghuni. Luas wilayah laut mencapai 4.450,405 km², sementara luas daratan sebesar 2.452,100 km². Kabupaten ini memiliki potensi perikanan tangkap yang sangat besar, terutama di tujuh kecamatan kepulauan, yaitu Kecamatan Pulau-Pulau Batu, Pulau-Pulau Batu Utara, Pulau-Pulau Batu Barat, Pulau-Pulau Batu Timur, Hibala, Tanah Masa, dan Simuk. Di bawah ini disajikan data perkembangan produksi perikanan laut dan perikanan darat di Kabupaten Nias Selatan.

Berikut perkembangan produksi perikanan laut dan darat di Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2023.

Tabel 2.70

Perkembangan Produksi Perikanan Laut dan Darat di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	Sat	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Perikanan Laut									
Jumlah Tangkapan	Ton	5.311	8.400	8.503	8.612	8.503	8.593	8.503	8.630
Jumlah kapal penangkap ikan	Unit								
a. Perahu/Kapal tanpa motor		1.109	1.434	1.129	1.132	1.156	1.206	1.156	861
b. Perahu motor tempel		907	1193	1.210	1.230	1.239	1.289	1.239	1417
Jumlah Rumah tangga perikanan	KK	1.198	1.299	1.358	1.381	2.741	2.790	2.741	2.864
Jumlah nelayan	Jiwa								
a. Penuh		4.457	4841	4952	4841	4841	4.990	4841	5.129
b. Sambilan		231	353	362	353	353	420	353	579
Jumlah tempat pelelangan ikan	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1
Perikanan Darat									
a. Tambak									
Luas	Ha	-	-	-	-	-	-	-	
Produksi	kg								
b. Kolam									
Luas	Ha	21	25	27	29	31	33	33	25
Produksi	kg	16.052	22.450	25.767	28.031	28.031	28.000	28.000	67.050
c. Keramba									
Luas	Ha	3	3	4	5	5	6	6	6
Produksi	Ton	2	5	11	13	12,7	13	13,00	10
Jumlah Produksi Ikan	Ton	-	-	38,766	36,625	-	41	41	
a. Produksi Perikanan Laut		-	-	8.293,30	8,625	-	8.593	8.593	8630
b. Produksi Perikanan Darat		19	23	38,766	28	31	41	41	77
Target Daerah untuk produksi Ikan	Ton	7.980	8.111	8.210	8.313	8.414	8.745	8.745	
a. Produksi Perikanan Laut		7.980	8000	8.200	8.400	8.550	8.600	8.650	8700
b. Produksi Perikanan Darat		11	12	13	14	15	15	45	45
Jumlah konsumsi Ikan	Kg	5.614.745	6.214.945	6.215.175	6.215.405	0,482638889	6.025.000	6.025.000	n/a
Target Daerah untuk konsumsi Ikan	Kg	5.968.253	8.820.893	8.854.877	8.878.493	8.878.493	8.878.493	8.878.493	n/a

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 2024

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa jumlah produksi perikanan laut dan produksi perikanan Kabupaten Nias Selatan cenderung meningkat tiap tahunnya mulai dari tahun 2016-2023. Pada tahun 2022 jumlah produksi perikanan laut sebesar 8.750 ton, sedangkan produksi perikanan darat sebesar menurun 15 Ton yang sebelumnya di tahun 2021 mencapai 45 ton. Jumlah rumah tangga nelayan juga mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2021 berjumlah 2790 KK dan pada tahun 2022 menjadi 2.485 KK. Hal ini disebabkan karena

masyarakat lebih memilih menjadi nelayan. Tangkapan perikanan laut merupakan potensi yang besar sehingga perlu ditingkatkan aktivitasnya melalui pemberian perahu/kapal/ alat tangkap kepada kelompok nelayan.

Luas daratan untuk areal budidaya ikan air tawar juga cukup besar untuk dikembangkan. Wilayah sasaran pengembangan kegiatan budidaya ikan air tawar ini diprioritaskan pada wilayah kecamatan yang secara geografis berada pada dataran tinggi, jauh dari pantai dan memiliki sumber mata air yang memadai. Wilayah kecamatan dimaksud sebagai tujuan pengembangan kegiatan budidaya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.71

Kecamatan Tujuan Pengembangan Budidaya Perikanan di Kabupaten Nias Selatan, 2023

No.	Nama Kecamatan	Keterangan
1.	Amandraya	Desa Hilimaera; Desa Tuindrao I; Desa Hilimbowa; Desa Sifaoroasi; Desa Sirofi
2.	Aramo	Desa Sikhori Lafau
3.	O'ou	Desa Hilinamazihono
4.	Lolowau	Desa Nituwumboho
5.	Uluidanotae	Desa Sisarahili Ewo
6.	Mazo	Desa Gui-Gui
7.	Gomo	Desa Orahili Gomo
8.	Susua	Desa Orahua Uluzoi; Desa Hilidanayao;
9.	Teluk Dalam	Desa Bawozaua; Desa Hilisondrekha; Desa Hiliana'a; Kel. Pasar Teluk Dalam; Desa Hilitobara
10.	Onolalu	Desa Hilimondregeraya
11.	Fanayama	Desa Bawomataluo; Desa Hiliofonaluo
12.	Luahagundre Maniamolo	Desa Sondregeasi; Desa Bawomaenamolo; Desa Sondregeasi
13.	Mazino	Desa Hilizalootano Larono;
14.	Hilimegai	Desa Togizita
15.	Onohazumba	Desa Fadoro Ewo; Desa Hiliweto
16.	Huruna	Desa Sifaoroasi, Desa Sifaoroasi Huruna dan Desa Hilimanawa

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan, 2024

Selain dari pada itu di bawah ini diuraikan Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang berada di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Nias Selatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 2.72

Jumlah Desa Nelayan di Kabupaten Nias Selatan

No	Kecamatan	Desa Nelayan	Kelurahan
1	Pulau-Pulau Batu	20	1
2	Hibala	17	-
3	Pulau-Pulau Batu Timur	10	-
4	Simuk	6	-
5	Pulau-Pulau Batu Barat	9	-
6	Pulau-Pulau Batu Utara	12	-
7	Tanah Masa	12	-

No	Kecamatan	Desa Nelayan	Kelurahan
8	Lolowau	4	-
9	Lahusa	6	-
10	Telukdalam	14	1
11	Toma	14	-
12	Fanayama	7	-
13	Amandraya	21	-
14	Maniamolo	14	-
15	Luahagundre Maniamolo	10	-
16	O'ou	3	-
17	Somambawa	5	-
Jumlah		198	2

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 2024

Tabel 2.73
Jumlah Kelompok Nelayan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok nelayan yang mendapat bantuan Pemd	6	7	22	36	10	12	10	34
Jumlah kelompok nelayan keseluruhan	80	94	113	128	134	146	156	168
Jumlah Produksi ikan di daerah (ton)	5.329	8.437	8.540	8.653	8.528	8.593	8.743	8.630
Nilai Tukar Nelayan	103,83	108,59	109,76	110	99,52	122,04	124,03	129,07

Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias Selatan 2024

Dari tabel tersebut dapat kita ketahui bahwa jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari Pemerintah Daerah di tahun 2023 adalah sebanyak 34 kelompok nelayan, naik jika dibandingkan dengan data di tahun 2022 yang berjumlah 10 kelompok nelayan. Sedangkan jumlah kelompok nelayan bertambah sebanyak 8 kelompok dibandingkan tahun 2022.

2.4.3.2 Pariwisata

Selain potensi pertanian, kelautan dan perikanan, pariwisata juga merupakan salah satu potensi unggulan yang ada di Kabupaten Nias Selatan. Pengembangan dan pengelolaan kepariwisataan Kabupaten Nias Selatan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 05 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Nias Selatan Tahun 2018-2025. Pembangunan kepariwisataan Kabupaten Nias Selatan mencakup 4 (empat) pilar yakni destinasi pariwisata, Industri Pariwisata, Pemasaran Pariwisata dan Kelembagaan Kepariwisata.

Kondisi kepariwisataan di Kabupaten Nias Selatan masih perlu ditingkatkan promosinya untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan baik wisatawan asing maupun domestik, misalnya berupa promosi langsung dalam bentuk penyelenggaraan event pariwisata dan partisipasi pada kegiatan promosi

pariwisata. Potensi obyek wisata yang dimiliki Kabupaten Nias Selatan cukup bervariasi seperti Wisata Alam, Wisata budaya, wisata bahari, dan peninggalan prasejarah / batu megalith.

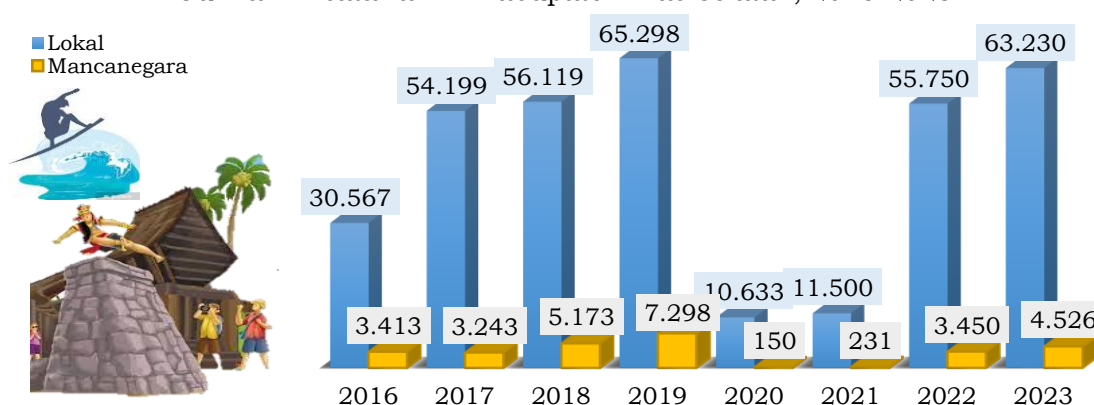
Tabel 2.74
Persentase Kunjungan Wisata di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) Mancanegara	3.413	3.243	5.173	7.298	150	231	3.450	4.526
Jumlah Kunjungan Wisata (Orang) Lokal	30.567	54.199	56.119	65.298	10.633	11.500	55.750	63.230
Rata Rata Lama Kunjungan Wisata dalam satu tahun (hari)	2	2	3	4	1	3	3	3
PAD Sektor Pariwisata (Ribu Rp)	-	357.260	750.138	440.365	110.212	12.086	4.378.691	4.040.264.130

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Nias Selatan 2024

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kunjungan wisata, lama kunjungan wisata dan PAD sektor pariwisata di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Rata-rata lamanya kunjungan wisata dalam satu tahun menjadi 3 hari, sedangkan PAD sektor pariwisata juga mengalami kenaikan yang makin melesat jauh mencapai Rp. 4.040.264.130 jika dibandingkan tahun tahun sebelumnya. Jumlah kunjungan wisata mancanegara naik sebanyak 7480 orang atau naik hingga 13,42 persen dibanding tahun 2022. Begitu juga dengan kunjungan wisata lokal yang naik sebanyak 1076 orang. Sehingga jumlah wisatawan mancanegara mencapai 63.230 orang dan Kunjungan wisatawan lokal mencapai 4.526 orang di tahun 2023.

Grafik 2.36
Jumlah Wisatawan Di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Kepemudaan Olahraga Kab. Nias Selatan, 2024

2.4.3.3 Pertanian

Pertanian juga merupakan potensi unggulan di Kabupaten Nias Selatan. Potensi pertaniannya antara lain: padi, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ketela

pohon, sayur-sayuran serta buah-buahan. Untuk produksi perkebunan antara lain: karet, kelapa, kopi, pinang, kakao dan lain-lain.

Layanan urusan pertanian dilaksanakan melalui pengelolaan lahan dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

Tanaman Hortikultura yang ada di Kabupaten Nias Selatan antara lain adalah jenis tanaman seperti bawang daun, kacang panjang, cabe, terong, ketimun, kangkung, bayam, buncis. Pada Tahun 2023 terjadi peningkatan luas panen jika dibandingkan pada Tahun 2022 yang disebabkan karena adanya bantuan berupa bibit tanaman sayuran dan juga sarana produksi (pupuk). Luas panen terbesar masih berupa komoditi cabe sebesar 137,3 Ha dengan produksi sebesar 357 ton.

Tabel 2.75
Luas Panen Tanaman Sayur-sayuran Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Komoditi	Luas Panen (Ha)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bawang Daun	57	54	53	40	22	26	6	3
Kacang Panjang	168	124	128	58	58	64	36	83
Cabe	576	386	335	95	164	127	133,5	137,3
Terong	209	137	136	89	70	78	46	91
Ketimun	112	92	88	64	39	36	46	64
Kangkung	113	62	52	25	26	32	36	60
Bayam	68	41	41	21	21	42	20	53
Buncis	45	35	24	13	9	12	3	10

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, 2024

Pada Tahun 2023 terjadi penurunan produksi Bawang Daun, kacang panjang, ketimun dan kangkung jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini disebabkan oleh adanya serangan hama dan iklim yang buruk (curah hujan) yang tinggi. Sedangkan produksi cabe dan terong sebaliknya, terjadi penambahan produksi disebabkan karena adanya perbaikan pola tanam dan budidaya. Jika di tahun 2022 produksi cabe 336 ton, di tahun 2023 produksi cabe naik menjadi 357 ton. Begitu juga dengan terong produksi meningkat menjadi 819 ton di tahun 2023, di tahun 2022 produksi terong adalah 750 ton. Peningkatan yang cukup drastis dalam produksi tanaman sayur-sayuran adalah produksi bayam dan produksi buncis. Hal ini juga dikarenakan adanya perbaikan pola tanam dan budidaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Produksi Tanaman Sayur-sayuran Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Komoditi	Jumlah Produksi (Ton)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Bawang Daun	589	2.780	198	155	80	89	20	11
Kacang Panjang	3.057	5.772	821	154	210	270	834	335
Cabe	11.636	21.883	2.121	569	577	484	336	357
Terong	5.460	8.006	869	253	193	241	750	819
Ketimun	1.856	4.580	614	195	120	120	1.014	580
Kangkung	2.187	3.854	178	57	99	129	294	780
Bayam	576	1.180	106	48	48	103	131	371
Buncis	806	1.723	83	29	25	34	17	92

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, 2024

Luas tanaman perkebunan yang terbesar di tahun 2023 adalah padi dengan luas sebesar 23.852 Ha. Padi juga merupakan tanaman perkebunan yang produksinya paling tinggi di tahun 2023 yaitu sebesar 103.517,7 ton. Luas tanaman perkebunan dan produksi tanaman perkebunan Kabupaten Nias Selatan dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.77
Luas Tanaman Perkebunan Kabupaten Nias Selatan Tahun, 2016-2023

Jenis Tanaman	Luas Perkebunan (Ha)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karet	11.656,00	116.977,75	11.204,30	11.383,25	11.383,25	11.378	11.383	11.383
Kelapa	21.634,25	18.677	19.786	20.286	20.286	20.502	20.510	20.512
Kopi	0	0	0	0	0	0	0	-
Cengkeh	290,5	113,5	355	389	389	403	404	404
Pala	50	67	68	71	71	70	73	73
Nilam	130	120	26	26,5	26,5	11	11	10,5
Kakao	6.077,75	4.824	5.568	5.609	5.609	5.621	5.621	5.618
Pinang	902	752	749,5	766,5	766,5	748	773	777,8
Kelapa Sawit	1.366,00	1.427,00	1.427	929	929	976	202	202
Jagung	1.922,8	2.303	3.914	3.940	2.785	840	432	354
Padi	29.944,3	25.572	27.244	19.496	21.958	20.995	23.158	23.852

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, 2024

Tabel 2.78
Produksi Tanaman Perkebunan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Karet	13.561,20	10.281,43	9.967,25	9.976,84	9.976,84	9.980	9.980	9.980,0
Kelapa	17.955,19	14.124,97	12.672,62	13.672,62	13.672,62	13.743	13.801	13.802,0
Kopi	0	0	0	0	0	0	0	-
Cengkeh	40,06	22,37	112,1	129,6	129,6	241	265	265,0
Pala	218,75	25,49	25,5	25,74	25,74	35	37	37,0
Nilam	33,6	1904	9,3	753,07	753,07	363,64	5000,06	4.986,0
Kakao	3.468,00	3.624,13	3.566,43	3.567,21	3.567,21	3.322	3.714,9	3.714,0
Pinang	202,8	752	185,43	185,34	185,34	214	234	234,6

Jenis Tanaman	Produksi (Ton)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kelapa Sawit	1,1	9,1	9,1	752,18	752,18	946	137	137,0
Jagung	6.389	7.774	3.331	4.172	28.313	7.157	2.709	2.565,4
Padi	121.125	97.903	22.137	21.032	112.803	101.180	113.536	103.517,7

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, 2024

Pada tahun 2023 terjadi penambahan populasi ternak meskipun tidak terlalu signifikan yang dapat disebabkan oleh adanya bantuan ternak yang diadakan oleh Dinas Pertanian. Populasi ternak di Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh ayam buras yaitu sebanyak 232.083 ekor di tahun 2023. Jumlah ini meningkat jika dibandingkan tahun 2022 yaitu 231.841. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.79
Jumlah Populasi Ternak Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Jenis Ternak	Jumlah Populasi ternak (ekor)							
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Babi	176.366	197.402	205.876	220.287	22.029	8.553	9.108	9.226
Sapi	64	68	72	90	106	82	38	52
Kerbau	43	53	56	59	65	57	16	16
Ayam Buras	194.930	87.355	93.743	103.117	278.344	281.555	231.841	232.083
Itik	5.516	6.772	7.433	7.954	8.749	30.836	31.655	37.016
Kambing	3.845	4.620	4.632	5.095	6.571	6.943	768	768

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, 2024

Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Nias Selatan cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2016-2023, dimana pada tahun 2016 sebesar 2.391,20 terus meningkat hingga pada tahun 2023 menjadi 3.834,58. Hal ini menandakan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu sektor yang mempunyai kontribusi dalam PDRB Kabupaten Nias Selatan sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 2.80
Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kontribusi PDRB dari sektor pertanian/perkebunan	2.391,20	2.600,34	2.822,21	3.044,02	3.196,25	3.307,45	3.619,28	3.834,58
Jumlah PDRB	5.192,77	5.695,74	6.247,31	6.861,48	7.164,27	7.420,63	8.014,50	8.574,98
Persentase (%)	46,05	45,65	45,17	44,36	44,61	44,57	45,16	44,72

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, 2024

Pembinaan kelompok tani juga menjadi bagian penting dalam pembangunan dalam urusan pertanian. Setiap tahunnya pemerintah Kabupaten Nias Selatan memberikan pembinaan dengan bantuan kepada kelompok-kelompok tani yang sudah tercatat. Di tahun 2023, jumlah kelompok tani yang

sudah menerima bantuan dari Pemda adalah 404 poktan atau sekitar 29,38 persen. Jumlah ini sedikit naik dibandingkan dengan tahun 2022 dimana jumlah kelompok tani yang mendapat bantuan dari pemda adalah 137 dengan persentase 11,14 Persen.

Tabel 2.81
Cakupan Bina Kelompok Tani di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Kelompok tani yang mendapatkan bantuan Pemda	226	226	135	137	404
Jumlah seluruh kelompok tani	1.114	1.114	1.123	1.230	1.187
Persentase (%)	20,29	20,29	12,02	11,14	29,38

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.3.4 Kehutanan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 14, Ayat (1) bahwa Penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang Kehutanan, Kelautan serta Energi dan Sumber Daya Mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

2.4.3.5 Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasokan energi listrik merupakan salah satu permasalahan utama di Kabupaten Nias Selatan, sebab tidak semua desa menikmati arus listrik dari PLN. Dari 461 desa dan kelurahan yang terdapat di Kabupaten Nias Selatan, masih terdapat beberapa desa yang belum tersentuh jaringan listrik yang bersumber dari PLN.

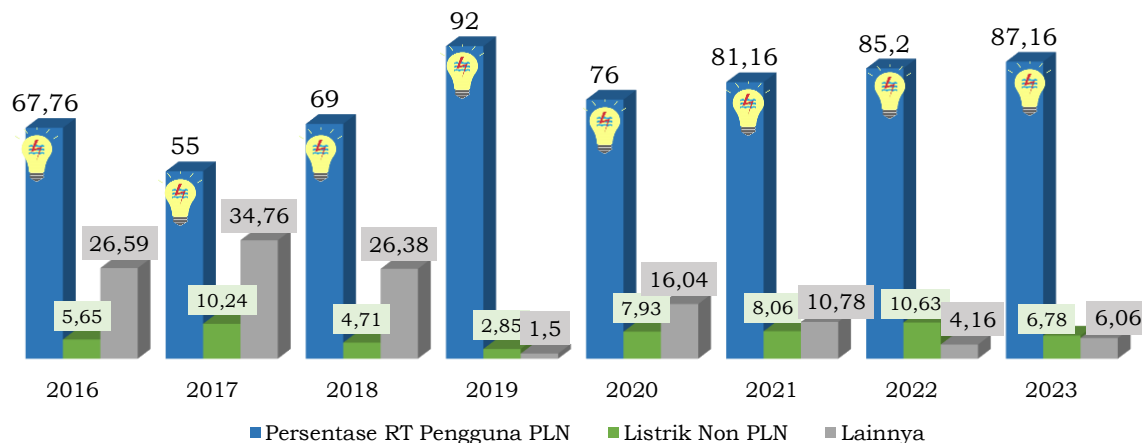
Pada tahun 2016, sebanyak 73,41% rumah tangga di Kabupaten Nias Selatan menggunakan listrik sebagai sumber penerangan, dengan rincian 67,76% menggunakan listrik dari PLN dan 5,65% menggunakan listrik non-PLN. Sebanyak 26,59% rumah tangga masih menggunakan sumber penerangan non-listrik.

Pada tahun 2023, terjadi peningkatan signifikan dalam akses listrik. Sebanyak 87,16% rumah tangga menggunakan listrik dari PLN, 6,78% menggunakan listrik non-PLN, dan hanya 6,06% yang masih menggunakan sumber penerangan lainnya. Hal ini menunjukkan peningkatan aksesibilitas dan pemerataan layanan listrik di wilayah Kabupaten Nias Selatan.

Berikut Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Di Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2023.

Grafik 2.37

Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Sumber Penerangan Di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023



Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara (data diolah)

Jumlah desa di Kabupaten Nias Selatan yang belum di aliri listrik adalah sebanyak 134 desa dari total keseluruhan 459 desa. Artinya ada sekitar 29,63 Persen desa di Kabupaten Nias Selatan yang belum di aliri listrik. Beberapa faktor penyebabnya adalah karena desa berada di daerah sebagian perbukitan, akses jalan setapak, akses jalan belum di aspal (onderlagh) dan lain sebagainya. Berikut daftar desa yang belum dialiri listrik di Kabupaten Nias Selatan di tahun 2023.

Tabel 2.82
Daftar Desa Yang Belum Dialiri Listrik Di Kabupaten Nias Selatan, 2023

No	Kecamatan	Desa	Keterangan
1	Somambawa	1 Desa Mehaga (Dusun O'okha, Hilimehaga, Umbufaomasi dan Luahadasua)	Berada di daerah sebagian perbukitan, akses jalan setapak.
		2 Desa Golambanua-II (Dusun Tasua)	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.
		3 Desa gabungan Tasua (Dusun III Luludasua dan Dusun IV Hiliotalua)	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.
		4 Desa Oladano (Dusun Hilisawato dan Hilimbuasi)	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.
2	Hilimegai	5 Desa Togizita, Dusun 5, 6 dan 7	Akses Jalan Belum diaspal (Onderlagh)
3	Lolowau	6 Desa Hilifadolo	Berada di Daerah Perbukitan
		7 Desa Sisarahili Ekholo	Berada di Daerah Perbukitan
		8 Desa Bawosalo'o Siwalawa	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.
		9 Lolohowa	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.
4	Huruna	10 Mombawa Oladano	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.
		11 Hiliuso	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.
		12 Luahamofakhe	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.
		13 Olayama (Dusun III Simanaere)	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.

No	Kecamatan	Desa		Keterangan
		14	Tarewe (Dusun Soora)	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.
		15	Hilifalawu (Dusun II, Amorosa)	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.
		16	Tundrumbaho (Dusun II)	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak.
5	Aramo	17	Dao-dao	-
		18	Hilimejaya	-
		19	Hiliadolowa	-
6	Toma	20	Desa Ehosofayo	Berada di daerah perbukitan
		21	Desa Hilisataro-Nandisa	Berada di daerah perbukitan
7	Idanotae	22	Desa Orahua	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak/sebagian onderlagh
		23	Desa Hiligabungan	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak/sebagian onderlagh
		24	Desa Buhawa	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak/sebagian onderlagh
		25	Desa Balomabruzzo Orahua	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak/sebagian onderlagh
		26	Desa Harefa Orahua	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak/sebagian onderlagh
8	Lahusa	27	Desa Sarahililaza	Rabat Beton / Perbukitan
		28	Desa Harenoro	Rabat Beton / Perbukitan
9	Gomo	29	Desa Orahua	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak/sebagian onderlagh
		30	Desa Sukamaju Mohili	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak/sebagian onderlagh
		31	Desa Gunung Gabungan	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak/sebagian onderlagh
10	Lolomatua	32	Desa Hiliotalua	Jalan aspal dan sebagian jalan telford
		33	Desa Keondrafo	jalan telford namun belum bisa dilalui kendaraan
		34	DesaTuhemberua	Jalan setapak
		35	Desa Ewo	jalan aspel dan sebagian jalan telford
		36	Desa Botohilindruria	jalan telford tapi belum bisa dilalui kendaraan
		37	Desa Hilifaondrato	jalan setapak serta perbukitan
11	Mazo	38	Desa Orahuahili	-
		39	Desa Tafulu	-
		40	Desa Hilimaufa	-
		41	Desa Hilimbaruzo	-
		42	Desa Luahandroito	-
12	Onohazumba	43	Desa Soroma'asi	Akses jalan sudah diaspal
		44	Desa Onohazumba (Dusun 2 dan Dusun 3)	Akses jalan Rabat Beton
		45		
		46	Desa Sisarahili Oyo (Dusun 1)	Akses jalan Rabat Beton
		47	Desa Helefanikha (Dusun 4)	Akses jalan Onderlagh
13	O'o'u	48	Desa Suka Maju Dusun III Fadorohili	Berada di Daerah Perbukitan, Akses Jalan (Masih Jalan Setapak)
14	Boronadu	49	Desa Balohili Gomo	Berada di Daerah Perbukitan Akse Jalan (masih jalan Onderlagh)
		50	Desa Bohalu	Berada di Daerah Perbukitan Akse Jalan (masih jalan Onderlagh)
		51	Desa Tuhegafoa	Berada di Daerah Perbukitan Akse Jalan (masih jalan Onderlagh)

No	Kecamatan	Desa		Keterangan
15	Ulunoyo	52	Desa Hilimaera	Jalan Desa/ DD
		53	Desa Hilifakhe	Jalan Desa/ DD
		54	Desa Bawololomatua	Jalan Desa/ DD
		55	Desa Puncak Lolomatua	Jalan Desa/ DD
16	Maniamolo	56	Hiliaurifa Hilisimaetano	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak
		57	Bawohosi	Berada di daerah perbukitan, akses jalan setapak
17	Umbunasi	58	Foikhugaga	-
		59	Hilibadalu	-
		60	Sifaoroasi Mola	-
		61	Tobualo	-
18	Luahagundre Maniamolo	62	Desa Botohilisaloo	-
		63	Bawomaniamolo	-
		64	Orahili Faomasi	-
19	susua	65	Hilisibohou	Daerah Perbukitan
		66	Orahua Uluzoi	Daerah Perbukitan
		67	Hiliwaebu	Daerah Perbukitan
		68	Hilitobara	Daerah Perbukitan
		69	Hilimboho	Daerah Perbukitan
		70	Hiliorudua	Daerah Perbukitan
		71	Orahili Susua	Daerah Perbukitan
		72	Sisobahili	Daerah Perbukitan
		73	Dao-dao Zanuwa	Daerah Perbukitan
		74	Bintang Baru	Daerah Perbukitan
20	Uluidanotae	75	Fanedanu Sibohou	Daerah Perbukitan
		76	Silimabanua Umbunasi	Daerah Perbukitan
		77	Sindrolo	Daerah Perbukitan
21	Ulususua	78	Orudua sibohou	Daerah Perbukitan
		79	Sifaoroasi	Daerah Perbukitan
		80	Amandraya	Daerah Perbukitan
		81	Foikhu Fondrako	Daerah Perbukitan
22	Sidua'ori	82	Uluidanoduo, Dusun Hilitoele	Akses jalan setapak
		83	Olanori, Dusun Botohili	Akses jalan setapak
		84	Dusun Orahua soso Mondowe	Akses jalan setapak
		85	Hilizanuwe Dusun Toese	Akses jalan setapak
		86	Umbusohahau Dusun Hilikara	Akses jalan setapak
23	Pulau Pulau Batu	87	Desa Koto	Jarak PLN yang terdekat Desa Balogia yaitu PLN Desa Lasondre
		88	Desa Balogia	Jarak PLN yang terdekat dengan Desa Koto yaitu PLN Desa Lasondre
24	Tanah Masa	89	Bawo'orodua	Berada di daerah pesisir, Akses Jalan Semeniasi, dibutuhkan PLTS
		90	Hiligehe Sogawu	Daerah pesisir, Belum ada akses jalan, dibutuhkan PLTS
		91	Jeke	Daerah pesisir, Belum ada akses jalan, dibutuhkan PLTS
		92	Makole	Daerah pesisir, Belum ada akses jalan, dibutuhkan PLTS
		93	Sifaoroasi	Daerah pesisir, Belum ada akses jalan, dibutuhkan PLTS

No	Kecamatan	Desa		Keterangan
25	Pulau Pulau Batu Barat	94	Fuge	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		95	Sigese	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		96	Bawo sitora	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		97	Bintuang	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		98	Sibarani	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		99	Bawolawindra	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		100	Hayo	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		101	Hilizamorogo Tano	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
26	Pulau Pulau Batu Utara	102	Silima Banua Mare	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		103	Ziabiang	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		104	Limobiang	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		105	Memo	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		106	Bale-bale	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		107	Teluklimo	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		108	Wawa	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		109	Marit Baru	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		110	Mazino Lorang	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		111	Afore Gobo	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		112	Bale-bale Sibohou	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		113	Siofabanua Lorang	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
27	Simuk	114	Gobo	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		115	Silina	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		116	Maufa	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		117	Gondia	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		118	Gobo Baru	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		119	silina Baru	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
28	Hibala	120	Tebolo Melayu	jarak terlalu jauh, akses jalan setapak, dibutuhkan PLTS
		121	Hiliorudua Tebolo	jarak terlalu jauh, akses jalan setapak, dibutuhkan PLTS
		122	Hilinifaese	jarak terlalu jauh, akses jalan setapak, dibutuhkan PLTS
		123	Duru	jarak terlalu jauh, akses jalan setapak, dibutuhkan PLTS
		124	Tanomikinu	jarak terlalu jauh, akses jalan setapak, dibutuhkan PLTS
29	Pulau Pulau Batu Timur	125	Labuan Hiu	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		126	Labuan Bajau	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		127	Labuan Rima	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		128	Lambak	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		129	Bais	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		130	Mahang Labara	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		131	Adam	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		132	Labara	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		133	Bais Baru	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS
		134	Labuan rima Baru	Pulau terpisah, dibutuhkan PLTS

Sumber: Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2023

2.4.3.6 Perdagangan

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi Kabupaten Nias Selatan adalah merosotnya daya beli masyarakat akibat penurunan harga komoditas unggulan yang menjadi sumber penghidupan utama, seperti karet dan komoditas perkebunan lainnya. Selain itu, masih terbatasnya sarana perdagangan, terutama dalam hal distribusi ke pasar, baik di pusat kota maupun di des menjadi kendala tersendiri. Permasalahan ini diperparah dengan belum adanya kebijakan yang jelas dan terintegrasi mengenai pengaturan mata rantai distribusi dari hulu ke hilir.

Nilai ekspor bersih perdagangan di Kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2023 dapat dilihat sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.83

Nilai Ekspor Bersih Perdagangan di Kabupaten Nias Selatan Tahun, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Nilai Ekspor (ton)	23.520	20.880	20.880	25.440	25.440	25.350	24.550	-
Nilai Impor (ton)	4.800	7.440	7.920	7.680	8.160	8.110	8.870	8.760
Total	28.320	28.320	28.800	31.680	33.600	33.460	33.420	33.420

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan 2024

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha Di kabupaten Nias Selatan tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.84

Cakupan Bina Kelompok Pedagang/Usaha informal di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah kelompok pedagang/usaha informasi yang mendapat bantuan binaan	319	309	372	332	357	350	350	355
Jumlah seluruh pedagang/usaha informasi	2.900	3.090	3.100	3.320	3.570	3.510	3.510	3.520
Persentase (%)	11,00	10,00	12,00	10,00	10,00	9,97	9,97	10,09

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Nias Selatan 2024

2.4.3.7 Perindustrian

Permasalahan pembangunan di bidang perindustrian Kabupaten Nias Selatan antara lain meliputi masih lemahnya budaya industri, pemanfaatan kawasan industri yang belum optimal, serta keterbatasan ketersediaan bahan baku lokal. Selain itu, akses terhadap informasi permodalan masih kurang, tingkat inovasi produk dan penguasaan teknologi masih rendah, serta kapasitas sumber daya manusia belum memadai. Fasilitas ruang pamer untuk hasil produksi belum tersedia, kualitas produk belum memenuhi standar, dan tingkat investasi di sektor industri masih rendah. Permasalahan-permasalahan ini menjadi tantangan dalam mendorong pertumbuhan sektor industri.

2.4.4 Urusan Penunjang

Urusan penunjang merupakan pondasi penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan di pemerintah daerah. Urusan ini mencakup pengelolaan sistem keuangan, kepegawaian, perencanaan pembangunan, dan pengawasan yang harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan berintegritas. Tanpa penguatan di sektor penunjang, pelaksanaan program pelayanan publik dan pembangunan daerah akan menghadapi berbagai hambatan, mulai dari ketidakefisienan, rendahnya kualitas layanan, hingga potensi penyimpangan anggaran.

Fokus utama aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat administratif adalah termasuk pengelolaan keuangan daerah, kepegawaian, perencanaan pembangunan, dan pengawasan internal.

2.4.4.1 Pemerintahan Umum

Urusan penunjang pemerintahan umum adalah bagian dari fungsi pemerintahan daerah yang bertujuan mendukung kelancaran pelaksanaan urusan wajib dan pilihan, khususnya dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan yang bersifat administratif. Ada juga beberapa indikator yang

Administrasi pemerintahan Kabupaten Nias Selatan terdiri atas beberapa tingkat wilayah yaitu kecamatan, desa, dan kelurahan. Penguatan kapasitas administrasi di ketiga tingkat ini sangat penting untuk mempercepat pembangunan daerah, memperluas jangkauan pelayanan publik, serta memastikan pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif. Perkembangan kecamatan, desa dan kelurahan di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.85
Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Kecamatan	35	35	35	35	35	35	35	35
2	Desa	459	459	459	459	459	459	459	459
3	Kelurahan	2	2	2	2	2	2	2	2

Sumber: Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2024

Kemudian dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran di tingkat daerah, Kabupaten Nias Selatan didukung oleh lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Jumlah anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan sebanyak 35 orang, yang berasal dari berbagai daerah

pemilihan di seluruh wilayah kabupaten. Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.86
Jumlah Anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan menurut Jenis Kelamin, 2023

Partai Politik	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	3	2	5
Partai Nasional Demokrat	5	-	5
Partai Golongan Karya	4	-	4
Partai Berkarya	3	1	4
Partai Demokrat	3	1	4
Pertai Perindo	3	-	3
Partai Garuda	3	-	3
Partai Gerakan Indonesia Raya	2	-	2
Partai Amanat Nasional	1	1	2
Partai Kebangkitan Bangsa	1	-	1
Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1	-	1
Parta Solidaritas Indonesia	-	1	1
Jumlah	29	6	35

Sumber : Kabupaten Nias Selatan Dalam Angka 2024

Dari tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan didominasi oleh kaum laki-laki dimana jumlahnya 29 orang sedangkan perempuan hanya berjumlah 6 orang. Dari 35 orang anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mengumbangkan 3 orang laki-laki dan 2 orang perempuan.

Untuk mengukur efektivitas dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, digunakan sejumlah indikator kinerja seperti Indeks Reformasi Birokrasi (IRB), Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Indeks Inovasi Daerah, dan Indeks Pelayanan Publik. Peningkatan capaian pada indikator-indikator ini mencerminkan semakin baiknya kapasitas institusional, transparansi, akuntabilitas, serta responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat.

2.4.4.1.1 Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah bagian penting dari evaluasi kinerja reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Reformasi birokrasi bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan. Indeks ini mengukur berbagai aspek seperti tata laksana, manajemen SDM, penguatan kelembagaan, dan pengawasan.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias Selatan mengalami tren perbaikan bertahap sejak pertama kali diukur pada tahun 2021. Pada tahun 2021 dan 2022, indeks masih berada pada kategori C dengan skor masing-masing 40,33 dan 42,33, mencerminkan birokrasi yang masih dalam tahap awal perbaikan dengan kinerja rendah. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan, ditandai dengan kenaikan skor menjadi 51,76 dan kategori berubah menjadi CC, yang menunjukkan adanya perbaikan dalam aspek-aspek reformasi birokrasi seperti tata kelola, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pengelolaan SDM.

Peningkatan ini merupakan sinyal positif bahwa upaya modernisasi birokrasi mulai membuahkan hasil, meskipun capaian tersebut masih tergolong rendah menurut standar nasional. Ke depan, dibutuhkan konsistensi dalam implementasi reformasi birokrasi, peningkatan kapasitas aparatur, serta perbaikan sistem pengawasan dan evaluasi kinerja untuk mendorong lompatan ke kategori yang lebih tinggi.

Tabel 2.87
Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Reformasi Birokrasi	-	-	C (40,33)	C (42,33)	CC (51,76)

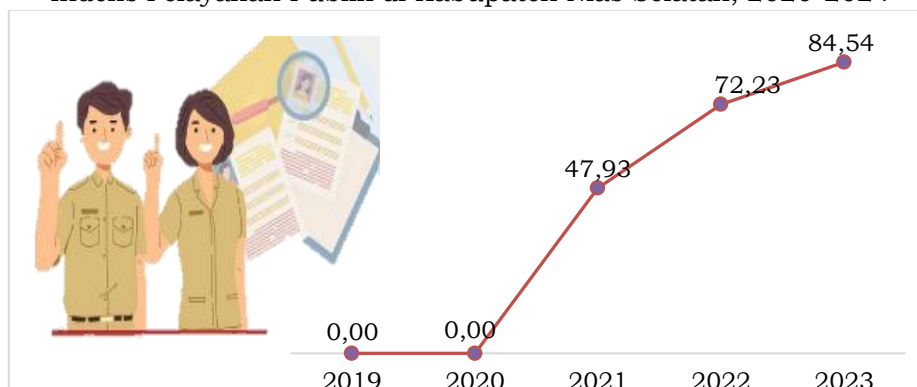
Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.4.1.2 Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik mengukur kualitas layanan instansi pemerintah berdasarkan kepuasan masyarakat terhadap aspek seperti transparansi, kecepatan, akurasi, aksesibilitas, dan akuntabilitas. Indeks yang tinggi mencerminkan layanan yang efektif, cepat, dan memuaskan, sedangkan indeks rendah menunjukkan perlunya perbaikan birokrasi, peningkatan profesionalisme aparatur, dan pemanfaatan teknologi.

Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan sejak tahun 2021. Setelah mencatatkan angka 0,00 pada tahun 2019 dan 2020, indeks melonjak menjadi 47,93 pada 2021, kemudian meningkat lagi menjadi 72,23 pada 2022, dan mencapai 84,54 pada 2023. Peningkatan ini menunjukkan adanya upaya serius pemerintah daerah dalam memperbaiki kualitas layanan publik, baik dari sisi kecepatan, aksesibilitas, maupun kepuasan masyarakat. Percepatan dalam dua tahun terakhir menandakan reformasi tata kelola, digitalisasi layanan, peningkatan kapasitas aparatur, serta komitmen memperluas akses pelayanan ke masyarakat.

Grafik 2.38
Indeks Pelayanan Publik di Kabupaten Nias Selatan, 2020-2024



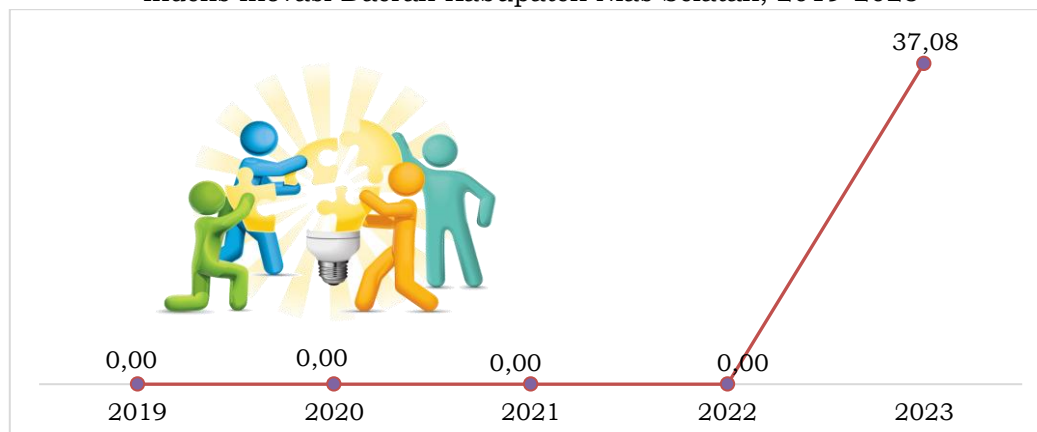
Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2024 (data diolah)

2.4.4.1.3 Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kapasitas dan kinerja inovasi suatu daerah dalam mendorong pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. IID dikembangkan oleh Badan Strategis Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri sebagai alat ukur untuk menilai sejauh mana pemerintah daerah mampu menciptakan, mengembangkan, dan menerapkan inovasi dalam berbagai sektor, termasuk pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan perekonomian.

Kabupaten Nias Selatan menghadapi tantangan dalam pengembangan inovasi daerah, sebagaimana tercermin dalam Indeks Inovasi Daerah (IID) yang dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri. Selama periode 2019-2022, Kabupaten Nias Selatan tidak memiliki nilai IID karena tidak ada inovasi yang terdokumentasikan. Upaya untuk mendokumentasikan inovasi baru dimulai pada tahun 2022, yang berkontribusi terhadap IID tahun 2023 sebesar 37,08, yang dikategorikan sebagai "inovatif".

Grafik 2.39
Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023



Sumber : Indeks Inovasi Daerah, 2022-2024 (data diolah)

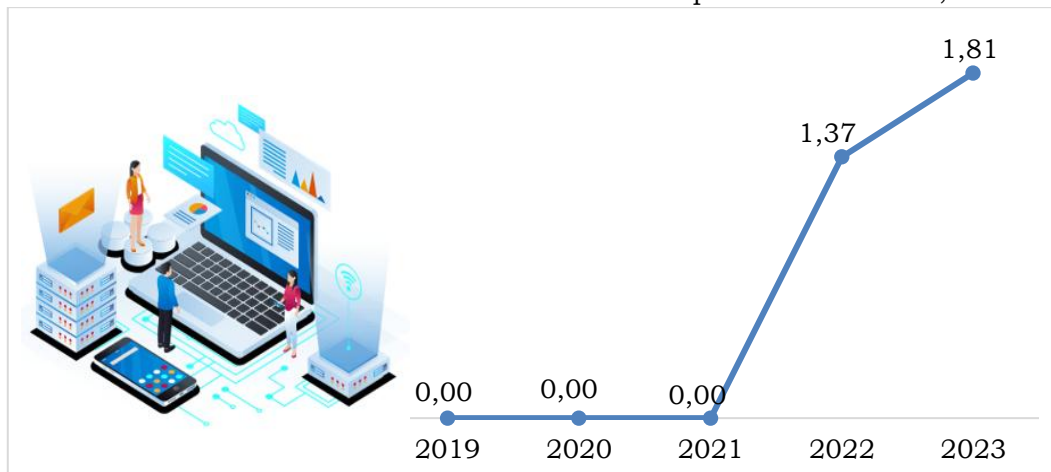
2.4.4.1.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah nilai yang menunjukkan tingkat kematangan penerapan SPBE di instansi pemerintah. Indeks ini dihitung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Indeks SPBE berperan sebagai tolak ukur keberhasilan transformasi digital pemerintahan dan menjadi dasar evaluasi serta perbaikan kebijakan berbasis teknologi.

Pada tahun 2019-2021, indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Nias Selatan masih berada di angka 0,00, yang menunjukkan bahwa implementasi sistem berbasis elektronik dalam pemerintahan daerah belum dapat dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB). Namun, pada tahun 2022, terjadi peningkatan signifikan dengan indeks mencapai 1,37, menandakan dimulainya penerapan sistem elektronik dalam pemerintahan yang kemudian dievaluasi oleh Menpan RB. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan kenaikan indeks menjadi 1,81. Perkembangan ini mencerminkan kemajuan dalam digitalisasi pemerintahan serta reformasi birokrasi di Kabupaten Nias Selatan, yang berkontribusi pada peningkatan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik.

Grafik 2.40

Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kabupaten Nias Selatan, 2019-2023



Sumber : Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (data diolah)

2.4.4.2 Aparatur dan Kepegawaian

Jumlah ASN Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 adalah 4.158 orang dengan jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah sebanyak 33 orang dan jumlah jabatan 887 orang. Jika dibandingkan tahun 2022, jumlah ASN bertambah sebanyak 276 orang. Peningkatan ini terjadi dikarenakan pengangkatan PPPK

(Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru Tahun 2023. Peningkatan jumlah jabatan juga naik sebanyak 7 orang di tahun 2023. Hal ini dikarenakan Penambahan Unit Kerja RSUD Nias Selatan (4 Jabatan) dan Penambahan Jabatan Irban V di Inspektorat.

ASN yang mengikuti diklat di tahun 2023 adalah 7 orang untuk Diklat PIM III. Sedangkan kasus pelanggaran yang ditangani adalah sebanyak 39 kasus. Berikut data mengenai perkembangan ASN di Kabupaten Nias Selatan Tahun 2016-2023.

Tabel 2.88
Perkembangan ASN di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan (tahun)	-	-	4	4	4	4	4	4
Jumlah pejabat ASN yang telah mengikuti diklat struktural (orang)	-	-	-	5	n/a	-	-	13
Jumlah jabatan tinggi pada instansi pemerintah	-	-	35	35	35	33	33	33
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah (orang)	-	-	-	-	2.129	2.020	2.129	2.513
Jumlah ASN	-	-	4.307	4.193	3.857	3.699	3.882	4.158
Jumlah total jabatan	-	-	881	881	882	882	882	887
Jumlah kasus pelanggaran yang ditangani	-	-	16	6	31	9	12	39
Jumlah ASN yang ikut Diklat PIM II	-	-	-	4	n/a	-	2	0
Jumlah ASN yang ikut Diklat PIM III	-	-	-	2	n/a	-	3	7
Jumlah ASN yang ikut Diklat PIM IV	-	-	-	1	n/a	-	-	6

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan 2024

Struktur Organisasi Kabupaten Nias Selatan juga dapat dibagi dalam beberapa memiliki beberapa tingkatan jabatan Eselon atau status tingkatan pangkat dalam jabatan struktural. Berikut jumlah ASN berdasarkan eselon:

Tabel 2.89
Jumlah ASN di Kabupaten Nias Selatan menurut Eselon, 2016-2023

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Eselon II	-	-	38	32	32	26	32	32
2	Eselon III	-	-	207	194	194	193	184	195
3	Eselon IV	-	-	430	446	446	471	450	490

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Nias Selatan 2024

2.4.4.3 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan dalam bentuk uang maupun

barang yang dapat dijadikan milik daerah dan berkaitan dengan pelaksanaan hak serta kewajiban tersebut. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Tujuan diaturnya keuangan daerah oleh pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan sumber daya keuangan daerah. Selain itu meningkatkan kesejahteraan daerah dan mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan tidak terlepas dari kebijakan yang ditempuh, baik dari sisi efektivitas pengelolaan penerimaan pendapatan yang dijabarkan melalui target APBD dan realisasinya, maupun dilihat dari efisiensi dan efektivitas pengeluaran daerah melalui belanja tidak langsung dan belanja langsung. Secara umum gambaran pengelolaan keuangan daerah yang berkaitan dengan pendapatan dan belanja daerah kurun waktu tahun 2016-2023 telah menunjukkan efektivitas dan efisiensi yang menggembirakan. Ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan dengan baik dan diharapkan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

Kondisi ini ditandai dengan semakin meningkatnya Penerimaan Daerah khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan terjadinya penghematan dari sisi belanja. Selain itu, di tahun 2022 dan tahun 2023, Kabupaten Nias Selatan dalam pengelolaan keuangan daerah memperoleh peringkat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Opini BPK. Hal ini menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan terhadap pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Nias Selatan.

Tabel 2.90
Kondisi Keuangan Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023 (Juta Rupiah)

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Total SILPA	68.059,9 7	120.128,8 5	113.461,4 0	113.461,4 0	108.964,3 9	13.193,70	2.056,42	73.250,78
Jumlah Total APBD	810.002, 82	1.066.164 ,75	1.171.732 ,69	1.512.733 ,43	1.674.906 ,66	1.549.477 ,55	1.391.469 ,80	1.619.975 ,65
Persentase SILPA		11,27	9,68	7,50	6,51	0,85	0,15	4,52
Jumlah Belanja bidang urusan pendidikan	174.165, 58	201.200,9 1	194.596,9 3	202.106,8 7	350.336,5 5	261.660,9 1	341.845,9 1	339.824,6 3
Persentase Belanja Pendidikan (20%)	21,5	18,87	16,61	15,44	20,92	16,89	24,57	20,98
Jumlah Belanja bidang	114.765, 04	129.506,9 3	87.999,94	116.423,6 5	214.022,9 6	241.375,1 2	144.724,0 2	143.085,6 3

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
urusan Kesehatan								
Persentase Belanja Kesehatan (10%)	14,17	12,15	7,51	8,9	12,78	15,58	10,40	8,83
Jumlah Belanja Operasional	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	733.724	853.183
Jumlah Belanja Modal	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	210.082	289.204
Jumlah Belanja Tidak Terduga	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	4.688	9.559
Jumlah Belanja Transfer	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	442.975	468.030
Jumlah Belanja Langsung	284.237,96	381.800,68	498.227,40	553.392,02	684.433,88	686.010,21	n/a	n/a
Jumlah Belanja Tidak Langsung	525.764,85	684.364,07	673.505,29	755.472,73	990.472,78	863.467,34	n/a	n/a
Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	35,09% : 64,19%	35,8% : 64,19%	42,52% : 57,48%	42,28% : 57,72%	40,86% : 59,14%	44,27% : 55,73%	n/a	n/a
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	Disclaimer	Disclaimer	Disclaimer	Disclaimer	WDP	WDP	WTP	WTP

Sumber : BPKPAD Kabupaten Nias Selatan 2024

2.4.4.4 Perencanaan Pembangunan

Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan telah diupayakan sejalan dan terpadu dengan perencanaan pembangunan nasional dan Provinsi Sumatera Utara untuk mewujudkan komitmen Kabupaten Nias Selatan menyelesaikan permasalahan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan dengan berdasarkan Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 25 tahun 2014 maka pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan wajib menyusun dokumen perencanaan meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penjabarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Berikut Cakupan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan tahun 2019 sampai dengan tahun 2023:

Tabel 2.91
Cakupan Bidang Perencanaan Pembangunan Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah diterapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah diterapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah diterapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	-	51	70	65	62	76	80,56	86

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nias Selatan, 2024

2.4.4.5 Penanggulangan Bencana Daerah

Kajian Risiko Bencana dilakukan dengan melakukan perhitungan pada komponen bahaya (*hazard*), kerentanan (*vulnerability*), dan kapasitas (*capacity*) di masing-masing provinsi dan kabupaten/kota. Komponen bahaya adalah fenomena alam yang dapat menyebabkan bencana seperti gempa bumi, letusan gunung api, tsunami, banjir, dan lainnya. Komponen kerentanan adalah (1) kondisi fisik, (2) sosial budaya, (3) ekonomi, dan (4) lingkungan yang rentan terpapar bencana. Sementara komponen kapasitas adalah dari unsur ketahanan daerah seperti kebijakan dan kelembagaan, Pendidikan dan pelatihan, logistik, kapasitas mitigasi, pencegahan, kesiapsiagaan dan penanganan darurat; dan kapasitas pemulihan.

Dari 514 Kabupaten kabupaten/ kota di Indonesia terdapat 221 kabupaten kota yang berada pada kelas indeks risiko tinggi, Kabupaten Nias Selatan termasuk di dalamnya. Dalam penilaian Indeks Risiko Bencana Indonesia ini telah menggunakan parameter-parameter bahaya, kerentanan dan kapasitas sebagai penghitungan risiko bencana.

Tujuan Indeks Risiko Bencana Indonesia antara lain untuk:

1. Memberikan informasi tingkat risiko bencana tiap-tiap kabupaten/kota di Indonesia sesuai dengan bahaya yang dimiliki dan gabungan dari bahaya tersebut.
2. Memberikan gambaran perbandingan tingkat risiko dari suatu daerah dibandingkan dengan daerah yang lain.
3. Melakukan analisis sebagai dasar dari kebijakan kelembagaan, pendanaan, perencanaan, statistik dan operasionalisasi penanggulangan bencana.

Berikut adalah Nilai Indeks Resiko Bencana Kabupaten Nias Selatan yang tercatat dalam Indeks Resiko Bencana Indonesia Tahun 2016-2023:

Tabel 2.92
Indeks Resiko Bencana Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Resiko Bencana	202,00 (Tinggi)	202,00 (Tinggi)	202,00 (Tinggi)	202,00 (Tinggi)	202,00 (Tinggi)	187,94 (Tinggi)	191,83 (Tinggi)	190,52 (Tinggi)

Sumber : Indeks Resiko Bencana Indonesia 2016-2023

2.4.4.6 Pengawasan

Dengan adanya komitmen pemerintah untuk mewujudkan *good governance* maka kinerja atas penyelenggaraan organisasi pemerintah menjadi perhatian pemerintah untuk dibenahi, salah satunya melalui sistem pengawasan yang efektif, dengan meningkatkan peran dan fungsi dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). Fungsi APIP yang berjalan dengan baik dapat mencegah kecurangan, menghasilkan keluaran yang berharga untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah pada waktu yang akan datang.

Persentase capaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP mengalami penurunan pada saat LHP terbit, hal ini disebabkan adanya temuan pemeriksaan pada LHP yang terbit, setelah dilaksanakan tindak lanjut atas LHP yang telah terbit tersebut maka persentase capaian tindak lanjut akan mengalami kenaikan dengan adanya penyelesaian terhadap temuan-temuan pemeriksaan. Pada tabel dibawah ini dapat kita lihat perkembangan cakupan pengawasan di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2023.

Tabel 2.93
Cakupan Pengawasan di Kabupaten Nias Selatan, 2016-2023

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Jumlah temuan yang ditindak lanjuti	109	85	67	16	1	22	25	22
2	Jumlah Total Temuan	130	101	119	95	7	51	28	11
3	Persentase tindak lanjut temuan (%)	84	84	56	17	14	43	48	75,21
4	Jumlah Total ASN	n/a	n/a	4.307	4.193	3.857	3.699	3.565	3.879
5	Jumlah Temuan BPK	173	16	23	26	13	17	17	16

Sumber : Inspektorat Kabupaten Nias Selatan 2024

2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2006-2026

2.5.1 Refleksi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan

Berbagai kebijakan dilakukan untuk meningkatkan pembangunan Kabupaten Nias Selatan Selama dua dekade terakhir. Hasil yang tercapai adalah dari penurunan angka kemiskinan, penurunan angka pengangguran, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang konsisten serta peningkatan PDRB perkapita. Walaupun di beberapa indikator yang menjadi capaian pembangunan tersebut terjadi pertumbuhan yang naik

turun atau cenderung fluktuatif. Beberapa diantaranya disebabkan oleh perubahan tahun dasar atau acuan penghitungan produk domestik bruto tahun 2010 di dan pandemi covid di awal tahun 2020 sampai di tahun 2023.

Refleksi Pembangunan RPJPD 2006–2026 menunjukkan tren perbaikan pada berbagai indikator utama pembangunan, seperti Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, tingkat kemiskinan, dan pengangguran. Meskipun terdapat fluktuasi dalam pencapaiannya, arah pembangunan daerah tetap konsisten dalam menargetkan penguatan ekonomi kerakyatan serta peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat.

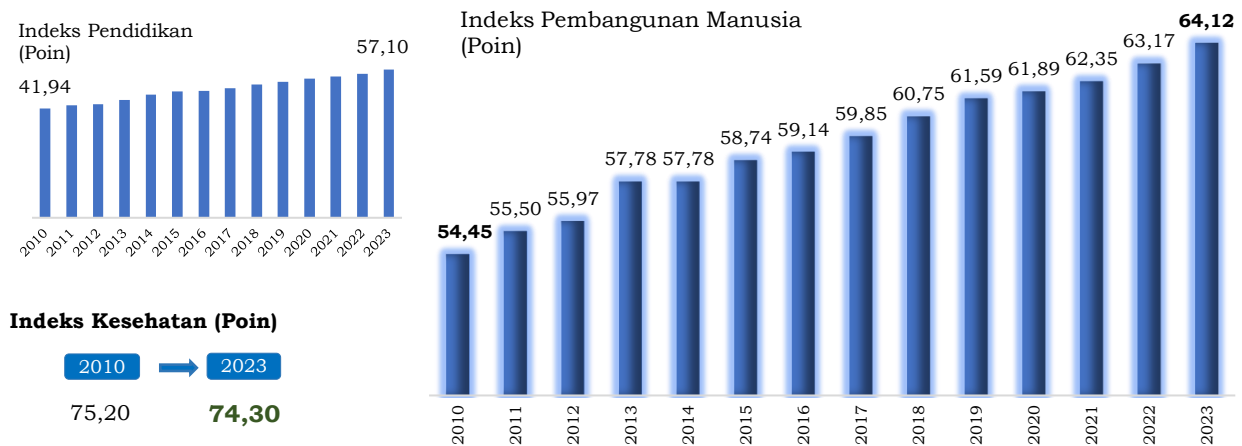
2.5.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Sumber daya manusia (SDM) memegang peran kunci dalam mendorong peningkatan kesejahteraan daerah. SDM berperan sebagai objek pembangunan yang harus ditingkatkan kualitas dan kesejahtraannya, sekaligus sebagai subjek yang menjadi motor penggerak pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas SDM itu sendiri. Untuk mengukur pembangunan SDM, digunakan tiga indikator utama: Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, dan Indeks Pengeluaran.

Pada tahun 2010, Indeks Kesehatan Kabupaten Nias Selatan berada pada angka 75,02 poin, namun mengalami sedikit penurunan menjadi 74,30 poin pada tahun 2023. Di sisi lain, Indeks Pendidikan menunjukkan lonjakan signifikan sebesar 15,07 poin dalam 13 tahun terakhir, dari nilai awal ke posisi 57,01 poin pada tahun 2023. Meskipun Indeks Kesehatan relatif stagnan, peningkatan tajam pada Indeks Pendidikan mencerminkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebagai indikator gabungan menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Pada tahun 2010, IPM Kabupaten Nias Selatan tercatat sebesar 54,45 poin dan terus meningkat selama 13 tahun terakhir, dengan rata-rata IPM sebesar 59,44 poin. Puncaknya, pada tahun 2023 IPM mencapai 64,12 poin. Capaian ini menegaskan bahwa meskipun masih terdapat tantangan, secara umum pembangunan manusia di Kabupaten Nias Selatan mengalami kemajuan yang nyata dan berkelanjutan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.41
Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan dan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Nias Selatan, 2010-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (*data diolah*)

Dari grafik tersebut diatas dapat dilihat bahwa IPM menunjukkan *tren* pertumbuhan positif dan konsisten, menggambarkan bahwa Kabupaten Nias Selatan mengalami peningkatan di tiga dimensi utama IPM: kesehatan, pendidikan, dan daya beli. Meski demikian, nilai 64,12 pada 2023 masih tergolong dalam kategori sedang, sehingga ke depan perlu akselerasi, khususnya di sektor pendidikan dan ekonomi untuk mendorong IPM ke kategori lebih tinggi.

2.5.1.2 Angka Kemiskinan

Masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah termasuk Kabupaten Nias Selatan. Angka kemiskinan dapat menjadi instrumen tangguh bagi pengambil kebijakan dalam memfokuskan perhatian pada kondisi hidup orang miskin. Beberapa indikator yang digunakan adalah Garis Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin, Persentase Penduduk Miskin, Indeks Keparahan Kemiskinaan dan Indeks Kedalaman Kemiskinan.

Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Garis kemiskinan Kabupaten Nias Selatan awalnya berkisar 116.885 Rupiah per Kapita per Bulan di tahun 2006, namun di tahun 2023 garis kemiskinan terukur dengan nilai Rp. 379.929 Rupiah per Kapita per Bulan.

Jumlah penduduk miskin di tahun 2006 di Kabupaten Nias Selatan adalah sebanyak 97.200 orang, angka ini berhasil di tekan hingga 54.160 orang di tahun

2022. Dengan angka tersebut, Persentase penduduk miskin di Kabupaten Nias Selatan adalah sebesar 37,66 Persen di tahun 2006 dan berhasil turun sebanyak 21,18 persen di tahun 2022. Persentase penduduk miskin di tahun 2023 tersebut adalah 16,48 persen.

Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kabupaten Nias Selatan juga berhasil di tekan selama 20 tahun terakhir. Di tahun 2006, Indeks Kedalaman Kemiskinan adalah 6,46 Persen dan Indeks Keparahan Kemiskinan adalah 1,75 Persen. Indeks Kedalam kemiskinan berhasil di tekan ke angka 3,04 persen di tahun 2023 dan Indeks Keparahan Kemiskinan berhasil di tekan ke angka 0,82 Persen di tahun 2023. Artinya selama hampir dua dekade terakhir, Kabupaten Nias Selatan menunjukkan kemajuan nyata dalam penanggulangan kemiskinan. Garis kemiskinan meningkat seiring membaiknya standar hidup, sementara jumlah dan persentase penduduk miskin terus menurun. Penurunan Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan mencerminkan peningkatan kualitas upaya pengentasan kemiskinan serta efektivitas program pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Grafik 2.42

Indeks Kedalaman Kemiskinan(P1), Indeks Keparahan Kemiskinan(P2), Peresentase Penduduk Miskin, Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan Kabupaten Nias Selatan, 2006-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (*data diolah*)

2.5.1.3 Angka Pengangguran

Pengangguran merupakan salah satu penyakit ekonomi yang sangat berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi. Pengangguran mengakibatkan orang tidak memiliki pendapatan dan mendorong mereka jatuh ke jurang kemiskinan. Secara umum pemerintah mengatasi pengangguran dengan

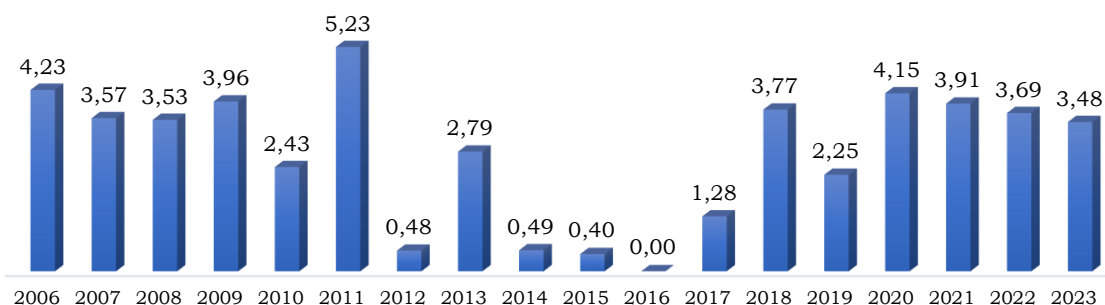
mengupayakan memperluas kesempatan kerja, baik di sektor pemerintahan maupun sektor swasta.

Masalah pengangguran selalu menjadi permasalahan yang sulit terpecahkan. Sebab jumlah penduduk yang bertambah semakin besar tiap tahunnya, akan menyebabkan meningkatnya jumlah orang pencari kerja, dan seiring itu tenaga kerja juga akan bertambah.

Angka pengangguran di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuasi. Awalnya di tahun 2005, angka pengangguran Kabupaten Nias Selatan adalah 4,78 persen. Penurunan angka pengangguran terus dapat ditekan sampai pada tahun 2008 dengan capaian 3,53 persen. Di tahun 2009, angka pengangguran naik menjadi 3,96 persen. Angka pengangguran mengalami naik turun semenjak tahun tersebut. Angka pengangguran tertinggi Kabupaten Nias Selatan selama 17 tahun terakhir adalah 5,23 persen yang diperoleh pada tahun 2011 dan angka pengangguran terendah adalah 0,40 persen yang diperoleh di tahun 2015.

Penurunan angka pengangguran tertinggi dicapai di tahun 2012, dimana pada tahun tersebut angka pengangguran berhasil ditekan hingga 0,48 persen. Sedangkan lonjakan peningkatan angka pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2011, yaitu naik sebesar 2,80 persen. Rata-rata angka pengangguran Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2005-2022 adalah 2,86 persen.

Grafik 2.43
Angka Pengangguran Kabupaten Nias Selatan, 2006-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (*data diolah*)

Secara umum, grafik diatas memperlihatkan adanya periode ketidakstabilan pada pertengahan dekade pertama, diikuti dengan fase pemulihan yang lebih stabil dalam lima tahun terakhir. Pola fluktuatif ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi Kabupaten Nias Selatan rentan terhadap gangguan besar, namun dalam beberapa tahun terakhir upaya stabilisasi mulai menunjukkan hasil. Meski

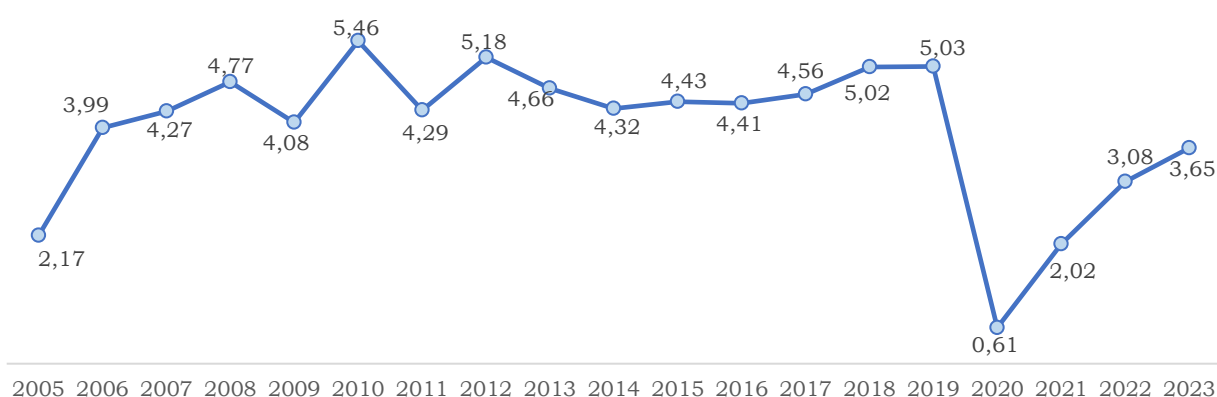
demikian, upaya keberlanjutan pembangunan, mitigasi risiko bencana, serta penguatan ekonomi lokal tetap perlu menjadi prioritas.

2.5.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang amat penting dalam menilai kinerja suatu perekonomian, terutama untuk melakukan analisis tentang hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan suatu negara atau suatu daerah. Ekonomi dikatakan mengalami pertumbuhan apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dapat menghasilkan tambahan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu negara atau suatu wilayah yang terus menunjukkan peningkatan menggambarkan bahwa perekonomian negara atau wilayah tersebut berkembang dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2023 mengalami fluktuatif dengan capaian tertinggi berada di angka 5,46 persen yang diperoleh pada tahun 2010. Untuk capaian terendah berada di angka 0,61 pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan di tahun tersebut terjadi pandemi *covid-19* yang menyebabkan melemahnya perekonomian di Indonesia bahkan secara global. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan selama 17 tahun tersebut adalah 4,00 persen. Pascapandemi, Kabupaten Nias Selatan menunjukkan tren pemulihan ekonomi yang positif, ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan, dan pemberdayaan UMKM dan penurunan angka kemiskinan dan stabilitas layanan dasar menjadi indikator keberhasilan awal pemulihan.

Grafik 2.44
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan, 2005-2023

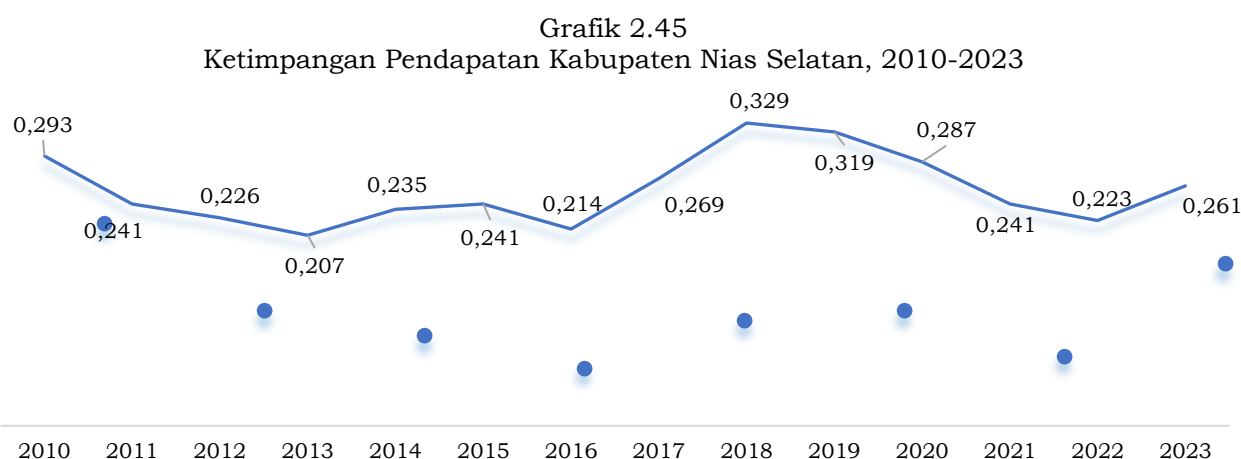


Sumber: Badan Pusat Statistik (*data diolah*)

2.5.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Masalah ketimpangan pendapatan telah menjadi fokus perhatian sejak lama untuk segera diatasi di negara maju dan negara sedang berkembang. Sebagaimana diketahui, pada agenda pembangunan global yang terdapat dalam Sustainable Development Goals (SDGs) memiliki tujuan untuk memastikan adanya kesempatan yang sama serta mengurangi ketimpangan pendapatan. Pada dasarnya ketimpangan pendapatan akibat tidak meratanya distribusi pendapatan dapat diminimalisir melalui pembangunan ekonomi.

Ketimpangan pendapatan Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2006 adalah 0,293 poin dan pada tahun 2023 diperoleh poin sebesar 0,261. Perkembangan Ketimpangan pendapatan selama periode tersebut mengalami fluktuatif dan stagnan di angka 0,2 kecuali pada tahun 2018 dan pada tahun 2019 berada di angka 0,329 poin dan 0,319 poin yang juga merupakan peningkatan tertinggi terhadap capaian ketimpangan pendapatan Kabupaten Nias Selatan. Untuk capaian terbaik yang diperoleh Kabupaten Nias Selatan selama 17 tahun terakhir adalah 0,207 poin pada tahun 2013. Rata-rata capaian ketimpangan pendapatan Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2005-2022 adalah 0,256 poin.



Sumber: Badan Pusat Statistik (*data diolah*)

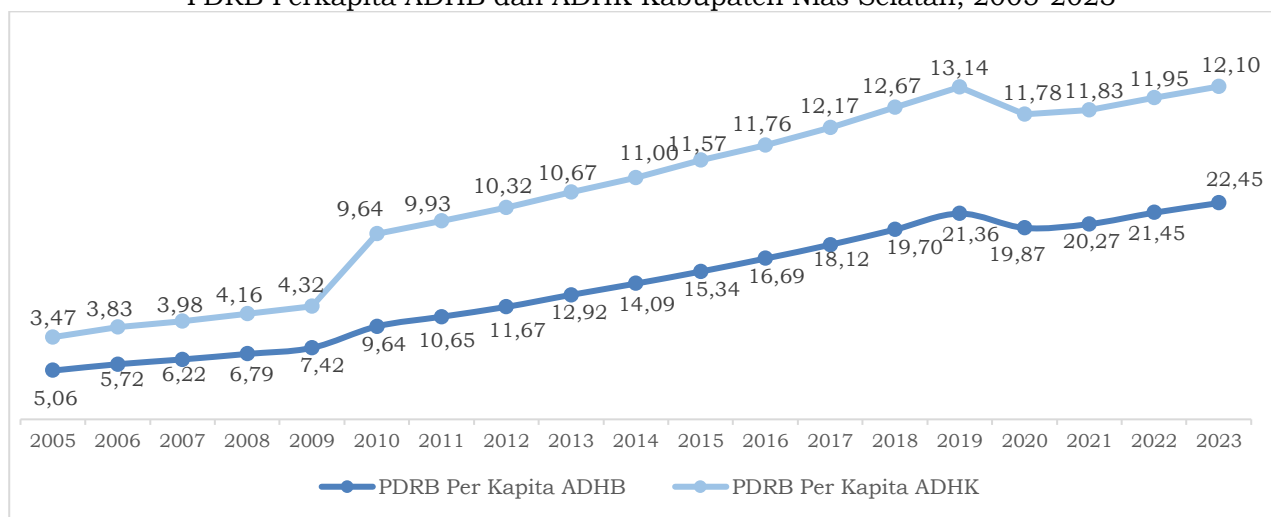
Secara keseluruhan, Kabupaten Nias Selatan mengalami penurunan ketimpangan pendapatan dari tahun 2006 ke 2023, meskipun ada fluktuasi yang cukup besar di beberapa tahun. Pencapaian terbaik tercatat pada tahun 2013, namun secara keseluruhan, stabilitas ketimpangan pendapatan terlihat dengan rata-rata 0,256 poin dari tahun 2005-2022. Tantangan utama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan adalah mengatasi fluktuasi yang terjadi pada beberapa tahun tertentu dan menjaga agar tingkat ketimpangan tidak meningkat kembali.

2.5.1.6 PDRB per Kapita

PDRB per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk yang didapat dari hasil bagi antara PDRB dengan populasi di suatu wilayah pada tahun tertentu. Semakin tinggi pendapatan per kapita, maka wilayah tersebut semakin makmur. Tercatat PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 adalah 22,45 Juta Rupiah per Jiwa. Angka ini merupakan pertumbuhan yang jauh meningkat jika dilihat di tahun 2006 yang tercatat hanya sebesar 5,06 Juta Rupiah per Jiwa. Memang sempat terjadi penurunan di tahun 2020 dimana PDRB per Kapita Atas Dasar harga Berlaku adala sebesar 19,97 Juta Rupiah per Jiwa.

Hal ini juga terjadi pada PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan. Terjadi pertumbuhan nilai yang cukup signifikan selama 18 tahun terakhir. Pada tahun 2006 PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan adalah senilai 3,47 Juta Rupiah per Jiwa. Terus mengalami pertumbuhan hingga pada tahun 2019 sempat menyentuh angka 13,14 Juta Rupiah per Jiwa dan turun ke angka 11,78 Juta Rupiah per jiwa di tahun 2020. PDRB per Kapita atas dasar harga Konstan pada tahun 2023 tercatat sebesar 12,10 Juta Rupiah per Jiwa.

Grafik 2.46
PDRB Perkapita ADHB dan ADHK Kabupaten Nias Selatan, 2005-2023



Sumber: Badan Pusat Statistik (*data diolah*)

2.5.2 Evaluasi Arah Pembangunan RPJPD 2006-2026

Dokumen RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 tidak memuat sasaran pokok beserta indikator dan targetnya atau hanya memuat arah pembangunan sehingga menyulitkan untuk dilaksanakan evaluasi sebagaimana diharapkan formulir E.56 dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Dengan tidak

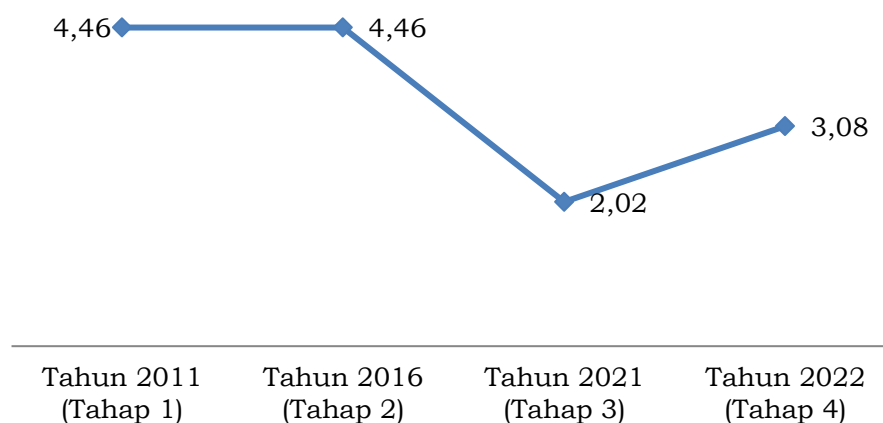
sesuainya substansi yang diharapkan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang bersifat kualitatif maka evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 dilakukan secara kuantitatif kedalam indikator yang relevan dengan arah pembangunan RPJPD. Capaian terhadap Indikator-indikator yang relevan dengan arah pembangunan RPJPD diuraikan sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan tangguh

a. Pertumbuhan ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 mengalami fluktuatif dengan capaian tertinggi berada di angka 5,46 persen yang diperoleh pada tahun 2010. Untuk capaian terendah berada di angka 0,61 pada tahun 2019. Hal ini dikarenakan di tahun tersebut terjadi pandemi covid-19 yang menyebabkan melemahnya perekonomian di Indonesia bahkan secara global. Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Nias Selatan berdasarkan tahap pelaksanaan RPJPD.

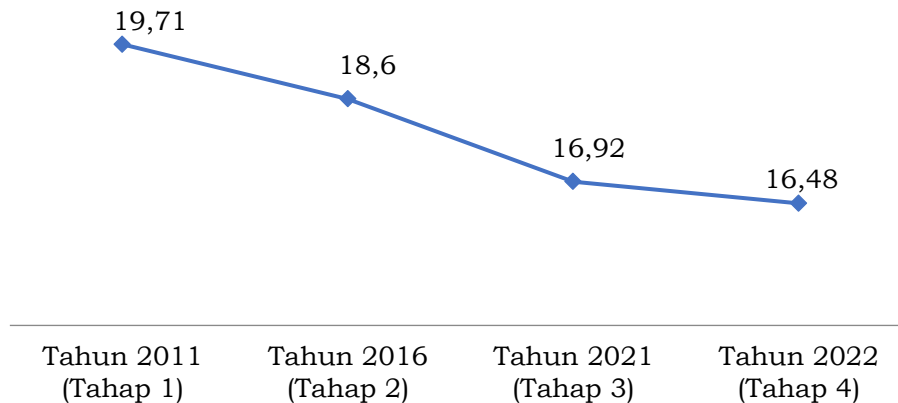
Grafik 2.47
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Nias Selatan
Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, persen



b. Persentase Penduduk Miskin

Angka Kemiskinan Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 cenderung mengalami penurunan. Berikut perkembangan Persentase Penduduk Miskin Nias Selatan berdasarkan tahap pelaksanaan RPJPD.

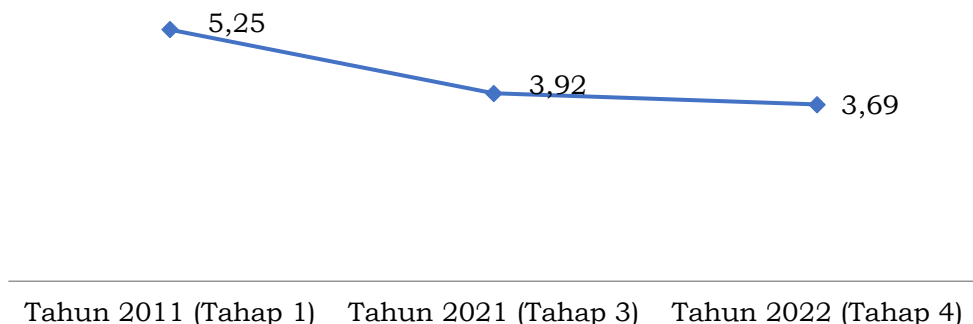
Grafik 2.48
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Nias Selatan
Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Persen



c. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Angka pengangguran di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2022 cenderung turun. Berikut perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Nias Selatan berdasarkan tahap pelaksanaan RPJPD.

Grafik 2.49
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Nias Selatan
Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Persen



2. Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana daerah

a. Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah

Capaian Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah pada tahun 2022 (Tahap ke-4 Pelaksanaan RPJPD) sebesar sebesar 56,94 persen atau naik sebesar 1,73 persen dari capaian periode sebelumnya yaitu tahun 2021 (Tahap ke-3 Pelaksanaan RPJPD) sebesar sebesar 55,21.

b. Tingkat kemantapan jalan kabupaten

Kemantapan jalan merupakan kondisi pelayanan sejak konstruksi masih baru sampai dengan kondisi pelayanan pada batas kemantapan (akhir umur rencana), dengan nilai kemantapan wajar seperti yang diperhitungkan. Yang termasuk dalam kondisi ini adalah jalan dengan

kondisi baik dan sedang. Capaian Tingkat kemantapan jalan kabupaten Nias Selatan dari tahun 2011-2022 cenderung naik. Berikut perkembangan Tingkat kemantapan jalan kabupaten Nias Selatan berdasarkan tahap pelaksanaan RPJPD.

Grafik 2.50
Perkembangan Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten Nias Selatan
Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Persen



Tahun 2011 (Tahap 1)	Tahun 2016 (Tahap 2)	Tahun 2021 (Tahap 3)	Tahun 2022 (Tahap 4)
-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------

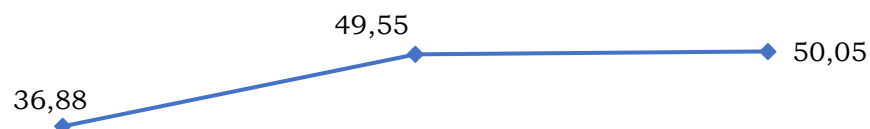
c. Persentase rumah tangga pengguna air bersih

Persentase rumah tangga pengguna air bersih pada tahun 2022 (Tahap ke-4 Pelaksanaan RPJPD) adalah sebesar 59,90 persen atau naik sebesar 4,18 persen dari periode sebelumnya yaitu tahun 2021 (Tahap ke-3 Pelaksanaan RPJPD) sebesar 66,72 persen.

d. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik

Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2016-2022 cenderung naik. Berikut perkembangan Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik kabupaten Nias Selatan berdasarkan tahap pelaksanaan RPJPD.

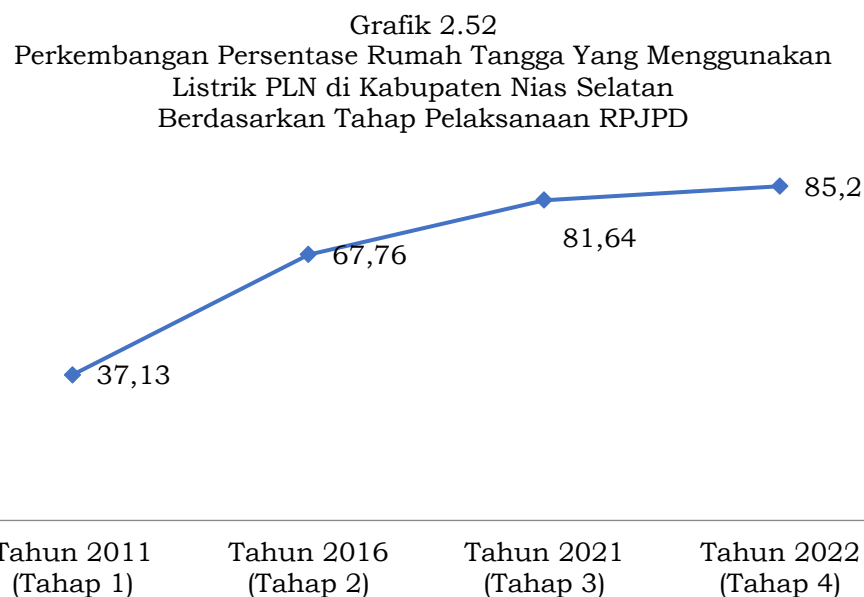
Grafik 2.51
Perkembangan Persentase Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik di
Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD



Tahun 2016 (Tahap 2)	Tahun 2021 (Tahap 3)	Tahun 2022 (Tahap 4)
----------------------	----------------------	----------------------

e. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN

Pasokan energi listrik merupakan salah satu permasalahan utama di Kabupaten Nias Selatan, sebab tidak semua desa menikmati arus listrik dari PLN. Dari 461 desa dan kelurahan yang terdapat di Kabupaten Nias Selatan, masih terdapat beberapa desa yang belum tersentuh jaringan listrik yang bersumber dari PLN. Hal ini merupakan salah satu masalah yang terus menurun diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan. Perkembangan Persentase Rumah Tangga yang menggunakan listrik PLN di Kabupaten Nias Selatan dari tahun 2011-2022 berdasarkan tahap pelaksanaan RPJPD:



f. Rasio Rumah Layak huni

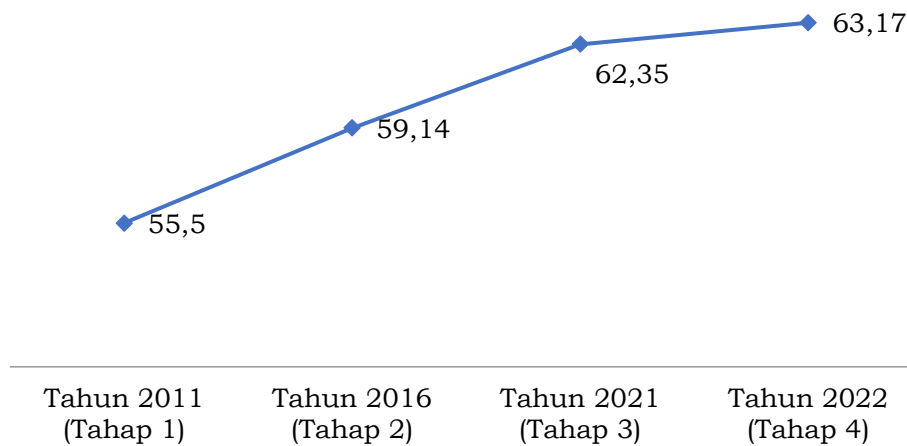
Rasio Rumah Layak huni di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2022 (Tahap ke-4 Pelaksanaan RPJPD) sebesar 0,290 atau naik sebesar 0,01 poin dari periode sebelumnya yaitu tahun 2021 (Tahap ke-3 Pelaksanaan RPJPD) sebesar 0,282

3. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius

a. Indeks Pembangunan Manusia

Capaian IPM Kabupaten pada Tahun 2011 adalah sebesar 55,50 poin (kategori rendah) sedangkan capaian pada tahun 2022 adalah sebesar 63,17 poin (Kategori Sedang) berarti tumbuh sebesar 16,02 persen. Berikut perkembangan pertumbuhan IPM Kab. Nias Selatan berdasarkan tahap pelaksanaan RPJPD.

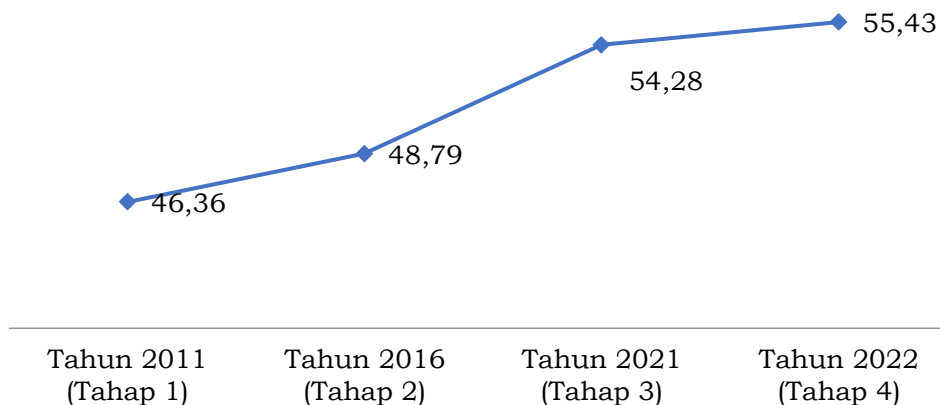
Grafik 2.53
Perkembangan IPM Kabupaten Nias Selatan
Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Poin



b. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan mengalami pertumbuhan yang positif selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2022. Berikut perkembangan Indeks Pendidikan di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tahap pelaksanaan RPJPD.

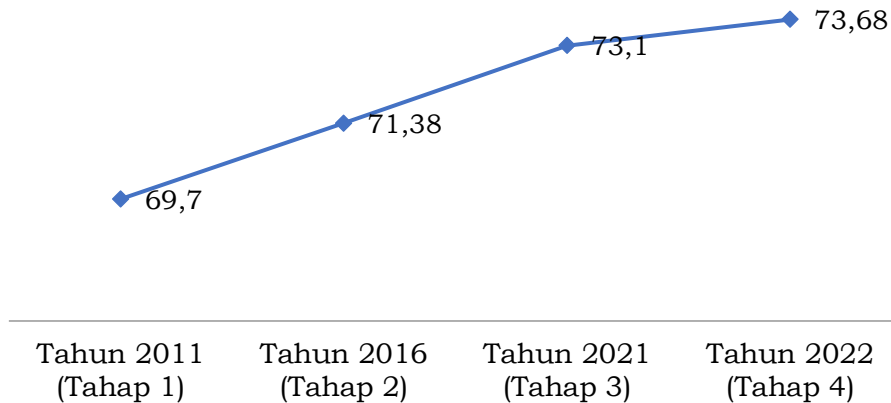
Grafik 2.54
Perkembangan Indeks Pendidikan Kabupaten Nias Selatan
Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Poin



c. Indeks Kesehatan

Indeks Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan mengalami pertumbuhan yang positif selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2022. Berikut perkembangan Indeks Kesehatan di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tahap pelaksanaan RPJPD.

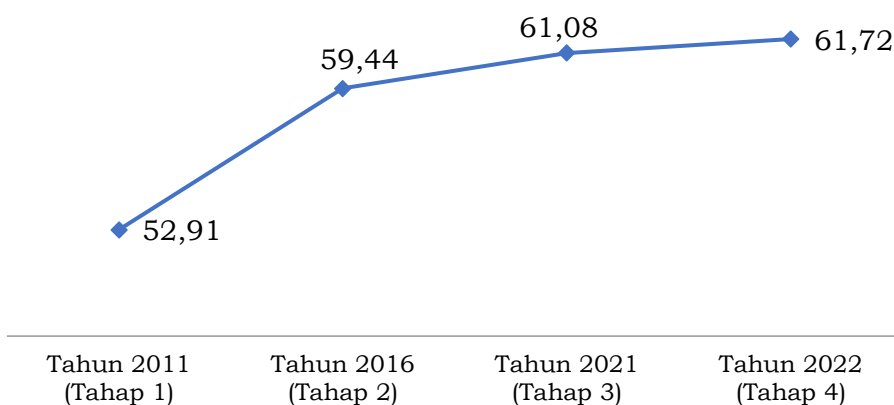
Grafik 2.55
Perkembangan Indeks Kesehatan Kabupaten Nias Selatan
Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Poin



d. Indeks Pengeluaran

Indeks Pengeluaran di Kabupaten Nias Selatan mengalami tren/pertumbuhan yang positif selama kurun waktu tahun 2011 sampai dengan tahun 2022. Berikut perkembangan Indeks Pengeluaran di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tahap pelaksanaan RPJPD.

Grafik 2.56
Perkembangan Indeks Pengeluaran Kabupaten Nias Selatan
Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD, Poin



4. Mewujudkan Pemerintah Daerah yang kuat, bersih, berwibawa, efektif dan efisien

a. Kapasitas Fiskal Daerah kategori

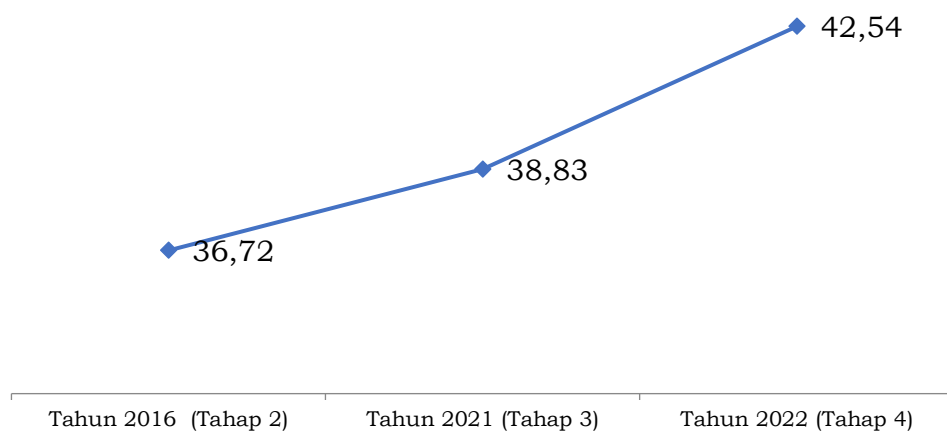
Kapasitas Fiskal adalah gambaran kemampuan keuangan masing-masing Daerah yang dicerminkan melalui penerimaan umum APBD. Kapasitas fiskal daerah Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2016 (Tahap ke-2 Pelaksanaan RPJPD) dan tahun 2021 (Tahap ke-3 Pelaksanaan RPJPD)

termasuk kategori rendah namun pada tahun 2022 (Tahap ke-4 Pelaksanaan RPJPD) terjadi perbaikan menjadi kategori tinggi.

b. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)

Peningkatan Nilai SAKIP menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi. Nilai Sakip Nias Selatan mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2022 bertambah sebesar 5,82 poin dengan predikat nilai C. Berikut perkembangan Nilai Sakip Kabupaten Nias Selatan berdasarkan tahap pelaksanaan RPJPD.

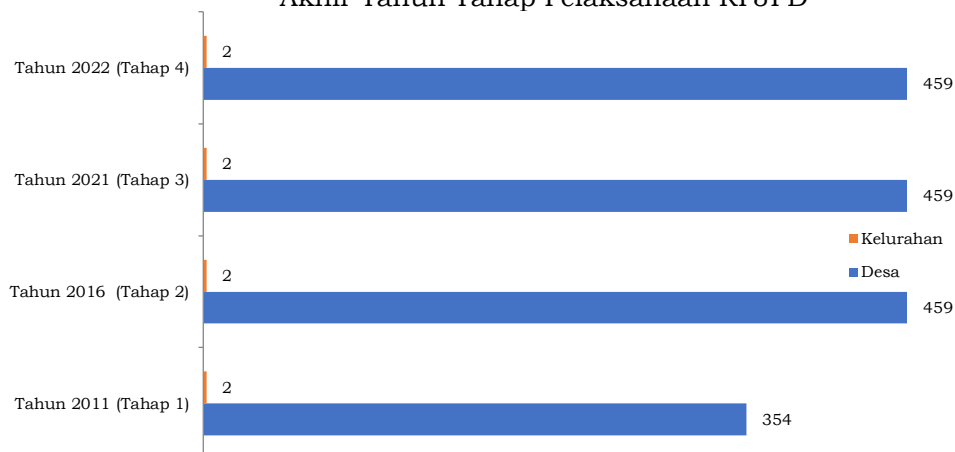
Grafik 2.57
Perkembangan Nilai Sakip Kabupaten Nias Selatan
Berdasarkan Tahap Pelaksanaan RPJPD



c. Jumlah Desa/ Kelurahan

Jumlah Desa/ Kelurahan pada tahun 2011 (Tahap ke-1) sebanyak 354 desa dan 2 kelurahan sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 459 desa dan 2 kelurahan dengan persentase penambahan jumlah desa sebesar 29,66 persen. Dengan bertambahnya jumlah desa hasil pemerkeran memiliki manfaat dalam Percepatan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan Desa melalui penggunaan dana desa. Berikut perkembangan jumlah desa/kelurahan periode di Nias Selatan berdasarkan capaian akhir tahun tahap pelaksanaan RPJPD:

Grafik 2.58
Perkembangan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Nias Selatan
Akhir Tahun Tahap Pelaksanaan RPJPD



Secara keseluruhan, evaluasi pembangunan menunjukkan bahwa penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan lokal telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi daerah. Namun, pencapaian yang ada belum cukup mendorong optimalisasi nilai tambah dan industrialisasi sektor primer. Ke depan, pembangunan perlu difokuskan pada peningkatan produktivitas lokal dan penguatan konektivitas pasar, baik secara regional, nasional, maupun internasional, untuk memastikan hasil produksi lokal dapat diolah lebih efisien dan terakses lebih luas. Pengembangan infrastruktur yang mendukung konektivitas dan akses pasar juga harus menjadi prioritas untuk memperkuat sektor unggulan lokal, menciptakan lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Capaian pembangunan menunjukkan peningkatan yang signifikan, meskipun beberapa indikator masih stagnan. Fokus pada pemerataan infrastruktur dan ketahanan pangan telah memberikan hasil positif, namun reformasi birokrasi dan peningkatan nilai tambah ekonomi lokal masih menjadi tantangan utama yang memerlukan perhatian lebih.

Ke depan, penting untuk memperkuat reformasi birokrasi agar proses pelayanan publik semakin efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Selain itu, upaya untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal perlu lebih difokuskan pada pengembangan sektor-sektor produktif, seperti industri pengolahan dan pengembangan sumber daya alam secara berkelanjutan.

Perkembangan Pencapaian setiap tahap RPJPD Kab. Nias Selatan Tahun 2006-2026 berdasarkan Arah Pembangunan RPJPD terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.94
Evaluasi Pencapaian RPJPD Kab. Nias Selatan Tahun 2006-2026

No	Arah Pembangunan	Uraian Pencapaian			
		Periode RPJMD Tahun 2006-2011	Periode RPJMD Tahun 2011-2016	Periode RPJMD Tahun 2016-2021	Periode RPJMD Tahun 2021-2026
1	Mewujudkan perekonomian daerah yang kokoh dan tangguh, diarahkan untuk: a. Memperkuat perekonomian daerah dengan orientasi pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan serta pariwisata b. Menjaga ketahanan pangan dan kemandirian pangan dengan mengembangkan kemampuan produksi dan sertifikasi dukungan kelembagaan ketahanan pangan, menuju terwujudnya swasembada pangan c. Perekonomian daerah dikembangkan berlandaskan prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan memperhatikan kepentingan daerah sehingga terjamin kesembatan berusaha dan bekerja bagi seluruh masyarakat dan mendorong tercapainya penganggulangan kemiskinan d. Mendayagunakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui seperti hutan, pertanian, perkebunan dan perikanan, harus dikelola secara rasional, optimal, efisien dan bertanggungjawab dengan mendayagunakan seluruh fungsi dan manfaat secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan e. Mengelola SDA yang tidak dapat diperbaharui seperti bahan tambang, untuk dapat menghasilkan nilai tambah yang optimal f. Mengembangkan potensi sumber daya kelautan g. Meningkatkan nilai perekonoinan rakyat dengan pemanfaatan sumber daya alam tropis dan khas h. Pengembangan usaha kecil menengah dan koperasi untuk menjadi pelaku ekonomi daerah	Perekonomian daerah yang kokoh dan tangguh pada tahun 2011 ditunjukkan oleh: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,46 persen. Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,92 persen dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata sebesar 3,37 persen. 2. Persentase Penduduk Miskin sebesar 19,71 persen 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 5,25 persen	Perekonomian daerah yang kokoh dan tangguh pada tahun 2016 ditunjukkan oleh: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,46 persen (sama dengan periode sebelumnya). Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,83 persen (turun 0,09 poin dari periode sebelumnya) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata sebesar 4,33 persen (naik sebesar 0,96 poin dari periode sebelumnya). 2. Persentase Penduduk Miskin sebesar 18,6 persen (turun sebesar 1,11 persen dari periode sebelumnya)	Perekonomian daerah yang kokoh dan tangguh pada tahun 2021 ditunjukkan oleh: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 2,02 persen (turun sebesar 2,64 persen dari periode sebelumnya). Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 1,77 persen (turun 2,06 persen dari periode sebelumnya) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata sebesar - 0,75 persen (turun sebesar 5,08 persen dari periode sebelumnya). 2. Persentase Penduduk Miskin sebesar 16,92 persen (turun sebesar 1,68 persen dari periode sebelumnya) 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,92 persen	Perekonomian daerah yang kokoh dan tangguh pada tahun 2022 ditunjukkan oleh: 1. Pertumbuhan ekonomi sebesar 3,08 persen (turun sebesar 1,06 persen dari periode sebelumnya). Pertumbuhan ekonomi ini didukung oleh Laju Pertumbuhan Ekonomi Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 3,30 persen (naik 1,53 persen dari periode sebelumnya) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi (penyediaan Akomodasi dan makan minum) Pariwisata sebesar 6,88 persen (naik sebesar 7,63 persen dari periode sebelumnya). 2. Persentase Penduduk Miskin sebesar 16,48 persen (turun sebesar 0,44 persen dari periode sebelumnya) 3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,69 persen (turun 0,23 persen dari periode sebelumnya)

No	Arah Pembangunan	Uraian Pencapaian			
		Periode RPJMD Tahun 2006-2011	Periode RPJMD Tahun 2011-2016	Periode RPJMD Tahun 2016-2021	Periode RPJMD Tahun 2021-2026
	i. Meningkatkan daya saing usaha kecil dan menengah j. Membangun Badan Usaha Milik Daerah yang handal, produktif dan kompetitif.				
2	Mewujudkan peningkatan sarana dan prasarana daerah, diarahkan untuk: a. Membangun jaringan infrastruktur yang lebih baik sampai ke pedesaan dan sentra-sentra ekonomi masyarakat b. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan darat, laut dan udara yang lebih baik c. Pembangunan transportasi untuk mendorong peningkatan transaksi perdagangan sebagai sarana mobilitas masyarakat, barang dan jasa d. Penanganan kejadian bencana alam dengan cepat, tepat dan terkoordinasi e. Pembangunan ketenaga-listrikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga ke pelosok pedesaan f. Pembangunan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan air bersih dan peningkatan jaringan irigasi untuk menjamin keberlanjutan daya dukungnya dengan kelestarian lingkungan hidup yang berfungsi sebagai daerah resapan air g. Pembangunan perumahan rakyat yang berkelanjutan, memadai, layak huni dan terjangkau daya beli masyarakat serta didukung sarana dan prasarana pemukiman yang mencukupi dan berkualitas yang dikelola secara profesional, kredibel, mandiri dan efisien dengan memperhatikan fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup h. Pengembangan jaringan infrastruktur penunjang kegiatan produksi pertanian dan perkebunan di kawasan perdesaan	Peningkatan sarana dan prasarana daerah ditunjukkan berdasarkan capaian tahun 2011 sebagai berikut : 1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten sebesar 41,80 persen 2. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebesar 37,13 persen	Peningkatan sarana dan prasarana daerah ditunjukkan berdasarkan capaian tahun 2016 sebagai berikut : 1. Tingkat kemantapan jalan kabupaten sebesar 44,68 persen (naik sebesar 2,88 persen dari periode sebelumnya) 2. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 36,88 persen 3. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebesar 67,76 persen (naik sebesar 30,63 persen dari periode sebelumnya)	Peningkatan sarana dan prasarana daerah ditunjukkan berdasarkan capaian tahun 2021 sebagai berikut : 1. Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah sebesar 55,21 persen 2. Tingkat kemantapan jalan kabupaten sebesar 54,69 persen (naik sebesar 10,01 persen dari periode sebelumnya) 3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 55,72 persen 4. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 49,55 persen (naik sebesar 12,67 persen dari periode sebelumnya) 5. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebesar 81,64 persen (naik sebesar 13,88 persen dari periode sebelumnya). 6. Rasio Rumah Layak huni sebesar 0,282	Peningkatan sarana dan prasarana daerah ditunjukkan berdasarkan capaian tahun 2022 sebagai berikut : 1. Indeks layanan kualitas infrastruktur Daerah sebesar 56,94 persen (naik sebesar 1,73 persen dari periode sebelumnya) 2. Tingkat kemantapan jalan kabupaten sebesar 61 persen (naik sebesar 6,31 persen dari periode sebelumnya) 3. Persentase rumah tangga pengguna air bersih sebesar 59,90 persen (naik sebesar 4,18 persen dari periode sebelumnya) 4. Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik sebesar 50,05 persen (naik sebesar 0,05 persen dari periode sebelumnya) 5. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik PLN sebesar 85,20 persen (naik sebesar 3,58 persen dari periode sebelumnya)

No	Arah Pembangunan	Uraian Pencapaian			
		Periode RPJMD Tahun 2006-2011	Periode RPJMD Tahun 2011-2016	Periode RPJMD Tahun 2016-2021	Periode RPJMD Tahun 2021-2026
	i. Peningkatan sarana dan prasarana kesehatan yang merata dan berkualitas j. Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas k. Peningkatan jaringan telekomunikasi yang merata dan berkualitas l. Peningkatan sarana dan prasarana kantor pemerintah				6. Rasio Rumah Layak huni sebesar 0,290 (naik sebesar 0,01 poin dari periode sebelumnya)
3	Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius, diarahkan untuk: a. Pembangunan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kompetitif b. Sistem perlindungan dan jaminan sosial disusun, ditata dan dikembangkan untuk memastikan dan memantapkan pemenuhan hak-hak rakyat akan pelayanan sosial dasar c. Peningkatan jangkauan layanan dan rehabilitasi sosial yang berkualitas, termasuk pemberdayaan sosial tepat guna d. Penanggulangan kemiskinan diarahkan pada penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar rakyat secara bertahap dengan mengutamakan prinsip kesetaraan dan non diskriminasi e. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai lingkungan hidup f. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, membina akhlak mulia, memupuk etos kerja, menghargai prestasi dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai kemajuan dalam pembangunan g. Meningkatkan keurukunan hidup umat beragama dengan meningkatkan rasa saling percaya dan harmonisasi antar kelompok masyarakat, sehingga tercipta suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, tenggang-rasa dan harmonis	Wujud kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius pada tahun 2011 ditunjukkan dengan : 1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 55,50 poin 2. Indeks Pendidikan sebesar 46,36 Poin 3. Indeks Kesehatan sebesar 69,70 poin 4. Indeks Pengeluaran sebesar 52,91 poin	Wujud kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius pada tahun 2016 ditunjukkan dengan : 1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 59,14 poin (naik sebesar 3,64 poin dari periode sebelumnya) 2. Indeks Pendidikan sebesar 48,75 poin (naik 2,39 poin dari periode sebelumnya) 3. Indeks Kesehatan sebesar 71,38 poin (naik sebesar 1,68 poin dari periode sebelumnya) 4. Indeks Pengeluaran sebesar 59,44 poin (naik 6,53 poin dari periode sebelumnya)	Wujud kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius pada tahun 2021 ditunjukkan dengan : 1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 62,35 poin (naik sebesar 3,21 poin dari periode sebelumnya) 2. Indeks Pendidikan sebesar 54,28 poin (naik sebesar 5,53 poin dari periode sebelumnya) 3. Indeks Kesehatan sebesar 73,10 poin (naik sebesar 1,72 poin dari periode sebelumnya) 4. Indeks Pengeluaran sebesar 61,08 poin (naik sebesar 17,58 poin dari periode sebelumnya)	Wujud kehidupan masyarakat yang berbudaya dan religius pada tahun 2022 ditunjukkan dengan : 1. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 63,17 poin (naik sebesar 0,82 poin dari periode sebelumnya) 2. Indeks Pendidikan sebesar 55,43 poin (naik sebesar 1,15 poin dari periode sebelumnya) 3. Indeks Kesehatan sebesar 73,68 poin (naik sebesar 0,58 poin dari periode sebelumnya) 4. Indeks Pengeluaran sebesar 61,72 poin (naik sebesar 0,64 poin dari periode sebelumnya)

No	Arah Pembangunan	Uraian Pencapaian			
		Periode RPJMD Tahun 2006-2011	Periode RPJMD Tahun 2011-2016	Periode RPJMD Tahun 2016-2021	Periode RPJMD Tahun 2021-2026
	h. Pemantapan jati diri Ononiha (Orang Nias) untuk mewujudkan karakter dan sistem sosial yang berakar, unik, dan modern i. Mengembangkan budaya inofatif yang berorientasi IPTEK j. Peningkatan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya keluarga kecil bahagia dan berkualitas k. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan upaya kesehatan, pembiayaan kesehatan, SDM kesehatan, obat dan perbekalan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan manajemen kesehatan l. Peningkatan kualitas hidup dan peran perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, penurunan tindakan kekerasan, penghapusan diskriminasi terhadap perempuan dan anak, penguatan kelembagaan dan jaringan pengurusutamaan gender serta kesediaan data dan statistik gender m. Peningkatan kualitas dan partisipasi pemuda di berbagai bidang pembangunan dan peningkatan budaya olah raga serta prestasi olah raga di kalangan masyarakat n. Pengembangan kepariwisataan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra daerah o. Peningkatan peran BUMD yang turut meningkatkan PAD				
4	Mewujudkan Pemerintah Daerah yang kuat, bersih, berwibawa, efektif dan efisien, diarahkan untuk: a. Pengembangan kapasitas pemerintah daerah melalui peningkatan kapasitas aparat daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan daerah dan peningkatan kapasitas keuangan pemerintah daerah	Pemerintah Daerah yang kuat, bersih, berwibawa, efektif dan efisien pada tahun 2011 diukur melalui capaian sebagai berikut: 1. Jumlah Desa/ Kelurahan sebanyak	Pemerintah Daerah yang kuat, bersih, berwibawa, efektif dan efisien pada tahun 2016 diukur melalui capaian sebagai berikut: 1. Kapasitas Fiskal Daerah kategori	Pemerintah Daerah yang kuat, bersih, berwibawa, efektif dan efisien pada tahun 2021 diukur melalui capaian sebagai berikut: 1. Kapasitas Fiskal Daerah kategori	Pemerintah Daerah yang kuat, bersih, berwibawa, efektif dan efisien pada tahun 2022 diukur melalui capaian sebagai berikut: 2. Kapasitas Fiskal Daerah kategori sangat

No	Arah Pembangunan	Uraian Pencapaian			
		Periode RPJMD Tahun 2006-2011	Periode RPJMD Tahun 2011-2016	Periode RPJMD Tahun 2016-2021	Periode RPJMD Tahun 2021-2026
	b. Memantapkan pelembagaan demokrasi yang lebih kokoh untuk mendukung berlangsungnya konsolidasi demokrasi secara berkelanjutan c. Memperkuat peran masyarakat sipil d. Memperkuat kualitas pelaksanaan otonomi daerah e. Mewujudkan batas wilayah pemerintahan daerah, kecamatan, desa dan kelurahan secara permanen f. Menjamin kebebasan media dalam mengkomunikasikan aspirasi dan kepentingan masyarakat g. Meningkatkan penegakkan supremasi hukum secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif h. Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik pada semua tingkat dan lini pemerintahan i. Merespon aspirasi masyarakat untuk penataan wilayah melalui Pemekaran Desa, Kecamatan dan Kabupaten j. Membina hubungan koordinasi dan kerjasama Pemerintah Daerah dengan lembaga, instansi vertikal dalam negeri dan lembaga-lembaga pemerintah luar negeri dalam menggali, mengelola dan mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki	354 desa dan 2 kelurahan	rendah dengan indeks sebesar 0,21 2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebesar 36,72 atau C 3. Jumlah Desa/ Kelurahan sebanyak 459 desa dan 2 kelurahan (bertambah sebanyak 105 desa dari periode sebelumnya)	sangat rendah dengan indeks sebesar 0,516 2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebesar 38,83 atau C (naik sebesar 2,11 poin dari periode sebelumnya) 3. Jumlah Desa/ Kelurahan sebanyak 459 desa dan 2 kelurahan	tinggi dengan rasio sebesar 2,328 3. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) sebesar 42,54 atau C (naik sebesar 3,71 poin dari periode sebelumnya) 4. Jumlah Desa/ Kelurahan sebanyak 459 desa dan 2 kelurahan (sama dengan periode sebelumnya)

2.5.3 Kesimpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dan evaluasi RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 maka terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2005-2022 cenderung mengalami peningkatan, pertumbuhan dan perbaikan (tren positif).
2. Dokumen RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 tidak memuat sasaran pokok beserta indikator dan targetnya atau hanya memuat arah pembangunan sehingga menyulitkan untuk dilaksanakan evaluasi sebagaimana diharapkan formulir E.56 dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Dengan tidak sesuainya substansi yang diharapkan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 yang bersifat kualitatif maka evaluasi terhadap Hasil RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2006-2026 dilakukan secara kuantitatif kedalam indikator yang relevan dengan arah pembangunan RPJPD.
3. Rata-Rata Capaian Kinerja Periode RPJMD Tahun 2021-2026 (pelaksanaan Tahun 2022) sebesar 120,108 persen dengan predikat sangat tinggi sedangkan Rata-Rata Capaian Kinerja pelaksanaan 3 Periode RPJMD sebelumnya tidak dapat disajikan mengingat RPJMD tersebut tidak memuat indikator tujuan/ sasaran beserta targetnya.

Beberapa Rekomendasi tindak lanjut yang diperlukan untuk penyusunan RPJPD periode selanjutnya sebagai berikut:

1. Penyusunan RPJPD periode berikutnya diharapkan agar mempedomani Permendagri nomor 86 Tahun 2017 dan peraturan perundangan lainnya.
2. Untuk menghasilkan dokumen perencanaan yang berkualitas, daerah membutuhkan *Coaching Clinic* dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.
3. Keterlibatan Stakeholder dalam setiap proses perencanaan daerah.
4. Sasaran pembangunan untuk periode berikutnya diarahkan untuk:
 - a. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Sehat, Berkualitas, Berdaya Saing serta Kreatif dan Inovatif.

- b. Memperkuat Birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik.
- c. Meningkatkan kuantitas pembangunan dan kualitas infrastruktur daerah yang berkelanjutan.
- d. Penguatan perekonomian masyarakat yang produktif dan inovatif melalui warisan sumber daya alam dan budaya.

Mengingat capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif namun belum inklusif dan merata, maka RPJPD 2025–2045 perlu menetapkan prioritas yang lebih konkret untuk mempercepat proses pembangunan yang berkelanjutan dan menyeluruh. Meskipun penguatan ekonomi berbasis sektor unggulan lokal telah memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan ekonomi daerah, tantangan besar dalam mendorong nilai tambah dan industrialisasi sektor primer masih perlu diatasi. Selain itu, meskipun pemerataan infrastruktur dan ketahanan pangan telah memberikan hasil positif, beberapa indikator penting masih stagnan, dan peningkatan nilai tambah ekonomi lokal serta reformasi birokrasi masih menjadi pekerjaan rumah.

2.6 Tren Demografi dan kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Permasalahan penduduk telah menjadi prioritas kebijakan pembangunan di Indonesia baik ditingkat Nasional atau wilayah. Penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah. Penduduk adalah subyek dan obyek pembangunan, di mana hasil- hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh penduduk yang bersangkutan.

Kabupaten Nias Selatan memiliki jumlah penduduk yang selalu meningkat pada setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk tersebut tidak lepas dari berbagai macam pengaruh, seperti besarnya kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar. Dampak dari pertumbuhan penduduk yang tinggi yang tidak di imbangi dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah tersebut maka akan menurunkan kesejahteraan penduduk di wilayah tersebut. Dampak ledakan penduduk dapat menimbulkan tingginya angka pengangguran, kriminalitas, berkurangnya lahan, bahkan menimbulkan kerusakan pada lingkungnya.

2.6.1 Proyeksi Kependudukan

Proyeksi penduduk merupakan perhitungan ilmiah yang didasarkan pada asumsi dari komponen-komponen laju pertumbuhan penduduk, yaitu kelahiran,

kematian, dan perpindahan (migrasi). Ketiga komponen tersebut akan menentukan jumlah dan struktur umur penduduk di masa depan. Untuk menentukan masing-masing asumsi diperlukan data yang menggambarkan tren di masa lampau hingga saat ini, faktor-faktor yang mempengaruhi tiap-tiap komponen, dan hubungan antara satu komponen dengan yang lain, termasuk target yang diharapkan dicapai pada masa mendatang.

2.6.1.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

Lembaga BPS dalam Statistik Indonesia menjelaskan “Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap”. Penduduk merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi serta tenaga kerja, tenaga ahli, pimpinan perusahaan tenaga kerja usahawan dalam menciptakan kegiatan ekonomi.

Estimasi penduduk di Kabupaten Nias Selatan berdasarkan pada tahun 2025 dengan jumlah penduduk 397.200 jiwa, jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2030 mencapai 430.830 jiwa, pada tahun 2035 jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan mencapai 457.960 jiwa, pada tahun 2040 dan 2045 jumlah penduduk di Kabupaten Nias Selatan mencapai 478.303 jiwa dan 494.667 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel proyeksi penduduk Kabupaten Nias Selatan di tahun 2025-2045 di bawah ini.

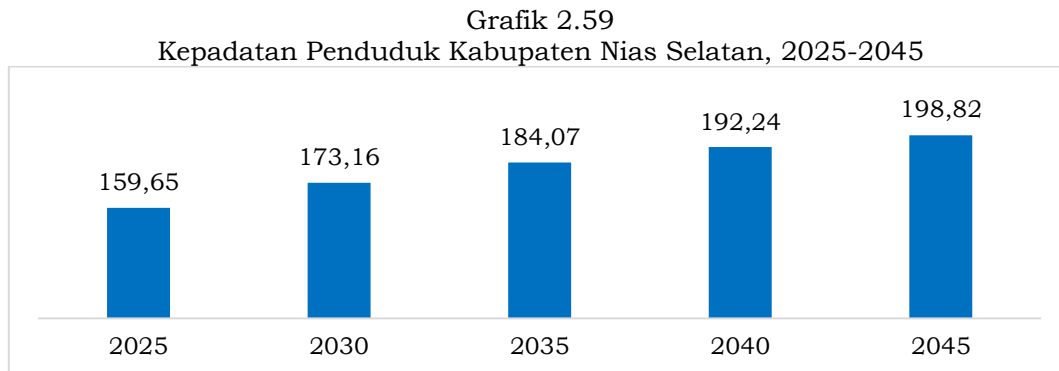
Tabel 2.95
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045

Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Penduduk (jiwa)				
	2025	2030	2035	2040	2045
382.539	397.200	430.830	457.960	478.303	494.667

Dari tabel tersebut diatas dapat di lihat bahwa Hasil proyeksi menunjukkan tren pertumbuhan penduduk menurun dimana pertumbuhan penduduk tertinggi adalah pertumbuhan penduduk dari tahun 2025 ke tahun 2030 yaitu 33.630 jiwa. Lima tahun kemudian, proyeksi yang dilakukan menunjukkan pertumbuhan penduduk turun angka 27.130 jiwa. Hingga pada tahun 2045, hasil proyeksi menunjukkan pertumbuhan penduduk ada di angka 16.364 jiwa.

Berdasarkan proyeksi tersebut di atas terlihat bahwa jumlah penduduk terus bertambah. Maka dari itu, kepadatan penduduk Kabupaten Nias Selatan juga akan semakin meningkat. Jika Luas Wilayah Kabupaten Nias Selatan adalah 2487,99 Hektar. Maka kepadatan penduduk di tahun 2025 adalah 159,65 jiwa/km²,

kemudian di tahun 2030 akan naik menjadi 173,16 jiwa/km². Hingga pada tahun 2045 nanti, proyeksi kepadatan penduduk Kabupaten Nias Selatan adalah 198,82 jiwa/km². Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada grafik berikut.



2.6.1.2 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi penduduk adalah pembagian penduduk suatu wilayah atau negara berdasarkan berbagai faktor demografis. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin merupakan salah satu aspek yang sering digunakan dalam perhitungan jumlah penduduk. Komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin adalah jumlah penduduk suatu wilayah atau negara berdasarkan gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Data komposisi memberikan gambaran tentang proporsi laki-laki dan perempuan dalam suatu populasi pada waktu tertentu. Selain itu, terdapat juga rasio jenis kelamin yang dapat memberikan indikasi tentang adanya ketidakseimbangan gender dalam populasi. Berikut Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin di tahun 2025-2045.

Tabel 2.96
Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Jenis Kelamin, 2025-2045

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Laki-Laki	192.344	200.080	217.650	231.820	242.356	250.747
Perempuan	192.195	197.180	213.210	226.170	235.947	243.920
Rasio	100,08	101,47	102,08	102,50	102,72	102,80

Dari tabel tersebut di atas, dapat dilihat bahwa setiap lima tahun kedepan penduduk laki-laki akan lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Selisih antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di tahun 2025 berada di angka 2900 jiwa. Hal ini menjadikan *sex ratio* di tahun 2025 mencapai 101,47. Artinya dari dalam setiap 100 penduduk wanita terdapat 101 penduduk laki laki. Pada tahun 2045 proyeksi *sex ratio* berada di angka 102,80. Hal ini dikarenakan

selisih antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan adalah 6.826 jiwa. Artinya dalam setiap 100 penduduk wanita terdapat 103 penduduk laki laki.

2.6.1.3 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut kelompok umur juga penting untuk diketahui, terutama ketika menyusun suatu perencanaan kebijakan dan program pembangunan suatu wilayah. Karena setiap kelompok umur penduduk mempunyai kebutuhan dan penanganan yang berbeda-beda. Kelompok penduduk dibawah 5 tahun misalnya, masih memerlukan ketersediaan pelayanan kesehatan yang baik, peningkatan status gizi dan status kesehatan, mengingat kelompok ini rentan terhadap kematian. Berikut Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Kelompok Umur di tahun 2025-2045.

Tabel 2.97

Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten Nias Selatan Berdasarkan Kelompok Umur, 2025-2045

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2023 (jiwa)	Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
0-14 Tahun	106.018	110.400	126.460	141.700	130.878	116.379
15-64 Tahun	262.378	270.270	282.840	288.360	312.491	332.492
> 65 Tahun	14.774	16.530	21.530	27.900	34.934	45.796
Angka Ketergantungan	46,04	46,96	52,32	58,82	53,06	48,78

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa, penduduk berusia 0-14 tahun sekitar 110.400 jiwa atau sekitar 27,79 persen di tahun 2025. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam penanganan penduduk balita dan usia 5-14 terutama dari segi kesehatan dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar. Dimana dari hasil proyeksi tersebut, jumlah penduduk berusia 0-14 tahun di tahun 2025 adalah 116.379 jiwa atau 23,53 persen dari jumlah penduduk Kabupaten Nias Selatan.

Yang perlu mendapatkan perhatian adalah bahwa penduduk kelompok muda tersebut akan mulai memasuki kelompok umur produktif, sementara kelompok umur produktif yang ada sekarang juga menunjukkan persentase yang tinggi dibandingkan kelompok umur lainnya. Dimana secara persentase penduduk 15-64 tahun berada di angka 68,04 persen atau 270.270 jiwa di tahun 2025. Selama dua puluh tahun kedepan, hasil proyeksi menunjukkan jumlah penduduk usia 15-64 tahun adalah 332.492 jiwa atau sekitar 67,22 persen.

Sementara itu penduduk lansia (65 tahun ke atas), menunjukkan proporsi yang kecil sekitar 16.530 jiwa atau 4,16 persen di tahun 2025. Meskipun demikian

dua puluh tahun ke depan jumlah penduduk kelompok ini akan terus bertambah, karena umur harapan hidup juga terus meningkat baik secara regional maupun nasional. Dimana di tahun 2045 proporsinya meningkat ke angka 45.796 jiwa atau 9,26 persen. Pertambahan jumlah penduduk lansia ini harus mulai diantisipasi karena diperlukan kebijakan seperti ketenagakerjaan, kesehatan, pelayanan lansia serta kebutuhan sosial dasar lainnya.

Angka Ketergantungan di kabupaten Nias Selatan berdasarkan hasil proyeksi tersebut adalah 46,96 persen di tahun 2025. Angka ini akan naik ke 52,32 persen di tahun 2030 dan naik kembali di tahun 2035 ke angka 58,82 persen. Hasil proyeksi menunjukkan Angka Ketergantungan Kabupaten Nias Selatan di tahun 2045 akan berada di angka 48,78 persen. Sehingga terlihat bahwa bonus demografi Kabupaten Nias Selatan ada di periode tahun 2030 sampai dengan 2040.

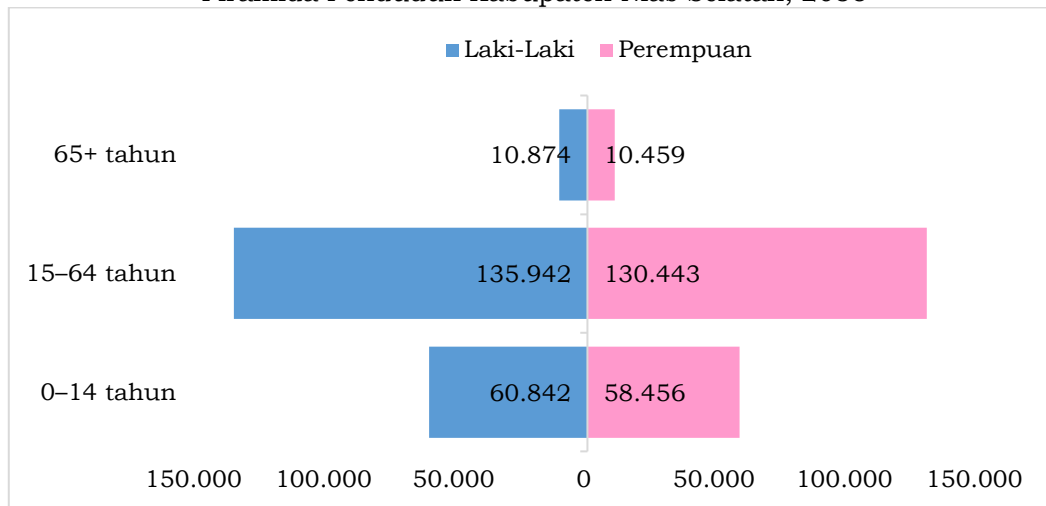
2.6.1.4 Analisis Proyeksi Kependudukan dan Bonus Demografi

Bonus demografi adalah suatu kondisi ketika jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) jauh lebih besar dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun dan di atas 64 tahun. Kondisi ini menciptakan peluang emas bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial karena tingginya proporsi usia produktif dapat meningkatkan jumlah tenaga kerja, produktivitas, serta daya saing wilayah jika dikelola dengan baik.

Untuk memahami apakah sebuah wilayah sedang mengalami bonus demografi, diperlukan analisis struktur usia penduduk. Salah satu alat visual yang efektif untuk menganalisis struktur ini adalah piramida penduduk, sebuah grafik yang menampilkan komposisi penduduk berdasarkan usia dan jenis kelamin. Piramida ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika populasi, seperti tingkat kelahiran, penuaan, serta potensi beban ketergantungan.

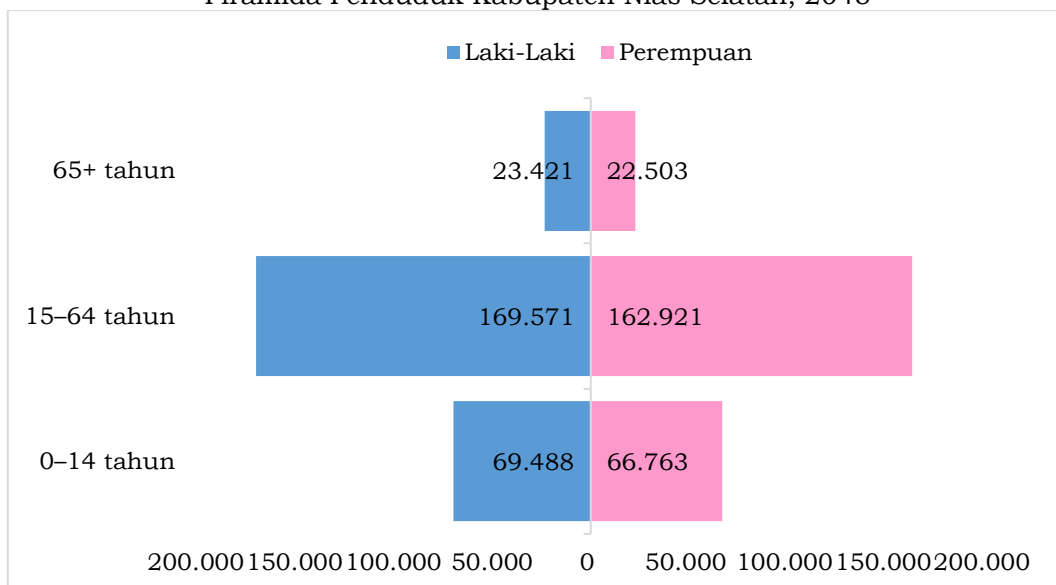
Berdasarkan proyeksi penduduk Kabupaten Nias Selatan, piramida penduduk per sepuluh tahun menunjukkan perubahan struktur demografi yang signifikan selama periode 2025–2045. Berikut grafik piramida penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2035.

Grafik 2.60
Piramida Penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2035



Pada tahun 2035, piramida penduduk masih menunjukkan dominasi usia produktif (15–64 tahun) sebesar 61,7%, menandakan fase bonus demografi yang masih berlangsung. Namun, mulai tampak penyempitan pada kelompok usia muda dan pelebaran awal pada kelompok lansia, mencerminkan awal transisi menuju masyarakat menua. Berikut grafik piramida penduduk Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2045.

Grafik 2.61
Piramida Penduduk Kabupaten Nias Selatan, 2045



Pada tahun 2045, perubahan ini semakin jelas. Proporsi usia produktif tetap tinggi (64,6%), tetapi jumlah lansia (65+) meningkat tajam menjadi 8,9%, hampir dua kali lipat dibanding 2035. Sementara itu, proporsi anak-anak (0–14 tahun) menurun menjadi 26,5%. Bentuk piramida yang menyempit di dasar dan melebar

di puncak menandakan pergeseran dari dominasi usia muda ke peningkatan beban lansia suatu ciri khas *aging population*.

Transisi ini memperbesar angka ketergantungan lansia dan mengubah arah tantangan pembangunan. Oleh karena itu, peluang dari bonus demografi harus dioptimalkan dengan kebijakan yang menekankan peningkatan produktivitas tenaga kerja, investasi pada SDM, dan penguatan sistem perlindungan sosial untuk menjaga keberlanjutan ekonomi dalam menghadapi struktur penduduk yang kian menua.

Dengan demikian, bonus demografi diperkirakan akan terjadi antara tahun 2025 hingga tahun 2035, ketika jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) lebih dominan dibandingkan dengan penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun). Pada tahun 2025, jumlah penduduk usia produktif (270.270 jiwa) mulai lebih besar daripada jumlah penduduk non-produktif, menciptakan peluang untuk meningkatkan output ekonomi.

Memasuki tahun 2030 hingga tahun 2035, bonus demografi semakin jelas dengan rasio ketergantungan yang relatif rendah (sekitar 50 persen), yang menunjukkan lebih banyak orang dalam usia kerja, sehingga berpotensi meningkatkan produktivitas ekonomi. Namun, setelah tahun 2035, jumlah lansia akan meningkat tajam (dari 27.900 jiwa pada 2035 menjadi 45.796 jiwa pada tahun 2045), yang akan meningkatkan beban ketergantungan terhadap kelompok usia produktif dan dapat mengurangi potensi ekonomi.

Implikasi kebijakan SDM yang tepat selama dan setelah periode bonus demografi sangat penting untuk memaksimalkan potensi ekonomi. Kebijakan yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan, pelatihan keterampilan, partisipasi angkatan kerja, serta kesejahteraan lansia, akan mendukung pemanfaatan bonus demografi dengan lebih optimal. Kebijakan SDM yang berkelanjutan akan membantu negara menjaga keseimbangan antara jumlah tenaga kerja produktif dan beban ketergantungan yang meningkat setelah tahun 2035.

2.6.2 Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Perkembangan jumlah penduduk pada suatu kawasan membawa perubahan besar pada kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan papan beserta fasilitas penunjangnya. Kebutuhan dasar tersebut terus meningkat secara alamiah seiring kompleksitasnya kebutuhan hidup bermasyarakat, seperti

kebutuhan untuk aktivitas sosial, aktivitas ekonomi, dan aktivitas pelayanan umum. Dari fenomena tersebut menuntut pula pembangunan sarana dan prasarana pada suatu kawasan guna menjaga kelangsungan hidup masyarakat di dalam suatu daerah.

2.6.2.1 Kebutuhan Rumah atau Tempat Tinggal

Model perhitungan kebutuhan rumah yang sudah distandarkan dan berlaku secara nasional di Indonesia menjadi kebutuhan cukup mendesak saat ini. Namun di sisi lain, ketersediaan data perumahan masih sangat terbatas. Selain itu, ada ketidaksinkronan data dan informasi antar instansi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan pendekatan dalam perhitungan kebutuhan rumah.

Setidaknya ada dua pendekatan yang digunakan untuk menghitung kebutuhan rumah, yaitu data demografi dan data *backlog*. Data demografi berkaitan dengan pertumbuhan dan kepadatan penduduk, jumlah rumah tangga, hingga pola migrasi penduduk. Data backlog perumahan didasarkan pada kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan penduduk.

Dengan asumsi rata-rata satu rumah dihuni oleh lima jiwa, maka kebutuhan rumah di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 79.440 unit untuk melayani jumlah penduduk sebanyak 397.200 jiwa. Seiring pertumbuhan penduduk, kebutuhan rumah pada tahun 2045 diproyeksikan meningkat menjadi 98.933 unit, sesuai dengan jumlah penduduk sebanyak 494.667 jiwa. Apabila menggunakan asumsi backlog perumahan sebesar 12 persen dari total kebutuhan rumah, maka jumlah backlog pada tahun 2025 diperkirakan mencapai 9.533 unit, dan akan meningkat menjadi sekitar 11.872 unit pada tahun 2045. Proyeksi kebutuhan rumah atau tempat tinggal dan *backlog* perumahan Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut

Tabel 2.98
Proyeksi Kebutuhan Rumah Atau Tempat Tinggal dan *backlog* perumahan Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023 (jiwa)	Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	382.539	397.200	430.830	457.960	478.303	494.667
Kebutuhan Rumah	76.508	79.440	86.166	91.592	95.661	98.933
<i>Backlog</i> perumahan	9.181	9.533	10.991	10.991	11.479	11.872

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa meskipun peningkatan kebutuhan rumah relatif linear mengikuti pertumbuhan penduduk, gap antara kebutuhan dan

ketersediaan hunian belum menunjukkan kecenderungan menurun. Bahkan, backlog cenderung stagnan di angka lebih dari 10.000 unit, mencerminkan perlunya intervensi yang lebih kuat dalam pembangunan perumahan, khususnya untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan wilayah tertinggal.

Kondisi backlog yang meningkat seiring waktu menunjukkan bahwa tanpa intervensi tambahan, gap antara kebutuhan dan ketersediaan hunian akan terus melebar. Hal ini dapat diatasi dengan beberapa strategi berupa pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah melalui program subsidi, optimalisasi lahan milik pemerintah untuk perumahan rakyat, pembangunan berbasis kawasan yang terintegrasi dengan infrastruktur dasar, penguatan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, pemutakhiran data backlog secara berkala untuk perencanaan yang tepat sasaran, serta penyederhanaan regulasi dan perizinan daerah disertai program perbaikan rumah tidak layak huni.

2.6.2.2 Kebutuhan Air Minum

Kebutuhan air minum terus mengalami peningkatan seiring pertumbuhan jumlah penduduk, sementara ketersediaannya semakin terbatas. Hal ini disebabkan oleh menyempitnya daerah resapan air, pembangunan yang kurang memperhatikan keseimbangan lingkungan, serta eksploitasi sumber air baku tanpa mempertimbangkan kelestarian alam.

Saat ini, penyediaan air minum di Kabupaten Nias Selatan masih menghadapi tantangan besar, baik dari sisi kapasitas sumber air maupun infrastruktur distribusi. Sumber air eksisting berasal dari air permukaan dan air tanah, namun belum dimanfaatkan secara optimal. Cakupan layanan PDAM sangat terbatas, hanya melayani sebagian wilayah perkotaan, sedangkan masyarakat di desa dan wilayah terpencil masih bergantung pada sumber air alternatif seperti sumur gali, mata air, air hujan, dan sungai yang kualitasnya belum terjamin.

Proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Nias Selatan dihitung berdasarkan pertumbuhan jumlah penduduk dan asumsi kebutuhan air sebesar 20 liter per orang per detik. Dengan menggunakan asumsi tersebut, kebutuhan air minum akan meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada tahun 2025, dengan proyeksi jumlah penduduk sebanyak 397.200 jiwa, kebutuhan

air minum diperkirakan mencapai 110,33 liter per detik. Sementara itu, pada tahun 2045, jumlah penduduk diperkirakan meningkat menjadi 494.667 jiwa, sehingga kebutuhan air juga meningkat menjadi sekitar 137,41 liter per detik.

Tabel 2.99
Proyeksi Kebutuhan Air Minum Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023 (jiwa)	Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	382.539	397.200	430.830	457.960	478.303	494.667
Kebutuhan Air Minum	106,26	110,33	119,68	127,21	132,86	137,41

Dari tabel di atas, rata-rata peningkatan kebutuhan air minum di Kabupaten Nias Selatan selama periode 2025–2045 adalah sekitar 6,77 liter per detik setiap lima tahun. Ini setara dengan tambahan kebutuhan sekitar 585.000 liter (585 m³) air per hari setiap lima tahun, sehingga memerlukan peningkatan kapasitas layanan air secara berkala dan berkelanjutan.

Kebutuhan air minum di Kabupaten Nias Selatan yang terus meningkat belum diimbangi dengan kapasitas layanan yang memadai, sehingga terjadi gap layanan yang cukup besar, terutama di wilayah pedalaman. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan pengembangan dan perluasan jaringan PDAM atau Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) desa, pemanfaatan sumber air lokal secara berkelanjutan, penerapan sistem penampungan air hujan dan teknologi filtrasi sederhana, serta pemetaan wilayah dengan risiko kekurangan air tertinggi sebagai dasar prioritas pembangunan.

2.6.2.3 Kebutuhan Listrik

Ketersediaan energi listrik merupakan aspek yang sangat penting dan bahkan menjadi suatu parameter untuk mendukung keberhasilan pembangunan suatu daerah. Ketersediaan energi listrik yang memadai dan tepat sasaran akan memacu perkembangan pembangunan daerah seperti sektor industri, komersial, pelayanan publik dan bahkan kualitas hidup masyarakat dengan semakin banyaknya warga yang menikmati energi listrik. Kemudian secara langsung maupun tidak langsung, hal akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dengan Asumsi Kebutuhan listrik adalah 170 watt/jiwa, maka kebutuhan energi listrik Kabupaten Nias Selatan di tahun 2025 adalah 67.551,52 kWh berdasarkan proyeksi jumlah penduduk sebanyak 397.200 jiwa. Prediksi kebutuhan energi listrik Kabupaten Nias Selatan di tahun 2045 adalah 84.127,04

kWH sesuai dengan proyeksi jumlah penduduk sebanyak 494.667 jiwa. Berikut proyeksi kebutuhan listrik Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2045.

Tabel 2.100
Proyeksi Kebutuhan Listrik Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023 (jiwa)	Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	382.539	397.200	430.830	457.960	478.303	494.667
Kebutuhan Rumah	76.508	79.440	86.166	91.592	95.661	98.933
Kebutuhan Listrik	65.057,65	67.551,52	73.270,35	77.884,35	81.344,05	84.127,04

Pada tahun 2023, rasio elektrifikasi Kabupaten Nias Selatan tercatat sebesar 58,54%, masih jauh di bawah rata-rata nasional (99,74%), menandakan adanya kesenjangan signifikan dalam akses energi, terutama di daerah terpencil. Dengan asumsi kebutuhan listrik sebesar 170 watt per jiwa, proyeksi kebutuhan energi wilayah ini mencapai 67.551,52 kWh pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 84.127,04 kWh pada tahun 2045, seiring pertumbuhan penduduk. Kondisi geografis yang menantang membuat pendekatan konvensional melalui perluasan jaringan PLN kurang efektif. Oleh karena itu, strategi elektrifikasi perlu mengutamakan pemanfaatan energi terbarukan seperti PLTS dan mikrohidro, pembangunan sistem *microgrid* mandiri, serta mendorong kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Penyusunan peta jalan elektrifikasi terpadu sangat penting guna mempercepat pemerataan akses energi dan mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

2.6.2.4 Kebutuhan Pengelolaan Persampahan

Dalam penanganan sampah dapat diasumsikan bahwa laju produksi sampah tidak sebanding dengan proses penanganannya. Hal tersebut tentu memacu pemerintah untuk lebih awal memikirkan bagaimana strategi yang efisien dalam menanggulangi masalah persampahan. Masalah persampahan terjadi antara lain karena semrawutnya pola permukiman dan pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk. Maka salah satu aspek yang sedang diupayakan adalah prasarana yang memadai sebagai media utama untuk pengelolaan persampahan.

Hingga tahun 2023, pengelolaan sampah di Kabupaten Nias Selatan masih menghadapi keterbatasan yang cukup signifikan, baik dari segi infrastruktur maupun sistem operasional. Saat ini, fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA) belum tersedia, yang mengindikasikan belum optimalnya sistem pembuangan dan pengelolaan akhir sampah di wilayah ini. Di sisi lain, jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) menunjukkan peningkatan dari hanya 2 unit menjadi 17 unit

pada tahun 2023, mencerminkan adanya komitmen awal pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur pengumpulan sampah. Namun demikian, keberadaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang memadai juga belum tersedia, sehingga sebagian besar sampah masih ditangani secara konvensional tanpa melalui tahapan pemilahan, pengolahan, atau daur ulang sebelum dibuang.

Sistem pengumpulan dan pengangkutan umumnya bersifat terbatas dan manual, dengan keterbatasan armada dan SDM. Hal ini berdampak pada rendahnya volume sampah yang tertangani dibandingkan total timbunan. Pada 2023, dari estimasi 520 ton timbunan sampah, hanya sekitar 210 ton ($\pm 40\%$) yang tertangani, menunjukkan adanya gap layanan lebih dari 60%, terutama di desa-desa dan wilayah non-perkotaan.

Kebutuhan infrastruktur persampahan per 5 tahun sampai dengan 2045 dapat dihitung menggunakan proyeksi kebutuhan timbunan sampah. Dengan asumsi timbunan sampah 2,5 liter/orang/hari, maka proyeksi timbunan sampah Kabupaten Nias Selatan di tahun 2025 adalah 993,00 m³/hari dengan jumlah penduduk 397.200 jiwa. Pada tahun 2045, proyeksi timbunan sampah adalah 1.236,67 m³/hari dengan jumlah penduduk 494.667 jiwa. Untuk lebih jelasnya berikut proyeksi kebutuhan pengelolaan persampahan Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2045.

Tabel 2.101
Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023 (jiwa)	Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	382.539	397.200	430.830	457.960	478.303	494.667
Proyeksi Timbunan Sampah	956,35	993,00	1.077,08	1.144,90	1.195,76	1.236,67
Proyeksi Jumlah Kebutuhan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu	0	0	1	2	4	6

2.6.2.5 Kebutuhan Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Beberapa jenis sarana kesehatan tersebut antara lain adalah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu dan balai pengobatan lingkungan. Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Nias Selatan sampai dengan tahun 2023 adalah

sebanyak 3 unit. Selama periode 2025 sampai 2045 pembangunan rumah sakit diproyeksi akan bertambah 1 di tahun 2045.

Dengan asumsi satu puskesmas dapat melayani hingga 30.000 jiwa, maka pembangunan 36 unit puskesmas yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Nias Selatan sudah memenuhi kebutuhan dasar pelayanan kesehatan tingkat pertama, mengingat proyeksi penduduk tahun 2025 sebesar 397.200 jiwa. Namun, sebaran geografis yang luas dan kondisi topografi yang menantang menyebabkan tidak semua wilayah memiliki akses mudah ke puskesmas. Oleh karena itu, puskesmas pembantu (Pustu) atau balai pengobatan lingkungan (BPL) menjadi solusi penting untuk memperluas jangkauan pelayanan di wilayah terpencil dan perbatasan.

Untuk tahun 2025, dengan mempertimbangkan persebaran dan aksesibilitas, diperlukan 13 unit Pustu/BPL sebagai pelengkap layanan di luar cakupan puskesmas induk. Sementara itu, dengan pertumbuhan penduduk menjadi 494.667 jiwa pada tahun 2045, jumlah Pustu/BPL ideal diproyeksikan meningkat menjadi 16 unit guna mengatasi beban layanan dan menjangkau populasi yang berada jauh dari pusat layanan kesehatan.

Pembangunan sarana ini perlu didukung oleh penguatan layanan kesehatan keliling, penyediaan tenaga medis di lokasi strategis, serta peningkatan sarana transportasi dan komunikasi, sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil dan merata. Berikut proyeksi kebutuhan fasilitas kesehatan Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2045.

Tabel 2.102
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045

Uraian	Kondisi Tahun 2023 (jiwa)	Penduduk (jiwa)				
		2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk	382.539	397.200	430.830	457.960	478.303	494.667
Proyeksi Jumlah Rumah Sakit	3	3	3	3	3	4
Proyeksi Jumlah Puskesmas	36	36	36	36	36	36
Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	13	13	14	15	16	16

2.6.2.6 Kebutuhan Sarana Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal maupun yang formal dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada.

Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Dalam menyusun proyeksi kebutuhan sarana pendidikan untuk tahun 2025-2045, digunakan sejumlah asumsi dasar yang mempertimbangkan distribusi usia dalam kelompok umur, tingkat partisipasi pendidikan, serta standar rasio kapasitas sekolah per murid. Asumsi ini bertujuan untuk menciptakan estimasi yang realistis dan dapat digunakan sebagai dasar perencanaan kebijakan pendidikan jangka menengah dan panjang.

Estimasi jumlah penduduk per kelompok umur (0–14 tahun dan 15–64 tahun) dalam proyeksi ini mengacu pada data proyeksi penduduk yang berlaku hingga tahun 2045. Kelompok umur 0–14 tahun dibagi menjadi tiga kategori jenjang pendidikan utama berdasarkan estimasi proporsi usia, dengan rincian sebagai berikut:

- PAUD (usia 3–6 tahun): Diasumsikan sebanyak 35% dari total kelompok umur 0–14 tahun.
- SD/MI (usia 7–12 tahun): Diasumsikan sebanyak 45% dari kelompok umur 0–14 tahun.
- SMP/MTs (usia 13–15 tahun): Diasumsikan sebanyak 20% dari kelompok umur 0–14 tahun.
- SMA/SMK/MA (usia 15–18 tahun): Diasumsikan sebanyak 15% dari kelompok umur 15–64 tahun

Dalam menghitung jumlah sekolah yang dibutuhkan, digunakan asumsi kapasitas rata-rata murid per unit sekolah yang mengacu pada standar ideal kapasitas pendidikan di Indonesia, sebagai berikut:

- PAUD: Setiap sekolah diasumsikan mampu menampung 100 murid.
- SD/MI: Setiap sekolah diasumsikan mampu menampung 200 murid.
- SMP/MTs: Setiap sekolah diasumsikan mampu menampung 150 murid.
- SMA/SMK/MA: Setiap sekolah diasumsikan mampu menampung 150 murid.

Dengan mengkombinasikan data proyeksi penduduk dan kapasitas sekolah ini, proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan Kabupaten Nias Selatan tahun 2025-2045 dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 2.103
Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan, 2025-2045

Uraian	Kondisi	Penduduk (jiwa)				
	Tahun 2023 (jiwa)	2025	2030	2035	2040	2045
Jumlah Penduduk 0-14 Tahun	106.018	110.400	126.460	141.700	130.878	116.379
Jumlah Penduduk 15-64 Tahun	262.378	270.270	282.840	288.360	312.491	332.492
Proyeksi Jumlah TK	278	290	332	372	343	306
Proyeksi Jumlah SD/MI	234	244	279	312	289	257
Proyeksi Jumlah SMP/Mts	127	133	152	170	157	140
Proyeksi Jumlah SMA/MA/SMK	210	216	226	231	250	266

Proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan di Kabupaten Nias Selatan menunjukkan tren meningkatnya kebutuhan sarana pendidikan PAUD hingga SMP/MTs hingga tahun 2035, seiring dengan bertambahnya jumlah anak usia 0–14 tahun. Setelah 2035, kebutuhan pada jenjang ini menurun karena berkurangnya populasi anak. Sebaliknya, kebutuhan sekolah jenjang SMA/SMK/MA terus meningkat hingga 2045, mengikuti pertumbuhan penduduk usia produktif (15–64 tahun). Tren ini menuntut penyesuaian kebijakan berupa fokus pembangunan sekolah dasar dan menengah pertama hingga 2035, lalu beralih ke penguatan jenjang menengah atas setelahnya.

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Pusat pertumbuhan (*growth pole*) adalah suatu wilayah yang mengalami perkembangan ekonomi dan sosial yang jauh lebih pesat dibandingkan wilayah sekitarnya. Wilayah ini memiliki daya tarik tinggi terhadap investasi, kegiatan ekonomi, dan mobilitas penduduk. Salah satu ciri utama pusat pertumbuhan adalah kemampuannya untuk memengaruhi dan mendorong pembangunan wilayah di sekitarnya melalui efek penyebaran (*spread effect*), baik dalam bentuk aliran tenaga kerja, teknologi, barang dan jasa, maupun infrastruktur.

Arah utama pembangunan ruang wilayah kabupaten difokuskan pada dua aspek pokok, yaitu perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Pada aspek struktur ruang, pembangunan diarahkan untuk membentuk sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta prasarana pendukung lainnya. Upaya ini bertujuan menciptakan tata ruang yang fungsional, efisien, terhubung, dan

berdaya saing. Sementara itu, aspek pola ruang menitikberatkan pada pengembangan kawasan budidaya, khususnya sektor pariwisata dan permukiman. Pengembangan ini tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik semata, tetapi juga mencakup pengelolaan kawasan secara berkelanjutan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan kualitas lingkungan permukiman.

Teluk Dalam sebagai pusat perkotaan utama atau Pusat Kegiatan Lokal (PKL) memiliki peran strategis dalam struktur ruang wilayah. Kawasan ini didukung oleh keberadaan jaringan jalan kolektor primer yang menghubungkan antarwilayah di dalam kabupaten, serta konektivitas antar pulau yang menunjang mobilitas orang dan barang. Dengan fungsi sebagai pusat aktivitas ekonomi, pemerintahan, dan pelayanan publik, Teluk Dalam menjadi simpul utama dalam sistem jaringan transportasi dan infrastruktur wilayah. Posisi strategis ini memperkuat peran Telukdalam sebagai motor penggerak pertumbuhan kawasan dan sekaligus sebagai titik konsentrasi pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) kabupaten.

Sebaran kawasan lindung dan kawasan budidaya di wilayah ini mencerminkan keterpaduan dengan arah utama pembangunan ruang wilayah yang menekankan pada perwujudan struktur ruang dan pola ruang. Kawasan lindung, seperti hutan lindung (72.716,57 Ha), kawasan badan air (1.425,23 Ha), kawasan konservasi, serta ekosistem mangrove (380,55 Ha), berfungsi sebagai elemen penting dalam mendukung kualitas lingkungan dan daya dukung wilayah. Sementara itu, kawasan budidaya yang lebih luas, meliputi hutan produksi (95.041,79 Ha), pertanian (62.354,68 Ha), permukiman (9.226,88 Ha), dan pariwisata (563,13 Ha), menjadi basis utama pengembangan ekonomi. Keseimbangan antara keduanya sejalan dengan pengembangan struktur ruang yang terhubung melalui jaringan transportasi, energi, dan telekomunikasi, serta pengembangan pola ruang yang mendorong kawasan budidaya berbasis potensi lokal. Infrastruktur pendukung seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan fasilitas publik direncanakan untuk memperkuat fungsi pusat-pusat kegiatan, terutama Telukdalam sebagai pusat pertumbuhan utama, guna menciptakan wilayah yang berdaya saing, berkelanjutan, dan inklusif.

2.7.1 Identifikasi dan Karakteristik Kawasan Strategis

Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah di arahkan sesuai dengan Kawasan Strategis Kabupaten Nias Selatan yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) RTRW Kabupaten Nias Selatan yang direncanakan sebagai berikut :

1. Kawasan strategis di tingkat provinsi meliputi Desa Tradisional Bawomataluo, wilayah Kecamatan Luahagundre Maniamolo, dan kawasan Taman Laut Pulau Sibaranun. Kegiatan unggulan di kawasan ini berfokus pada pelestarian budaya tradisional serta pengembangan ekowisata berbasis laut dan kearifan lokal. Infrastruktur pendukung yang tersedia masih terbatas, berupa jalan akses desa, fasilitas wisata dasar, dan dermaga kecil. Tantangan utama dalam pengembangan kawasan ini meliputi aksesibilitas yang rendah, kurangnya promosi destinasi wisata unggulan, serta kebutuhan peningkatan perlindungan terhadap ekosistem laut.
2. Kawasan Strategis Kabupaten Nias Selatan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi. Kawasan ini mencakup beberapa wilayah dengan fungsi ekonomi yang berbeda.
 - a) Telukdalam sebagai Ibu Kota Kabupaten menjadi pusat pertumbuhan ekonomi melalui sektor pemerintahan, perdagangan, dan jasa. Kawasan ini didukung oleh pelabuhan, jaringan jalan nasional, dan pasar tradisional. Tantangan yang dihadapi berupa kepadatan penduduk, kemacetan, dan kebutuhan penataan ruang kota yang lebih efisien.
 - b) Kecamatan Luahagundre Maniamolo dan Kecamatan Fanayama ditetapkan sebagai kawasan unggulan dalam sektor pariwisata, khususnya wisata budaya dan bahari. Meskipun terdapat akses jalan menuju objek wisata dan beberapa akomodasi lokal seperti *homestay*, pengembangannya masih menghadapi tantangan berupa minimnya fasilitas pendukung wisata dan rendahnya kapasitas sumber daya manusia di bidang pariwisata
 - c) Kecamatan Pulau-Pulau Batu berperan sebagai pusat perikanan tangkap dan wisata bahari. Untuk meningkatkan daya saing, diperlukan penguatan sistem rantai dingin (*cold chain*) dan pengembangan pelabuhan pengumpul. Infrastruktur yang ada, seperti TPI dan

pelabuhan kecil, masih terbatas. Tantangan utama adalah keterbatasan transportasi laut dan kurangnya prasarana ekonomi untuk mendukung produksi dan distribusi.

3. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya yaitu sebagai berikut:
 - a) Kawasan Bawomataluo merupakan pusat pelestarian budaya Nias Selatan yang menonjolkan keberadaan rumah induk adat dan tata ruang perkampungan tradisional. Infrastruktur pendukung mencakup situs budaya yang telah dikenal secara nasional dan akses untuk wisatawan. Tantangan yang dihadapi adalah perlunya pelestarian fisik rumah adat di tengah arus modernisasi serta keterbatasan dana pemeliharaan.
 - b) kawasan Sifalago Gomo di Kecamatan Boronadu dan kawasan Tundrumbaho di Kecamatan Idanotae berfungsi sebagai lokasi pelestarian rumah adat dan cagar budaya megalitikum. Infrastruktur yang tersedia berupa akses jalan desa dan papan informasi budaya. Kendala utama meliputi keterbatasan upaya konservasi, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap warisan budaya, serta kurang optimalnya promosi di tingkat regional maupun nasional.
4. Kawasan pesisir pantai seperti Hilisataro di Kecamatan Toma, Pantai Baloho di Kecamatan Telukdalam, serta pantai Lagundri dan Sorake di Kecamatan Luahagundre Maniamolo ditetapkan sebagai kawasan strategis dari sisi lingkungan hidup. Kegiatan unggulan di kawasan ini mencakup konservasi ekosistem pesisir dan pengembangan wisata bahari yang berkelanjutan. Infrastruktur yang tersedia meliputi beberapa fasilitas wisata dan pemukiman pesisir. Tantangan utama meliputi tekanan lingkungan akibat pembangunan, abrasi pantai, pencemaran laut, serta alih fungsi lahan yang tidak terkendali.

- Percepatan Pengembangan Sistem Perkotaan
 - Revitalisasi dan Percepatan Pengembangan Kawasan Perkotaan sebagai Pusat Pertumbuhan Wilayah dan Pusat Pelayanan
 - Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Perkotaan sesuai Sistem Perkotaan (Transportasi, Energi, Telekomunikasi, Jaringan Sumber Daya Air, Jaringan Prasarana Lingkungan)
 - Rehabilitasi dan Pengendalian Kawasan Perkotaan berbasis Mitigasi Bencana
 - Penyusunan Rencana Rinci (RDTR) sebagai Operasional Pengelolaan Perkotaan
 - Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial
- b. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi
- Sistem Transportasi Darat
 - Pemantapan Jaringan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer K-1 yang ada dalam wilayah Daerah
 - Pengembangan Jaringan Jalan Arteri Primer, Kolektor Primer yang ada dalam wilayah Daerah
 - Jaringan Jalan Kabupaten
 - Pemantapan Jaringan Jalan Kolektor Primer K-2/K-3 Daerah
 - Pengembangan Jalan Kolektor Primer K-2/K-3 dan Jalan Kabupaten yang Menghubungkan Antar Kecamatan
 - Peningkatan Kualitas Jalan Antar Kecamatan
 - Sistem Transportasi Udara
 - Perwujudan Sistem Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus, serta Pengendalian Kawasan Budidaya pada KKOP
- c. Perwujudan Sistem Jaringan Energi
- Pemantapan dan Pengembangan Sistem Jaringan Transmisi Tenaga Listrik
 - Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Kelistrikan ke Seluruh Wilayah Kabupaten
- d. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

- Pengembangan Konservasi Sumber Daya Alam (SDA) melalui Perlindungan dan Pelestarian Jaringan Sumber Daya Air, Pengawetan Air, Pengelolaan Kualitas SDA, dan Pengendalian Pencemaran SDA
 - Pengembangan Pendayagunaan dan Penyediaan SDA Berbasis Daerah Aliran Sungai (DAS)
 - Pemeliharaan Bangunan Sumber Daya Air
 - Pengembangan Pola Pengelolaan Sumber Daya Air (WS)
 - Pengembangan Pola Pengelolaan Cekungan Air Tanah
 - Pengembangan Pola Pengelolaan Badan Air
 - Pengembangan Sumber Daya Air pada Kawasan Rawa
 - Pengembangan Pengelolaan Sumber Mata Air
 - Pengelolaan Pengendalian Daya Rusak Air dengan Penanggulangan, Pemulihan Kualitas Lingkungan, dan Pemulihan Jaringan SDA yang Rusak
 - Pengembangan Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
 - Peningkatan Prasarana Penanggulangan Banjir dan Abrasi
 - Rehabilitasi, Peningkatan, dan Perluasan Prasarana dan Sarana Jaringan Irigasi Sungai
 - Rehabilitasi dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Bangunan Pengendali Daya Rusak Air
 - Pemantapan Normalisasi, Penguatan Tebing, Pembuatan Kolam Retensi, dan Pembuatan Tanggul yang Telah Ada
 - Pemantapan Sistem Penanganan Erosi dan Longsor
 - Pemantapan Sistem Pengamanan Abrasi Pantai
 - Pengembangan Sistem Jaringan Drainase dan Pengendalian Banjir
 - Pemantapan dan Pengembangan Sistem Jaringan Drainase Makro dan Mikro
 - Penyediaan Sumur Resapan dan Kolam Retensi
 - Pengembangan Kelembagaan Pengelola Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air
- e. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Pengembangan Kelembagaan Pengelola Jaringan Prasarana Lingkungan
 - Pengembangan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Baru

2. Perwujudan Rencana Pola Ruang Wilayah Daerah

a. Perwujudan Kawasan Pariwisata

- Pengembangan Objek Wisata Potensial dan Objek Wisata yang Telah Ditetapkan
- Pengembangan Kawasan Pariwisata
- Pengelolaan Kawasan Pariwisata
- Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Pengembangan Pariwisata Bahari

b. Perwujudan Kawasan Permukiman

- Pengembangan Sarana dan Prasarana Permukiman
- Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sesuai Tipologi dan Hirarki pada Kawasan Permukiman
- Peningkatan Sanitasi Lingkungan Kawasan Permukiman

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar dalam merumuskan fokus pembangunan daerah. Oleh karena itu, proses perumusannya perlu melibatkan berbagai pihak agar lebih terarah dan efektif dalam menyelesaikan permasalahan pembangunan di daerah. Perumusan permasalahan dan isu strategis ini bertujuan untuk memberikan arah kebijakan serta sasaran pokok pembangunan dalam jangka waktu dua puluh tahun ke depan. Selain itu, identifikasi permasalahan dan analisis isu strategis menjadi pijakan awal bagi daerah dalam merumuskan visi dan misi pembangunan jangka panjang yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

5.1. Permasalahan Pembangunan Daerah

Penentuan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan didasarkan pada hasil analisis terhadap gambaran umum kondisi daerah serta hasil penjarangan dari berbagai pihak. Permasalahan yang diidentifikasi merupakan aspek-aspek yang membutuhkan intervensi kebijakan untuk diselesaikan dalam kurun waktu 20 tahun.

Permasalahan pembangunan tersebut merupakan hasil sintesis dari analisis mendalam terhadap kondisi daerah sebagaimana diuraikan dalam Bab II, serta hasil kajian dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan. Proses identifikasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan normatif dan teknokratis, yang bertujuan untuk menemukan kesenjangan (*gap*) antara capaian aktual pembangunan dengan kondisi ideal yang diharapkan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, lingkungan, maupun tata kelola pemerintahan. Setiap permasalahan dirumuskan secara ringkas sebagai pernyataan kondisi faktual, yang menunjukkan adanya deviasi atau ketimpangan antara kondisi eksisting dan target yang ditetapkan dalam visi pembangunan jangka panjang. Dengan pendekatan ini, perumusan permasalahan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga menggambarkan urgensi penanganan berdasarkan hasil kajian empirik dan data yang relevan, serta memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Dengan demikian, daftar permasalahan yang disajikan dalam dokumen ini dapat menjadi dasar yang kokoh dalam merumuskan arah kebijakan, strategi, dan program prioritas dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan, sekaligus

mencerminkan integrasi antara analisis teknis dan prinsip keberlanjutan yang diamanatkan dalam KLHS RPJPD Kabupaten Nias Selatan. Berdasarkan hasil analisis diatas adapun permasalahan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan adalah sebagai berikut:

a. Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi daerah dan pemanfaatan sumber daya alam

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator utama keberhasilan pembangunan daerah. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, umumnya semakin baik pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ekonomi merupakan proses perubahan yang dilakukan secara sadar dan terencana untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Di Kabupaten Nias Selatan, permasalahan ekonomi masih menjadi tantangan besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan peluang usaha, peningkatan daya beli, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

Salah satu tantangan utama yang dihadapi dalam pembangunan daerah saat ini adalah masih rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang mencerminkan keterbatasan kemampuan pemerintah daerah dalam menggali potensi sumber daya lokal secara optimal. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya produktivitas sektor-sektor unggulan yang seharusnya menjadi penggerak utama perekonomian daerah. Akibatnya, terjadi ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang pada akhirnya membatasi ruang fiskal daerah dalam merancang dan melaksanakan program-program pembangunan yang berkelanjutan dan tepat sasaran.

Ketergantungan fiskal yang tinggi ini berdampak pada terbatasnya kapasitas pemerintah daerah untuk meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Belum optimalnya pemanfaatan potensi sektor unggulan, seperti pertanian, pariwisata, atau industri kreatif, juga menunjukkan perlunya strategi yang lebih terfokus dan terintegrasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh karena itu, peningkatan PAD dan produktivitas sektor unggulan harus menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan daerah, guna menciptakan kemandirian fiskal serta

mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat yang lebih merata dan berkelanjutan.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam di Nias Selatan masih menghadapi kendala, terutama dalam hal kreativitas pemanfaatannya. Kurangnya inovasi dalam mengelola sektor pertanian, perkebunan, serta perikanan mengakibatkan sektor-sektor tersebut belum mampu memberikan kesejahteraan yang optimal bagi para pelakunya.

Sektor perikanan, pertanian dan pariwisata merupakan sektor unggulan daerah dan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi belum optimal. Permasalahan yang menghambat perkembangan sektor tersebut meliputi:

- Permasalahan sektor perikanan

Kurangnya infrastruktur pendukung perikanan seperti pelabuhan, jalan, fasilitas penyimpanan (cold storage), dan pasar sering kali tidak memadai. Hal ini menghambat distribusi hasil tangkapan dan menyebabkan penurunan kualitas ikan. Akses Terbatas ke teknologi modern, baik dalam hal penangkapan ikan maupun pengolahan hasil tangkapan. Teknologi yang kurang memadai menyebabkan efisiensi penangkapan yang rendah dan tingginya tingkat kehilangan hasil tangkapan (post-harvest losses). Keterbatasan Modal dan Pendanaan bagi nelayan, tanpa modal yang cukup nelayan tidak dapat memperbaiki peralatan, membeli kapal yang lebih baik, atau mengakses teknologi modern. Tingkat pendidikan dan keterampilan yang rendah di kalangan nelayan menyebabkan kurangnya pengetahuan tentang praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan, manajemen sumber daya, dan teknik pengolahan yang efisien. Hal ini berdampak negatif pada produktivitas dan kelestarian sumber daya perikanan. Banyak nelayan di masih menggunakan metode penangkapan tradisional yang kurang efisien dan tidak berkelanjutan. Metode ini tidak hanya mengurangi hasil tangkapan tetapi juga berpotensi merusak ekosistem perairan. Implementasi kebijakan perikanan sering kali lemah dan kurang efektif. Pengelolaan sumber daya perikanan yang tidak memadai serta kurangnya dukungan dari pemerintah pusat dan daerah memperburuk kondisi sektor perikanan

- Permasalahan sektor pertanian

Infrastruktur pendukung seperti jalan, irigasi, penyimpanan, dan fasilitas pasar sering kali tidak memadai. Hal ini menghambat transportasi hasil pertanian, meningkatkan biaya produksi, dan mengurangi akses petani ke pasar. Petani sering kali memiliki akses terbatas ke teknologi pertanian modern dan pengetahuan tentang praktik pertanian yang efisien. Ini mengakibatkan rendahnya produktivitas dan hasil panen yang kurang optimal. Banyak petani kesulitan mendapatkan akses ke modal dan kredit untuk membeli benih berkualitas, pupuk, alat pertanian, dan investasi lainnya. Tanpa modal yang cukup, mereka sulit meningkatkan produksi dan mengadopsi teknologi baru. Perubahan iklim menyebabkan ketidakpastian dalam pola cuaca, yang berdampak negatif pada produksi pertanian. Bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan badai juga lebih sering terjadi dan merusak lahan serta tanaman. Keterbatasan Akses ke Pasar Petani sering kali kesulitan menjual hasil pertaniannya karena akses yang terbatas ke pasar yang lebih besar. Infrastruktur transportasi yang buruk dan kurangnya informasi pasar memperburuk situasi ini. Layanan penyuluhan pertanian yang terbatas mengakibatkan kurangnya pengetahuan dan keterampilan di kalangan petani. Selain itu, kebijakan dan dukungan dari pemerintah sering kali tidak cukup atau tidak tepat sasaran. Kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan, dan masalah kesehatan juga berkontribusi pada rendahnya produktivitas sektor pertanian di daerah tertinggal. Faktor-faktor ini membatasi kemampuan petani untuk mengembangkan usaha pertanian mereka.

- Permasalahan sektor pariwisata

Infrastruktur dasar seperti jalan, transportasi, listrik, air bersih, dan fasilitas komunikasi tidak memadai. Ini menghambat aksesibilitas dan kenyamanan bagi wisatawan yang ingin berkunjung. Kurangnya akses ke modal dan investasi membuat sulit untuk mengembangkan fasilitas pariwisata yang menarik. Tanpa investasi, pembangunan hotel, restoran, dan atraksi wisata menjadi terhambat. Tidak memiliki sumber daya atau keahlian untuk mempromosikan potensi wisatanya secara efektif. Kurangnya promosi menyebabkan kurangnya kesadaran wisatawan terhadap destinasi wisata di daerah tersebut. Tenaga kerja di sektor pariwisata sering kali kurang terlatih dan kurang berpengalaman. Hal ini

berdampak pada kualitas layanan yang diberikan kepada wisatawan dan dapat mengurangi daya tarik destinasi wisata. Pengelolaan lingkungan yang buruk dapat merusak daya tarik alam yang menjadi salah satu aset utama pariwisata. Polusi, sampah, dan kerusakan ekosistem alam dapat mengurangi daya tarik wisata dan kelestarian alam. Dukungan dari pemerintah sering kali kurang optimal, baik dalam bentuk kebijakan, regulasi, maupun bantuan finansial. Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pengembangan pariwisata menghambat pertumbuhan sektor ini. Akses informasi yang terbatas membuat wisatawan kesulitan menemukan informasi mengenai destinasi wisata, akomodasi, dan aktivitas yang dapat dilakukan. Ini mengurangi minat wisatawan untuk berkunjung.

b. Pembangunan infrastruktur masih jauh dibawah kebutuhan

Infrastruktur merujuk pada kumpulan fasilitas fisik, sistem, dan layanan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan sehari-hari masyarakat serta aktivitas ekonomi. Infrastruktur juga merupakan prasyarat penting dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kabupaten Nias Selatan yang memiliki wilayah luas dan terdiri dari berbagai pulau (wilayah kepulauan) masih sangat membutuhkan infrastruktur penunjang, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, serta sarana dan prasarana transportasi, baik darat, udara, maupun laut.

Salah satu permasalahan strategis yang masih dihadapi dalam pembangunan wilayah kepulauan adalah masih rendahnya tingkat konektivitas antarwilayah serta terbatasnya aksesibilitas antar pulau. Kondisi geografis yang tersebar serta infrastruktur transportasi yang belum merata menyebabkan distribusi layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan logistik, menjadi terhambat. Hal ini tidak hanya mempengaruhi kualitas pelayanan publik, tetapi juga menciptakan ketimpangan dalam akses terhadap berbagai peluang ekonomi.

Ketidakmerataan konektivitas ini menghambat mobilitas barang, jasa, dan tenaga kerja, serta membatasi potensi ekonomi lokal untuk berkembang secara maksimal. Banyak wilayah yang memiliki sumber daya unggulan, baik di sektor pertanian, kelautan, maupun pariwisata, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal karena sulitnya akses menuju dan keluar dari

wilayah tersebut. Akibatnya, disparitas pembangunan antarwilayah semakin melebar, dan masyarakat di wilayah terpencil atau terluar masih tertinggal dalam menikmati hasil pembangunan.

Kurangnya jumlah serta rendahnya kualitas infrastruktur dan sarana prasarana daerah berdampak pada keterbatasan aksesibilitas, sehingga sebagian besar wilayah Kabupaten Nias Selatan masih tergolong terpencil, terisolasi, dan tertinggal. Kondisi ini menjadi tantangan utama dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, diperlukan upaya serius dalam meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah, terutama melalui pembangunan dan perbaikan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara yang terintegrasi. Penguatan konektivitas ini tidak hanya akan mempercepat pemerataan pembangunan, tetapi juga menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah.

c. Belum optimalnya peningkatan daya saing produk unggulan daerah

Perekonomian suatu wilayah merupakan tolok ukur utama dalam menilai tingkat kesejahteraan masyarakat, baik dari perspektif makro maupun mikro. Hal ini menjadi aspek penting karena kehidupan masyarakat sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi yang berkaitan dengan aspek finansial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Belum berkembangnya inovasi dalam dunia usaha serta masih rendahnya kapasitas Usaha Kecil dan Menengah (UKM) menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan daya saing produk unggulan lokal, khususnya di pasar regional. Banyak UKM yang masih menghadapi keterbatasan dalam hal akses terhadap teknologi, permodalan, sumber daya manusia yang terampil, serta strategi pemasaran yang adaptif terhadap dinamika pasar modern. Akibatnya, produk-produk lokal sulit bersaing, baik dari segi kualitas, desain, maupun harga, dibandingkan dengan produk dari daerah lain atau bahkan dari luar negeri.

Rendahnya inovasi usaha juga mengindikasikan minimnya kolaborasi antara pelaku usaha, lembaga riset, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah dalam mendorong pengembangan produk berbasis potensi lokal yang bernilai tambah tinggi. Banyak potensi lokal yang sebenarnya memiliki keunikan dan keunggulan, namun belum dikelola dengan pendekatan kewirausahaan yang

kreatif dan inovatif. Hal ini menyebabkan produk unggulan lokal belum mampu menembus pasar yang lebih luas secara konsisten.

Oleh karena itu, peningkatan kapasitas UKM perlu menjadi fokus strategis melalui program pendampingan usaha, pelatihan kewirausahaan, penyediaan akses pembiayaan yang lebih inklusif, serta penguatan ekosistem inovasi daerah. Dengan dukungan kebijakan yang berpihak dan kolaborasi lintas sektor, UKM diharapkan mampu bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang tangguh, adaptif, dan kompetitif, sehingga produk-produk lokal dapat bersaing secara optimal di pasar regional, nasional, maupun internasional.

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga berperan krusial dalam menopang kemajuan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan daerah secara berkelanjutan. Dengan adanya inovasi, produktivitas ekonomi dapat meningkat, sehingga daya saing daerah semakin kuat.

d. Daya saing sumber daya manusia relatif rendah

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset strategis sekaligus investasi jangka panjang yang sangat menentukan arah dan keberhasilan pembangunan suatu daerah. Namun demikian, daya saing SDM di Kabupaten Nias Selatan masih tergolong rendah. Permasalahan ini berakar pada sejumlah faktor, antara lain kualitas lulusan pendidikan formal yang belum siap memasuki dunia kerja, dominasi angkatan kerja berpendidikan rendah, ketimpangan mutu SDM antarwilayah, serta rendahnya tingkat produktivitas tenaga kerja secara umum.

Tingginya proporsi tenaga kerja yang tidak memperoleh upah dan masih bekerja di sektor informal mencerminkan lemahnya kompetensi dan keterampilan yang dimiliki oleh sebagian besar angkatan kerja. Kondisi ini juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara sistem pendidikan dan pelatihan dengan kebutuhan riil dunia usaha dan industri. Kurikulum yang belum selaras dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar kerja mengakibatkan lulusan pendidikan sulit terserap secara optimal, sehingga berdampak langsung terhadap rendahnya kontribusi SDM terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Selain tantangan struktural, pengembangan SDM di Kabupaten Nias Selatan juga dihadapkan pada hambatan kultural. Masih terdapat pola pikir dan pandangan dalam masyarakat yang memandang pendidikan sebagai sesuatu

yang kurang prioritas. Di samping itu, sikap mental yang pasif, kurangnya semangat kewirausahaan, serta hambatan psikologis seperti rasa takut untuk memulai usaha atau berinovasi, turut memperlambat proses pengembangan potensi individu. Keterbatasan akses terhadap teknologi, informasi, dan ruang kreatif juga menjadi kendala dalam upaya peningkatan kapasitas dan daya saing masyarakat.

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dalam mereformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi yang berbasis kompetensi dan selaras dengan kebutuhan pasar kerja. Peningkatan akses terhadap pelatihan kerja, program sertifikasi keterampilan, serta penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat—seperti padat karya dan pengembangan wirausaha produktif—merupakan langkah strategis yang perlu dikedepankan. Dengan demikian, Kabupaten Nias Selatan dapat mewujudkan SDM yang berkualitas, adaptif, serta memiliki daya saing tinggi sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.

e. Rendahnya kualitas sanitasi daerah serta pentingnya pelestarian lingkungan hidup

Derajat kesehatan masyarakat merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kualitas pembangunan manusia di suatu daerah. Di Kabupaten Nias Selatan, derajat kesehatan masyarakat masih dipengaruhi oleh berbagai faktor determinan, salah satunya adalah masih tingginya persentase rumah tangga yang belum memiliki akses terhadap sanitasi layak dan air bersih. Kondisi ini menjadi tantangan serius dalam upaya meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

Ketiadaan fasilitas sanitasi yang layak, seperti jamban sehat dan sistem pembuangan limbah yang aman, meningkatkan risiko penyebaran penyakit berbasis lingkungan seperti diare, infeksi saluran pencernaan, dan penyakit kulit. Demikian pula, keterbatasan akses terhadap air bersih berdampak langsung terhadap pola hidup sehat masyarakat, terutama dalam hal konsumsi air minum, kebersihan diri, dan sanitasi rumah tangga. Kedua aspek ini berkontribusi terhadap tingginya angka morbiditas dan mortalitas, khususnya pada kelompok rentan seperti balita, lansia, dan ibu hamil.

Rendahnya cakupan layanan sanitasi dan air bersih juga mencerminkan kesenjangan dalam pembangunan infrastruktur dasar, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan pedesaan. Hal ini menunjukkan perlunya intervensi yang lebih komprehensif dan terintegrasi antara pemerintah daerah, lembaga pelayanan publik, serta partisipasi aktif masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi dan air bersih.

Oleh karena itu, peningkatan akses terhadap sanitasi layak dan air bersih harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah jangka panjang. Upaya tersebut perlu diwujudkan melalui pembangunan infrastruktur berbasis kebutuhan lokal, penguatan kelembagaan pengelola air minum dan sanitasi, serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan kualitas lingkungan permukiman dan derajat kesehatan masyarakat, yang pada akhirnya akan mendukung terwujudnya masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang sehat, produktif, dan sejahtera secara berkelanjutan.

f. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang inovatif dan berkualitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Namun demikian, hingga saat ini Kabupaten Nias Selatan masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan integratif. Ketidakterwujudan tata kelola yang responsif terhadap dinamika perubahan serta kurangnya koordinasi lintas sektor dan jenjang pemerintahan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam efektivitas pelaksanaan pembangunan di daerah ini.

Tata kelola yang belum adaptif tercermin dari masih lambatnya respon pemerintah daerah terhadap perubahan lingkungan strategis, baik dalam hal regulasi, teknologi, maupun kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Sementara itu, lemahnya integrasi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan antarorganisasi perangkat daerah menyebabkan rendahnya sinergi program dan tumpang tindih pelaksanaan kegiatan, yang berdampak pada pemborosan sumber daya dan tidak tercapainya target-target pembangunan secara optimal.

Selain itu, kapasitas kelembagaan pemerintah daerah, termasuk sumber daya aparatur, sistem informasi manajemen, serta mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan, masih memerlukan penguatan yang signifikan. Belum optimalnya penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik dan hasil pembangunan.

Oleh karena itu, reformasi tata kelola pemerintahan perlu menjadi salah satu prioritas strategis dalam agenda pembangunan jangka panjang Kabupaten Nias Selatan. Upaya ini dapat diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur, penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, digitalisasi layanan pemerintahan, serta pengembangan mekanisme koordinasi lintas sektor dan partisipasi masyarakat. Dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang adaptif, integratif, dan berdaya saing, maka efektivitas dan efisiensi pembangunan daerah dapat ditingkatkan secara signifikan dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Nias Selatan yang maju, mandiri, dan berkelanjutan.

g. Dominasi kawasan hutan lindung yang membatasi ruang pembangunan dan pemanfaatan lahan secara berkelanjutan di Nias Selatan

Dominasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu tantangan utama dalam pembangunan jangka panjang. Kawasan ini mencakup hampir seluruh wilayah permukiman penduduk dan lahan pertanian masyarakat, meskipun banyak permukiman tersebut telah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Beberapa wilayah seperti Ulunoyo, Boronadu, serta beberapa kecamatan lain di wilayah daratan saat ini dikategorikan sebagai kawasan hutan lindung. Padahal, secara historis, wilayah-wilayah tersebut bukan merupakan kawasan hutan lindung, melainkan telah lama menjadi area permukiman dan pertanian masyarakat.

Berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 6609/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Utara hingga tahun 2020, luas hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan tercatat sebesar 72.716,57 hektare. Namun, keterbatasan ruang untuk permukiman,

pertanian, serta pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama dalam perencanaan pembangunan daerah.

Menanggapi kondisi tersebut, pada tahun 2024, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia telah melakukan pelepasan sebagian kawasan hutan lindung melalui perubahan batas kawasan hutan untuk kepentingan masyarakat desa yang sebelumnya termasuk dalam kawasan hutan lindung. Pelepasan ini dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri LHK Nomor 1502 Tahun 2024, dengan luas kawasan yang dilepas mencapai 2.175,87 hektare. Dengan adanya perubahan ini, luas hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan berkurang menjadi 70.540,70 hektare.

Meskipun pelepasan ini merupakan langkah positif dalam menyediakan ruang bagi masyarakat, pengurangan luas kawasan lindung tersebut masih belum cukup signifikan dalam mengatasi permasalahan keterbatasan lahan bagi permukiman, pertanian, serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nias Selatan.

Beberapa permasalahan utama yang muncul akibat dominasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan antara lain:

1. Ketidakpastian Hukum atas Pemanfaatan Lahan
 - Banyak masyarakat yang telah bermukim di dalam kawasan hutan lindung jauh sebelum Pemerintah Pusat menetapkan sebagai kawasan hutan lindung, tetapi tidak bisa memiliki hak kepemilikan tanah yang sah, sehingga mengalami keterbatasan dalam memperoleh layanan pembangunan dan akses pembiayaan.
 - Ketiadaan legalitas lahan menghambat investasi dan pengembangan sektor ekonomi produktif, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
 - Kurangnya kejelasan status kepemilikan lahan berpotensi menimbulkan konflik agraria dan sosial antara masyarakat dengan pemerintah atau pemangku kepentingan lainnya.
2. Terbatasnya Ruang untuk Pengembangan Infrastruktur dan Pusat Kegiatan Ekonomi
 - Kesulitan dalam menyediakan lahan untuk pembangunan fasilitas publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, perkantoran, dan infrastruktur dasar lainnya.

- Keterbatasan ruang untuk pengembangan kawasan industri, perdagangan, dan layanan ekonomi lainnya yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi daerah.
 - Potensi sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata, sulit dikembangkan secara maksimal karena keterbatasan ruang akibat status hutan lindung.
3. Konflik Tata Ruang dan Ketidaksesuaian dengan Rencana Pembangunan Daerah
- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Nias Selatan mengalami ketidaksesuaian dengan kondisi faktual di lapangan, sehingga banyak kegiatan pembangunan yang terhambat oleh regulasi tata ruang.
 - Proses revisi dan penyesuaian RTRW harus dilakukan secara komprehensif agar mendukung kebutuhan pembangunan daerah tanpa mengabaikan aspek konservasi lingkungan.
 - Diperlukan sinergi dan koordinasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam penyelesaian status kawasan.
4. Ancaman terhadap Kelestarian Lingkungan dan Keberlanjutan Ekosistem
- Perubahan status hutan lindung tanpa perencanaan yang baik berpotensi menyebabkan degradasi lingkungan, seperti deforestasi, erosi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.
 - Perlunya kebijakan pembangunan yang berbasis lingkungan, seperti perhutanan sosial, pengelolaan ekowisata, dan pola pemanfaatan lahan yang berkelanjutan.
 - Meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam akibat aktivitas masyarakat yang bermukim dan berusaha di dalam kawasan hutan lindung.
5. Terbatasnya Aksesibilitas dan Konektivitas Wilayah
- Status hutan lindung menghambat pembangunan jalan dan sarana transportasi yang menghubungkan antarwilayah dalam Kabupaten Nias Selatan, sehingga mempersulit mobilitas masyarakat dan distribusi barang.

- Kesulitan dalam membangun jaringan listrik, telekomunikasi, serta infrastruktur dasar lainnya yang penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tingginya dominasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu faktor pembatas dalam pengembangan ruang wilayah, khususnya untuk pembangunan permukiman, infrastruktur dasar, dan pengembangan aktivitas ekonomi masyarakat. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ketersediaan lahan yang dapat dimanfaatkan secara legal untuk mendukung percepatan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah dengan tekanan pertumbuhan penduduk dan kebutuhan investasi yang tinggi. Di sisi lain, ketentuan perlindungan lingkungan yang melekat pada status kawasan hutan lindung seringkali tidak diimbangi dengan penyediaan alternatif ruang pembangunan yang memadai, sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara aspek konservasi dan kebutuhan pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penataan ruang yang lebih adaptif dan integratif melalui peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah secara menyeluruh, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan pemanfaatan ruang untuk pembangunan daerah.

h. Masih Tingginya Ketimpangan Pembangunan antar Kecamatan dan Wilayah Kepulauan

Ketimpangan pembangunan antar kecamatan dan wilayah kepulauan di Kabupaten Nias Selatan masih menjadi tantangan utama dalam upaya mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Disparitas tersebut tercermin dari perbedaan yang signifikan dalam hal akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, air bersih, serta fasilitas ekonomi antar wilayah daratan utama dan pulau-pulau terluar. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kesenjangan pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan kualitas hidup antar wilayah dalam satu kabupaten.

Wilayah-wilayah kepulauan umumnya menghadapi hambatan geografis dan keterbatasan konektivitas yang berdampak langsung pada tingginya biaya logistik, minimnya investasi, serta lambatnya arus distribusi barang, jasa, dan informasi. Sementara itu, sebagian besar pembangunan infrastruktur dan kegiatan ekonomi masih terkonsentrasi di wilayah tertentu yang lebih

mudah dijangkau, sehingga memperbesar ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketidakseimbangan ini berpotensi memicu masalah sosial, memperlambat integrasi wilayah, dan menghambat akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah secara menyeluruh.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan kebijakan pembangunan wilayah yang berbasis pada pendekatan kewilayahan dan karakteristik lokal, dengan memperkuat konektivitas antarwilayah, memperluas jangkauan layanan publik, serta mendorong pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru di wilayah kepulauan dan kecamatan tertinggal. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam mengurangi ketimpangan ini secara bertahap. Dengan demikian, percepatan pembangunan yang merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan dapat tercapai sesuai dengan prinsip keadilan sosial dan pemerataan hasil pembangunan.

i. Belum Berkembangnya Pusat Pertumbuhan Wilayah Akibat Keterbatasan Infrastruktur Konektivitas, Investasi, dan Keterpaduan Antar Sektor

Belum berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan wilayah di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam upaya pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu penyebab utama dari stagnasi ini adalah keterbatasan infrastruktur, baik dari sisi konektivitas antarwilayah, aksesibilitas transportasi, maupun kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan jaringan komunikasi. Tanpa infrastruktur yang memadai, potensi ekonomi di berbagai kecamatan dan desa tidak dapat dimanfaatkan secara optimal, yang menghambat terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih merata.

Selain itu, keterbatasan investasi di wilayah-wilayah strategis juga turut memperlambat perkembangan pusat-pusat pertumbuhan. Kurangnya insentif dan fasilitas yang menarik minat investor, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, menyebabkan kurangnya aliran investasi yang dapat menggerakkan sektor-sektor ekonomi produktif. Ketidakterpaduan antara kebijakan sektor, baik dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, maupun pariwisata, juga menjadi hambatan dalam menciptakan pusat-pusat

pertumbuhan yang saling mendukung dan berbasis pada keunggulan komparatif masing-masing wilayah.

Oleh karena itu, untuk mempercepat pengembangan pusat-pusat pertumbuhan wilayah, diperlukan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis pada pemetaan potensi masing-masing wilayah. Penguatan infrastruktur konektivitas antarwilayah, baik darat, laut, maupun udara, harus menjadi prioritas utama, disertai dengan kebijakan yang mendukung kemudahan berinvestasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penguatan sinergi antar sektor. Pembangunan kawasan industri, pengembangan sektor pariwisata berbasis lokal, dan pengembangan produk unggulan daerah juga perlu didorong sebagai pilar utama dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata di seluruh Kabupaten Nias Selatan.

5.2. Isu Strategis

5.3. Isu Global

a. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / Sustainable Development Goals

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs) 2015–2030 merupakan kesepakatan global yang diadopsi oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai agenda pembangunan universal untuk mendorong kesejahteraan masyarakat, memperkuat keberlanjutan sosial, menjaga kualitas lingkungan hidup, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inklusif dan transparan, serta memastikan keberlangsungan kehidupan yang layak bagi generasi mendatang. Agenda ini ditetapkan melalui Resolusi Majelis Umum PBB No. 70/1 tahun 2015 yang berjudul "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*".

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan mencakup 17 tujuan utama dan 169 target yang saling terkait, yaitu:

1. Tanpa Kemiskinan,
2. Tanpa Kelaparan,
3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera,
4. Pendidikan Berkualitas,
5. Kesetaraan Gender,

6. Air Bersih dan Sanitasi Layak,
7. Energi Bersih dan Terjangkau,
8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi,
9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur,
10. Berkurangnya Kesenjangan,
11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan,
12. Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab,
13. Penanganan Perubahan Iklim,
14. Ekosistem Lautan,
15. Ekosistem Daratan,
16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh, dan
17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Di tingkat nasional, komitmen terhadap implementasi TPB/SDGs diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah dan panjang. Pemerintah Indonesia melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah menetapkan arah kebijakan dan strategi pelaksanaan TPB dalam dokumen Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, serta dalam dokumen perencanaan strategis nasional seperti RPJMN 2020–2024 dan RPJPN 2025–2045. Dokumen RPJPN 2025–2045 secara tegas menekankan pentingnya pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan guna mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, maju, adil, dan makmur.

Dengan demikian, implementasi TPB/SDGs di daerah, termasuk di Kabupaten Nias Selatan, menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, serta mendorong peran aktif seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, sektor swasta, lembaga masyarakat, maupun komunitas lokal.

b. Demografi Global dan Bonus Demografi

Perkembangan demografi global menjadi salah satu faktor strategis yang sangat memengaruhi dinamika pembangunan ekonomi dan sosial. Pergeseran struktur penduduk dunia, termasuk di Indonesia, menimbulkan tantangan yang kompleks, khususnya dalam hal peningkatan kebutuhan hidup masyarakat di tengah keterbatasan sumber daya alam dan lingkungan

yang semakin tertekan. Seiring dengan hal tersebut, Indonesia diproyeksikan akan memasuki era bonus demografi pada tahun 2045, di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) akan mencapai puncaknya, melampaui jumlah penduduk usia non-produktif.

Menurut Kementerian PPN/Bappenas (2023) dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, momentum bonus demografi merupakan peluang strategis yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, meningkatkan produktivitas, dan mempercepat transformasi sosial. Namun demikian, tingginya proporsi penduduk usia muda juga membawa konsekuensi berupa meningkatnya kebutuhan terhadap layanan perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, serta penyediaan lapangan kerja yang layak dan inklusif.

Dalam konteks tersebut, pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing menjadi fondasi utama dalam menghadapi tantangan demografi ke depan. Diperlukan kebijakan yang terintegrasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerja, memperluas cakupan jaminan sosial, serta menciptakan iklim investasi yang mendukung terbukanya peluang kerja produktif, khususnya bagi generasi muda. Upaya ini sejalan dengan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 2020–2024, yang menempatkan pembangunan manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai prioritas utama pembangunan nasional.

Dengan memanfaatkan momentum bonus demografi secara optimal melalui investasi pada peningkatan kualitas SDM dan transformasi ekonomi berbasis inovasi, Indonesia – termasuk daerah seperti Kabupaten Nias Selatan – berpeluang besar untuk melompat ke dalam kelompok negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, sebagaimana ditargetkan dalam visi Indonesia Emas 2045.

c. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat telah menghadirkan fenomena disrupsi teknologi, yaitu perubahan fundamental yang menggeser tatanan konvensional dalam masyarakat, dunia usaha, dan pemerintahan. Disrupsi teknologi ditandai oleh kemunculan inovasi-inovasi baru yang

secara signifikan meningkatkan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya serta operasional sistem. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi dan industri, tetapi juga merambah ke sektor pendidikan, kesehatan, tata kelola pemerintahan, dan kehidupan sosial masyarakat secara umum.

Berdasarkan proyeksi dan arah kebijakan pembangunan nasional dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, Kementerian PPN/Bappenas (2023) menekankan bahwa kemajuan teknologi seperti *Internet of Things (IoT)*, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence/AI*), rekayasa genetika, nanoteknologi, robotika, dan berbagai inovasi teknologi digital lainnya akan menjadi kekuatan penggerak utama transformasi pembangunan nasional. Teknologi ini berpotensi besar untuk menciptakan peluang baru dalam pembangunan ekonomi berbasis inovasi, mendorong efisiensi sektor manufaktur dan industri kreatif, memperluas jangkauan layanan pendidikan dan kesehatan, serta memperkuat sistem pelayanan publik yang adaptif dan responsif.

Namun, manfaat dari perkembangan teknologi ini hanya dapat diraih apabila masyarakat dan pemerintah daerah memiliki tingkat kesiapan yang memadai dalam menghadapi perubahan. Adaptasi terhadap teknologi membutuhkan peningkatan literasi digital, ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang merata, serta penguatan regulasi dan kebijakan yang menjamin pemanfaatan teknologi secara bertanggung jawab. Tanpa kesiapan tersebut, disrupsi teknologi justru berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, memperkuat ketimpangan ekonomi, serta menimbulkan risiko terhadap keamanan data dan kedaulatan digital.

Dalam konteks ini, daerah seperti Kabupaten Nias Selatan perlu merumuskan kebijakan strategis yang berpihak pada peningkatan kapasitas SDM berbasis teknologi, pengembangan ekosistem inovasi daerah, serta digitalisasi layanan publik secara terintegrasi. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa manfaat transformasi digital dapat dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan dalam mendorong pertumbuhan daerah dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

d. Krisis Iklim dan Pembangunan Rendah Karbon

Kelangkaan dan persaingan dalam pemanfaatan sumber daya alam, terutama yang berkaitan dengan energi, air, dan pangan, telah menjadi isu strategis global yang memengaruhi ketahanan dan keberlanjutan pembangunan. Seiring meningkatnya kebutuhan manusia dan tekanan terhadap kapasitas daya dukung lingkungan, tantangan dalam menjamin ketersediaan dan aksesibilitas terhadap sumber daya-sumber daya vital tersebut semakin kompleks. Tantangan ini diperparah oleh tiga krisis planet yang dikenal sebagai *Triple Planetary Crisis*, yakni perubahan iklim, kerusakan lingkungan, dan hilangnya keanekaragaman hayati, sebagaimana disampaikan oleh *United Nations Environment Programme (UNEP, 2021)*. Ketiga krisis tersebut saling terkait dan berdampak langsung terhadap stabilitas ekosistem serta keberlangsungan hidup manusia di masa depan.

Merespons kondisi tersebut, pembangunan berkelanjutan yang berbasis pada prinsip ekonomi sirkular dan rendah karbon menjadi arah kebijakan global dan nasional yang tidak dapat ditawar. Indonesia melalui *Paris Agreement* tahun 2015 telah menunjukkan komitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 29% dengan kemampuan sendiri, dan hingga 41% dengan dukungan internasional pada tahun 2030. Lebih lanjut, kajian Kementerian PPN/Bappenas (2019) menunjukkan bahwa dengan skenario kebijakan dan transformasi yang ambisius, Indonesia berpotensi menurunkan emisi GRK hingga 43% pada tahun 2030.

Untuk memastikan pencapaian tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis yang konsisten dan terintegrasi, antara lain:

1. Transisi energi dari bahan bakar fosil menuju sumber energi terbarukan yang lebih bersih dan ramah lingkungan;
2. Peningkatan efisiensi energi di berbagai sektor, termasuk industri, transportasi, dan bangunan;
3. Penegakan penuh terhadap moratorium pemanfaatan kawasan hutan, pembukaan lahan gambut, serta ekspansi sawit dan pertambangan yang merusak ekosistem;
4. Kepatuhan terhadap komitmen konservasi sumber daya air, keanekaragaman hayati, dan perikanan berkelanjutan;
5. Peningkatan produktivitas lahan melalui penerapan praktik pertanian cerdas iklim dan rehabilitasi lahan kritis.

Dalam konteks daerah, termasuk Kabupaten Nias Selatan, pendekatan ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon harus dijadikan sebagai landasan penting dalam perumusan arah kebijakan pembangunan jangka panjang. Hal ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan ekonomi daerah, dan mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik dalam jangka panjang. Penerapan prinsip ini sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam dokumen RPJPN 2025–2045, serta mendukung capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), khususnya tujuan ke-13 (Penanganan Perubahan Iklim), ke-7 (Energi Bersih dan Terjangkau), dan ke-15 (Ekosistem Daratan).

5.3.1. Isu Strategis Nasional

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara yang majemuk yang terdiri dari beberapa suku, Bahasa daerah, adat budaya yang berbeda-beda, dan termasuk negara ke tiga yang sangat besar populasi jumlah penduduknya, maka untuk menciptakan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, Bersatu, berdaulat, adil dan Makmur sesuai dengan visi Indonesia tahun 2045 maka pilar pembangunan bangsa Indonesia tahun 2045 adalah sebagai berikut :

- a. Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK
- b. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan
- c. Pemerataan pembangunan
- d. Pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan

Isu Strategis Nasional yang dapat dikembangkan dari ke empat pilar pembangunan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK

Salah satu isu strategis nasional dalam pembangunan jangka panjang adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia yang ditandai dengan tingginya akses dan mutu pendidikan, kebudayaan yang kuat dan berakar pada jati diri bangsa, peningkatan derajat kesehatan, usia harapan hidup yang tinggi, serta kualitas hidup yang semakin baik. Selain itu, pembangunan manusia juga diarahkan untuk menghasilkan sumber daya manusia (SDM) yang produktif, kompetitif, serta mampu menguasai dan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) secara adaptif terhadap dinamika global.

Isu strategis ini secara langsung mempengaruhi kondisi daerah, termasuk Kabupaten Nias Selatan, yang hingga kini masih menghadapi tantangan besar dalam pembangunan manusia. Berdasarkan berbagai indikator, kualitas SDM di Kabupaten Nias Selatan masih berada di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Utara maupun nasional. Tingkat pendidikan formal masih didominasi oleh lulusan jenjang dasar, dengan angka partisipasi sekolah menengah atas dan perguruan tinggi yang belum optimal. Keterbatasan sarana prasarana pendidikan, distribusi tenaga pendidik yang belum merata, serta minimnya akses pendidikan berbasis teknologi memperkuat tantangan dalam mencetak generasi yang unggul dan berdaya saing.

Di bidang kesehatan, meskipun terdapat peningkatan layanan dasar, namun tantangan dalam hal cakupan layanan kesehatan ibu dan anak, prevalensi stunting, serta akses terhadap fasilitas sanitasi dan air bersih masih signifikan. Hal ini turut memengaruhi derajat kesehatan masyarakat secara umum dan berdampak pada rendahnya usia harapan hidup di wilayah ini.

Selain itu, penguasaan IPTEK di Kabupaten Nias Selatan masih sangat terbatas, baik dari sisi infrastruktur digital maupun literasi masyarakat terhadap teknologi. Hal ini menghambat pengembangan inovasi lokal serta pemanfaatan teknologi dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, pertanian, perikanan, dan layanan publik.

Dengan demikian, isu strategis nasional terkait pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK harus direspon secara serius dalam kebijakan pembangunan daerah. Kabupaten Nias Selatan perlu menyusun strategi yang terfokus pada peningkatan mutu pendidikan secara inklusif, perbaikan layanan kesehatan primer, serta penguatan literasi dan infrastruktur teknologi digital yang menjangkau hingga wilayah terpencil. Upaya ini penting untuk mendorong peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), daya saing daerah, serta mempercepat transformasi sosial-ekonomi menuju masyarakat yang produktif, inovatif, dan berkelanjutan.

b. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan

Isu strategis nasional dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan menekankan pentingnya transformasi ekonomi menuju Indonesia sebagai negara maju dan salah satu kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Visi ini digerakkan oleh pertumbuhan sektor-sektor strategis seperti investasi,

perdagangan, industri, pariwisata, maritim, dan jasa, serta ditopang oleh infrastruktur yang andal, sistem logistik yang efisien, dan ketahanan pangan, energi, dan air yang kuat. Pembangunan ekonomi juga harus berjalan seiring dengan komitmen terhadap pelestarian lingkungan hidup sebagai prasyarat bagi keberlanjutan pembangunan lintas generasi, sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2025–2045 dan kerangka Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Dalam konteks daerah, isu strategis ini memiliki relevansi dan dampak langsung terhadap arah pembangunan Kabupaten Nias Selatan. Sebagai daerah kepulauan yang memiliki potensi kelautan dan perikanan, pariwisata berbasis alam dan budaya, serta lahan pertanian yang luas, Nias Selatan menyimpan peluang besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Namun, potensi tersebut belum dapat dimanfaatkan secara optimal akibat sejumlah tantangan struktural dan spasial.

Pertama, keterbatasan infrastruktur konektivitas dan logistik masih menjadi hambatan utama dalam mengintegrasikan Nias Selatan ke dalam arus utama perdagangan dan investasi nasional maupun global. Jalur transportasi antarwilayah dan antarpulau yang belum memadai, termasuk pelabuhan, jalan penghubung, dan infrastruktur digital, membatasi efisiensi distribusi barang dan jasa, serta menghambat pengembangan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

Kedua, kontribusi sektor produktif seperti industri pengolahan, jasa maritim, dan pariwisata terhadap PDRB daerah masih relatif rendah. Minimnya investasi swasta, kurangnya kapasitas pelaku usaha lokal, serta lemahnya dukungan ekosistem inovasi dan kewirausahaan menjadi faktor yang memperlambat akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketiga, tantangan dalam ketahanan pangan dan energi juga masih signifikan. Sistem pertanian dan perikanan tradisional dengan produktivitas rendah, keterbatasan akses terhadap teknologi pertanian dan pasokan energi yang stabil, serta belum meratanya jaringan irigasi dan air bersih, menjadi hambatan dalam menciptakan sistem ketahanan sumber daya yang tangguh.

Keempat, komitmen terhadap pelestarian lingkungan juga perlu diperkuat mengingat karakteristik geografis Nias Selatan yang rentan terhadap bencana alam dan degradasi ekosistem pesisir dan hutan. Pembangunan ekonomi

yang tidak berbasis pada prinsip keberlanjutan berisiko memperparah kerusakan lingkungan dan memperlemah ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim.

Oleh karena itu, isu strategis pembangunan ekonomi berkelanjutan perlu dijadikan sebagai landasan utama dalam perencanaan jangka panjang daerah. Kabupaten Nias Selatan perlu mendorong strategi transformasi ekonomi yang berorientasi pada pemanfaatan potensi lokal berbasis sumber daya alam secara berkelanjutan, penguatan infrastruktur konektivitas dan logistik, pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi maritim, serta peningkatan kapasitas SDM dan pelaku usaha lokal. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah, mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah, dan menjadikan Nias Selatan sebagai bagian integral dari agenda pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

c. Pemerataan pembangunan

Salah satu isu strategis nasional yang sangat krusial dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 adalah pemerataan pembangunan. Pemerataan ini mencakup distribusi hasil pembangunan yang semakin luas dan adil, peningkatan pendapatan masyarakat di seluruh lapisan sosial, penyempitan kesenjangan pembangunan antarwilayah, serta penyediaan infrastruktur dasar yang merata dan terintegrasi di seluruh pelosok negeri. Isu ini juga mencakup keberhasilan dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan, terutama di daerah tertinggal, terpencil, dan kepulauan, sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJPN 2025–2045 dan selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) poin ke-1 (satu) dan ke-10 (sepuluh).

Dalam konteks daerah, isu pemerataan pembangunan memiliki dampak langsung dan signifikan terhadap Kabupaten Nias Selatan. Sebagai daerah kepulauan dengan topografi yang menantang dan aksesibilitas terbatas, Nias Selatan masih menghadapi ketimpangan pembangunan yang cukup tinggi antarwilayah, baik antar-kecamatan maupun antara wilayah daratan dan kepulauan. Ketimpangan ini terlihat pada disparitas infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, air bersih, layanan pendidikan dan kesehatan, yang

menyebabkan terhambatnya akses masyarakat terhadap layanan publik dan peluang ekonomi.

Ketimpangan tersebut juga tercermin dalam distribusi pendapatan masyarakat yang masih timpang antara wilayah yang relatif berkembang dengan wilayah yang tertinggal, serta masih tingginya tingkat kemiskinan, khususnya di daerah pedesaan dan kepulauan. Akses terhadap pekerjaan layak, peluang usaha, dan fasilitas pendukung ekonomi produktif juga masih terbatas di banyak wilayah, sehingga memperlambat upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Selain itu, belum meratanya pembangunan infrastruktur konektivitas dan transportasi antarwilayah memperburuk integrasi ekonomi lokal dan menghambat pergerakan barang, jasa, dan orang. Hal ini pada akhirnya mempengaruhi efektivitas pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah dan berpotensi meningkatkan migrasi penduduk dari desa ke kota atau dari daerah ke luar wilayah.

Untuk menjawab isu strategis ini, Kabupaten Nias Selatan perlu menerapkan pendekatan pembangunan yang berbasis kewilayahan (*spatial-based development*) dengan memperkuat peran pusat-pusat pertumbuhan baru di setiap kecamatan, meningkatkan kualitas infrastruktur dasar secara merata, serta memperluas akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Penguatan program pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kapasitas pelaku usaha mikro dan kecil di seluruh wilayah juga menjadi kunci dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.

Melalui arah kebijakan yang fokus pada pengurangan ketimpangan dan peningkatan inklusivitas pembangunan, Kabupaten Nias Selatan dapat memperkuat kontribusinya dalam mendukung agenda nasional pemerataan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, berdaya saing, dan inklusif secara berkelanjutan.

d. Pemantapan ketahanan nasional dan tata Kelola pemerintahan

Salah satu isu strategis nasional yang menjadi pilar penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 adalah pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel.

Penguatan ketahanan nasional tidak hanya mencakup aspek pertahanan dan

keamanan negara, tetapi juga menyangkut kualitas demokrasi, supremasi hukum, pemberantasan korupsi, reformasi kelembagaan dan birokrasi, serta pelaksanaan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, pembangunan sistem hukum nasional yang responsif, inklusif, dan berkeadilan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan.

Secara khusus, isu ini tercermin dalam sasaran strategis nasional sebagaimana diamanatkan dalam RPJPN 2025–2045 serta selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) poin ke-16, yaitu membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.

Dalam konteks daerah, isu ini memiliki implikasi yang sangat nyata terhadap Kabupaten Nias Selatan. Tantangan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan di daerah ini masih cukup besar, terutama terkait dengan kapasitas birokrasi yang belum sepenuhnya profesional, rendahnya kualitas pelayanan publik, serta belum optimalnya implementasi prinsip-prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efektivitas pengambilan kebijakan.

Selain itu, Kabupaten Nias Selatan juga masih menghadapi tantangan dalam penegakan hukum di tingkat lokal, koordinasi lintas lembaga dan antarwilayah, serta pengawasan terhadap praktik-praktik yang rentan terhadap korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Rendahnya tingkat literasi hukum masyarakat juga turut memperlemah pengawasan publik terhadap pelaksanaan pemerintahan.

Dari sisi ketahanan daerah, posisi Nias Selatan sebagai wilayah kepulauan yang berada di wilayah perbatasan Samudera Hindia menjadikannya strategis namun juga rentan terhadap gangguan keamanan, bencana alam, dan kerentanan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan kapasitas keamanan lokal, peningkatan kesiapsiagaan bencana, serta pelibatan aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban umum.

Untuk menjawab isu ini, perlu dilakukan reformasi kelembagaan daerah yang diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), optimalisasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), perbaikan sistem pengawasan internal, serta pelaksanaan sistem perencanaan dan

penganggaran yang lebih transparan dan partisipatif. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat kerja sama dengan aparat penegak hukum, lembaga vertikal, serta masyarakat sipil dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan terpercaya.

Dengan demikian, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Nias Selatan merupakan syarat mutlak dalam mempercepat pembangunan daerah yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. tinggi.

5.3.2. Isu Strategis Sumatera Utara

Isu-isu strategis Sumatera Utara yang diharapkan dapat teratasi dalam pembangunan jangka panjang (2025–2045) diuraikan sebagai berikut:

a. Pembangunan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan

Pembangunan sarana dan prasarana yang belum memadai masih menjadi persoalan pembangunan yang perlu direspon ke depan. Luasan permukiman kumuh, rumah tangga dengan akses air minum layak, rumah tangga dengan akses sanitasi layak infrastruktur SDA dalam kondisi baik, penanganan banjir merupakan isu-isu penyediaan infrastruktur yang perlu direspon dalam jangka panjang ke depan. Cakupan rumah tangga yang menempati hunian layak yang terpadu dengan akses air minum, sanitasi dan penanganan persampahan juga masih cukup rendah. Selain itu, kondisi kawasan perkotaan di Provinsi Sumatera Utara menghadapi perkotaan arah perkembangan yang tidak terstruktur (*urban sprawl*). Kelayakan dan keandalan perumahan yang dibangun secara swadaya juga perlu menjadi perhatian mengingat tingginya risiko bencana di Provinsi Sumatera Utara.

Layanan ketenagalistrikan Provinsi Sumatera Utara masih kekurangan pasokan daya atau beberapa sistem, atau cadangan di pembangkit eksisting yang tidak efisien serta kekurangan pasokan daya untuk daerah perbatasan serta pulau terluar. Penyediaan tenaga listrik di Wilayah Sumatra masih belum menjangkau seluruh penduduk secara berkualitas. Fleksibilitas operasi masih belum optimum terutama saat kondisi di luar waktu beban puncak sebagai akibat dari minimum operasi PLTG. Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari Sistem Interkoneksi Sumatra dan sistem-sistem yang terisolasi. Sistem transmisi ekstra tinggi belum tersambung untuk mengevakuasi daya energi yang tersebar di seluruh wilayah. Konsumen

tenaga listrik masih didominasi oleh rumah tangga. Jangkauan jaringan seluler di Provinsi Sumatera Utara belum diimbangi dengan pemanfaatannya untuk mendukung kegiatan produktif (masih terbatas untuk penggunaan telekomunikasi). Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan komunikasi di Provinsi Sumatera Utara sudah cukup merata dan hampir menjangkau seluruh area wilayah pemukiman dan pusat-pusat pertumbuhan.

Provinsi Sumatera Utara juga memiliki tantangan dalam penyediaan pelayanan dasar, yaitu belum terpenuhi dan meratanya penyediaan sarana dan prasarana dasar di seluruh daerah, khususnya di daerah afirmasi 3T. Permasalahan yang dihadapi di antaranya penyediaan air bersih, irigasi, banjir, dan abrasi. Jumlah kejadian bencana banjir masih tinggi terutama di Metropolitan Medan, pulau-pulau kecil di Provinsi Sumatera Utara juga terdampak risiko abrasi akibat perubahan iklim tersebut.

Permasalahan pembangunan infrastruktur dasar yang masih dihadapi Provinsi Sumatera Utara secara langsung berimplikasi terhadap kondisi di Kabupaten Nias Selatan sebagai wilayah kepulauan dengan karakteristik geografis yang menantang. Cakupan rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum dan sanitasi layak di Kabupaten Nias Selatan masih relatif rendah, disebabkan oleh keterbatasan jaringan infrastruktur dan kondisi topografi yang menyulitkan distribusi layanan dasar secara merata. Tingginya angka permukiman tidak layak huni dan rendahnya integrasi hunian dengan sistem sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah mencerminkan keterbatasan upaya penataan kawasan permukiman, terutama di daerah pedesaan dan pesisir. Masalah ini diperparah dengan keterbatasan pasokan listrik, terutama di wilayah perbatasan dan pulau-pulau kecil, yang menghambat kegiatan ekonomi produktif dan pelaksanaan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Selain itu, potensi bencana alam yang tinggi di Kabupaten Nias Selatan, seperti banjir, longsor, dan abrasi pantai, semakin menuntut penyediaan sarana prasarana yang tangguh dan adaptif. Sejalan dengan tantangan Provinsi Sumatera Utara dalam menangani risiko abrasi dan banjir, Kabupaten Nias Selatan juga menghadapi ancaman kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim, yang memerlukan pendekatan mitigasi dan adaptasi berbasis wilayah pesisir dan kepulauan. Di sisi lain, potensi lokal Nias

Selatan dalam sektor pariwisata bahari, pertanian organik, serta energi terbarukan seperti tenaga surya dan mikrohidro belum dapat dimaksimalkan karena keterbatasan infrastruktur dasar. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkeadilan, serta penguatan konektivitas antarpulau dan antarkawasan, menjadi syarat mutlak dalam mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

b. Pembangunan antar daerah serta desa-kota

Keterkaitan antar daerah serta desa-kota di Provinsi Sumatera Utara belum mencerminkan keterkaitan tidak bisa mengabaikan rantai pasok, sehingga wilayah kota dan kawasan-kawasan perlu memiliki rantai nilai dengan wilayah-wilayah lain untuk mendorong perekonomian yang merata. Pembangunan wilayah Metropolitan Medan (Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo) masih menghadapi permukiman kumuh seperti air bersih dan sanitasi, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan infrastruktur transportasi massal yang belum mendukung mobilitas penduduk. Permasalahan ini muncul sebagai akibat dari urbanisasi yang tidak terkendali dan pertumbuhan ekonomi yang berpusat di inti bisnis dan perdagangan. wilayah pertumbuhan ekonomi yang pesat menjadi *pull factor* manusia bermigrasi ke wilayah dengan ekonomi yang relatif baik.

Isu ketimpangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Sumatera Utara, khususnya antara kawasan metropolitan dan daerah perdesaan serta kepulauan, menunjukkan pentingnya penguatan keterkaitan wilayah dan integrasi rantai pasok antar daerah. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi seperti Metropolitan Medan terus berkembang pesat, namun pertumbuhan ini belum diimbangi dengan keterhubungan yang kuat dengan wilayah lainnya, termasuk Kabupaten Nias Selatan. Akibatnya, Kabupaten Nias Selatan menghadapi keterbatasan akses terhadap pasar, infrastruktur logistik, serta jejaring ekonomi yang dapat mendukung pemanfaatan potensi lokal secara optimal. Minimnya konektivitas fisik dan ekonomi antarwilayah menyebabkan Nias Selatan belum sepenuhnya terintegrasi dalam rantai nilai provinsi, yang berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi lokal dan kesenjangan kesejahteraan antardaerah.

Namun demikian, posisi strategis Kabupaten Nias Selatan sebagai wilayah kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam dan potensi pariwisata bahari yang unik dapat menjadi peluang besar jika dikembangkan melalui pendekatan pengembangan kawasan berbasis keterkaitan wilayah. Penguatan konektivitas laut dan udara, pembangunan pusat logistik terpadu, serta integrasi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata dengan rantai pasok provinsi akan mendorong transformasi ekonomi lokal dan mengurangi ketergantungan pada pusat-pusat pertumbuhan konvensional. Oleh karena itu, penting bagi Kabupaten Nias Selatan untuk tidak hanya fokus pada pembangunan internal wilayah, tetapi juga mengembangkan kemitraan dan integrasi pembangunan lintas kabupaten/kota di Sumatera Utara guna menciptakan ekosistem ekonomi yang saling mendukung dan merata.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Berkelanjutan

Dalam upaya pengelolaan SDA berkelanjutan menjadi perhatian terhadap pengelolaan investasi berbasis lahan yang belum seluruhnya mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan yang baik terutama kelestarian lingkungan dan menjamin keberlanjutan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang. Pengoptimalan pengelolaan Sumber Daya Alam dan lingkungan hidup berkelanjutan juga berkaitan dengan: adaptasi perubahan iklim; pengawasan terhadap deforestasi dan kebakaran hutan dan lahan dan harmonisasi antara manusia dengan satwa liar; akses dan partisipasi masyarakat, termasuk perempuan dan kelompok marginal; dukungan dalam mewujudkan kelestarian dan kesejahteraan yang rendah; belum maksimalnya akses seluruh masyarakat terhadap energi, dan peningkatan pemanfaatan sumber energi terbarukan.

Isu pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup berkelanjutan yang masih menjadi tantangan di tingkat Provinsi Sumatera Utara juga tercermin secara nyata di Kabupaten Nias Selatan. Investasi berbasis lahan, seperti kegiatan perkebunan dan kehutanan, di beberapa wilayah belum sepenuhnya memperhatikan prinsip-prinsip pelestarian lingkungan serta keberlanjutan sosial-ekologis masyarakat lokal. Di Kabupaten Nias Selatan, yang memiliki cakupan kawasan hutan yang cukup luas dan ekosistem pesisir yang rentan, potensi degradasi lingkungan akibat praktik pemanfaatan SDA yang tidak berkelanjutan menjadi isu krusial.

Keterbatasan dalam pengawasan deforestasi, belum optimalnya pemanfaatan energi terbarukan, serta akses energi yang belum merata, turut memperbesar tantangan pembangunan berkelanjutan di wilayah ini.

Namun demikian, potensi Kabupaten Nias Selatan dalam pengembangan ekowisata serta penguatan peran masyarakat lokal dalam konservasi sumber daya alam menjadi peluang strategis yang dapat dikembangkan secara terpadu. Penerapan prinsip pembangunan rendah karbon, penguatan adaptasi perubahan iklim melalui rehabilitasi hutan dan perlindungan wilayah pesisir, serta keterlibatan aktif kelompok masyarakat, termasuk perempuan dan komunitas adat, menjadi elemen penting dalam mewujudkan pengelolaan SDA yang inklusif dan berkelanjutan. Sinergi antara perlindungan lingkungan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Nias Selatan merupakan langkah konkret untuk mendukung agenda pembangunan provinsi dan nasional menuju keberlanjutan jangka panjang.

d. Peningkatan Sumberdaya Manusia (SDM) yang Berkualitas dan Berdaya Saing

Idealnya pembangunan sumber daya manusia (SDM) ditandai dengan capaian indikator yang tinggi pada aspek harapan hidup, angka rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan tingkat kesejahteraan yang setara atau bahkan melampaui rata-rata nasional. Di tingkat Provinsi Sumatera Utara, meskipun telah terdapat berbagai kemajuan dalam sektor pendidikan dan kesehatan, namun disparitas antardaerah masih menjadi persoalan yang signifikan. Capaian indeks pembangunan manusia (IPM) di beberapa kabupaten/kota masih berada di bawah rata-rata provinsi, mencerminkan perlunya upaya lebih besar dalam pemerataan akses layanan dasar. Kesetaraan kualitas pendidikan, layanan kesehatan yang menjangkau hingga pelosok, serta penguatan perlindungan sosial menjadi aspek utama dalam penguatan SDM yang berdaya saing dan adaptif terhadap tantangan pembangunan.

Dalam konteks Kabupaten Nias Selatan, tantangan pembangunan SDM tampak dari masih rendahnya angka lama sekolah dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, terutama di wilayah-wilayah terpencil dan kepulauan. Ketimpangan fasilitas pendidikan dan kesehatan antar wilayah, termasuk keterbatasan jumlah tenaga pendidik dan tenaga

kesehatan yang tersebar tidak merata, menjadi penghambat peningkatan kualitas SDM secara menyeluruh. Namun demikian, potensi besar terdapat dalam kekayaan budaya lokal, semangat masyarakat dalam menempuh pendidikan, serta peran aktif komunitas lokal dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui kegiatan ekonomi berbasis potensi daerah. Oleh karena itu, percepatan pembangunan SDM di Nias Selatan perlu diarahkan pada perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan yang inklusif, peningkatan kompetensi generasi muda, serta pembangunan sistem perlindungan sosial yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat..

e. Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas Infrastruktur

Infrastruktur yang berkaitan dengan konektivitas dan sistem logistik berpotensi menekan aktivitas ekonomi berupa mahalanya biaya logistik dari wilayah penghasil komoditas menuju lokasi pengolahan dan pemasaran. Hal tersebut perlu diupayakan dengan upaya meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi. Aksesibilitas daerah juga dapat ditinjau dari ketersediaan fasilitas perhubungan yang meliputi darat, laut dan udara. Perhubungan darat di dibagi atas beberapa bagian jaringan transportasi seperti jaringan angkutan jalan raya, jaringan jalur kereta api, jaringan angkutan sungai dan danau, dan jaringan angkutan penyeberangan.

Permasalahan infrastruktur konektivitas dan sistem logistik di Provinsi Sumatera Utara memiliki dampak langsung terhadap pengembangan wilayah Kabupaten Nias Selatan. Sebagai daerah kepulauan yang relatif terpencil, Nias Selatan menghadapi tantangan serius dalam hal keterhubungan antarwilayah, baik di dalam kabupaten maupun ke wilayah luar seperti pusat-pusat ekonomi di daratan Sumatera. Biaya logistik yang tinggi menjadi hambatan utama dalam distribusi hasil pertanian, perikanan, dan produk UMKM lokal menuju pasar yang lebih luas, sehingga berdampak pada rendahnya nilai tambah dan daya saing produk daerah. Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan infrastruktur transportasi darat yang belum optimal, pelabuhan yang belum modern dan representatif, serta belum tersedianya jalur transportasi udara yang stabil dan terjangkau.

Namun demikian, potensi lokal Kabupaten Nias Selatan sangat besar untuk dikembangkan apabila didukung oleh sistem konektivitas dan logistik yang efisien. Komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, hasil perikanan, serta potensi pariwisata bahari dan budaya dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah apabila terhubung secara lancar dengan pusat-pusat industri dan distribusi di wilayah lain. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur perhubungan darat melalui peningkatan kualitas jalan, pengembangan pelabuhan penyeberangan antar pulau, serta optimalisasi bandara Silambo menjadi strategis untuk mempercepat arus barang, jasa, dan manusia. Langkah-langkah ini akan menjadi kunci untuk mengatasi disparitas wilayah, menurunkan biaya logistik, dan mendorong inklusi ekonomi yang lebih merata di Kabupaten Nias Selatan.

f. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi persoalan pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Ke depannya masih perlu dilakukan reformasi birokrasi dan peningkatan SDM yang profesional dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia, untuk perlu mendapatkan perhatian untuk dioptimalkan. Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah berkaitan dengan optimalisasi ketersediaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) ke seluruh wilayah dan ke semua lapisan masyarakat; transparansi dan akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang inklusif; perlunya optimalisasi manajemen kepegawaian, terutama setelah terjadinya restrukturisasi kelembagaan dan juga rekrutmen yang efektif dan efisien sehingga menjadi birokrasi yang ramping miskin struktur akan tetapi kaya fungsi berlandaskan merit system; dan optimalisasi implementasi reformasi birokrasi melalui penguatan pengawasan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Persoalan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang belum optimal di Provinsi Sumatera Utara juga tercermin dalam kondisi Kabupaten Nias Selatan. Wilayah ini masih menghadapi tantangan dalam hal kualitas layanan publik yang belum merata, terutama di daerah terpencil dan desa-desa yang sulit dijangkau. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan

infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang belum menjangkau seluruh wilayah kabupaten, sehingga menghambat digitalisasi layanan publik dan pemanfaatan sistem informasi dalam tata kelola pemerintahan. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) serta minimnya pelatihan berkelanjutan juga berdampak pada rendahnya kualitas pelayanan dan efisiensi birokrasi di tingkat lokal.

Namun, di tengah tantangan tersebut, Kabupaten Nias Selatan memiliki peluang besar untuk melakukan lompatan kemajuan melalui optimalisasi reformasi birokrasi dan pemanfaatan teknologi. Pemerintah daerah dapat mendorong pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif melalui pengembangan sistem layanan digital berbasis TIK. Selain itu, potensi sumber daya manusia lokal yang muda dan adaptif terhadap teknologi perlu diberdayakan melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas ASN berbasis merit system. Dengan mengoptimalkan infrastruktur TIK serta memperkuat integritas dan efisiensi birokrasi, Kabupaten Nias Selatan dapat mempercepat transformasi pelayanan publik yang inklusif dan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan lokal.

5.3.3. Isu Strategis Nias Selatan

Berdasarkan permasalahan pembangunan yang telah diuraikan sebelumnya dan isu strategis global dan nasional maka isu strategis daerah Kabupaten Nias Selatan pada RPJPD Tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut:

a. Optimalisasi sumber-sumber PAD dan pemanfaatan sumber daya alam

Pendapatan Asli Daerah sangat penting dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat lokal. Peningkatan PAD dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan infrastruktur, serta memperluas akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi.

Optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pemanfaatan sumber daya alam merupakan langkah penting dalam memperkuat ekonomi daerah kepulauan Indonesia. Beberapa strategi yang dapat diimplementasikan untuk mencapai hal ini antara lain:

- Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi di daerah kepulauan dapat mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu

seperti pertanian dan perikanan. Pengembangan industri kreatif, pariwisata berkelanjutan, serta sektor jasa dan manufaktur dapat meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan

- Pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan Bijak: Memastikan pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab adalah kunci untuk menjaga ekosistem pulau-pulau Indonesia. Pengaturan yang ketat, pemantauan yang cermat, serta pengembangan teknologi ramah lingkungan dapat membantu memastikan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak merusak lingkungan dan menguntungkan masyarakat setempat
- Pengembangan Pertanian dan Perikanan Berkelanjutan: Mendorong praktik pertanian dan perikanan berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas sambil menjaga keberlanjutan lingkungan. Pendekatan seperti pertanian organik, perikanan berkelanjutan, dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dapat membantu memaksimalkan potensi sumber daya alam secara jangka panjang
- Promosi Pariwisata: Daerah kepulauan Indonesia memiliki potensi pariwisata yang besar dengan keindahan alamnya yang menakjubkan dan kekayaan budayanya yang beragam. Memperkuat infrastruktur pariwisata, meningkatkan aksesibilitas, serta mempromosikan destinasi pariwisata secara efektif dapat menjadi sumber pendapatan yang signifikan bagi daerah tersebut.
- Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah: Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah adalah langkah penting dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Pembaruan sistem perpajakan, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, serta pemberdayaan masyarakat dalam pemungutan pajak dapat membantu meningkatkan pendapatan daerah secara signifikan
- Kemitraan dengan Sektor Swasta: Membangun kemitraan dengan sektor swasta dapat membantu menggerakkan investasi dan pengembangan ekonomi di daerah kepulauan. Program kemitraan publik-swasta dalam pengembangan infrastruktur, industri, dan pariwisata dapat memberikan dorongan besar dalam memperkuat ekonomi daerah.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara holistik dan berkelanjutan, diharapkan daerah Kabupaten Nias Selatan dapat memaksimalkan potensi sumber daya alamnya serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan isu strategis yang berdampak jangka panjang bagi keberlanjutan pembangunan daerah, khususnya di wilayah kepulauan seperti Kabupaten Nias Selatan. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dari pusat menjadikan daerah rentan terhadap fluktuasi kebijakan fiskal nasional. Jika isu peningkatan PAD ini diabaikan, maka akan terjadi stagnasi pembangunan infrastruktur, rendahnya kualitas layanan dasar publik, serta keterbatasan dalam menanggulangi persoalan sosial dan ekonomi di tingkat lokal. Lebih lanjut, kurangnya diversifikasi ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan akan menimbulkan degradasi lingkungan dan hilangnya potensi nilai tambah ekonomi daerah. Oleh karena itu, kebijakan strategis dalam memperkuat PAD perlu didukung melalui regulasi, investasi, dan reformasi tata kelola, sebagaimana ditekankan dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Nias Selatan serta konsistensi arah kebijakan pembangunan dalam RPJPN 2025–2045.

Hasil penjaringan aspirasi masyarakat serta pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik RPJPD menunjukkan bahwa masyarakat lokal mengharapkan adanya terobosan dalam pemanfaatan sumber daya alam yang bijak, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, serta penguatan tata kelola keuangan daerah. Strategi ini juga sejalan dengan arahan pembangunan nasional yang menempatkan penguatan ekonomi daerah sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Implementasi strategi peningkatan PAD, seperti pengembangan sektor unggulan daerah (pertanian, perikanan, dan pariwisata), reformasi sistem pajak dan retribusi, hingga kemitraan strategis dengan sektor swasta, memerlukan investasi awal yang besar dan koordinasi lintas sektor yang intensif. Namun demikian, jika tidak segera dilaksanakan, maka Kabupaten Nias Selatan berisiko kehilangan momentum pembangunan dan tertinggal dalam mendorong kesejahteraan masyarakatnya.

Secara nasional, ketergantungan daerah pada dana transfer dari pusat menjadi isu sentral yang menghambat kemandirian fiskal daerah. Isu ini semakin relevan dalam konteks Indonesia yang berupaya menuju Indonesia Emas 2045, di mana penguatan ekonomi daerah menjadi prioritas. Di sisi global, tekanan untuk mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan menghadapi tantangan perubahan iklim semakin mempengaruhi pola pembangunan daerah-daerah kepulauan seperti Nias Selatan. Ketergantungan pada sektor tertentu, seperti pertanian dan perikanan, tanpa adanya diversifikasi ekonomi dapat memperburuk kondisi ekonomi daerah. Oleh karena itu, penguatan sektor-sektor unggulan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan PAD dan memitigasi dampak negatif dari perubahan ekonomi global.

Potensi lokal Kabupaten Nias Selatan menawarkan peluang besar untuk merespons isu-isu strategis tersebut melalui optimalisasi sumber daya alam yang dimiliki. Dengan kekayaan alam dan budaya yang melimpah, sektor pariwisata, pertanian, dan perikanan berkelanjutan memiliki potensi untuk dikembangkan secara lebih maksimal. Diversifikasi ekonomi melalui pengembangan industri kreatif, jasa, serta peningkatan infrastruktur pariwisata dapat mengurangi ketergantungan pada sektor yang lebih rentan terhadap perubahan iklim dan fluktuasi harga pasar. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan kebijakan yang mendukung tata kelola keuangan daerah yang lebih baik, reformasi sistem pajak, serta penguatan kemitraan dengan sektor swasta. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, Kabupaten Nias Selatan dapat meningkatkan PAD, memperkuat perekonomian lokal, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi sumber utama kehidupan dan penghidupan mereka.

b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan aksesibilitas wilayah

Keberhasilan pembangunan dapat diukur dari ketersediaan dan kecukupan serta kemampuan sarana dan prasarana serta infrastruktur pembangunan yang mempunyai peranan penting terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur dapat didefinisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang

dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat. Dengan aset Infrastruktur yang baik akan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Pembangunan Infrastruktur Kabupaten Nias Selatan merujuk pada penyediaan transportasi, kelistrikan, air bersih, perumahan layak huni, drainase, dan fasilitas publik lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Peningkatan berbagai infrastruktur pembangunan daerah diharapkan akan berdampak langsung pada perekonomian daerah maupun kesejahteraan masyarakat, sehingga hal tersebut akan mewujudkan pemerataan pembangunan yang berkualitas.

Pembangunan infrastruktur merupakan isu strategis yang memiliki dampak jangka panjang terhadap peningkatan kualitas hidup dan perekonomian masyarakat, terutama di daerah tertinggal dan kepulauan seperti Kabupaten Nias Selatan. Infrastruktur yang memadai menjadi fondasi utama bagi konektivitas antarwilayah, peningkatan produktivitas ekonomi, serta pemerataan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Jika pembangunan infrastruktur ini diabaikan, maka akan terjadi stagnasi dalam pertumbuhan wilayah, meningkatnya ketimpangan antarwilayah, serta menurunnya daya saing daerah. Investasi infrastruktur memang memerlukan biaya besar dan perencanaan jangka panjang, namun dampaknya akan sangat signifikan terhadap percepatan pembangunan daerah. Hal ini selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJPN 2025–2045 serta dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Nias Selatan yang menekankan pentingnya infrastruktur sebagai motor penggerak pembangunan berkelanjutan.

Dalam penjangkauan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal, isu keterbatasan infrastruktur seperti minimnya jaringan jalan yang layak, terbatasnya akses air bersih dan listrik, serta buruknya fasilitas umum diidentifikasi sebagai kendala utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat Nias Selatan. Peningkatan infrastruktur tidak hanya memberikan manfaat fisik, tetapi juga meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan sosial dan ekonomi, mempercepat integrasi pasar lokal dengan regional, serta menciptakan peluang kerja baru. Oleh karena itu,

pembangunan infrastruktur di Kabupaten Nias Selatan perlu ditempatkan sebagai prioritas utama dalam dokumen perencanaan jangka panjang dan menengah daerah, dengan sinergi pembiayaan dari pemerintah pusat, daerah, serta mitra swasta. Mengabaikan isu ini akan menghambat kemajuan daerah dan memperbesar kesenjangan pembangunan antarwilayah di Provinsi Sumatera Utara.

Secara nasional, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu fokus utama dalam RPJPN 2025–2045, di mana pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah melalui peningkatan akses dan konektivitas. Bagi daerah kepulauan seperti Nias Selatan, keterbatasan infrastruktur, seperti jalan yang buruk, terbatasnya akses air bersih, dan listrik yang tidak merata, menjadi hambatan besar dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Isu ini semakin relevan dengan tantangan global yang menekankan pada keberlanjutan pembangunan dan pengurangan kesenjangan ekonomi. Tanpa investasi yang memadai dalam infrastruktur, Kabupaten Nias Selatan akan terus tertinggal dalam hal akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi yang dapat mendorong kesejahteraan masyarakat.

Namun, potensi lokal Kabupaten Nias Selatan memiliki peluang besar untuk merespons tantangan infrastruktur ini. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan kekayaan budaya yang menarik, sektor pariwisata dan perikanan dapat dijadikan motor penggerak utama pembangunan infrastruktur yang terintegrasi. Pembangunan infrastruktur yang mendukung sektor-sektor ini, seperti akses jalan yang lebih baik ke destinasi wisata, peningkatan pasokan air bersih, dan penyediaan listrik yang merata, dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi lokal. Selain itu, pembangunan infrastruktur juga akan menciptakan lapangan kerja baru, mendorong integrasi pasar lokal dengan pasar regional, serta membuka peluang untuk investasi swasta. Oleh karena itu, sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur sangat penting untuk memaksimalkan potensi lokal Kabupaten Nias Selatan, serta meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

c. Peningkatan ekonomi kreatif

Ekonomi kreatif telah menjadi salah satu bagian yang besar dalam pengembangan masyarakat dimana kreativitas menjadi hal yang utama dalam pengembangan ekonomi. Sederhananya, ekonomi kreatif merupakan bentuk pengembangan dari konsep ekonomi dengan penambahan kreativitas. Namun, kreativitas tersebut tidak hanya terbatas pada kegiatan produksi saja, tetapi juga termasuk ke dalam bagaimana penggunaan bahan baku serta inovasi suatu teknologi di dalamnya.

Ekonomi kreatif mengacu pada segmen ekonomi yang berfokus pada eksploitasi kreativitas, keahlian, dan bakat manusia untuk menciptakan nilai tambah dan menghasilkan pendapatan. Berbeda dengan sektor ekonomi tradisional yang berorientasi pada produksi barang dan jasa konvensional, ekonomi kreatif menekankan pada produk-produk dan layanan-layanan yang menggabungkan aspek-aspek kreatif, artistik, dan inovatif.

Melalui ekonomi kreatif dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan pekerjaan baru, mendorong masyarakat jadi lebih kreatif, meningkatkan inovasi di berbagai bidang, menciptakan kompetisi bisnis yang sehat, dan tentunya dapat mengurangi angka pengangguran.

Ekonomi kreatif merupakan sektor strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, terutama di daerah dengan kekayaan budaya dan sumber daya manusia yang melimpah seperti Kabupaten Nias Selatan. Keberagaman budaya lokal, tradisi, serta potensi pariwisata alam dan budaya menjadi aset penting untuk dikembangkan dalam kerangka ekonomi kreatif. Jika tidak dikelola secara optimal, potensi ini dapat terabaikan dan tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pengembangan ekonomi kreatif memerlukan dukungan jangka panjang berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan, infrastruktur pendukung seperti pusat kreativitas dan pasar digital, serta perlindungan hak kekayaan intelektual. Ketika sektor ini diabaikan, daerah akan kehilangan peluang besar dalam menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan nilai tambah produk lokal, dan mengurangi ketergantungan pada sektor ekonomi tradisional yang rentan terhadap fluktuasi pasar.

Isu penguatan ekonomi kreatif telah diidentifikasi dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Nias Selatan serta

dalam penjangkaran aspirasi publik sebagai salah satu prioritas pembangunan jangka panjang. Hal ini juga sejalan dengan visi pembangunan nasional dalam RPJPN 2025–2045 yang mendorong transformasi ekonomi menuju ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. Implementasi strategi ekonomi kreatif membutuhkan investasi yang tidak kecil, baik dalam pengembangan kapasitas SDM, teknologi digital, hingga promosi dan pemasaran produk unggulan daerah. Namun, jika strategi ini dijalankan secara sistematis dan kolaboratif, dampaknya akan sangat signifikan dalam meningkatkan daya saing daerah, memperkuat identitas lokal, serta mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Selatan.

Keterkaitan antara permasalahan daerah dan isu strategis global, nasional, serta daerah dalam konteks pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Nias Selatan menjadi semakin penting di tengah transformasi ekonomi menuju era berbasis inovasi dan digitalisasi. Di tingkat global, tren ekonomi kreatif telah menjadi pilar pertumbuhan baru yang mendorong penciptaan lapangan kerja, inovasi, dan peningkatan daya saing. Hal ini selaras dengan arah kebijakan nasional dalam RPJPN 2025–2045 yang menempatkan ekonomi kreatif sebagai bagian dari transformasi ekonomi berbasis inovasi dan kreativitas. Namun, di Kabupaten Nias Selatan, potensi luar biasa dalam seni, budaya, kriya, dan warisan lokal masih belum dikelola secara optimal karena minimnya infrastruktur kreatif, kurangnya pelatihan SDM, serta terbatasnya akses terhadap pasar digital dan perlindungan kekayaan intelektual. Jika permasalahan ini tidak segera diatasi, maka Nias Selatan akan kehilangan peluang besar dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi baru yang inklusif dan berkelanjutan.

Potensi lokal Kabupaten Nias Selatan yang kaya akan budaya, tradisi, serta keindahan alam merupakan fondasi kuat dalam membangun ekonomi kreatif yang unik dan berdaya saing. Festival budaya, kerajinan tangan khas daerah, pertunjukan seni, dan produk lokal lainnya bisa dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang menarik wisatawan maupun pasar domestik dan internasional. Pengembangan ekonomi kreatif yang berbasis pada identitas lokal ini dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat citra positif daerah. Diperlukan dukungan lintas sektor berupa penyediaan

pusat inovasi, pelatihan keterampilan kreatif, pemanfaatan teknologi digital, serta program pemasaran terpadu agar sektor ini tumbuh secara terarah. Dengan pendekatan yang terintegrasi, Kabupaten Nias Selatan tidak hanya akan memperkuat struktur ekonomi daerahnya, tetapi juga menjadi model pembangunan daerah yang berbasis budaya dan kreativitas dalam kerangka pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

d. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal penting dalam meraih visi Indonesia Emas 2045. Pada tahun 2023 Kabupaten Nias Selatan memiliki kuantitas penduduk usia produktif yang mendominasi struktur penduduk Kabupaten Nias Selatan. Kuantitas penduduk usia produktif harus didukung juga dengan kualitas sumber daya manusia yang baik dan dimulai dari sedini mungkin. Kualitas dan daya saing sumber daya manusia didukung oleh berbagai macam aspek yang saling berkaitan, yaitu kesejahteraan sosial, kesehatan masyarakat dan pendidikan. Saat ini sumber daya manusia masih menjadi isu yang perlu pengoptimalan dari banyak aspek pendukungnya. Salah satu indikator untuk mengukur ketercapaian kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Nias Selatan adalah melalui angka indeks pembangunan manusia. IPM di Kabupaten Nias Selatan pada tahun 2023 masih berada di bawah capaian provinsi dengan peringkat 32 dari 33 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sumatera Utara. Kabupaten Nias Selatan masih menghadapi isu-isu kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh partisipasi dan fasilitas pendidikan yang belum merata, derajat kesehatan yang rendah, pemberdayaan sosial yang kurang, serta pembangunan dan pemberdayaan gender yang belum optimal. Selain itu adanya kondisi sosial yang lebih rendah di daerah kepulauan juga memerlukan perhatian lebih. Sehingga aspek sumber daya manusia tidak hanya dilihat dalam capaian kualitas dan kuantitas namun pemerataannya juga.

- **Belum Optimalnya Kualitas dan Partisipasi Pendidikan**

Pendidikan yang berkualitas disertai dengan partisipasi pendidikan yang optimal akan menjadi modal untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan diharapkan penduduk dapat memiliki kesempatan kerja yang lebih baik. Kualitas pendidikan di Kabupaten Nias

Selatan dapat dilihat dari aspek sarana, prasarana, tenaga pendukung penyelenggaraan pendidikan serta tingkat partisipasi pendidikan yang ada. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Nias Selatan adalah 6,23 tahun yang berarti penduduk secara rata-rata menempuh pendidikan hanya hingga tingkat pertama pendidikan menengah SMP dan bahkan belum mencapai angka wajib belajar 9 tahun. Perlu adanya dorongan rata-rata lama sekolah hingga angka 12 tahun bahkan lebih untuk menempuh pendidikan tinggi. Selain itu dalam aspek ketercukupan sarana dan prasarana juga masih belum optimal yang dapat dilihat dari cakupan pendidikan anak usia dini yang masih rendah, angka putus sekolah yang tinggi, kualifikasi tenaga pendidik dan tenaga pendukung pendidikan yang belum optimal serta kualitas bangunan sekolah yang belum baik. Kualitas dari tenaga pendidik dan lingkungan belajar yaitu bangunan sekolah akan turut berpengaruh terhadap kondisi belajar murid dan motivasinya untuk mengikuti atau bahkan melanjutkan belajar. Motivasi dari murid juga harus ditingkatkan agar melanjutkan pendidikan. Untuk mendorong motivasi anak, peranan orang tua untuk mendukung pendidikan anak juga menjadi penting.

- Derajat Kesehatan Masyarakat yang Rendah

Salah satu aspek penting yang menunjukkan kualitas masyarakat adalah kondisi kesehatan masyarakat yang ditunjukkan oleh derajat kesehatan. Namun, tingkat derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Nias Selatan masih tergolong rendah. Dalam beberapa tahun terakhir, angka kematian ibu dan bayi memiliki kecenderungan meningkat. Penyebab kematian ibu disebabkan beberapa faktor seperti risiko anemia, obesitas, kekurangan energi kalori dan penyakit TBC. Sementara itu, penyebab kematian bayi didominasi afiksia dan berat badan lahir rendah (BBLR). Kasus stunting dan balita gizi buruk juga masih ditemukan di Kabupaten Nias Selatan. Faktor penyebab kasus stunting dan balita gizi buruk adalah pola hidup dan pola asuh bayi dalam keluarga. Selanjutnya, masalah aspek kesehatan secara umum yang terjadi adalah peningkatan prevalensi penyakit menular dan tidak menular yaitu HIV/AIDS, kasus ISPA, infeksi diare, TBC, dan DBD. Pencegahan dan penanganan masalah-masalah yang telah disebutkan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit, masih belum maksimal. Terdapat tenaga

kerja yang bekerja di luar SOP kesehatan dan belum memiliki respon kegawatdaruratan yang optimal. Selain itu, kecukupan tenaga medis (dokter, paramedis, dan bidan) di Kabupaten Nias Selatan masih terbatas sehingga hanya fasilitas kesehatan dengan alokasi dana lebih yang mampu mempekerjakan secara mandiri. Tidak hanya dari sisi pelayanan, saat ini ketersediaan obat dan logistik kesehatan dari program yang dilaksanakan masih terbatas, terutama alat TCM untuk pemeriksaan TB.

- Kurangnya Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial

Perlindungan sosial merupakan salah satu aspek penting yang menunjukkan keberhasilan dalam pemberdayaan sosial masyarakat. Saat ini, pemberdayaan dan penanganan bagi kelompok fakir miskin masih belum memadai. Taraf kehidupan fakir miskin di Kabupaten Nias Selatan dinilai masih belum layak. Tidak hanya itu, peran Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial juga masih kurang. Padahal keterlibatan PSKS sangat diperlukan oleh pemerintah, mengingat bidang kemiskinan merupakan isu dengan dimensi yang luas dan memiliki banyak fokus, tidak hanya dari sisi ekonomi tetapi juga sosial. Oleh karena itu, dalam penanganannya diperlukan kerjasama dan koordinasi antara banyak pihak. Pemberdayaan sosial juga dapat dilihat dari sisi pemberdayaan terhadap PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang belum optimal. balita terlantar, anak terlantar, anak jalanan Anak Jermal, anak nakal, penyandang disabilitas, gelandangan, lanjut usia dan sebagainya.

- Pembangunan dan Pemberdayaan Perempuan serta Anak belum Optimal

Kesetaraan gender merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan yang berkelanjutan, yakni ketika seluruh lapisan masyarakat dapat memenuhi hak dan kewajibannya tanpa terbatas gender tertentu. Mencapai kesetaraan gender dapat dilakukan melalui strategi sistematis Pengarusutamaan Gender (PUG). Salah satu aspek yang dapat merepresentasikan kesetaraan gender adalah aspek pembangunan gender dan pemberdayaan wanita & anak. Selama 5 tahun terakhir, pertumbuhan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Nias selatan tidak terlalu signifikan. Selain itu, nilainya masih berada di bawah Provinsi Sumatera Utara dan Nasional. Selanjutnya, kekerasan

terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Nias Selatan setiap tahunnya selalu ada. Hal ini menunjukkan perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak masih belum maksimal. Diperlukan peningkatan upaya perlindungan terhadap tindak kekerasan, penelantaran, dan perlakuan lain melalui pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban.

Isu pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Nias Selatan merupakan persoalan strategis yang tidak bisa ditunda penyelesaiannya karena berdampak jangka panjang terhadap daya saing daerah, kualitas hidup masyarakat, dan keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Ketertinggalan kualitas pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, belum optimalnya pemberdayaan sosial serta ketimpangan gender akan menjadi beban fiskal dan sosial yang terus meningkat jika tidak ditangani secara sistematis dan berkelanjutan. Saat ini, IPM Kabupaten Nias Selatan berada di peringkat ke-32 dari 33 kabupaten/kota di Sumatera Utara, yang menandakan perlunya intervensi serius dalam peningkatan rata-rata lama sekolah, akses dan mutu layanan kesehatan, serta pembangunan partisipatif yang inklusif. Kondisi sosial kepulauan yang unik menuntut pendekatan berbasis wilayah dan kebijakan afirmatif agar tidak semakin tertinggal. Bila diabaikan, dampaknya adalah pengulangan siklus kemiskinan struktural dan rendahnya produktivitas jangka panjang.

Permasalahan-permasalahan ini telah menjadi perhatian utama dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Nias Selatan, serta tercermin dalam aspirasi masyarakat melalui berbagai forum musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) dan penjaringan aspirasi lainnya. Hal ini juga sejalan dengan arah kebijakan RPJPN 2025–2045 yang menempatkan pembangunan manusia sebagai fondasi utama menuju Indonesia Emas 2045. Investasi dalam pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang merata, penguatan jaring pengaman sosial, dan pemberdayaan gender tidak hanya menjadi kebutuhan saat ini, tetapi juga investasi penting yang akan menentukan kualitas masa depan generasi Kabupaten Nias Selatan. Kegagalan dalam membangun SDM hari ini akan menjadi penghambat besar dalam upaya mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Sumber daya manusia (SDM) di Kabupaten Nias Selatan memiliki korelasi yang erat dengan isu strategis global, nasional, dan daerah, terutama dalam konteks pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), serta visi Indonesia Emas 2045 yang menempatkan pembangunan manusia sebagai pilar utama. Ketertinggalan dalam aspek pendidikan, kesehatan, pemberdayaan sosial, dan kesetaraan gender di Nias Selatan mencerminkan tantangan struktural yang membutuhkan penanganan lintas sektor dan berkelanjutan. Di tingkat nasional, RPJPN 2025–2045 secara tegas menargetkan peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui akses pendidikan yang merata, layanan kesehatan berkualitas, serta perlindungan sosial yang inklusif. Namun di Nias Selatan, rendahnya angka rata-rata lama sekolah, tingginya angka kematian ibu dan bayi, serta kurangnya pemberdayaan kelompok rentan menunjukkan kesenjangan signifikan yang mengancam produktivitas jangka panjang dan memperbesar ketimpangan regional. Jika tidak segera diatasi, maka akan terjadi siklus kemiskinan yang berulang dan sulit diputus.

Meski demikian, Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi lokal yang besar untuk mendukung peningkatan kualitas SDM, terutama melalui kekayaan budaya, semangat gotong royong masyarakat, dan struktur demografis yang didominasi usia produktif. Budaya lokal yang kuat dapat menjadi fondasi bagi pembangunan pendidikan berbasis kearifan lokal, serta pendekatan kesehatan masyarakat yang lebih kontekstual di daerah kepulauan. Selain itu, keberadaan komunitas dan organisasi sosial lokal dapat dimobilisasi menjadi mitra strategis dalam pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan dan anak. Potensi ini jika dikembangkan dengan dukungan kebijakan afirmatif, peningkatan infrastruktur dasar, serta sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat sipil, akan mampu mempercepat pencapaian target-target pembangunan manusia yang berkeadilan di Nias Selatan. Dengan strategi yang tepat, Nias Selatan dapat bertransformasi menjadi daerah yang tidak hanya mengejar ketertinggalan, tetapi juga menjadi contoh pembangunan SDM di wilayah kepulauan Indonesia.

e. Penguatan kehidupan masyarakat yang rukun dan berbudaya

Hidup rukun merupakan hidup yang saling harga menghargai, hormat menghormati serta juga saling menyanyangi di antara sesama manusia. Hal

tersebut dapat ditunjukkan dengan perilaku manusia terhadap manusia yang lainnya. Kondisi dari kehidupan yang rukun tersebut akan menimbulkan rasa bahu membahu, saling tolong menolong, serta menjauhi perselisihan dan pertikaian antara sesama manusia.

Masyarakat berbudaya akan memiliki nilai-nilai luhur yang menjadi modal pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan produktif juga menunjukkan kondisi keunggulan di bidang kebudayaan yang menjadi ikon daerah baik ditingkat nasional maupun internasional. Berbudaya atau memiliki budaya masih menjadi ciri khas masyarakat yang ada di Kabupaten Nias Selatan hingga saat ini masih terlestarikan budaya dan adat istiadat masing-masing dengan ciri khasnya.

Melalui masyarakat yang rukun dan berbudaya akan memudahkan pemerintah daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mencapai target capaian pembangunan.

Hidup rukun dan pelestarian budaya lokal merupakan fondasi sosial yang strategis bagi keberhasilan pembangunan jangka panjang di Kabupaten Nias Selatan. Kondisi masyarakat yang rukun menciptakan iklim sosial yang kondusif, memperkuat kohesi sosial, serta mengurangi potensi konflik horizontal yang dapat menghambat proses pembangunan. Sementara itu, budaya yang lestari menjadi identitas sekaligus daya tarik yang memiliki nilai ekonomi, khususnya dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Jika aspek kerukunan sosial dan kebudayaan ini diabaikan, maka risiko yang muncul tidak hanya berupa perpecahan sosial dan hilangnya nilai-nilai luhur, tetapi juga tergerusnya potensi ekonomi dan identitas kultural daerah yang selama ini menjadi modal sosial masyarakat kepulauan. Hal ini akan berdampak besar terhadap peningkatan biaya sosial dan pemulihan yang tinggi di masa depan.

Isu strategis ini telah teridentifikasi dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Nias Selatan, serta tercermin dalam RPJPN dan hasil penjaringan aspirasi masyarakat yang menunjukkan kuatnya aspirasi warga untuk menjaga harmoni sosial dan warisan budaya sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Masyarakat yang berbudaya dan hidup dalam kerukunan adalah modal sosial yang penting untuk mendukung pelaksanaan program-program pembangunan pemerintah

daerah. Upaya pelestarian adat istiadat, peningkatan peran lembaga adat, serta integrasi nilai-nilai budaya dalam sistem pendidikan dan tata kelola pemerintahan perlu dipandang sebagai investasi jangka panjang yang tidak hanya mempertahankan jati diri masyarakat Nias Selatan, tetapi juga memperkuat daya saing daerah di tingkat nasional dan global.

Permasalahan sosial terkait menurunnya kesadaran akan pentingnya hidup rukun dan pelestarian budaya lokal di Kabupaten Nias Selatan perlu dilihat sebagai isu strategis yang beririsan dengan agenda pembangunan global, nasional, dan daerah. Di tingkat global, upaya pelestarian budaya dan penguatan kohesi sosial menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh) dan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan), yang menekankan pentingnya identitas budaya dan kehidupan masyarakat yang harmonis dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan. Sementara itu, pada level nasional dan daerah, RPJPN 2025–2045 serta dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Nias Selatan telah menekankan pentingnya penguatan nilai-nilai sosial dan budaya sebagai pondasi pembangunan. Ketika kerukunan sosial dan nilai budaya mulai melemah, maka pembangunan rentan terhambat oleh konflik, disintegrasi sosial, serta hilangnya jati diri daerah yang selama ini menjadi perekat komunitas lokal.

Kabupaten Nias Selatan menyimpan potensi luar biasa dalam hal budaya lokal dan kearifan tradisional yang masih hidup dan menjadi bagian dari keseharian masyarakat. Keragaman adat istiadat, seni ukir, arsitektur tradisional, musik, tari, dan tradisi gotong royong merupakan aset yang tidak hanya memperkuat identitas daerah tetapi juga memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikembangkan dalam bingkai ekonomi kreatif dan pariwisata budaya. Dalam konteks ini, masyarakat yang hidup rukun dan menjunjung nilai-nilai budaya dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam mengawal dan melaksanakan program pembangunan. Melalui pelibatan tokoh adat, revitalisasi lembaga budaya, serta integrasi pendidikan berbasis nilai-nilai lokal, Kabupaten Nias Selatan dapat memperkuat ketahanan sosial dan mengangkat budayanya ke panggung nasional dan internasional. Jika dikelola secara terarah dan berkelanjutan, kerukunan dan pelestarian

budaya bukan hanya menjadi warisan, tetapi juga motor penggerak pembangunan yang inklusif dan bermartabat.

f. Penyediaan akses sanitasi layak dan aman serta pelestarian lingkungan hidup

Penyediaan akses sanitasi layak dan aman serta pelestarian lingkungan hidup merupakan isu strategis yang penting bagi pembangunan berkelanjutan. Adapun beberapa hal yang menunjukkan bahwa pentingnya hal tersebut adalah sebagai berikut:

- Kesehatan Masyarakat: Akses terhadap sanitasi yang layak dan aman sangat penting untuk mencegah penularan penyakit-penyakit yang terkait dengan lingkungan kotor, seperti diare, kolera, dan infeksi saluran pernapasan. Penyediaan fasilitas sanitasi yang memadai dapat meningkatkan kesehatan masyarakat secara keseluruhan
- Penurunan Angka Kematian: Di banyak negara berkembang, penyediaan sanitasi yang layak dapat membantu menurunkan angka kematian akibat penyakit-penyakit terkait air dan sanitasi yang dapat dicegah. Hal ini khususnya berdampak pada anak-anak, yang rentan terhadap infeksi dan penyakit akibat sanitasi yang buruk.
- Peningkatan Kualitas Hidup: Fasilitas sanitasi yang memadai tidak hanya penting untuk kesehatan fisik, tetapi juga untuk kesejahteraan psikologis dan sosial masyarakat. Dengan memiliki akses yang layak dan aman terhadap sanitasi, masyarakat dapat hidup dengan lebih nyaman dan terhindar dari stres dan kecemasan terkait kondisi sanitasi yang buruk.
- Pelestarian Lingkungan Hidup: Pengelolaan limbah dan sanitasi yang buruk dapat merusak lingkungan hidup, termasuk pencemaran air, tanah, dan udara. Ini dapat berdampak negatif pada ekosistem lokal, keanekaragaman hayati, serta ketersediaan sumber daya alam yang penting bagi kehidupan manusia.
- Pengurangan Kemiskinan: Akses yang baik terhadap sanitasi dan air bersih dapat membantu mengurangi beban ekonomi rumah tangga, termasuk biaya pengobatan akibat penyakit-penyakit yang terkait dengan sanitasi yang buruk. Hal ini dapat membantu meningkatkan produktivitas dan mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat.

- Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Isu sanitasi dan pelestarian lingkungan hidup merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya Target 6.2 yang menargetkan untuk mencapai akses universal terhadap sanitasi yang layak dan aman, serta menghentikan deforestasi dan memulihkan lahan yang terdegradasi pada tahun 2030.

Untuk mengatasi isu strategis ini, memerlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil, dan masyarakat secara keseluruhan. Upaya-upaya ini harus didukung oleh kebijakan yang efektif, investasi yang memadai, serta kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh komponen masyarakat untuk mencapai akses sanitasi yang layak dan aman serta pelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Penyediaan akses sanitasi yang layak dan aman, serta pelestarian lingkungan hidup merupakan dua aspek yang sangat strategis dalam upaya mencapai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Nias Selatan. Sanitasi yang buruk bukan hanya menjadi masalah kesehatan, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat dan berpotensi memperburuk kemiskinan. Penyakit yang ditularkan melalui air dan lingkungan yang tidak bersih, seperti diare dan kolera, dapat menambah beban ekonomi rumah tangga dan menurunkan produktivitas. Tanpa upaya serius untuk meningkatkan akses sanitasi, risiko peningkatan angka kematian akibat penyakit terkait sanitasi yang buruk akan terus menjadi masalah besar, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan lainnya. Pelestarian lingkungan juga memiliki dampak jangka panjang yang tidak kalah pentingnya, mengingat kerusakan ekosistem akibat pencemaran limbah sanitasi dapat mengancam sumber daya alam yang vital untuk keberlanjutan hidup masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah.

Jika isu ini diabaikan, dampaknya akan berbiaya sangat besar, baik dari sisi kesehatan, ekonomi, dan ekosistem. Penyediaan sanitasi yang layak memerlukan investasi yang signifikan, namun dampak positif jangka panjang yang dihasilkan akan jauh lebih besar, seperti penurunan biaya pengobatan, peningkatan kualitas hidup, serta tercapainya target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) pada tahun 2030. Isu sanitasi dan pelestarian

lingkungan ini telah tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD Kabupaten Nias Selatan, serta teridentifikasi dalam hasil penjarangan aspirasi masyarakat yang menunjukkan kebutuhan mendesak untuk memperbaiki infrastruktur sanitasi dan pengelolaan lingkungan. Oleh karena itu, keberlanjutan pembangunan daerah sangat bergantung pada komitmen bersama untuk menyelesaikan tantangan ini, dengan melibatkan pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam upaya menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Isu sanitasi dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Nias Selatan berkaitan erat dengan isu strategis global, nasional, dan daerah yang menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Di tingkat global, sanitasi layak dan pelestarian lingkungan merupakan bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 6 (Akses Air Bersih dan Sanitasi) dan SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim), yang menargetkan peningkatan kualitas sanitasi dan perlindungan terhadap ekosistem dari degradasi lingkungan. Secara nasional, RPJPN 2025–2045 juga mengedepankan penguatan infrastruktur dasar, termasuk sanitasi dan pengelolaan lingkungan, sebagai fondasi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Di tingkat daerah, dokumen KLHS RPJPD Kabupaten Nias Selatan secara tegas menyoroti rendahnya akses sanitasi layak dan meningkatnya pencemaran lingkungan sebagai hambatan besar bagi pembangunan berkelanjutan, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses layanan dasar.

Namun demikian, Kabupaten Nias Selatan juga memiliki potensi lokal yang besar dalam mendukung perbaikan sanitasi dan pelestarian lingkungan jika dikelola dengan tepat. Masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong dan hidup selaras dengan alam merupakan kekuatan sosial yang dapat dioptimalkan dalam kampanye perubahan perilaku hidup bersih dan pengelolaan lingkungan. Sumber daya alam seperti hutan, sungai, dan pantai yang tersebar luas bisa menjadi basis edukasi lingkungan sekaligus sumber ekonomi alternatif berbasis ekowisata yang mendukung konservasi. Selain itu, pendekatan lokal berbasis komunitas, seperti pemanfaatan teknologi tepat guna untuk pengolahan limbah dan air bersih, dapat diintegrasikan dalam program pembangunan sanitasi yang ramah lingkungan

dan terjangkau. Dengan memperkuat kolaborasi lintas sektor dan membangun kesadaran masyarakat, Kabupaten Nias Selatan berpeluang besar untuk menjadi contoh praktik pembangunan berbasis lingkungan dan sanitasi berkelanjutan di kawasan kepulauan Indonesia.

g. Implementasi reformasi birokrasi pada setiap aspek pembangunan secara inovatif dan berkualitas

Reformasi birokrasi merupakan proses yang kompleks dan memerlukan komitmen yang kuat dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, pegawai negeri, dan masyarakat secara luas. Dengan implementasi yang baik, reformasi birokrasi dapat menjadi kunci dalam menciptakan pemerintahan yang lebih efektif, responsif, dan mampu menjawab tuntutan zaman.

Prioritas utama Kabupaten Nias Selatan dalam peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Kabupaten Nias Selatan adalah melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang inovatif dan berkualitas dengan memegang komitmen dalam melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan melalui peningkatan pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas. Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dan perbaikan manajemen (struktur) pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dari sisi pelayanan publik, saat ini teknologi informasi sudah sangat memberikan kemudahan bagi setiap masyarakat dalam meningkatkan kapasitas dirinya. Hal tersebut juga seharusnya mampu ditangkap oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai pelayanan masyarakat maupun dalam menjalankan kinerja masing-masing bidang urusan

pembangunan, khususnya pelayanan publik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dalam mendapatkan layanan yang maksimal. Namun perlu juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur pelayanan publik, peningkatan inovasi daerah juga diperlukan untuk efektifitas pelayanan di daerah Nias Selatan.

Beberapa penggunaan teknologi informasi dan komunikasi akan menjadikan kemudahan dalam pelaksanaan koordinasi bagi perangkat daerah; pemberian pendidikan dan pelatihan bagi pegawai pemerintah di daerah yang sulit dijangkau atau membutuhkan biaya besar; meminimalisir terjadinya kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah; mempermudah berbagai pelayanan masyarakat seperti kependudukan dan catatan sipil, kesehatan, penanaman modal, dan sebagainya. Diharapkan berbagai inovasi melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara berkualitas dan merata akan mampu memberikan dampak signifikan pada peningkatan dan optimalisasi capaian pembangunan di Nias Selatan.

Pada prinsipnya, pembangunan daerah merupakan salah satu upaya pemerintah pusat dalam meningkatkan kemandirian daerah dalam melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kemandirian daerah disini tidak hanya berlaku pada pelaksana pembangunan baik pemerintah, swasta maupun masyarakat, akan tetapi kemandirian juga diharapkan terealisasi dalam keuangan daerah baik dari segi pengelolaan dan penyediaan anggaran.

Reformasi birokrasi di Kabupaten Nias Selatan merupakan isu strategis yang harus segera diimplementasikan, karena memiliki dampak jangka panjang terhadap kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Tanpa adanya komitmen yang kuat dalam melaksanakan reformasi birokrasi, potensi untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel akan terhambat. Selain itu, penguatan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang terintegrasi sangat penting agar masyarakat dapat mengakses pelayanan dengan lebih cepat, mudah, dan murah. Pemanfaatan teknologi informasi yang maksimal juga akan mempercepat proses koordinasi antar perangkat daerah dan meminimalkan

kesalahan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah, yang merupakan aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam jangka panjang, pengabaian terhadap reformasi birokrasi akan memperburuk kualitas pelayanan publik, menghambat pembangunan daerah, dan meningkatkan ketergantungan terhadap pusat, yang berpotensi merugikan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

Isu ini merupakan bagian dari Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJPN), yang menunjukkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat bergantung pada efektivitas birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Berdasarkan hasil penjarangan aspirasi masyarakat, ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui pelatihan dan peningkatan kapasitas, serta mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap sektor pelayanan publik. Jika reformasi birokrasi dan penguatan teknologi informasi tidak segera diterapkan, maka Kabupaten Nias Selatan berisiko tertinggal dalam kompetisi pembangunan dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dengan efektif.

Isu dan Permasalahan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Nias Selatan sangat erat kaitannya dengan isu strategis nasional dan global mengenai reformasi birokrasi dan transformasi digital. Secara global, reformasi birokrasi telah menjadi pilar penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adaptif, transparan, dan partisipatif di tengah era digitalisasi dan globalisasi. Di tingkat nasional, RPJPN 2025–2045 mengamanatkan penguatan kelembagaan dan birokrasi yang berintegritas serta berbasis teknologi informasi guna mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan urgensi di tingkat daerah, di mana Kabupaten Nias Selatan menghadapi tantangan dalam hal efisiensi pelayanan publik, rendahnya kapasitas aparatur, serta keterbatasan akses terhadap teknologi informasi di wilayah-wilayah terpencil. Ketidakefisienan birokrasi dan rendahnya integrasi sistem informasi dapat menghambat percepatan pembangunan serta berdampak pada rendahnya kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Namun, Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi lokal yang kuat untuk mendukung keberhasilan reformasi birokrasi dan digitalisasi pelayanan publik. Kultur gotong royong dan semangat partisipasi masyarakat yang tinggi dapat menjadi kekuatan sosial dalam mempercepat adopsi inovasi pelayanan berbasis teknologi. Selain itu, perkembangan infrastruktur digital secara bertahap, ditambah dengan dukungan lembaga pendidikan dan pelatihan lokal, membuka peluang besar dalam peningkatan kapasitas ASN melalui program-program pelatihan daring. Potensi wilayah sebagai kawasan kepulauan juga memungkinkan pengembangan sistem layanan publik berbasis teknologi mobile yang menjangkau desa-desa terpencil. Dengan pengelolaan yang baik, reformasi birokrasi yang terintegrasi dengan penguatan teknologi informasi dapat menjadi motor utama transformasi pelayanan publik di Kabupaten Nias Selatan, sekaligus memperkuat daya saing daerah dalam kerangka pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

h. Pembebasan Kawasan Hutan Lindung Yang Membelenggu Ruang Pembangunan di Kabupaten Nias Selatan

Dominasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan telah menjadi kendala utama dalam upaya percepatan pembangunan. Sejumlah besar wilayah permukiman, lahan pertanian, serta area yang potensial untuk pengembangan infrastruktur saat ini masih berada dalam kawasan hutan lindung, meskipun telah dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat jauh sebelum Indonesia merdeka.

Kondisi ini berdampak pada terbatasnya ruang bagi pembangunan daerah, menghambat investasi, serta menyulitkan masyarakat dalam memperoleh legalitas kepemilikan tanah. Selain itu, keterbatasan lahan juga menghambat pengembangan sektor ekonomi, terutama pertanian, perkebunan, dan permukiman, yang merupakan sektor utama penghidupan masyarakat.

Dalam rangka mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah strategis untuk mempercepat proses pembebasan kawasan hutan lindung, terutama di 28 kecamatan di wilayah daratan serta 2 kecamatan di kepulauan (Pulau-Pulau Batu dan Pulau-Pulau Batu Barat). Upaya ini perlu dilakukan melalui revisi tata ruang, pengajuan perubahan status kawasan, serta koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan lainnya guna

memastikan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan adanya pembebasan kawasan hutan lindung yang membelenggu ruang pembangunan, diharapkan Kabupaten Nias Selatan dapat lebih leluasa dalam mengembangkan wilayahnya, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Dominasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan menjadi salah satu isu strategis yang mempengaruhi percepatan pembangunan daerah. Sejumlah besar wilayah permukiman, lahan pertanian, dan area yang berpotensi untuk pengembangan infrastruktur saat ini masih terletak dalam kawasan hutan lindung, meskipun telah dihuni dan dimanfaatkan oleh masyarakat sejak sebelum Indonesia merdeka. Kondisi ini menghambat pengembangan sektor ekonomi, terutama dalam sektor pertanian, perkebunan, dan permukiman yang menjadi sumber utama penghidupan masyarakat. Terbatasnya ruang untuk pembangunan daerah dan kesulitan masyarakat dalam memperoleh legalitas kepemilikan tanah, berpotensi menghambat investasi dan meningkatkan ketimpangan pembangunan antara wilayah-wilayah yang berada dalam kawasan hutan lindung dan yang tidak terbatas. Oleh karena itu, pembebasan kawasan hutan lindung menjadi langkah yang sangat strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membuka potensi pembangunan yang lebih luas.

Langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah melalui pembebasan kawasan hutan lindung di 28 kecamatan wilayah daratan dan 2 kecamatan di kepulauan (Pulau-Pulau Batu dan Pulau-Pulau Batu Barat). Upaya ini dapat dilakukan melalui revisi tata ruang, pengajuan perubahan status kawasan hutan, serta koordinasi yang intensif dengan pemerintah pusat dan pemangku kepentingan terkait lainnya. Proses ini diharapkan dapat mengurangi pembatasan yang ada, serta menciptakan ruang pembangunan yang lebih besar bagi pengembangan sektor-sektor ekonomi yang vital bagi kehidupan masyarakat, seperti pertanian, perkebunan, dan infrastruktur. Dalam konteks ini, isu ini merupakan bagian dari rekomendasi yang tercantum dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Kabupaten Nias Selatan, serta hasil penjangkaran aspirasi masyarakat yang mendukung kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi. Pembebasan kawasan hutan lindung yang terhambat ini menjadi krusial untuk mengoptimalkan potensi pembangunan, dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Nias Selatan dalam jangka panjang.

Permasalahan dominasi kawasan hutan lindung di Kabupaten Nias Selatan merupakan isu strategis yang tidak hanya berdampak pada pembangunan lokal, tetapi juga terkait erat dengan isu global dan nasional mengenai pengelolaan lahan, hak masyarakat adat, dan pembangunan berkelanjutan. Secara global, banyak negara menghadapi tantangan serupa dalam menyeimbangkan antara pelestarian lingkungan dan kebutuhan pembangunan, terutama di wilayah-wilayah yang dihuni masyarakat adat sejak lama. Di tingkat nasional, kebijakan satu peta dan reforma agraria menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperjelas status kawasan dan memberikan legalitas yang adil bagi masyarakat. Kabupaten Nias Selatan, dengan sebagian besar wilayahnya berada dalam kawasan hutan lindung yang dihuni masyarakat jauh sebelum kemerdekaan, menghadapi dilema serupa. Hambatan legalitas ini bukan hanya menahan laju pembangunan, tetapi juga berpotensi memicu ketimpangan sosial dan ekonomi serta memperlambat pertumbuhan wilayah.

Namun demikian, Kabupaten Nias Selatan memiliki potensi lokal yang besar untuk dikembangkan apabila hambatan kawasan hutan lindung dapat diatasi secara bijak dan adil. Wilayah ini memiliki kekayaan alam berupa tanah subur, potensi perkebunan dan pertanian yang tinggi, serta lokasi strategis untuk pengembangan infrastruktur dan pariwisata bahari. Dengan pembebasan atau perubahan status sebagian kawasan hutan yang telah lama dimanfaatkan masyarakat secara turun-temurun, ruang pembangunan yang inklusif dan produktif dapat tercipta. Proses ini harus dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, serta didukung oleh mekanisme revisi tata ruang berbasis data spasial yang akurat dan partisipatif. Jika dikelola dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, pembukaan akses terhadap lahan ini tidak hanya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, tetapi

juga menjaga keseimbangan ekologis serta memperkuat daya saing daerah dalam konteks pembangunan nasional dan global.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH



BAB VI

VISI DAN MISI DAERAH

Sebagai tindak lanjut dari identifikasi permasalahan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam Bab III, maka pada Bab IV ini ditetapkan visi dan misi jangka panjang daerah yang menjadi arah dan landasan dalam penyelenggaraan pembangunan Kabupaten Nias Selatan selama periode 2025-2045. Visi dan misi ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi, sekaligus menggambarkan kondisi masa depan yang ingin dicapai secara berkelanjutan.

4.1. Visi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2025-2045

Visi merupakan pandangan jauh ke depan mengenai tujuan yang ingin dicapai serta langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkannya di masa mendatang. Sebuah visi harus berorientasi ke depan, tidak dibuat berdasarkan kondisi saat ini, mengekspresikan kreatifitas, dan mengandung nilai penghargaan kepada masyarakat. Visi juga harus memperhatikan sejarah dan kultur, ideal, memiliki standar yang tinggi, serta bersifat ideal, tetapi juga memberikan semangat kepada berbagai komponen untuk mencapai tujuan-tujuan dari visi tersebut.

Visi Indonesia Emas 2045 adalah Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Negara Nusantara berarti negara kepulauan yang memiliki ketangguhan dalam bidang politik, ekonomi, keamanan nasional, serta budaya dan peradaban bahari sebagai poros maritim dunia. Berdaulat yang dicapai melalui ketahanan, kesatuan, mandiri, dan aman. Maju tercermin dari berdaya, modern, tangguh, inovatif, dan adil. Berkelanjutan melalui pembangunan yang lestari dan seimbang antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

RPJPN dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045 menjadi pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Nias Selatan dalam merumuskan visi, misi, arah pembangunan, serta kebijakan pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun ke depan. Mempedomani RPJPN, RPJPD Provinsi Sumatera Utara dan karakteristik serta kondisi daerah Kabupaten Nias Selatan, maka rumusan visi tahun 2025-2045 sebagai berikut:

“Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan”

Rumusan visi ini menggambarkan transformasi jangka panjang yang diinginkan oleh Kabupaten Nias Selatan, yang selaras dengan arah nasional untuk menjadi negara yang berdaulat secara politik, maju secara ekonomi, dan berkelanjutan secara sosial-lingkungan. Visi ini merupakan hasil penyelarasan dengan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Bersatu, Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. ‘Sejahtera’ menekankan pada pertumbuhan yang inklusif dan berkeadilan; ‘Berbudaya’ merefleksikan identitas daerah yang kuat dan menjadi kekuatan pendorong pembangunan; ‘Maju’ mencerminkan kesiapan menghadapi tantangan global melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi digital, dan penguatan ekonomi hijau; serta ‘Berkelanjutan’ menandai komitmen untuk menjaga harmoni antara pembangunan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan hidup.

Visi ini sangat penting untuk menyatukan persepsi berbagai kalangan dan komponen masyarakat dalam menentukan arah dan sasaran pembangunan daerah ke depan. Visi ini juga selaras dengan sasaran pokok dan arah kebijakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nias Selatan. Dokumen ini bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejahtera adalah masyarakat Nias Selatan yang berada dalam kondisi baik materil maupun spiritual memungkinkan untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan jasmani, rohani dan sosial dengan sebaik-baiknya. Dengan kata lain masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berbudaya adalah nilai-nilai luhur budaya Nias Selatan menjadi modal pembangunan untuk menciptakan masyarakat yang bermartabat dan produktif. Kebudayaan Nias Selatan menjadi ikon yang dikenal di tingkat nasional maupun internasional yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, demokrasi dan sejahtera.

Maju adalah kondisi Kabupaten Nias Selatan yang terus bergerak meningkatkan kualitas dirinya mengikuti dinamika pergerakan dan perkembangan zaman dengan tetap menjaga nilai-nilai adat istiadat yang ada ditengah masyarakat.

Berkelanjutan adalah kondisi masyarakat Kabupaten Nias Selatan yang terus mempertahankan kualitas hidup pada saat ini dengan orientasi masa yang akan datang dengan prinsip kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

4.2. Sasaran Visi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan 2025-2045

Untuk mewujudkan visi RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045, yaitu **“Mewujudkan Nias Selatan yang Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan”** maka telah ditetapkan sasaran visi daerah Kabupaten Nias Selatan yang telah diselaraskan dengan sasaran visi RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan RPJPN Tahun 2025-2045 yaitu :

1. Peningkatan Pendapatan Per Kapita

Peningkatan pendapatan per kapita Kabupaten Nias Selatan diproyeksikan dari Rp24,03 juta pada tahun 2025 menjadi Rp404,08 juta pada tahun 2045. Transformasi ini mencerminkan arah pembangunan jangka panjang menuju kesejahteraan yang merata dan inklusif. Salah satu motor penggeraknya adalah penguatan sektor ekonomi biru, yang tercermin dari peningkatan Indeks Ekonomi Biru (IBEI) dari 2,78 menjadi 7,77. Selain itu, peningkatan kontribusi industri pengolahan dari kisaran 0,16-0,18 persen menjadi 12,5-13 persen menandai pergeseran struktur ekonomi dari berbasis primer ke industri bernilai tambah. Sasaran ini sejalan dengan agenda RPJPN 2025-2045 yang menargetkan Indonesia mencapai status negara berpendapatan tinggi (high income country), sekaligus mencerminkan arah visi daerah dalam mewujudkan masyarakat sejahtera dan berkelanjutan.

2. Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan

Kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan diproyeksikan menurun dari kisaran 15,80-14,76 persen pada tahun 2025 menjadi 9,21-8,17 persen pada tahun 2045. Penurunan ini didukung oleh strategi penguatan ekonomi inklusif yang juga berdampak pada penurunan Rasio Gini dari 0,260-0,250 menjadi 0,198-0,209. Kontribusi Kabupaten terhadap PDRB Provinsi juga meningkat, dari 0,66-0,81 persen menjadi 0,91-0,96 persen yang mengindikasikan pemerataan pembangunan antarwilayah. Pertumbuhan ekonomi yang stabil di kisaran 3,984,49 persen pada 2045 menjadi fondasi bagi pencapaian ini. Transformasi ini mendukung visi "Nias Selatan Sejahtera" yang tidak hanya

berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga pada pemerataan hasil pembangunan dan pengurangan ketimpangan antarwilayah dan antarindividu, sesuai arah pembangunan jangka panjang nasional.

3. Peningkatan Peran dan Posisi di Tingkat Nasional

Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Nias Selatan diproyeksikan meningkat dari kisaran 43,95–45,95 pada tahun 2025 menjadi 79,01–89,01 pada tahun 2045. Begitu pula dengan Indeks Daya Saing Daerah yang meningkat dari 3,37 menjadi 4,57. Peningkatan ini mencerminkan strategi pembangunan yang berorientasi pada penguatan kapasitas kelembagaan dan adopsi teknologi, serta kolaborasi lintas sektor yang mendukung pencapaian kinerja pembangunan daerah. Sasaran ini mendukung visi “Nias Selatan Maju” dengan membangun daya saing berbasis inovasi lokal dan penguatan posisi daerah dalam struktur ekonomi regional dan nasional, selaras dengan sasaran transformasi kelembagaan dalam RPJPN.

4. Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Nias Selatan diperkirakan meningkat dari 66,56–68,77 menjadi 73,78–76,78, dan Indeks Modal Manusia dari 0,44–0,47 menjadi 0,70–0,77. Kenaikan ini mencerminkan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta akses terhadap lapangan kerja yang produktif. Transformasi ini menjadi fondasi bagi keberhasilan pembangunan di sektor lain, termasuk ekonomi, sosial, dan lingkungan. Sasaran ini mendukung visi "Nias Selatan Maju dan Berkelanjutan" dengan menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan, sejalan dengan arah RPJPN untuk membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global.

5. Penurunan Emisi GRK Menuju Zero Emission

Penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di Kabupaten Nias Selatan ditargetkan dari 169.979,91 ton CO₂eq pada tahun 2025 menjadi 1.069.029,89 ton CO₂eq pada tahun 2045, yang menandai komitmen serius daerah terhadap mitigasi perubahan iklim. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLH) juga ditingkatkan dari 79,4 menjadi 82,8. Transformasi ini mencerminkan upaya menuju pembangunan rendah karbon berbasis konservasi dan energi terbarukan. Sasaran ini menguatkan pilar “Nias

Selatan Berkelanjutan” yang berorientasi pada pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi terhadap bencana, serta sejalan dengan agenda nasional menuju ekonomi hijau dan net-zero emission pada 2060.

Tabel 4.2
5 Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045

Sasaran Visi	Indikator	2025	2045
(1)	(2)	(3)	(4)
Peningkatan Pendapatan Per Kapita	a. PDRB per kapita (Rp Juta)	24,03	404,08
	b. Indeks Ekonomi Biru (IBEI)	2,78	7,77
	c. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	0,16-0,18	12,50-13,00
Pengentasan Kemiskinan dan Ketimpangan	a. Tingkat Kemiskinan (%)	15,80 - 14,76	9,21 - 8,17
	b. Rasio Gini	0,260 - 0,250	0,198-0,209
	c. Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota (%)	0,66 - 0,81	0,91-0,96
	d. Pertumbuhan Ekonomi (%)	3,76 - 3,86	3,98-4,49
Peran dan Posisi di Tingkat Nasional meningkat	a. Indeks Inovasi Daerah	43,95 - 45,95	79,01-89,01
	b. Indeks Daya Saing Daerah	3,37	4,57
Peningkatan daya saing sumber daya manusia	a. Indeks Pembangunan Manusia	66,56-68,77	73,78-76,78
	b. Indeks Modal Manusia	0,44 - 0,47	0,70-0,77
Penurunan Emisi GRK menuju zero emission	a. Penurunan Emisi GRK (ton CO2eq)	169.979,91	1.069.029,89
	b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,4	82,8

4.3. Misi

Selaras dengan Visi Indonesia Emas 2025-2045 dan untuk mewujudkan visi Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan maka ditetapkan 8 (Delapan) Misi Pembangunan meliputi:

1. Mewujudkan **Transformasi Sosial** untuk membangun manusia yang sehat, berkualitas dan sejahtera.

Sebagai bentuk dukungan akan tercapainya Visi Indonesia Emas 2045, Kabupaten Nias Selatan akan melakukan transformasi sosial yang ditujukan untuk mewujudkan manusia dan masyarakat yang sejahtera, unggul, dan berdaya saing melalui kebijakan yang menyeluruh berdasarkan siklus hidup yang diarahkan pada terwujudnya kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, serta perlindungan sosial yang adaptif.

Misi ini secara langsung menjawab permasalahan daerah terkait rendahnya daya saing sumber daya manusia dan kualitas sanitasi yang masih belum memadai. Isu strategis yang menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan misi ini mencakup peningkatan kualitas dan daya saing SDM, penyediaan

akses sanitasi yang layak dan aman, serta pelestarian lingkungan hidup sebagai bagian integral dari pembangunan manusia yang berkelanjutan

2. Mewujudkan **Transformasi Ekonomi** melalui peningkatan produktivitas kegiatan perekonomian berbasis IPTEK, Inovasi dan berkelanjutan.

Untuk mendukung ketercapaian transformasi ekonomi Indonesia kedepan maka Kabupaten Nias Selatan akan melakukan transformasi ekonomi di berbagai sektor, terutama sektor yang mendukung pertumbuhan perekonomian daerah yang akan diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani/ nelayan; mendorong pengembangan pariwisata daerah agar bisa memberikan nilai tambah yang tinggi, mengembangkan ekonomi kreatif dengan mengangkat nilai-nilai unggul budaya, seni dan kearifan lokal; melakukan penerapan ekonomi hijau untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan; mendorong pengembangan UMKM dan Koperasi sebagai penopang ekonomi, dan melakukan penguatan SDM melalui peningkatan keahlian Tenaga Kerja agar lebih berkompeten dan inovatif.

Misi ini merespons permasalahan belum optimalnya pertumbuhan ekonomi dan pemanfaatan SDA serta rendahnya daya saing produk unggulan. Terkait dengan isu strategis seperti optimalisasi PAD, pengembangan ekonomi kreatif, dan pemanfaatan sumber daya alam secara inovatif dan berkelanjutan.

3. Mewujudkan **Transformasi Tata Kelola** pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif.

Selaras dengan hal tersebut diatas Kabupaten Nias Selatan juga akan melakukan transformasi tata kelola dalam birokrasi dan pelayanan publik yang mencakup perwujudan regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif, mewujudkan kelembagaan yang efektif dengan penataan hubungan dan kewenangan antar instansi pemerintah daerah, penguatan manajemen Aparatur Sipil Negara, dan penguatan upaya pencegahan korupsi. Dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif Kabupaten Nias Selatan akan melakukan transformasi tata kelola yang mencakup

peningkatan aksesibilitas dan inklusivitas pelayanan publik terpadu, serta mewujudkan transformasi layanan pemerintah berbasis digital.

Misi ini bertujuan menjawab permasalahan belum optimalnya tata kelola pemerintahan. Selaras dengan isu strategis implementasi reformasi birokrasi secara inovatif di semua sektor pembangunan

4. Mewujudkan Keamanan lingkungan yang tangguh dan stabilitas ekonomi.

Dalam upaya mendukung supremasi hukum, stabilitas, dan kepemimpinan Indonesia Kabupaten Nias Selatan secara khusus akan melaksanakan upaya-upaya untuk penguatan pembangunan hukum demi terwujudnya supremasi hukum melalui optimalisasi penerapan dan penegakan hukum, serta penguatan lembaga pengawas institusi penegak hukum, baik internal maupun eksternal dengan dukungan teknologi informasi untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, mendukung penguatan sistem pemberantasan korupsi serta mendukung perluasan akses layanan bantuan hukum di daerah. selain itu Kabupaten Nias Selatan juga akan mewujudkan Keamanan Lingkungan yang Tangguh, Masyarakat Demokratis serta Stabilitas Ekonomi Makro.

Misi ini mendukung penguatan stabilitas wilayah serta keamanan lingkungan sebagai fondasi pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan

5. Mewujudkankan Ketahanan Sosial Budaya, Pangan dan Lingkungan Hidup.

Dalam upaya untuk mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi Kabupaten Nias Selatan akan melakukan penguatan peran agama sebagai landasan spritual, etika, moral dan modal dasar pembangunan keagamaan; meningkatkan ketangguhan individu, keluarga dan masyarakat untuk memastikan terbentuknya sumber daya manusia sebagai motor penggerak pembangunan; penguatan pengarusutamaan gender; pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup untuk peningkatan kualitas hidup, produktifitas, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; perkuatan pembangunan infrastruktur untuk mencegah dan meminimalkan kerusakan alam serta mengendalikan pencemaran lingkungan; penguatan efektivitas tata kelola kawasan konservasi darat dan laut; efisiensi dan efektifitas pendayagunaan sumber daya air dan peningkatan ketangguhan penanggulan bencana di daerah.

Misi ini menyorot isu strategis penguatan kehidupan masyarakat yang rukun dan berbudaya serta pelestarian lingkungan. Misi ini juga relevan terhadap tantangan kualitas sanitasi dan degradasi lingkungan hidup.

6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah.

Dalam upaya untuk mendukung keberhasilan Pembangunan Wilayah yang Merata dan Berkeadilan Kabupaten Nias Selatan akan melakukan pemerataan pembangunan berdasarkan potensi masing-masing daerah, di pedesaan terutama yang berbasis pertanian pembangunan diarahkan ke agroindustri padat karya. Pertumbuhan fisik kota juga harus dikendalikan. Keterkaitan ekonomi antar daerah di dorong agar lebih sinergis. Pembangunan kesejahteraan sosial ditingkatkan dengan adanya lembaga jaminan sosial yang mampu menjamin pemenuhan hak masyarakat akan pelayanan sosial dasar. Kebutuhan lain yang harus dipenuhi adalah berupa perumahan, air minum dan sanitasi. Selain itu juga diperlukan adanya prinsip kesetaraan dan non diskriminasi dalam penanggulangan kemiskinan. Misi ini menjadi jawaban atas ketimpangan wilayah dan dominasi kawasan hutan lindung yang membatasi ruang pembangunan. Juga mendukung isu pembebasan kawasan hutan lindung agar pembangunan dapat berjalan lebih adil dan merata.

7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan.

Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor pendukung utama pengembangan wilayah Kabupaten Nias Selatan dan menjadi pilar transformasi yang diharapkan terwujud di tahun 2045. Dukungan sarana dan prasarana yang perlu dibangun di Kabupaten Nias Selatan ialah berkaitan dengan konektivitas, teknologi informasi dan komunikasi, serta sarana dan prasarana dasar di kawasan perkotaan maupun perdesaan. Misi ini juga mendukung misi ke-7 RPJPN 2025-2045 yaitu Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang ramah lingkungan. Dalam mewujudkan misi ini, pembangunan sarana dan prasarana Kabupaten Nias Selatan juga mengikuti arahan pembangunan wilayah Sumatera yang telah diamanatkan dalam RPJPN 2025-2045.

Misi ini merespons langsung permasalahan minimnya infrastruktur serta isu strategis peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur dan aksesibilitas wilayah. Misi ini juga mendukung keberlanjutan lingkungan.

8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Kestinambungan pembangunan di Kabupaten Nias Selatan terwujud melalui sinkronisasi substansi dan periodisasi perencanaan antara pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota, sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Kabupaten, peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, penguatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko, dan pengembangan pembiayaan inovatif. Misi ini sesuai dengan misi ke-8 RPJPN 2025-2045 yaitu kestinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas. Perwujudan misi ke-8 jangka panjang Kabupaten Nias Selatan diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap perwujudan kaidah pelaksanaan RPJPN 2025-2045 dan pembiayaan pembangunan yang lebih efektif dan inovatif.

Misi ini menjadi payung dari seluruh agenda transformasi dengan memastikan bahwa semua proses pembangunan bersifat berkelanjutan, terukur, dan konsisten lintas periode.

BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK



BAB V

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

5.1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nias Selatan disusun dengan kerangka kerja pembangunan per lima tahun dalam rangka pencapaian visi daerah. Penyusunannya mengacu pada tahapan dan tematik pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025–2045 serta RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025–2045, yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi, dan tantangan strategis daerah Kabupaten Nias Selatan.

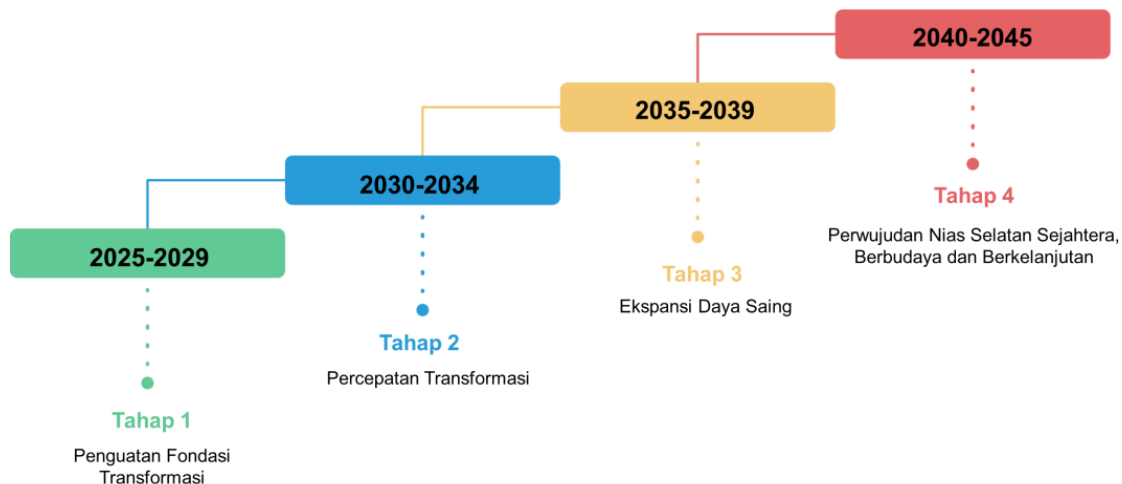
Setiap arah kebijakan lima tahunan pada RPJPD ini dirancang sebagai respon terintegrasi terhadap isu-isu strategis daerah, seperti keterisolasian wilayah pesisir, keterbatasan akses terhadap pelayanan dasar, serta tekanan ekologis akibat eksploitasi sumber daya alam dan tantangan pemanfaatan ruang yang dibatasi oleh keberadaan kawasan hutan lindung. Oleh karena itu, arah kebijakan disusun secara bertahap dan sistematis agar mampu menjawab permasalahan mendasar daerah sekaligus mendorong transformasi menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Sebagai bagian dari wilayah pesisir barat Sumatera Utara, arah kebijakan pembangunan Kabupaten Nias Selatan juga diarahkan untuk mengoptimalkan potensi kawasan pesisir melalui pengembangan pariwisata bahari dan hilirisasi sektor perikanan. Strategi ini tidak hanya akan memperkuat struktur ekonomi lokal, tetapi juga menjadi kontributor utama bagi transformasi ekonomi biru dan mendukung agenda pembangunan berkelanjutan di tingkat Provinsi Sumatera Utara. Pemanfaatan potensi laut dan pesisir secara bijak akan mendorong terciptanya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian ekosistem, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Nias Selatan meliputi:

1. Arah Kebijakan Periode 2025-2029: **Penguatan Fondasi Transformasi**
2. Arah Kebijakan Periode 2030-2034: **Percepatan Transformasi**
3. Arah Kebijakan Periode 2035-2039: **Ekspansi Daya Saing**
4. Arah Kebijakan Periode 2040-2045: **Perwujudan Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju dan Berkelanjutan**

Gambar 5.1
Arah Kebijakan Pertahapan Pembangunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045



Kerangka kerja pembangunan setiap arah kebijakan setiap periode sebagai berikut:

a. Arah Kebijakan Tahap I Tahun 2025-2029

Pada tahap ini, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada *Penguatan Fondasi Transformasi* sebagai dasar yang kokoh bagi pencapaian visi jangka panjang daerah. Penguatan fondasi ini diarahkan untuk mempercepat peningkatan layanan dasar, mendorong transformasi sosial dan ekonomi, serta memperkuat tata kelola pemerintahan dan pembangunan kewilayahan yang merata. Upaya ini juga mencakup strategi pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan stabilitas sosial, ketahanan lingkungan, serta kesinambungan fiskal dan ekonomi daerah.

Transformasi Sosial difokuskan pada peningkatan kualitas dan pemerataan layanan dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Peningkatan aksesibilitas dan mutu layanan ini menjadi prasyarat bagi terwujudnya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif.

Transformasi Ekonomi diarahkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara optimal melalui penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah. Penguatan fondasi transformasi ekonomi juga dilakukan melalui pengembangan potensi unggulan daerah, hilirisasi komoditas berbasis sumber daya alam lokal, pemberdayaan UMKM, serta peningkatan kesiapan daerah dalam mengembangkan kawasan

pariwisata berkelanjutan, khususnya di wilayah pesisir Nias Selatan yang memiliki keunggulan ekowisata dan budaya.

Transformasi Tata Kelola menitikberatkan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas ASN, pembentukan regulasi yang adaptif dan efektif, digitalisasi pelayanan publik, serta pelibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan. Tata kelola yang responsif, transparan, dan partisipatif menjadi landasan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berdaya saing.

Keamanan Lingkungan dan Stabilitas Ekonomi difokuskan pada peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, penguatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), serta peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pendapatan dan pengelolaan belanja yang efisien.

Ketahanan Sosial Budaya, Pangan, dan Lingkungan Hidup diarahkan pada optimalisasi kerukunan umat beragama, penguatan peran keluarga, dan penggerakan modal sosial sebagai pilar harmoni sosial. Upaya pelestarian lingkungan hidup dan penguatan ketahanan pangan juga terus didorong untuk menjaga keberlanjutan pembangunan.

Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Adil difokuskan pada peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata di seluruh wilayah, termasuk percepatan pembangunan di daerah terisolir. Penataan ruang yang adil juga dilakukan melalui upaya pembebasan kawasan hutan lindung yang membelenggu ruang pembangunan di wilayah-wilayah strategis.

Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan diarahkan pada penyediaan infrastruktur yang mendukung pemenuhan pelayanan dasar, konektivitas antar wilayah, dan pengembangan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi. Pendekatan pembangunan dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan dan daya dukung lingkungan.

Kesinambungan Pembangunan menjadi perhatian dalam setiap kebijakan dengan memastikan bahwa setiap fondasi transformasi yang telah dibangun terus diperkuat dan dikembangkan secara berkelanjutan di tahap-tahap pembangunan selanjutnya, menuju Nias Selatan yang adil makmur, berdaya saing, inovatif, lestari, dan berkeadaban.

b. Arah Kebijakan Tahap II Tahun 2030-2034

Setelah terbentuknya fondasi transformasi yang kuat, arah kebijakan pembangunan daerah difokuskan pada **Percepatan Transformasi** guna mendorong lompatan kemajuan menuju struktur pembangunan yang lebih inklusif, inovatif, dan berdaya saing global. Tahap ini merupakan akselerasi dari upaya sebelumnya, dengan mengedepankan integrasi antar sektor, penguatan kapasitas sumber daya manusia dan institusi, serta pengembangan ekonomi berbasis teknologi dan inovasi.

Transformasi Sosial difokuskan pada percepatan pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif. Upaya ini meliputi penguatan akses dan mutu pendidikan, peningkatan keterampilan melalui pendidikan vokasional, serta penguatan nilai-nilai kebangsaan dan solidaritas sosial. Pengembangan SDM diarahkan untuk menciptakan tenaga kerja yang adaptif terhadap dinamika kebutuhan pasar kerja global dan perkembangan teknologi.

Transformasi Ekonomi diarahkan pada penguatan ilmu pengetahuan, teknologi, sumber daya manusia, dan inovasi yang mendukung hilirisasi sumber daya alam serta pengembangan industri lokal yang kompetitif. Percepatan transformasi juga dilakukan melalui pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah strategis dan pesisir, investasi dalam teknologi bioindustri, serta penguatan rantai nilai berbasis potensi lokal.

Transformasi Tata Kelola menitikberatkan pada penguatan kelembagaan yang kolaboratif, pengembangan SDM ASN yang profesional dan adaptif, serta perumusan regulasi berbasis teknologi dan informasi. Reformasi birokrasi diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong keterbukaan data serta transparansi pemerintahan.

Keamanan Lingkungan dan Stabilitas Ekonomi difokuskan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta pengelolaan fiskal yang adaptif dan berkelanjutan. Stabilitas keamanan menjadi prasyarat penting dalam mendukung pertumbuhan investasi, sementara kebijakan fiskal diarahkan pada pembiayaan yang produktif dan inovatif.

Ketahanan Sosial Budaya, Pangan, dan Lingkungan Hidup diarahkan pada penguatan ekosistem pendukung ketahanan melalui pemanfaatan teknologi berbasis riset dan inovasi. Upaya ini meliputi perlindungan budaya lokal,

pengembangan pertanian berkelanjutan, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi.

Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Adil difokuskan pada percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di daerah terpencil dan terluar. Pengembangan wilayah dilakukan berdasarkan karakteristik lokal, dengan tetap mendorong upaya pembebasan kawasan hutan lindung yang menghambat ruang pembangunan. Pemerataan pembangunan menjadi dasar utama dalam menciptakan keadilan spasial dan sosial.

Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan diarahkan pada percepatan pemenuhan infrastruktur dasar yang mendukung konektivitas wilayah, akses layanan publik, serta mendorong transformasi digital secara menyeluruh. Infrastruktur yang dibangun mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan berorientasi pada pengurangan emisi serta efisiensi energi.

Kesinambungan Pembangunan difokuskan pada penguatan fondasi transformasi yang telah dibangun sebelumnya. Kebijakan berorientasi jangka panjang tetap dijaga dengan memastikan bahwa percepatan pembangunan tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan, daya saing, dan kemandirian daerah.

c. Arah Kebijakan Tahap III Tahun 2035-2039

Setelah percepatan transformasi berhasil mendorong lompatan pembangunan, arah kebijakan selanjutnya difokuskan pada **Eksansi Daya Saing** untuk memperkuat posisi daya saing daerah secara berkelanjutan di tingkat nasional dan global. Tahap ini menandai transisi dari penguatan internal menuju penetrasi pasar yang lebih luas, dengan menekankan pada penguatan produktivitas, kolaborasi global, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi secara menyeluruh di seluruh aspek pembangunan.

Transformasi Sosial difokuskan pada penguatan daya saing sumber daya manusia yang disertai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Arah kebijakan ini menitikberatkan pada pendidikan berbasis kompetensi global, keterampilan digital, serta penguatan sistem perlindungan sosial untuk menciptakan masyarakat yang sehat, produktif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Transformasi Ekonomi diarahkan pada perluasan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis keunggulan komparatif dan

kompetitif daerah. Fokus pengembangan ekonomi meliputi penguatan bioindustri kelautan dan pertanian, pengembangan destinasi wisata berkelas dunia, serta digitalisasi ekonomi lokal yang diarahkan untuk menembus pasar ekspor melalui kemitraan dengan pelaku industri global. Strategi ini diharapkan mampu mendorong terciptanya lapangan kerja berkualitas dan peningkatan pendapatan daerah.

Transformasi Tata Kelola menekankan pada kelembagaan yang adaptif terhadap perubahan global, peningkatan profesionalisme ASN yang kompetitif, serta regulasi yang inovatif dan responsif berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerintahan digital yang transparan, akuntabel, dan efisien akan memperkuat pelayanan publik dan mempercepat pengambilan keputusan strategis.

Keamanan Lingkungan yang Tangguh dan Stabilitas Ekonomi difokuskan pada peningkatan partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban, pengelolaan fiskal yang adaptif, serta pemantapan lingkungan yang aman, nyaman, dan mendukung kegiatan investasi. Stabilitas sosial dan ekonomi menjadi fondasi utama dalam membangun iklim usaha yang sehat dan berdaya saing.

Ketahanan Sosial Budaya, Pangan, dan Lingkungan Hidup diarahkan pada pembentukan manusia dan keluarga yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, maupun bencana alam. Penekanan diberikan pada penguatan budaya lokal sebagai modal sosial, ketahanan pangan berbasis lokal, serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Adil difokuskan pada peningkatan konektivitas antarwilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, pemenuhan akses pelayanan dasar yang merata, serta penuntasan pembebasan kawasan hutan lindung yang selama ini membelenggu ruang pembangunan. Pengembangan wilayah berbasis keunggulan lokal tetap menjadi pijakan utama dalam menciptakan keseimbangan antarwilayah.

Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan diarahkan pada pemanfaatan infrastruktur secara optimal untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dan pertumbuhan ekonomi. Digitalisasi infrastruktur publik dan konektivitas digital menjadi motor utama dalam

membuka akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pasar yang lebih luas.

Kesinambungan Pembangunan tetap menjadi pijakan utama dalam menjaga keberlanjutan ekspansi daya saing. Penguatan daya saing dilakukan secara progresif dengan memastikan kesinambungan antar program, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta adaptasi terhadap tantangan global dan lokal secara dinamis.

d. Arah Kebijakan Tahap IV Tahun 2040-2045

Tahap ini merupakan fase akhir dari proses pembangunan jangka menengah dan panjang yang menandai perwujudan visi daerah menuju **Nias Selatan yang sejahtera, berbudaya, maju, dan berkelanjutan**. Pada tahap ini, kebijakan pembangunan diarahkan untuk mengonsolidasikan seluruh capaian transformasi sebelumnya dan mengukuhkan posisi Nias Selatan sebagai daerah yang berdaya saing tinggi, inklusif secara sosial, dan tangguh terhadap tantangan global maupun lokal.

Arah pembangunan pada tahap ini secara khusus ditujukan untuk mewujudkan **Nias Selatan sebagai pusat wisata bahari tropis berstandar global dan penggerak ekonomi biru**, dengan menekankan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat, pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, pengembangan infrastruktur ramah lingkungan, dan kontribusi nyata terhadap pengurangan emisi karbon. Hal ini menjadi tonggak penting dalam menyeimbangkan kemajuan ekonomi dengan kelestarian lingkungan dan budaya lokal.

Transformasi Sosial difokuskan pada pencapaian sumber daya manusia Nias Selatan yang sehat, berkualitas, dan sejahtera. Sistem kesehatan yang tangguh, pendidikan yang adaptif terhadap tantangan masa depan, serta perlindungan sosial yang menyeluruh menjadi prioritas utama dalam memastikan kualitas hidup masyarakat yang tinggi dan merata.

Transformasi Ekonomi diarahkan pada peningkatan kontribusi sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata, dan jasa terhadap PDRB daerah. Penguatan ekonomi biru, pengelolaan pesisir yang berkelanjutan, serta promosi destinasi wisata bahari tropis berstandar global menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ramah lingkungan.

Transformasi Tata Kelola menekankan pada konsistensi regulasi dan praktik tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan partisipatif. Digitalisasi, transparansi, serta akuntabilitas publik menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, serta memastikan pelayanan publik yang responsif dan efisien.

Keamanan Lingkungan dan Stabilitas Ekonomi difokuskan pada penciptaan masyarakat yang hidup aman, nyaman, dan tangguh terhadap ancaman sosial maupun bencana alam. Stabilitas ekonomi dijaga melalui penguatan fiskal, iklim investasi yang kondusif, serta pengelolaan sumber daya keuangan daerah secara bijak dan berkelanjutan.

Ketahanan Sosial Budaya, Pangan, dan Lingkungan Hidup diarahkan pada pembentukan masyarakat yang tangguh dan berketahanan dalam menghadapi berbagai perubahan. Penguatan nilai-nilai budaya lokal, ketahanan pangan daerah, serta pelestarian lingkungan menjadi agenda utama yang menyatu dalam pembangunan berkelanjutan yang rendah emisi karbon.

Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Adil difokuskan pada menjaga ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Nias Selatan. Tujuannya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekaligus menjamin akses terhadap pelayanan dasar secara merata, termasuk di wilayah pesisir dan terpencil.

Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan diarahkan pada pemenuhan infrastruktur publik yang mendukung kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan. Pemanfaatan teknologi hijau, efisiensi energi, serta pengurangan emisi menjadi bagian integral dari pembangunan fisik yang berorientasi masa depan.

Kesinambungan Pembangunan tetap menjadi dasar dari keseluruhan kebijakan. Perwujudan Nias Selatan yang sejahtera, berbudaya, dan maju dilakukan secara berkesinambungan dengan memastikan bahwa setiap capaian dapat dilanjutkan, diperkuat, dan diwariskan kepada generasi mendatang.

Arah kebijakan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 berdasarkan agenda dalam pencapaian visi daerah sebagai berikut:

Tabel 5.1
Arah Kebijakan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045

Visi	Misi	Arah Kebijakan			
		2025-2029	2030-2034	2035-2039	2040-2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan	Misi 1: Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun manusia yang sehat, berkualitas, dan sejahtera	Peningkatan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial	Percepatan pembangunan SDM yang berkualitas dan inklusif	Penguatan daya saing SDM dan peningkatan kesejahteraan.	Sumber daya manusia Nias Selatan yang sehat, berkualitas, dan sejahtera
	Misi 2: Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui peningkatan inovasi dan produktivitas ekonomi, penerapan ekonomi hijau, dan transformasi digital	Pemanfaatan sumber daya alam melalui penerapan IPTEK dan inovasi untuk meningkatkan produktivitas	Penguatan IPTEK, SDM, dan inovasi untuk mendukung hilirisasi SDA serta penguatan industri loka	Perluasan sumber pertumbuhan ekonomi.	Peningkatan kontribusi ekonomi sektor pertanian, perikanan, industri pengolahan, pariwisata, serta jasa
	Misi 3: Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Peningkatan kelembagaan dan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat	Penguatan kelembagaan kolaboratif, SDM ASN berkualitas, regulasi berbasis teknologi-informatif	Kelembagaan adaptif, SDM ASN kompetitif, regulasi adaptif berbasis TIK	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif
	Misi 4: Mewujudkan keamanan lingkungan yang tangguh dan stabilitas ekonomi	Peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat, penguatan TPID, serta peningkatan kapasitas fiskal daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta pengelolaan fiskal yang adaptif	Pemantapan lingkungan yang aman untuk bertempat tinggal dan menjalankan investasi	Masyarakat hidup aman dan nyaman serta terjaminnya stabilitas ekonomi daerah
	Misi 5: Mewujudkan ketahanan sosial budaya, pangan, dan lingkungan hidup	Optimalisasi kerukunan umat beragama, peningkatan peran keluarga, dan penggerakan modal sosial	Penguatan lingkungan pendukung dan pemanfaatan teknologi berbasis riset dan inovasi	Manusia dan keluarga yang tangguh serta adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan dan bencana	Masyarakat tangguh dan berketahanan terhadap perubahan serta bencana
	Misi 6: Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah	Peningkatan infrastruktur dasar yang berkualitas dan merata di setiap wilayah, pemetaan karakteristik dan potensi wilayah, serta pembebasan kawasan hutan lindung yang membelenggu ruang pembangunan	Percepatan peningkatan kualitas pelayanan dasar, khususnya di daerah terpencil, pembangunan berdasarkan karakteristik wilayah, serta pembebasan kawasan hutan lindung yang membelenggu ruang pembangunan	Konektivitas antar wilayah dengan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi serta pemenuhan akses pelayanan dasar secara merata, serta penuntasan pembebasan kawasan hutan lindung yang membelenggu ruang pembangunan	Menjaga ketersediaan infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Nias Selatan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pelayanan dasar yang berkualitas
	Misi 7: Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Penguatan fondasi transformasi melalui pemenuhan pelayanan dasar, pembangunan wilayah dengan potensi ekonomi tinggi, dan wilayah terisolir	Percepatan pemenuhan infrastruktur dasar dan transformasi digital	Pemanfaatan infrastruktur dan digitalisasi untuk peningkatan SDM dan peningkatan ekonomi	Terpenuhinya infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat
	Misi 8: Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Peningkatan fondasi transformasi berkesinambungan	Penguatan fondasi transformasi berkesinambungan	Peningkatan daya saing berkesinambungan	Perwujudan Nias Selatan yang sejahtera, berbudaya, maju, dan berkelanjutan secara konsisten

5.2. Sasaran Pokok RPJPD Tahun 2025-2045

Sasaran pokok RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 merupakan gambaran kinerja daerah dalam pencapaian pembangunan yang

secara langsung mencerminkan terwujudnya visi “Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan”.

5.2.1. Arah Pembangunan Daerah

Arah pembangunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah serta berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional jangka panjang, dengan tetap menyesuaikan karakteristik dan potensi wilayah.

5.2.1.1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk membangun manusia yang sehat, berkualitas dan sejahtera

Transformasi sosial merupakan perwujudan dari misi pertama RPJPD Kabupaten Nias Selatan, RPJPD Provinsi Sumatera Utara, serta RPJPN Indonesia periode 2025-2045. Transformasi ini terdiri atas tiga arah pembangunan jangka panjang, yaitu: (1) Kesehatan untuk semua; (2) Pendidikan unggul dan merata; (3) Masyarakat sejahtera dan terlindungi.

a. Kesehatan Untuk Semua

Sasaran pokok dalam pembangunan kesehatan diarahkan pada terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya melalui peningkatan akses, pemerataan, dan kualitas layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduk. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk hidup sehat secara fisik, mental, dan sosial.

Peningkatan usia harapan hidup dari 71,79 pada tahun 2025 menjadi 76,86 pada tahun 2045 akan ditempuh melalui perluasan upaya promotif dan preventif serta pembudayaan perilaku hidup sehat dilakukan melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, layanan kesehatan, ruang terbuka hijau, serta fasilitas komunal yang mendukung kesehatan masyarakat. Di samping itu, dilakukan pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan guna memastikan layanan yang berkualitas di seluruh wilayah. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan juga menjadi prioritas, seiring dengan penguatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung oleh pemberian bantuan atau insentif khusus bagi tenaga kesehatan.

Dalam aspek kesehatan ibu dan anak, target penurunan angka kematian ibu dari 3 orang pada tahun 2025 menjadi 1 orang pada tahun 2045 serta penurunan prevalensi stunting dari 29,3% pada tahun 2025 menjadi 8,46% pada

tahun 2045 akan dicapai melalui peningkatan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan dilakukan secara berkelanjutan untuk memperluas jangkauan dan mutu layanan kesehatan. Penuntasan stunting dan pencegahan stunting dilakukan melalui berbagai program percepatan yang terintegrasi. Ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat ditingkatkan untuk mendukung derajat kesehatan yang optimal.

Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (TBC) akan dipertahankan pada angka 100%, dan angka keberhasilan pengobatan TBC ditargetkan tetap sebesar 90%. Hal ini akan dicapai melalui percepatan Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Pencegahan dan pengendalian penyakit dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat serta peningkatan cakupan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan yang berbasis budaya lokal. Masyarakat lokal diberdayakan dan diarahkan untuk menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas guna mendukung ketersediaan sumber daya manusia di bidang kesehatan.

Peningkatan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari 84,04 persen pada tahun 2025 menjadi minimal 98 persen pada tahun 2045 dilakukan melalui pemerataan dan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan universal. Upaya ini bertujuan untuk memastikan seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan dan masyarakat di daerah terpencil, memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan juga diarahkan untuk menjamin mutu dan keadilan, sehingga setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh layanan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

b. Pendidikan Berkualitas Yang Merata

Sasaran pokok pembangunan pendidikan diarahkan pada terwujudnya sistem pendidikan yang berkualitas, merata, dan inklusif guna menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing, berkarakter, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan akses pendidikan pada semua jenjang, penguatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan, penyediaan sarana dan prasarana yang layak, serta pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan pembangunan daerah dan tantangan global.

Peningkatan kualitas pembelajaran di satuan pendidikan ditargetkan melalui pencapaian standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional. Untuk literasi membaca, persentase satuan pendidikan di jenjang SD ditingkatkan dari 38,35 persen pada tahun 2025 menjadi 75,70 persen pada tahun 2045, sedangkan di jenjang SMP ditingkatkan dari 28,05 persen menjadi 75,28 persen pada periode yang sama. Sementara itu, untuk numerasi, persentase satuan pendidikan di jenjang SD ditingkatkan dari 39,20 persen menjadi 68,25 persen, dan di jenjang SMP dari 31,14 persen menjadi 67,85 persen pada tahun 2045. Pencapaian tersebut dilakukan melalui penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang berbasis pengembangan talenta dan karakter, literasi digital, serta penyesuaian dengan kondisi lokal daerah.

Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun merupakan indikator penting dalam menilai perkembangan kualitas pendidikan di suatu daerah. Pada tahun 2025, rata-rata lama sekolah diperkirakan mencapai 7,43 tahun, dengan target peningkatan yang signifikan pada tahun 2045, yaitu mencapai 10,03 tahun. Selain itu, harapan lama sekolah juga menjadi salah satu indikator utama dalam mengukur keberhasilan sistem pendidikan. Diperkirakan pada tahun 2025, harapan lama sekolah akan mencapai 12,88 tahun, dengan target peningkatan pada tahun 2045 menjadi 14,63 tahun. Pencapaian target ini akan didorong melalui beberapa langkah strategis, antara lain percepatan wajib belajar 13 tahun, pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini serta pendidikan dasar, perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, serta pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar keamanan bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Pada tahun 2025, proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki pendidikan tinggi diperkirakan mencapai 11,17%, dan diproyeksikan meningkat menjadi 16,77% pada tahun 2045. Pencapaian ini akan didorong melalui percepatan wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan, serta pemberdayaan masyarakat lokal untuk menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Sementara itu, persentase pekerja yang lulus dari pendidikan menengah dan tinggi serta bekerja

di bidang keahlian menengah tinggi diperkirakan mencapai 34,63% pada tahun 2025, dengan target peningkatan menjadi 49,43% pada tahun 2045. Target ini akan dicapai melalui peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru serta tenaga kependidikan, penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik, serta pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.

c. Perlindungan Sosial Yang Adaptif

Sasaran pokok pembangunan perlindungan sosial diarahkan pada terwujudnya sistem perlindungan sosial yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, guna menjamin keberlangsungan hidup masyarakat rentan dalam menghadapi risiko sosial, ekonomi, dan bencana. Upaya ini mencakup penguatan skema jaminan sosial, bantuan sosial yang responsif terhadap dinamika sosial ekonomi, pemberdayaan kelompok rentan, serta peningkatan kapasitas kelembagaan dalam penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan sosial.

Dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan, arah kebijakan yang akan ditempuh adalah percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan secara terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, ditargetkan angka kemiskinan di Kabupaten Nias Selatan dapat ditekan dari 15,8 persen pada tahun 2025 menjadi 8,69 persen pada tahun 2045. Upaya ini akan didukung oleh berbagai program lintas sektor yang menitikberatkan pada peningkatan pendapatan, akses terhadap pelayanan dasar, serta pemberdayaan masyarakat miskin dan rentan.

Selanjutnya, dalam rangka memperluas perlindungan terhadap tenaga kerja, terutama bagi kelompok masyarakat marjinal dan rentan, arah kebijakan yang diambil adalah perluasan penyediaan jaminan sosial, termasuk jaminan ketenagakerjaan, jaminan kesehatan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dari 14 persen pada tahun 2025 menjadi 46,8 persen pada tahun 2045, dengan memanfaatkan sistem pendataan yang terintegrasi serta pendekatan inklusif agar manfaat jaminan sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, khususnya bagi masyarakat umum, menjadi fokus strategis yang akan didorong melalui program-program upskilling dan reskilling. Kebijakan ini juga

diarahkan untuk mendorong keterlibatan penyandang disabilitas dalam sektor formal, dengan target peningkatan persentasenya dari 33,25 persen pada tahun 2025 menjadi 65,7 persen pada tahun 2045. Hal ini mencerminkan komitmen daerah untuk menciptakan kesempatan kerja yang setara dan inklusif guna mendukung pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

5.2.1.2. Mewujudkan Transformasi Ekonomi melalui peningkatan produktivitas kegiatan perekonomian berbasis IPTEK, Inovasi dan berkelanjutan

Transformasi ekonomi merupakan penjabaran kata kunci misi kedua RPJPD Kabupaten Nias Selatan, RPJPD Provinsi Sumatera Utara maupun RPJPN Indonesia periode 2025-2045 yang terdiri atas 5 arah pembangunan jangka panjang yaitu : (1) IPTEK, inovasi dan produktivitas ekonomi; (2) Penerapan ekonomi hijau; (3) Transformasi Digital; (4) Integrasi ekonomi domestik dan global; (5) Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi.

a. Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi

Sasaran pokok diarahkan pada peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penguatan ekosistem inovasi, serta peningkatan produktivitas ekonomi masyarakat dan daerah. Hal ini dilakukan melalui pengembangan riset dan inovasi yang aplikatif, dukungan terhadap wirausaha berbasis teknologi, peningkatan kapasitas SDM pelaku ekonomi, serta pemanfaatan potensi lokal secara optimal dan berkelanjutan. Dengan demikian, daya saing daerah dapat terus ditingkatkan guna menghadapi dinamika ekonomi regional, nasional, dan global.

Dalam rangka mewujudkan transformasi ekonomi daerah yang berdaya saing dan inklusif menuju visi pembangunan jangka panjang, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan menetapkan arah kebijakan yang terfokus pada peningkatan kontribusi sektor-sektor strategis terhadap PDRB dan penciptaan lapangan kerja berkualitas. Peningkatan rasio PDRB industri pengolahan dari 0,16 persen pada tahun 2025 menjadi 12,385 persen pada tahun 2045 diarahkan melalui percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, mencakup energi, air, akses digital, pengelolaan limbah industri, serta fasilitas pelatihan kerja dan layanan dasar bagi pekerja. Selanjutnya, sektor pariwisata ditargetkan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, dengan peningkatan rasio PDRB

penyediaan akomodasi makan dan minum dari 2,17 persen menjadi 5,15 persen, serta tingkat penghunian kamar dari 6 persen menjadi 25 persen. Hal ini dicapai melalui pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik berbasis pemenuhan aspek 6A, serta penataan dan penguatan daya tarik wisata secara kolaboratif dan peningkatan konektivitas kawasan wisata.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis kreativitas, proporsi PDRB ekonomi kreatif ditargetkan meningkat dari 7,9 persen menjadi 11 persen, dengan arah kebijakan penguatan pengelolaan kawasan strategis ekonomi kreatif serta pemasaran digital berbasis platform untuk mendorong daya saing subsektor unggulan. Di sisi lain, penguatan peran UMKM dan koperasi juga menjadi prioritas utama. Proporsi usaha kecil dan menengah non-pertanian ditingkatkan dari 1 persen menjadi 9 persen, sementara industri kecil dan menengah pada level provinsi ditargetkan naik dari 1 persen menjadi 8 persen, melalui peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, serta industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah. Rasio kewirausahaan daerah juga diharapkan meningkat dari 0,18 persen menjadi 4,67 persen dengan penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan ekosistem digital, inovasi, dan inkubator bisnis. Return on Asset (ROA) BUMD ditargetkan mencapai 3 persen melalui penguatan peran BUMD dalam skema closed-loop model di sektor pertanian dan perikanan, serta keterlibatan dalam rantai pasok dan distribusi lokal.

Untuk menekan tingkat pengangguran terbuka dari 3,25 persen menjadi 1,2 persen, kebijakan diarahkan pada penyediaan fasilitas pelatihan kerja, pengembangan industri padat karya, dan dukungan terhadap usaha produktif berbasis potensi lokal serta digitalisasi UMKM. Partisipasi angkatan kerja perempuan ditingkatkan dari 72,59 persen menjadi 87,09 persen melalui pemberdayaan ekonomi perempuan, pelatihan, dan dukungan ekosistem kerja yang inklusif. Terakhir, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) ditargetkan meningkat signifikan dari 0,06 menjadi 4,625, melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, percepatan transformasi digital, peningkatan literasi digital masyarakat, dan pengembangan talenta digital di semua jenjang.

b. Penerapan Ekonomi berkelanjutan

Sasaran pokok diarahkan pada meningkatnya penerapan prinsip ekonomi berkelanjutan yang menjamin keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan sosial. Penerapan ekonomi berkelanjutan dilakukan melalui pemanfaatan sumber daya alam secara efisien dan bertanggung jawab, pengembangan ekonomi hijau dan sirkular, penguatan regulasi dan insentif ramah lingkungan, serta penguatan peran masyarakat dan dunia usaha dalam menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi yang akan datang.

Indikator utama dalam penerapan ekonomi hijau di daerah ini meliputi dua hal: Indeks Ekonomi Hijau Daerah dan Porsi Energi Baru Terbarukan (EBT) dalam Bauran Energi Primer. Pada tahun 2045, targetnya adalah Indeks Ekonomi Hijau Daerah mencapai 90,65 dan Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer sebesar 70%. Penerapan ekonomi hijau akan dilakukan dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan secara berkelanjutan. Ini termasuk penggunaan teknologi canggih seperti smart farming, sensor, dan modifikasi cuaca, serta penyediaan bibit unggul dan pupuk ramah lingkungan. Selain itu, petani dan nelayan akan diberikan pelatihan tentang teknologi terbaru, termasuk cara pengendalian hama, pengelolaan komoditas, dan pemasaran produk secara digital. Untuk mendukung ini, akses pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan akan diperluas, dan model koperasi yang terintegrasi dengan pasar, perbankan, dan asuransi akan diperkuat. Infrastruktur penting untuk sektor pangan juga akan disediakan, dengan penekanan pada digitalisasi untuk meningkatkan efisiensi. Pembangunan ekonomi biru dan penguatan ekonomi hijau melalui perdagangan karbon dan pajak karbon juga akan diperkenalkan. Selain itu, bauran EBT akan terus ditingkatkan untuk mencapai target keberlanjutan energi yang lebih tinggi pada tahun 2045.

c. Transformasi Digital

Sasaran pokok diarahkan pada terwujudnya transformasi digital yang menyeluruh dan inklusif di berbagai sektor pembangunan, baik pemerintahan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial kemasyarakatan. Transformasi digital dilakukan melalui penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan literasi digital masyarakat, pengembangan sistem

pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung inovasi layanan publik dan pertumbuhan ekonomi berbasis digital yang berkelanjutan.

Indikator utama untuk pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) adalah Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, yang ditargetkan meningkat dari 55,83 pada tahun 2025 menjadi 81,73 pada tahun 2045. Untuk mencapainya, kebijakan yang akan dilakukan meliputi penguatan infrastruktur TIK dengan memperluas jaringan broadband ke seluruh pelosok daerah, memastikan akses internet yang cepat dan merata. Selain itu, akan ada peningkatan pemanfaatan TIK di sektor-sektor penting, seperti mendukung perekonomian nelayan dan pelayaran, melalui digitalisasi sektor tersebut. Terakhir, akan ada pengembangan SDM digital dengan meningkatkan literasi digital dan pelatihan talenta digital, agar masyarakat dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Indeks Pembangunan TIK dapat tercapai dan memberikan manfaat besar bagi masyarakat.

d. Integrasi Ekonomi domestik

Sasaran pokok terwujudnya integrasi ekonomi domestik difokuskan pada penciptaan suatu ekosistem ekonomi yang terhubung secara efisien antar wilayah, serta mendorong pemanfaatan potensi sumber daya lokal secara maksimal. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat konektivitas antar daerah, baik dalam hal infrastruktur transportasi, komunikasi, dan teknologi, yang akan memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung pertumbuhan sektor-sektor ekonomi unggulan daerah. Selain itu, perlu diupayakan peningkatan daya saing ekonomi daerah melalui pemberdayaan ekonomi lokal, penguatan sektor UMKM, dan pemfasilitasian akses terhadap pasar yang lebih luas. Melalui sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, integrasi ekonomi domestik yang berkeadilan dan berkelanjutan akan terwujud, memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi daerah yang inklusif.

Arah kebijakan untuk meningkatkan indikator utama pembangunan ini mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, untuk Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah, dengan target penurunan dari 10 pada tahun 2025 menjadi 5 pada tahun 2045, dilakukan pembangunan dan peningkatan sarana serta

prasarana kepelabuhanan, termasuk pelabuhan pengumpul dan pengumpan, untuk memperlancar distribusi barang antar wilayah dengan biaya rendah dan waktu yang lebih cepat. Selanjutnya, untuk Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB), yang ditargetkan turun dari 26,39% pada tahun 2025 menjadi 22,46% pada tahun 2045, akan dilakukan peningkatan kualitas dan kuantitas layanan pelayaran logistik rutin yang efisien serta peningkatan sarana dan prasarana bandar udara untuk mendukung konektivitas daerah. Untuk Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB), dengan target meningkat dari 1% pada tahun 2025 menjadi 5% pada tahun 2045, kebijakan akan difokuskan pada peningkatan keterkaitan UMKM dengan rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif, termasuk pembiayaan, pemasaran, dan teknologi. Selain itu, penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital dan akses ke ruang inovasi, kreasi, serta inkubator bisnis juga akan menjadi prioritas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal di pasar global.

e. Perkotaan dan perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran pokok terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi diarahkan untuk menciptakan keseimbangan pembangunan antarwilayah melalui penguatan konektivitas, pemerataan akses terhadap layanan dasar, serta pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yang saling mendukung antara kawasan kota dan desa.

Untuk mencapai hal tersebut persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan ditargetkan meningkat dari 12,5 persen pada tahun 2025 menjadi 20,71 persen pada tahun 2045. Capaian tersebut akan didorong melalui arah kebijakan penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan yang inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Peningkatan akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau akan dilakukan melalui penyediaan perumahan di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya, yang didukung oleh pembangunan infrastruktur dasar dan layanan publik yang memadai. Sementara itu, persentase desa atau kelurahan mandiri ditargetkan meningkat dari 1,96 persen pada tahun 2025 menjadi 2,87 persen pada tahun 2045. Target ini akan dicapai melalui arah kebijakan penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, termasuk pembentukan

regulasi dan kelembagaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan. Penguatan kelembagaan ini mencakup layanan publik seperti air minum, pengelolaan persampahan dan sanitasi, serta transportasi publik, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing wilayah.

5.2.1.3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

Transformasi tata kelola pemerintahan merupakan penjabaran kata kunci misi ketiga RPJPD Kabupaten Nias Selatan, RPJPD Provinsi Sumatera Utara maupun RPJPN Indonesia periode 2025-2045 yang terdiri atas 1 arah pembangunan jangka panjang yaitu : (1) Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif

a. Tata Kelola pemerintahan yang Berintegritas dan Adaptif

Sasaran pokok terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik diarahkan untuk membangun sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tata kelola yang efektif menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, serta pencapaian tujuan pembangunan secara efisien dan berkelanjutan.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih menuju tahun 2045, Pemerintah Daerah menetapkan beberapa arah kebijakan strategis yang diukur melalui indikator utama pembangunan. Pertama, untuk meningkatkan Indeks Reformasi Hukum dari baseline 60 pada tahun 2025 menjadi 90 pada tahun 2045, arah kebijakan difokuskan pada penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. Kedua, percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) menjadi fokus untuk mendorong peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dari angka 2,21 pada tahun 2025 menjadi 4,16 pada tahun 2045. Ketiga, peningkatan Indeks Pelayanan Publik dari 1,19 menjadi 2,62 ditopang oleh kebijakan percepatan digitalisasi pelayanan publik serta peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Keempat, penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas aparatur sipil negara (ASN) yang profesional dan bebas korupsi menjadi strategi utama untuk meningkatkan Indeks Integritas Nasional dari 66,78 pada tahun 2025 menjadi

80,44 pada tahun 2045. Kebijakan-kebijakan ini diarahkan secara terintegrasi untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

5.2.1.4. Mewujudkan Keamanan lingkungan yang tangguh dan stabilitas ekonomi

Keamanan lingkungan yang tangguh dan stabilitas ekonomi merupakan penjabaran kata kunci misi keempat RPJPD Kabupaten Nias Selatan, RPJPD Provinsi Sumatera Utara maupun RPJPN Indonesia periode 2025-2045 yang terdiri atas 3 arah pembangunan jangka panjang yaitu : (1) Pemahaman wawasan kebangsaan, idiologi Pancasila dan Trantibunlinmas; (2) Stabilitas ekonomi makro; (3) Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan.

a. Keamanan Lingkungan Yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Sasaran pokok terwujudnya keamanan lingkungan yang tangguh dan demokrasi substansial diarahkan untuk menciptakan kondisi sosial yang stabil, inklusif, dan berkeadaban, di mana masyarakat merasa aman, terlindungi, serta memiliki ruang yang luas untuk berpartisipasi aktif dalam proses demokrasi. Keamanan yang tangguh tidak hanya mencakup ketertiban umum dan penegakan hukum, tetapi juga perlindungan terhadap lingkungan hidup dan ketahanan sosial budaya. Sementara itu, demokrasi substansial ditandai oleh penghormatan terhadap hak asasi manusia, partisipasi publik yang bermakna, serta tata kelola pemerintahan yang menjunjung tinggi prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas.

Untuk mendukung tercapainya tata kehidupan masyarakat yang aman, adil, dan demokratis pada tahun 2045, sejumlah arah kebijakan strategis telah ditetapkan dengan indikator pembangunan yang terukur. Pertama, peningkatan keamanan dan penegakan hukum di wilayah perbatasan, terutama perbatasan laut, menjadi strategi utama dalam meningkatkan persentase penegakan hukum terhadap peraturan daerah dari baseline 70 persen pada tahun 2025 menjadi 100 persen pada tahun 2045. Kedua, pelaksanaan aksi Hak Asasi Manusia (HAM) ditargetkan meningkat dari 70 persen menjadi 90 persen, yang didorong melalui kebijakan penguatan keamanan dan ketertiban untuk menurunkan tingkat kriminalitas. Ketiga, proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya ditingkatkan dari 62,8 persen menjadi 80

persen dengan pendekatan kebijakan yang sama, yaitu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib. Terakhir, dalam rangka memperkuat fondasi demokrasi, penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat dilakukan untuk meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia dari kategori “Sedang” menjadi “Tinggi” pada tahun 2045. Seluruh arah kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat supremasi hukum, perlindungan HAM, dan kualitas demokrasi di tingkat daerah secara berkelanjutan.

b. Stabilitas Ekonomi Makro

Sasaran pokok terwujudnya stabilitas ekonomi makro bertujuan untuk memastikan agar perekonomian daerah tumbuh secara stabil, inklusif, dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui pengendalian inflasi, penciptaan iklim investasi yang kondusif, penjagaan keseimbangan fiskal, serta penciptaan lapangan kerja yang luas dan produktif. Stabilitas ekonomi makro juga mencakup pengelolaan fiskal yang prudent, pengendalian utang daerah yang terkendali, serta dukungan kebijakan moneter yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata. Dengan tercapainya stabilitas ekonomi makro yang kokoh, daerah akan memiliki ketahanan ekonomi yang memadai untuk menghadapi berbagai tantangan, termasuk fluktuasi ekonomi global dan domestik, sehingga dapat memberikan fondasi yang kuat bagi pembangunan jangka panjang.

Untuk mencapai sasaran tersebut, arah kebijakan pembangunan difokuskan pada penguatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan asli daerah, khususnya dari pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD). Target peningkatan rasio pajak daerah terhadap PDRB dari 0,35% pada tahun 2025 menjadi 1,12% pada tahun 2045 merupakan salah satu indikator keberhasilan kebijakan ini. Strategi stabilitas fiskal juga diarahkan pada perluasan basis penerimaan daerah melalui digitalisasi perpajakan, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah.

Di samping itu, penguatan pembiayaan alternatif dan kreatif daerah menjadi bagian penting dalam membiayai pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada pendanaan konvensional. Berbagai skema pembiayaan seperti pemanfaatan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Daerah (KPUD),

tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), jasa ekosistem, perdagangan karbon, serta pinjaman daerah akan didorong secara terukur dan berkelanjutan. Hal ini diharapkan mampu mendorong peningkatan total dana pihak ketiga terhadap PDRB hingga mencapai 1,65% dan peningkatan rasio total kredit terhadap PDRB dari 6,18% menjadi 25,81% pada tahun 2045.

Akselerasi pembiayaan produktif juga akan diperkuat melalui peningkatan akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan koperasi, terutama melalui kolaborasi strategis dengan lembaga keuangan daerah serta institusi jasa keuangan lainnya. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat struktur sektor jasa keuangan lokal dan meningkatkan fungsi intermediasi keuangan yang sehat dan berdaya saing. Dalam kerangka ini, perluasan inklusi dan akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal juga menjadi fokus penting. Hal ini tercermin melalui target peningkatan Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD) dari 2,20 pada tahun 2025 menjadi 3,42 pada tahun 2045. Indeks ini mencerminkan tingkat kemudahan, keterjangkauan, dan ketersediaan layanan keuangan yang dapat diakses oleh masyarakat, terutama di wilayah terpencil dan kelompok rentan.

Di sisi lain, pengendalian inflasi daerah akan terus diperkuat untuk menjaga kestabilan harga barang dan jasa serta daya beli masyarakat, dengan target tingkat inflasi yang terkendali di kisaran $3\pm 1\%$ sepanjang periode perencanaan. Optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD) serta peningkatan kualitas belanja daerah juga menjadi bagian integral dalam mendukung efektivitas pembangunan. Hal ini sejalan dengan upaya memperkuat sinergi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah dengan agenda pembangunan nasional, dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

c. Ketangguhan Kepemimpinan Daerah dan Diplomasi

Sasaran pokok terwujudnya ketangguhan kepemimpinan daerah dan diplomasi diarahkan untuk membangun kapasitas kepemimpinan yang visioner, responsif, dan adaptif terhadap dinamika perubahan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Kepemimpinan daerah yang tangguh berperan penting dalam mengarahkan pembangunan secara efektif, menjalin sinergi antarpemangku kepentingan, serta mengambil keputusan strategis yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Di sisi lain, diplomasi daerah ditujukan

untuk memperkuat posisi dan peran daerah dalam jejaring kerja sama antarwilayah dan internasional, meningkatkan daya saing daerah, serta membuka peluang kolaborasi dan investasi yang mendukung pembangunan berkelanjutan.

Ketangguhan kepemimpinan daerah Kabupaten Nias Selatan akan diwujudkan melalui penguatan posisi daerah dalam jejaring kerja sama antarwilayah yang strategis, termasuk implementasi perjanjian kerja sama lintas kabupaten/kota di kawasan pesisir. Pemerintah Kabupaten Nias Selatan akan mendorong sinergi yang lebih erat dengan aparat TNI dan Kemenhan untuk penyediaan sarana pendukung pertahanan wilayah perbatasan laut, yang sangat penting dalam menjaga stabilitas keamanan serta keberlanjutan pembangunan daerah. Sebagai indikator pencapaian, target yang dapat diukur adalah peningkatan jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/Bersaudara (Sister Province/Sister City) dari 3 pada tahun 2025 menjadi 15 pada tahun 2045, yang menggambarkan peningkatan kualitas dan kuantitas hubungan kerja sama internasional dan regional yang semakin kuat, sehingga memperkuat posisi Kabupaten Nias Selatan di tingkat nasional maupun global. Selain itu, diharapkan Indeks daya saing daerah yang saat ini berada pada angka 3,37 pada tahun 2025, dapat meningkat menjadi 4,57 pada tahun 2045, mencerminkan kemajuan signifikan dalam daya saing daerah. Peningkatan ini akan menunjang kemampuan Kabupaten Nias Selatan dalam menarik investasi serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi lokal berbasis potensi alam. Dengan terwujudnya hubungan kerja sama yang lebih luas dan peningkatan daya saing, Kabupaten Nias Selatan tidak hanya akan memperkuat posisi tawarnya dalam pembangunan regional dan nasional, tetapi juga akan menciptakan ketahanan wilayah yang lebih baik, dengan menjaga keseimbangan antara pertahanan, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan hidup

5.2.1.5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya, Pangan dan Lingkungan Hidup

Ketahanan sosial budaya dan lingkungan hidup (ekologi) merupakan penjabaran kata kunci misi keempat RPJPD Kabupaten Nias Selatan, RPJPD Provinsi Sumatera Utara maupun RPJPN Indonesia periode 2025-2045 yang terdiri atas 5 arah pembangunan jangka panjang, yaitu : (1) Beragama maslahat

dan berkebudayaan maju; (2) Keluarga berkualitas, kesetaraan gender dan masyarakat inklusif; (3) Lingkungan hidup berkualitas; (4) Berketahanan energi, air dan kemandirian pangan; (5) Resilensi terhadap bencana dan perubahan iklim.

a. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Sasaran pokok terwujudnya masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang hidup harmonis dengan dasar nilai-nilai agama yang membawa kebaikan bagi seluruh umat, serta menghargai dan melestarikan kekayaan budaya daerah. Masyarakat yang beragama maslahat berarti setiap individu menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, sehingga tercipta kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Sementara itu, masyarakat yang berkebudayaan maju mencerminkan penghargaan terhadap budaya lokal yang terus berkembang seiring dengan kemajuan zaman, serta mampu mengintegrasikan nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat identitas dan karakter bangsa.

Peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) dari 55 pada tahun 2025 menjadi 77,5 pada tahun 2045 akan dicapai melalui penetapan seluruh situs budaya lokal sebagai cagar budaya. Upaya ini dilaksanakan melalui kolaborasi aktif dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya serta penguatan regulasi daerah yang mendukung pelestarian dan pemanfaatan warisan budaya secara berkelanjutan.

Sementara itu, peningkatan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dari 90 pada tahun 2025 menjadi 98 pada tahun 2045 akan diwujudkan melalui serangkaian strategi terstruktur, antara lain: pembentukan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) di setiap kecamatan, penyelenggaraan pelatihan bagi fasilitator dialog lintas iman, serta penyusunan dan pelaksanaan program sosialisasi nilai-nilai toleransi di satuan pendidikan dan rumah-rumah ibadah. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat kohesi sosial dan menjamin kehidupan masyarakat yang damai, saling menghargai, dan inklusif.

b. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

Sasaran pokok terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif bertujuan untuk menciptakan keluarga yang sehat dan harmonis, di mana setiap anggota mendapatkan perhatian dan pendidikan yang

baik. Selain itu, sasaran ini juga berfokus pada pemberian kesempatan yang setara bagi laki-laki dan perempuan di berbagai bidang, serta menciptakan masyarakat yang menerima semua orang tanpa membedakan latar belakang, agar setiap individu dapat berpartisipasi dan merasakan manfaat dari pembangunan.

Sebagai tolok ukur keberhasilan, target peningkatan Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK) ditetapkan dari 36,46 pada tahun 2025 menjadi 42,99 pada tahun 2045. Capaian ini didorong melalui penyediaan layanan pengasuhan berbasis komunitas, konseling keluarga, serta penguatan peran kelembagaan sosial seperti Bina Keluarga Remaja (BKR) dan Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) di tingkat desa dan kecamatan.

Sementara itu, penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dari 0,57 pada tahun 2025 menjadi 0,40 pada tahun 2045 akan dicapai melalui peningkatan partisipasi perempuan dalam sektor ekonomi, pendidikan, dan kepemimpinan lokal, serta penguatan kebijakan pengarusutamaan gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, termasuk RPJMD dan APBD

c. Lingkungan Hidup Berkualitas

Sasaran pokok terwujudnya lingkungan hidup berkualitas bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang sehat, bersih, dan berkelanjutan, yang mendukung kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan sumber daya alam. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi polusi, menjaga kelestarian alam, serta meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan. Dengan demikian, terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas akan memastikan bahwa generasi sekarang dan mendatang dapat menikmati sumber daya alam yang tetap terjaga dan mampu hidup dalam lingkungan yang sehat.

Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah menjadi indikator utama pencapaian sasaran ini, dengan target naik dari 79,4 pada tahun 2025 menjadi 82,8 pada tahun 2045. Upaya ini akan didukung oleh konservasi kawasan hutan, pemulihan lahan kritis, serta pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Dalam hal sanitasi, jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman ditargetkan meningkat signifikan dari 12,5 persen menjadi 60 persen. Pencapaian ini akan didorong melalui pembangunan tangki

septik komunal, penyediaan air bersih yang memadai, serta edukasi dan kampanye perubahan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pengelolaan sampah juga menjadi aspek penting dalam mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas. Persentase timbulan sampah yang terolah di fasilitas pengolahan ditargetkan meningkat dari 15 persen pada tahun 2025 menjadi 19 persen pada tahun 2045. Hal ini akan dicapai melalui penguatan sistem pengelolaan sampah terpadu, peningkatan kapasitas dan cakupan fasilitas pengolahan, serta penerapan kebijakan pemilahan sampah dari sumber. Selain itu, proporsi rumah tangga yang mendapatkan layanan penuh pengumpulan sampah ditargetkan meningkat dari 3,5 persen menjadi 50 persen. Peningkatan ini akan ditempuh melalui perluasan cakupan layanan persampahan, penguatan infrastruktur dan armada pengangkutan, serta peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah domestik.

d. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan

Sasaran pokok terwujudnya ketahanan energi, air, dan kemandirian pangan bertujuan untuk memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup, berkelanjutan, dan terjangkau bagi masyarakat. Ketahanan energi difokuskan pada pemenuhan kebutuhan energi yang efisien, ramah lingkungan, dan berbasis pada sumber daya lokal. Ketahanan air bertujuan untuk menjamin akses terhadap air bersih dan pengelolaan sumber daya air secara bijaksana. Sedangkan kemandirian pangan ditujukan untuk mengembangkan sektor pertanian yang produktif dan berkelanjutan, serta mengurangi ketergantungan pada impor pangan dengan memanfaatkan potensi lokal.

Peningkatan konsumsi listrik per kapita dari 175 kWh pada tahun 2025 menjadi 1.975 kWh pada tahun 2045 merupakan salah satu indikator utama dalam penguatan ketahanan energi daerah. Sasaran ini akan dicapai melalui perluasan infrastruktur energi bersih, khususnya di wilayah terpencil, seperti pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) off-grid yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Penurunan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dari 13,00 persen menjadi 5,00 persen pada tahun 2045 diperkuat melalui kebijakan diversifikasi pangan lokal, penguatan cadangan pangan desa, serta

pengembangan sistem distribusi logistik yang efisien dan merata hingga ke daerah terpencil.

Dalam aspek ketahanan air, peningkatan kapasitas air baku dari 1 m³/detik menjadi 21 m³/detik dan peningkatan akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan dari 12,5 persen menjadi 20,71 persen diarahkan melalui peningkatan ketahanan air di kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi maupun keterbatasan sumber daya air. Langkah ini akan dilaksanakan melalui pembangunan infrastruktur pendukung seperti embung, sumur dalam, serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara terpadu dan berkelanjutan.

e. Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim

Sasaran pokok terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat dan daerah dalam menghadapi, mengurangi, dan memulihkan dampak dari bencana alam serta perubahan iklim. Hal ini mencakup penguatan sistem peringatan dini, pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam mengelola risiko bencana secara mandiri. Selain itu, upaya mitigasi perubahan iklim melalui pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta pengembangan kebijakan adaptasi perubahan iklim yang komprehensif juga menjadi bagian integral dalam menciptakan daerah yang lebih tangguh terhadap ancaman perubahan iklim.

Untuk mencapai sasaran ini, penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) dari 209,81 pada tahun 2025 menjadi 167,64 pada tahun 2045 dan penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) merupakan target utama. Penurunan emisi gas rumah kaca yang ditargetkan dari 169.979,91 ton CO₂eq pada tahun 2025 menjadi 1.069.029,89 ton CO₂eq pada tahun 2045 dapat dicapai melalui berbagai langkah strategis. Salah satunya adalah pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis, yang memperhatikan karakteristik lingkungan alam serta resiko bencana yang ada. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung, rehabilitasi ekosistem alami, serta pengelolaan hutan secara berkelanjutan akan menjadi kunci dalam mengurangi emisi karbon dan meningkatkan daya serap karbon di daerah ini.

Selain itu, pengelolaan risiko bencana akan diperkuat dengan peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dan instansi terkait, serta penguatan sistem peringatan dini yang lebih efektif dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Program peningkatan kurikulum pendidikan yang berfokus pada kesiapsiagaan bencana, kesadaran serta literasi masyarakat terhadap potensi bahaya seperti tsunami, gempa bumi, dan bencana alam lainnya akan menjadi bagian dari pembentukan budaya tangguh di tingkat lokal. Penyuluhan dan pelatihan berbasis komunitas juga akan menjadi bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang efektif.

Pengembangan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi juga akan diprioritaskan, termasuk pembangunan infrastruktur yang tahan bencana, peningkatan kualitas bangunan, serta perencanaan dan pembangunan yang berbasis pada analisis risiko bencana. Selain itu, peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam merespons bencana dengan cara yang cepat dan terkoordinasi akan menjadi hal yang sangat penting dalam memperkuat ketahanan wilayah terhadap bencana alam.

5.2.1.6. Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah

Sasaran pokok pemenuhan infrastruktur sesuai karakteristik daerah secara adil dan merata bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing wilayah. Infrastruktur yang dibangun harus dapat mendukung potensi lokal, memperkecil kesenjangan antarwilayah, serta mendorong pemerataan akses dan kualitas kehidupan. Hal ini akan dicapai melalui penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah yang memungkinkan kolaborasi dalam pembangunan infrastruktur, sehingga dapat lebih efisien dan terkoordinasi.

Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan wilayah menjadi bagian penting dari upaya ini, mencakup antara lain rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), serta regulasi mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dan kewenangan irigasi daerah. Penyusunan regulasi ini akan memperkuat pengelolaan tata ruang dan sumber daya alam yang lebih berkelanjutan serta mendukung pencapaian pembangunan yang adil di seluruh wilayah.

Fokus pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada kawasan dengan tingkat keterisolasian tinggi untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan mempercepat pembangunan di daerah yang masih tertinggal. Pembangunan infrastruktur akan disesuaikan dengan kebutuhan spesifik tiap daerah, seperti infrastruktur pertanian di pedesaan, pelabuhan di kawasan pesisir, dan transportasi di daerah terpencil. Semua wilayah, baik kota maupun desa, akan mendapatkan akses yang setara terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih, energi, dan transportasi.

Dengan demikian, melalui kebijakan yang terkoordinasi dan berbasis kebutuhan lokal, diharapkan ketimpangan antarwilayah dapat ditekan, serta dapat mendukung pencapaian target Indeks Williamson sebesar 0,4 pada tahun 2045, yang mencerminkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5.2.1.7. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan

Sasaran pokok pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan bertujuan untuk menyediakan prasarana dan sarana yang andal, merata, dan berkelanjutan guna mendukung aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik. Infrastruktur yang berkualitas ditandai oleh daya tahan, efisiensi, serta kemampuan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan antar pusat pertumbuhan. Sementara itu, prinsip ramah lingkungan dalam pembangunan infrastruktur menekankan pentingnya menjaga kelestarian alam, meminimalkan emisi karbon, serta memperhatikan aspek mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dalam mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, perencanaan tata ruang akan diarahkan dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, keberadaan kawasan hutan, wilayah jelajah satwa dilindungi, serta dampak perubahan iklim-khususnya di wilayah pesisir dan perkotaan. Penerapan standar keandalan bangunan yang tahan bencana dan iklim juga menjadi bagian penting untuk meningkatkan ketangguhan infrastruktur.

Guna mempercepat penyediaan lahan yang adil dan transparan, pengadaan dan pencadangan tanah akan dilakukan secara partisipatif melalui pendekatan LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean,

Clear, Consolidated), yang melibatkan masyarakat secara aktif guna membangun rasa keadilan, kepercayaan, dan dukungan terhadap pembangunan, terutama untuk proyek strategis dan pengembangan aktivitas ekonomi prioritas.

Selanjutnya, pengembangan infrastruktur akan didukung melalui berbagai insentif dan kemudahan, seperti deregulasi, penyederhanaan perizinan, akses terhadap pembiayaan hijau atau berbunga rendah, serta subsidi dan insentif fiskal maupun nonfiskal, baik dari pemerintah pusat maupun daerah. Hal ini terutama ditujukan untuk mendorong investasi di sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif seperti pertanian, perikanan, industri, serta sektor ekonomi biru, hijau, dan energi baru terbarukan.

Secara keseluruhan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan akan diarahkan untuk memenuhi standar efisiensi energi, memperkuat konektivitas, serta mempercepat pembangunan wilayah secara adil dan merata, dengan target pencapaian Indeks Infrastruktur Daerah sebesar 75 pada tahun 2045.

5.2.1.8. Mewujudkan Kestinambungan Pembangunan

Sasaran pokok mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, sinkron, bersinergi, dan inovatif bertujuan untuk menciptakan sistem perencanaan yang menyeluruh dan konsisten antar dokumen, antar tingkatan pemerintahan, serta antar sektor pembangunan. Perencanaan yang terintegrasi mendorong keterpaduan antara dokumen perencanaan pusat dan daerah, sedangkan sinkronisasi menjamin keselarasan substansi dan periodisasi antar dokumen strategis, termasuk antara RPJPD dengan RTRW, guna mendukung keterpaduan kebijakan tata ruang dan pembangunan jangka panjang.

Sinergi antar pelaku pembangunan diperkuat melalui peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan, serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah yang selaras dengan pencapaian sasaran prioritas nasional. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan rencana, pengendalian pembangunan diarahkan pada penerapan manajemen risiko yang sistematis, sehingga dapat meminimalkan deviasi terhadap target yang ditetapkan.

Pendekatan inovatif menjadi elemen kunci dalam menjawab kompleksitas tantangan pembangunan ke depan. Hal ini diwujudkan melalui penguatan riset yang relevan dengan sektor-sektor ekonomi produktif sebagai basis pengambilan kebijakan, serta pengembangan skema pembiayaan alternatif yang inovatif

seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan blended finance untuk mendukung pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Melalui upaya-upaya tersebut, diharapkan perencanaan pembangunan daerah dapat mencapai tingkat efektivitas dan kualitas tinggi, dengan target Indeks Perencanaan Pembangunan sebesar 95 pada tahun 2045.

Indikator dan target setiap sasaran pokok RPJPD tertuang dalam Tabel berikut ini.

Tabel 5.2
Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPN	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Tahun 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, berkualitas dan sejahtera	Terwujudnya kesehatan untuk semua	Kesehatan untuk semua (IE)	1 Usia Harapan Hidup (tahun)	71,79	76,86
				2 Kesehatan ibu dan anak :		
				a) Kasus kematian ibu (orang)	3	1
				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	29,3	8,46
		Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Pendidikan berkualitas yang merata (IE2)	3 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk):		
				a) Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100	100
				b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90
				4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	84,04	100
				5 Hasil Pembelajaran:		
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat tingkat nasional untuk :		
				a) Literasi Membaca		
				- SD	38,35	75,7
				- SMP	28,05	75,28
				b) Numerasi		
				- SD	39,2	68,25
				- SMP	31,14	67,85
				c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	6,78	10,03
				d) Harapan lama sekolah	12,88	14,63
				6 Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualitas pendidikan tinggi (%)	11,17	16,77

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPN	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Tahun 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif (IE3)	7 Persentase Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	34,63	49,43
				8 Tingkat Kemiskinan (%)	15,8	8,69
				9 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	14	46,8
				10 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	33,25	65,7
2	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas kegiatan perekonomian berbasis IPTEK, Inovasi dan berkelanjutan	Meningkatnya iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi	Iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi (IE4)	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	0,16	12,385
				12 Pengembangan Pariwisata Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	2,17	5,15
				a) Tingkat penghunian kamar (%)	6	25
				13 Proporsi PDRB Ekonomi kreatif (%)	7,9	11
				14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD		
				a-i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	1	9
				a-ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	1	8
				b) Rasio kewirausahaan daerah (%)	0,18	4,67
				d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0	3
		Meningkatnya penerapan ekonomi berkelanjutan	Penerapan ekonomi hijau (IE5)	15 Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik		
				a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,25	1,2
				16 Tingkat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	72,59	87,09
				17 Tingkat Penguasaan IPTEK	0,06	4,625
		Terwujudnya transformasi digital	Transformasi digital (IE6)	18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau		
				a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70,8	90,65
		Terwujudnya integrasi ekonomi domestik	Integrasi ekonomi politik dan global (IE7)	b) Porsi EBT dalam Bauran energi primer (%)	20	70
				19 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	55,83	81,73
				20 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Kabupaten/Kota	10	5

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPN	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Tahun 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (IE8)	21 Pembentukan modal tetap Bruto (% PDRB)	26,39	22,46
				22 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1	5
				23 Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan		
				a) Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	12,5	20,71
				b) Persentase Desa/Kelurahan Mandiri (%)	1,96	2,87
3	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif (IE9)	24 Indeks Reformasi Hukum	60	90
				25 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,21	4,16
				26 Indeks Pelayanan Publik	1,19	2,62
				27 Indeks Integritas Nasional	66,78	80,44
4	Mewujudkan keamanan lingkungan yang tangguh dan stabilitas ekonomi	Terwujudnya keamanan lingkungan yang tangguh, dan demokrasi substansial	Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial (IE10)	28.a Persentase Penegakan Hukum peraturan daerah	70	100
				28.b Persentase Capaian pelaksanaan aksi HAM	70	90
				29 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area empat tinggalnya (%)	62,8	80
				30 Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Tinggi
		Terwujudnya stabilitas ekonomi makro	Stabilitas ekonomi makro (IE11)	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,35	1,12
				32 Tingkat Inflasi (%)	3±1	3±1
				33 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan		
				a) Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	0,77	1,65
				b) Total Kredit / PDRB (%)	6,18	25,81
				34 Indeks Akses Keuangan Daerah	2,20	3,42
		Terwujudnya ketangguhan kepemimpinan daerah dan diplomasi	Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan (IE12)	35 Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/Bersaudara (Sister Province / Sister City)	3	15
				36 Indeks daya saing daerah	3,37	4,57
5	Mewujudkan ketahanan sosial budaya, pangan dan lingkungan hidup	Terwujudnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju (IE13)	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55	77,5

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPN	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Tahun 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
				38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	90	98
		Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif (IE14)	39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	36,46	42,99
				40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,57	0,4
		Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas	Lingkungan hidup berkualitas (IE15)	42 Kualitas Lingkungan Hidup		
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,4	82,8
				b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	12,5	60
				c) Pengelolaan Sampah - Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15	19
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	3,5	50
		Terwujudnya berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan (IE16)	43 Ketahanan Energi, Air, dan Pangan		
				a) Ketahanan Energi - Konsumsi listrik per Kapita (kWh) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalnce of dernourishment) (%)	175	1975
				b) Ketahanan Air - Kapasitas Air Baku (m3/detik) - Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpipaan	13	5
	6	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim (IE17)	44 Indeks Risiko bencana (IRB)	209,81	167,64
				45 Penurunan Emisi GRK (tonCO2eq)	169.979,91	1.069.029,89
				Indeks Williamson	0,5	0,4

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPN	Indikator Utama Pembangunan	Target	
					Baseline 2025	Tahun 2045
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pembangunan infrastruktur berkualitas dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat		Indeks Infrastruktur Daerah	50	75
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang terintegrasi, Sinkron, bersinergi dan inovatif.		Indeks Perencanaan Pembangunan	83	95

5.2.2. Arah Kebijakan Transformasi

Arah kebijakan transformasi menggambarkan upaya transformasi pembangunan daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 yang telah disesuaikan dengan karakteristik daerah untuk mewujudkan pencapaian RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025-2045 dan RPJPN Indonesia Emas 2025-2045.

Tabel 5.3
Arah Kebijakan Transformasi RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045

No	RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
1	Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus tenaga kesehatan, terutama untuk tenaga kesehatan yang bertugas di Daerah Afirmasi 3TP Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas Percepatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting. Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat. Percepatan eliminasi penyakit menular dan penyakit tropis terabaikan. Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar). Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah.

No	RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.
		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah (termasuk kondisi kebencanaan daerah).
		Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik.
		Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan.
		Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan.
		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan.
		Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan
		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas
		Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK
		Percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan
		Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion
		Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat
		Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling.
		Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand.
		Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien.
		Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
		Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat
		Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat
		Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga.
		Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah
		Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan
2	Ekonomi	Peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya).
		Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global.
		Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
		Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform.
		Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian.
		Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian.
		Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian

No	RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan.
		Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. Penyediaan instrumen pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. Penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenities, ancillary services, aktivitas, available packages) Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah

No	RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).
3	Tata Kelola	Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat Penguatan integritas partai politik
4	Keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah	Penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Penguatan pengendalian inflasi daerah. Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/pangkalan komposit/pangkalan/pos militer/sarana & prasarana pertahanan lainnya di Daerah
5	Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi	Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

No	RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045	
	Transformasi	Arah Kebijakan Transformasi
(1)	(2)	(3)
		Pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis.
		Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami.
		Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya seperti tsunami, dan gempa bumi maupun bahaya lainnya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.
		Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan.
		Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.
		Peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
		Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi
		pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.
6	Implementasi Transformasi	Penguatan kerjasama antardaerah dalam pengelolaan wilayah.
		Percepatan penyusunan panduan dan rencana pengembangan daerah/wilayah antara lain termasuk rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang (RDTR), standar pelayanan, penetapan regulasi tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), regulasi tentang penetapan kewenangan irigasi daerah dsb .
		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, luasan hutan, wilayah jelajah satwa spesies dilindungi, dan perubahan iklim, terutama pada wilayah perkotaan dan pesisir.
		Percepatan pengadaan & pencadangan tanah sesuai LARAP-3C (Land Acquisition and Resettlement Action Plan-Clean, Clear, Consolidated) yang disusun secara kolaboratif & partisipatif bersama masyarakat, guna menghadirkan rasa keadilan, trust, dan dukungan penuh dari masyarakat, terutama untuk proyek-proyek dan/atau pengembangan aktivitas ekonomi strategis/prioritas
		Pemberian deregulasi, kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/nonfiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan.
		Penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif
		Penegakan standar keandalan bangunan yang berketahanan bencana dan iklim.
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan blended finance.
		Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.
		Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW
		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.
		Perkuatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko

5.3. Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator utama pembangunan berfungsi sebagai alat ukur untuk menilai pencapaian tujuan pembangunan daerah serta kontribusinya terhadap tujuan pembangunan nasional dalam jangka panjang. Indikator utama pembangunan jangka panjang Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 ditetapkan sebagai berikut

Tabel 5.4
Indikator Utama Pembangunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan
Tahun 2025-2045

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPN	Indikator Utama Pembangunan	Target Tahun 2025-2045				
					Baseline 2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, berkualitas dan sejahtera	Terwujudnya kesehatan untuk semua	Kesehatan untuk semua (IE)	1 Usia Harapan Hidup (tahun)	71,79	72,80	74,07	75,34	76,86
				2 Kesehatan ibu dan anak : a) Kasus kematian ibu (orang)	3,00	2,60	2,10	1,60	1,00
				b) Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	29,30	25,13	19,92	14,71	8,46
				3 Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk): a) Tuberkulosis (treatment coverage) (%)	100	100	100	100	100
				b) Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	90	90	90	90	90
				4 Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)	84,04	87,232	91,222	95,212	100
		Terwujudnya pendidikan berkualitas yang merata	Pendidikan berkualitas yang merata (IE2)	5 Hasil Pembelajaran:					
				Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat tingkat nasional untuk :					
				a) Literasi Membaca					
				- SD	38,35	45,82	55,16	64,50	75,70
				- SMP	28,05	37,50	49,30	61,11	75,28
				b) Numerasi					
				- SD	39,20	45,01	52,27	59,54	68,25
				- SMP	31,14	38,48	47,66	56,84	67,85
				c) Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)	6,78	7,43	8,24	9,06	10,03
				d) Harapan lama sekolah	12,88	13,23	13,67	14,11	14,63
				6 Proporsi Penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berjualitas pendidikan tinggi (%)	11,17	12,29	13,69	15,09	16,77

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPN	Indikator Utama Pembangunan	Target Tahun 2025-2045				
					Baseline 2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		terwujudnya perlindungan sosial yang adaptif	Perlindungan sosial yang adaptif (IE3)	7 Persentase Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	34,63	37,59	41,29	44,99	49,43
				8 Tingkat Kemiskinan (%)	15,80	14,38	12,60	10,82	8,69
				9 Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	14,00	20,56	28,76	36,96	46,80
				10 Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%)	33,25	39,74	47,85	55,97	65,70
2	Mewujudkan transformasi ekonomi melalui peningkatan produktivitas kegiatan perekonomian berbasis IPTEK, Inovasi dan berkelanjutan	Meningkatnya iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi	Iptek, inovasi, dan produktifitas ekonomi (IE4)	11 Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	0,16	2,61	5,66	8,72	12,39
				12 Pengembangan Pariwisata					
				a) Rasio PDRB penyediaan akomodasi makan dan minum (%)	2,17	2,77	3,51	4,26	5,15
				b) Tingkat penghunian kamar (%)	6,00	9,80	14,55	19,30	25,00
				13 Proporsi PDRB Ekonomi kreatif (%)	7,9	8,52	9,295	10,07	11
				14 Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD					
				a- i) Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian (%)	1	2,6	4,6	6,6	9
				a- ii) Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi (%)	1	2,4	4,15	5,9	8
				b) Rasio kewirausahaan daerah (%)	0,18	1,08	2,20	3,32	4,67
				d) Return on Aset (ROA) BUMD (%)	0	0,6	1,35	2,1	3
				15 Penciptaan Lapangan Kerja yang Baik					
				a) Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,25	2,84	2,33	1,82	1,20
		Meningkatnya penerapan ekonomi berkelanjutan	Penerapan ekonomi hijau (IE5)	16 Tingat Partisipasi Angkatan kerja Perempuan	72,59	75,49	79,115	82,74	87,09
				17 Tingkat Penguasaan IPTEK	0,060	0,973	2,114	3,256	4,625
				18 Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau					

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPN	Indikator Utama Pembangunan	Target Tahun 2025-2045				
					Baseline 2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				a) Indeks Ekonomi Hijau Daerah	70,8	74,77	79,73	84,70	90,65
				b) Porsi EBT dalam Bauran energi primer (%)	20	30	42,5	55	70
		Terwujudnya transformasi digital	Transformasi digital (IE6)	19 Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	55,83	61,01	67,49	73,96	81,73
		Terwujudnya integrasi ekonomi domestik	Integrasi ekonomi politik dan global (IE7)	20 Koefisien Variasi Harga Antar wilayah tingkat Kabupaten/Kota	10	9	7,75	6,5	5
				21 Pembentukan modal tetap Bruto (% PDRB)	26,39	25,60	24,62	23,64	22,46
				22 Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	1,00	1,80	2,80	3,80	5,00
		Terwujudnya perkotaan dan perdesaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi	Perkotaan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi (IE8)	23 Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan					
				a) Rumah Tangga dengan akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)	12,50	14,14	16,19	18,25	20,71
				b) Persentase Desa/Kelurahan Mandiri (%)	1,96	2,18	2,41	2,46	2,87
3	Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif	Regulasi dan tata kelola yang berintegritas dan adaptif (IE9)	24 Indeks Reformasi Hukum	60	66	73,5	81	90
				25 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	2,21	2,60	3,09	3,58	4,16
				26 Indeks Pelayanan Publik	1,19	1,48	1,83	2,19	2,62
				27 Indeks Integritas Nasional	66,78	69,51	72,93	76,34	80,44
4	Mewujudkan keamanan lingkungan yang tangguh dan stabilitas ekonomi	Terwujudnya keamanan lingkungan yang tangguh, dan demokrasi substansial	Hukum berkeadilan, keamanan nasional tangguh, dan demokrasi substansial (IE10)	28.a Persentase Penegakan Hukum peraturan daerah	70	76	83,5	91	100

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPN	Indikator Utama Pembangunan	Target Tahun 2025-2045				
					Baseline 2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
				28.b Persentase Capaian pelaksanaan aksi HAM	70	74	79	84	90
				29 Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area empat tinggalnya (%)	62,8	66,24	70,54	74,84	80
				30 Indeks Demokrasi Indonesia	Sedang	Sedang	Sedang	Tinggi	Tinggi
		Terwujudnya stabilitas ekonomi makro	Stabilitas ekonomi makro (IE11)	31 Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)	0,35	0,50	0,70	0,89	1,12
				32 Tingkat Inflasi (%)	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
				33 Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan					
				a) Total Dana Pihak Ketiga / PDRB (%)	0,77	0,946	1,166	1,386	1,65
				b) Total Kredit / PDRB (%)	6,18	10,11	15,01	19,92	25,81
				34 Indeks Akses Keuangan Daerah	2,20	2,49	2,79	3,09	3,42
		Terwujudnya ketangguhan kepemimpinan daerah dan diplomasi	Ketangguhan diplomasi dan pertahanan berdaya gentar kawasan (IE12)	35 Jumlah kerja sama provinsi/kabupaten/kota kembar/Bersaudara (Sister Province / Sister City)	3	5,4	8,4	11,4	15
				36 Indeks daya saing daerah	3,37	3,61	3,91	4,21	4,57
5	Mewujudkan ketahanan sosial budaya, pangan dan lingkungan hidup	Terwujudnya beragama maslahat dan berkebudayaan maju	Beragama maslahat dan berkebudayaan maju (IE13)	37 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	55	59,5	65,125	70,75	77,5
				38 Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	90	91,6	93,6	95,6	98
		Terwujudnya keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif	Keluarga berkualitas, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif (IE14)	39 Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	36,46	37,77	39,40	41,03	42,99
				40 Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,57	0,54	0,49	0,45	0,40

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPN	Indikator Utama Pembangunan	Target Tahun 2025-2045				
					Baseline 2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
		Terwujudnya lingkungan hidup berkualitas	Lingkungan hidup berkualitas (IE15)	42 Kualitas Lingkungan Hidup					
				a) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	79,4	80,08	80,93	81,78	82,8
				b) Rumah tangga dengan akses sanitasi aman	12,5	22	33,875	45,75	60
				c) Pengelolaan Sampah					
				- Timbulan Sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah (%)	15	15,8	16,8	17,8	19
				- Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	3,5	12,8	24,4	36,1	50,0
		Terwujudnya berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan	Berketahanan energi, air, dan kemandirian pangan (IE16)	43 Ketahanan Energi, Air, dan Pangan					
				a) Ketahanan Energi					
				- Konsumsi listrik per Kapita (kWh)	175	535	985	1435	1975
				b) Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (prevalnce of dernourishment) (%)	13	11,4	9,4	7,4	5
		Terwujudnya resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim	Resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim (IE17)	c) Ketahanan Air					
				- Kapasitas Air Baku (m3/detik)	1	5	10	15	21
				- Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap air siap minum perpiaan	12,50	14,14	16,19	18,25	20,71
				44 Indeks Risiko bencana (IRB)	209,81	201,38	190,83	180,29	167,64
				45 Penurunan Emisi GRK (tonCO2eq)	169.979,91	349.789,91	574.552,40	799.314,90	1.069.029,89

No	Misi RPJPD	Sasaran Pokok RPJPD	Arah Pembangunan RPJPN	Indikator Utama Pembangunan	Target Tahun 2025-2045				
					Baseline 2025	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
6	Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan adil berbasis karakteristik wilayah	Pemenuhan infrastruktur sesuai karakteristik daerah secara adil dan merata untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi wilayah		Indeks Williamson	0,5	0,48	0,455	0,43	0,4
7	Mewujudkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	Pembangunan infrastuktur berkualitas dan ramah lingkungan untuk kesejahteraan masyarakat		Indeks Infranstruktur Daerah	50	55	61,25	67,5	75
8	Mewujudkan kesinambungan pembangunan	Mewujudkan perencanaan pembangunan Daerah yang terintegrasi, Sinkron, bersinergi dan inovatif.		Indeks Perencanaan Pembangunan	83	85,4	88,4	91,4	95

BAB VI

PENUTUP



BAB VI

PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045 merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang selama 20 (dua puluh) tahun. Penyusunan RPJPD ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

RPJPD berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah guna mewujudkan visi “**Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan.**” Untuk mencapai visi tersebut, diperlukan pengawalan yang ketat terhadap pelaksanaan pembangunan dengan menerapkan kaidah pelaksanaan yang efektif serta memastikan ketersediaan pembiayaan yang memadai.

6.1. Kaidah Pelaksanaan

RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025–2045 menjadi pedoman utama bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, dan organisasi kemasyarakatan, dalam melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai dengan peran dan tanggung jawab masing-masing. Pelaksanaan RPJPD ini akan menganut pendekatan ‘*whole of government*’ dan ‘*whole of society*’ sebagai strategi kolaborasi lintas sektor pemerintahan dan seluruh unsur masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan.

6.1.1. Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025–2045 harus selaras dengan dokumen perencanaan lainnya serta konsisten dengan kebijakan pendanaan guna memastikan perencanaan pembangunan yang berkualitas. Keselarasan ini mencakup kesesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, ketersediaan pendanaan, serta optimalisasi pemanfaatannya.

Pelaksanaan pembangunan harus berpedoman pada perencanaan yang telah disusun serta disesuaikan dengan kapasitas pendanaan yang tersedia agar dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. Perencanaan yang berkualitas harus berorientasi pada hasil (*result-oriented government*) secara berkelanjutan

serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah maupun nonpemerintah.

Untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan pendanaan, diperlukan penguatan mekanisme pengambilan keputusan yang cermat dan tegas, terutama dalam menentukan prioritas pembangunan daerah hingga pada tingkat proyek atau output. Pelaksanaan pembangunan juga harus dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan guna mencapai hasil yang optimal.

6.1.1.1. Keterkaitan RPJPD dengan Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Pendek

RPJPD memiliki posisi tertinggi dalam hierarki perencanaan pembangunan daerah dan menjadi pedoman utama bagi dokumen perencanaan lainnya. RPJPD harus menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD guna memastikan kesinambungan perencanaan pembangunan daerah. Konsistensi antara RPJPD dan dokumen turunannya dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Sinkronisasi periodisasi dan substansi
 - Periodisasi RPJMD mengikuti periodisasi arah kebijakan dalam RPJPD.
 - Substansi arah kebijakan dalam setiap periode menjadi bagian utama dalam RPJMD.
- 2) Arah pembangunan jangka panjang dan transformasi pembangunan
 - RPJPD memberikan arah pembangunan jangka panjang dan memuat upaya transformatif untuk mencapai visi yang telah ditetapkan.
 - Rencana strategis pembangunan lima tahunan dituangkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).
- 3) Keselarasan sasaran dan indikator pembangunan
 - Sasaran pokok dan indikator dalam RPJPD menjadi pedoman dalam penentuan sasaran, arah kebijakan, serta indikator pembangunan dalam RPJMD.
- 4) Keterkaitan RPJMD dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah
 - Tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan sasaran dan indikator pada RKPD serta Renstra Perangkat Daerah.

- Sasaran dan indikator strategis dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam menyusun sasaran dan indikator program pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

5) Integrasi indikator kinerja pembangunan daerah

- Indikator tujuan dan sasaran dalam RPJMD menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah (IKU Daerah).
- Indikator tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah menjadi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD), yang digunakan dalam penilaian akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

6) Konsistensi dengan rencana pembangunan sektoral

- Dokumen RPJPD, RPJMD, dan RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan sektoral, seperti rencana induk, strategi daerah, peta jalan, atau dokumen lain yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan daerah. Konsistensi antar dokumen ini sangat penting agar arah pembangunan daerah berjalan selaras dan terkoordinasi. Sebagai contoh, jika dalam RPJPD ditetapkan pengembangan kawasan pariwisata sebagai prioritas, maka hal ini harus tercermin dalam Renstra Dinas Kebudayaan, Pariwisata, dan Pemuda Olahraga melalui program peningkatan daya tarik destinasi wisata. Selain itu, pengembangan tersebut juga harus sesuai dengan arahan pemanfaatan ruang dalam RTRW, agar lokasi kegiatan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang. Konsistensi seperti ini memastikan pembangunan berjalan lebih tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Nias Selatan.

7) Pedoman bagi pasangan calon kepala daerah dan calon anggota DPRD

- RPJPD menjadi acuan dalam merumuskan visi, misi, dan program bagi pasangan calon kepala daerah serta calon anggota DPRD Kabupaten Nias Selatan.

Pencapaian sasaran pembangunan daerah juga harus didukung oleh kebijakan kelembagaan yang kuat, regulasi yang jelas, serta pendanaan dan investasi yang memadai. Selain itu, untuk mempercepat pencapaian sasaran pembangunan daerah, ditetapkan proyek prioritas pembangunan daerah dalam RPJMD dan RKPD. Setiap proyek prioritas tersebut dilengkapi dengan ukuran

keberhasilan yang mendukung tercapainya sasaran prioritas pembangunan daerah.

6.1.1.2. Penerapan Prinsip Kerangka Kerja Logis dalam Perencanaan Pembangunan

Penyusunan RPJPD dan dokumen turunannya menerapkan prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) dalam pembangunan. Pemanfaatan KKL bertujuan untuk memastikan bahwa setiap intervensi kebijakan selaras dengan tujuan pembangunan yang telah direncanakan, sekaligus mendukung efektivitas pemantauan dan evaluasi pembangunan.

KKL menggambarkan hubungan yang sistematis antara input, proses, output, outcome, dan impact. Dalam RPJPD, sasaran utama pembangunan yang bersifat impact dan outcome harus diterjemahkan secara rinci hingga ke level input, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen turunannya, yaitu rencana pembangunan jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagai alat ukur ketercapaian sasaran pembangunan, KKL dilengkapi dengan indikator kinerja pada setiap tingkatan. Pemilihan indikator kinerja harus memenuhi kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevant, dan Time-Bound*), sehingga dapat memastikan kesinambungan indikator dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menjamin kesinambungan pembangunan, seluruh indikator dalam RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD, dan seluruh indikator dalam RPJMD harus menjadi bagian dari Renstra Perangkat Daerah.

6.1.1.3. Skema Pendanaan dan Penganggaran

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJPD 2025-2045, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Nias Selatan harus didukung oleh sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Untuk memastikan keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan, diperlukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan, baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun nonpemerintah, dengan pendekatan yang inovatif, integratif, dan tepat sasaran.

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber pendanaan pembangunan, perlu peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas sesuai tahapan pembangunan. Selain itu, sumber pendanaan alternatif seperti pinjaman, hibah,

dan sumber lainnya juga dapat dimanfaatkan secara efektif untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

6.1.2. Kerangka Pengendalian

Untuk menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah, diperlukan pengendalian yang kontinu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu serta tata kelola data pembangunan. Pengendalian dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan manajemen risiko, baik pada tahap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan.

Sistem elektronik terpadu digunakan untuk mengintegrasikan seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, guna memastikan bahwa kebijakan pembangunan berbasis bukti (*evidence-based policy*).

Pengendalian RPJPD dilakukan dalam dua tahapan utama, yaitu pengendalian jangka menengah dan jangka pendek, dengan hasil evaluasinya disampaikan kepada kepala daerah.

1) Pengendalian Perencanaan

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan untuk:

- Memastikan konsistensi perencanaan pembangunan;
- Meningkatkan kualitas desain proyek prioritas pembangunan daerah; dan
- Menjamin ketersediaan alokasi anggaran dari sumber pemerintah maupun nonpemerintah.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek, yang mencakup:

a) Pengendalian Jangka Menengah

- Penjabaran RPJPD ke dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah;
- Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah, termasuk penerapan Kerangka Kerja Logis (KKL) dan penetapan ukuran keberhasilan;
- Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; dan
- Identifikasi serta mitigasi risiko perencanaan pembangunan.

b) Pengendalian Jangka Pendek

- Penjabaran RPJMD ke dalam RKPD, serta RKPD ke dalam rencana kerja jangka pendek perangkat daerah;
- Kesiapan desain proyek prioritas pembangunan daerah, termasuk penerapan KKL dan penetapan ukuran keberhasilan;
- Konsistensi antara perencanaan dan penganggaran; dan
- Identifikasi serta mitigasi risiko perencanaan pembangunan.

2) Pengendalian Pelaksanaan

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek, yang mencakup:

- Pemantauan pelaksanaan proyek prioritas pembangunan daerah;
- Pemantauan mitigasi risiko pembangunan;
- Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah; dan
- Penilaian terhadap capaian kinerja utama dan program pembangunan dalam mendukung sasaran pembangunan daerah.

6.1.2.1. Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN)

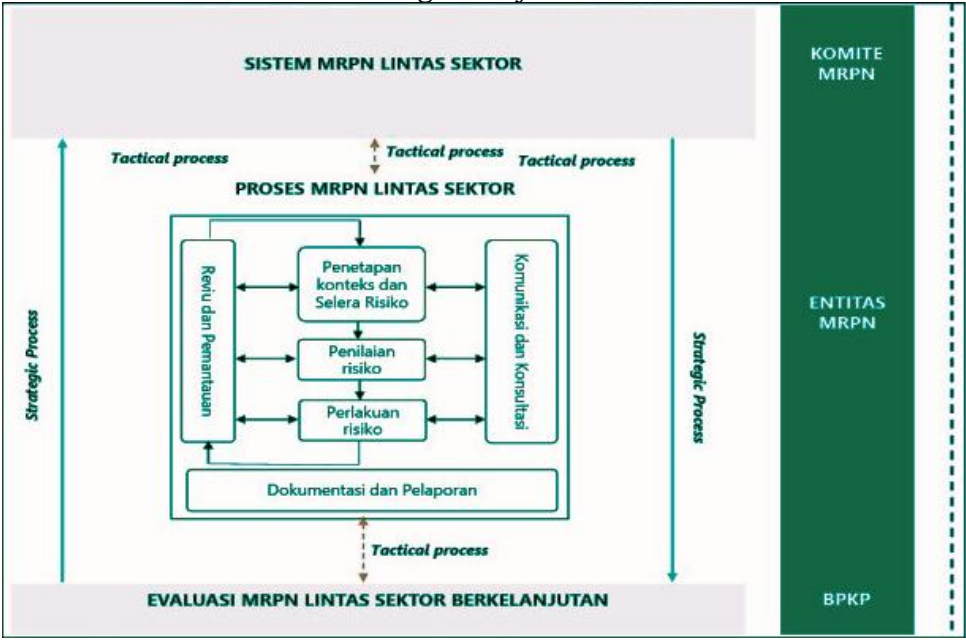
Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN) adalah serangkaian kegiatan terkoordinasi yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan risiko dalam pencapaian sasaran pembangunan nasional. MRPN bertujuan untuk mengelola ketidakpastian yang dapat memengaruhi keberhasilan program, kegiatan, proyek, prioritas pembangunan, dan/atau jenis risiko tertentu yang bersifat lintas sektor. Melalui MRPN, pengendalian dan mitigasi risiko dilakukan secara sistematis guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi pencapaian target pembangunan nasional. Hasil dari implementasi MRPN menjadi bagian dari penilaian kinerja, termasuk terhadap Pemerintah Daerah, sehingga mendorong tata kelola yang lebih akuntabel dan berorientasi pada hasil.

Untuk memperkuat pengendalian pembangunan daerah, sistem pengendalian harus terintegrasi dengan platform Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Satu Data Indonesia, dan KRISNA. Integrasi ini akan memastikan aliran data yang konsisten dan transparan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah. SPBE mendukung pengelolaan data secara elektronik, memfasilitasi integrasi antara

data perencanaan dan pelaksanaan, serta memungkinkan pemantauan perkembangan secara real-time. Sementara itu, Satu Data Indonesia mengoptimalkan penggunaan data yang valid dan terpercaya untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan tepat sasaran. KRISNA (Kinerja dan Sistem Informasi Pembangunan Daerah) turut memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pembangunan daerah melalui pemantauan kinerja dan pengelolaan sumber daya secara efektif.

MRPN mengintegrasikan manajemen risiko yang telah ada dalam berbagai organisasi ke dalam suatu sistem pengendalian risiko lintas sektor. Pengelolaan ini dilaksanakan secara lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023. Kerangka Kerja MRPN dapat dilihat pada Gambar berikut:

Gambar 6.1
Kerangka Kerja MRPN



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas dan BPKP, 2024

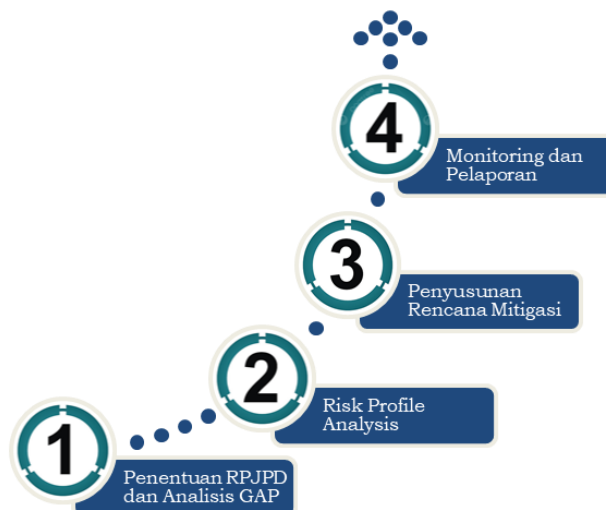
Pemerintah Daerah, sebagai salah satu entitas dalam Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN), perlu menerapkan pendekatan ini sejak tahap perencanaan pembangunan daerah guna memastikan efektivitas dan keberlanjutan pencapaian tujuan pembangunan. Penerapan MRPN di daerah dilakukan melalui pembentukan Komite Manajemen Risiko, yang berperan dalam koordinasi dan pengawasan, serta penyusunan kebijakan manajemen risiko sebagai pedoman dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan

risiko pembangunan. Proses penerapan MRPN mencakup beberapa langkah strategis, antara lain:

1. Perencanaan kinerja prioritas pembangunan, untuk menetapkan arah dan sasaran pembangunan daerah secara terukur.
2. Penentuan objek dan entitas MRPN, guna mengidentifikasi sektor atau program pembangunan yang memiliki risiko strategis dan operasional yang perlu dikelola.
3. Assessment risiko, yang melibatkan identifikasi, analisis, evaluasi, serta perlakuan terhadap risiko yang dapat berdampak pada pencapaian target pembangunan.

Penerapan manajemen risiko ini menjadi instrumen penting dalam pengambilan keputusan, guna meningkatkan probabilitas pencapaian sasaran pembangunan serta memitigasi potensi dampak negatif terhadap entitas MRPN. Dengan demikian, MRPN tidak hanya berperan dalam memperkuat capaian pembangunan, tetapi juga dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, memperkuat efektivitas sistem pengendalian internal, serta mendorong inovasi dalam pelayanan publik yang berorientasi pada keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat.

Gambar 6.2
Tahapan Manajemen Risiko untuk Mencapai Target RPJPD



6.1.2.2. Manajemen Risiko dalam Penyusunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025-2045

Penyusunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025-2045 harus berkesinambungan serta menjaga sinkronisasi antar periodisasi dan substansi

yang mengacu pada RPJPD Provinsi dan RPJPN. Dalam rangka percepatan pembangunan di berbagai sektor sesuai dengan rencana pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan, diperlukan tahapan dan integrasi manajemen risiko yang menyeluruh serta pembentukan dasar hukum yang memastikan integrasi tersebut dalam penyelenggaraan manajemen risiko.

Tahapan Manajemen Risiko dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 sebagai berikut:

a. Penentuan RPJPD

Penyusunan RPJPD Kabupaten Nias Selatan 2025-2045 dilakukan dengan menetapkan arah kebijakan dan target yang akan dicapai pada tahun 2045. Penentuan ini mencakup visi, misi, serta sasaran pembangunan jangka panjang yang diharapkan dapat membawa Kabupaten Nias Selatan berkontribusi dalam pencapaian Indonesia Emas 2045. Hal tersebut dilakukan melalui gap analysis terhadap target yang telah ditetapkan dalam RPJPD periode sebelumnya untuk mengidentifikasi kesenjangan antara kinerja dengan harapan. Dengan demikian, upaya strategis dapat ditentukan untuk mengatasi kesenjangan tersebut guna meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dalam RPJPD.

b. Risk Profile Analysis

Risk profile analysis dilakukan melalui identifikasi dan penilaian risiko. Proses identifikasi mencakup pengenalan dan evaluasi terhadap berbagai potensi risiko yang mungkin timbul, baik dari internal maupun eksternal, yang dapat menghambat pencapaian target RPJPD 2025-2045. Selanjutnya, dilakukan penilaian risiko untuk mengevaluasi kemungkinan terjadinya risiko serta dampak yang ditimbulkan. Penilaian ini membantu menentukan tingkat urgensi dan risiko yang harus dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan pencegahan dan mitigasi yang tepat dalam penyusunan RPJPD.

c. Penyusunan Rencana Mitigasi

Rencana mitigasi disusun melalui kerja sama dengan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait. Proses ini mencakup identifikasi risiko yang diprioritaskan serta penyusunan jadwal pelaksanaan rencana mitigasi yang jelas. Dengan demikian, rencana mitigasi dapat dirancang secara sistematis dan efektif untuk mengatasi risiko yang mungkin timbul dalam implementasi RPJPD 2025-2045.

d. Monitoring dan Pelaporan

Untuk memastikan implementasi RPJPD berjalan dengan baik, dilakukan monitoring dan evaluasi berkala terhadap pencapaian target, serta memastikan partisipasi berbagai pihak dalam pembangunan daerah. Proses ini mencakup pemantauan internal terhadap pelaksanaan RPJPD serta melibatkan pihak eksternal seperti lembaga pengawas dan organisasi masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan RPJPD serta mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan guna meningkatkan efektivitas implementasi.

Identifikasi risiko yang dilakukan terhadap misi atau tujuan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 antara lain:

a. Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi sosial, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama yaitu:

Kesehatan melalui perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat melalui pemenuhan penyediaan air minum dan sanitasi, kesehatan, ruang terbuka hijau, dan fasilitas komunal pendukung kesehatan. Pemerataan dan peningkatan akses layanan kesehatan universal. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana-prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan berkeadilan. Peningkatan kesejahteraan tenaga kesehatan. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan.

Pendidikan melalui Percepatan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar). Pemerataan dan peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan dasar Perluasan dan peningkatan bantuan pembiayaan bagi peserta didik, khususnya bagi masyarakat berpendapatan rendah dan/atau bagi yang memiliki prestasi. Pemerataan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar yang memenuhi standar aman bencana dan sarana transportasi khusus peserta didik sesuai kondisi daerah. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter, digital literacy, dan kondisi lokal daerah

(termasuk kondisi kebencanaan daerah). Penguatan manajemen talenta dan prestasi peserta didik. Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Peningkatan kualitas pendidikan guru dan tenaga kependidikan. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Perkuatan pemenuhan kebutuhan guru dan tenaga kependidikan yang didukung dengan pemberian bantuan/insentif khusus guru dan tenaga kependidikan. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas. Pengembangan layanan pendidikan jarak jauh berbasis digital dan TIK.

Perlindungan Sosial Yang Adaptif melalui percepatan pembangunan dan penuntasan kemiskinan. Peningkatan akses infrastruktur pelayanan dasar (antara lain air baku/air minum, sanitasi, rumah layak, energi/listrik) dan infrastruktur konektivitas intraregion & interregion. Penguatan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi (unique & high-value economy), serta peningkatan insentif fiskal & nonfiskal bagi investasi guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan kualitas sumber daya manusia pada usia produktif, terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling. Pengembangan/peningkatan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke Daerah yang akan mendorong peningkatan geliat kegiatan ekonomi melalui bertambahnya demand. Perlindungan sosial adaptif, terintegrasi, dan inklusif bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat dengan mengoptimalkan pemanfaatan sistem Regsosek agar tepat sasaran, tepat guna, dan efisien. Perluasan penyediaan bantuan sosial, seperti bantuan pembiayaan pendidikan, bantuan pembiayaan kesehatan, bantuan pemenuhan dan peningkatan ketahanan pangan dan gizi, bantuan pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, bantuan penyediaan tempat tinggal yang layak, bantuan pemberdayaan ekonomi dan pekerjaan, bantuan/subsidi energi, bantuan/subsidi transportasi dan komunikasi, dan sebagainya, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat. Perluasan penyediaan jaminan sosial, seperti jaminan kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, jaminan kematian, jaminan hari tua, terutama bagi kelompok marjinal, rentan, dan masyarakat. Pemberdayaan ekonomi mikro,

kecil, dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat. Percepatan eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah Percepatan penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga terhadap hunian layak di perkotaan

- b. Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi Ekonomi, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama yaitu:

Iptek, Inovasi, dan Produktifitas Ekonomi melalui peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). Percepatan penyediaan infrastruktur penunjang aktivitas industri yang andal, antara lain: Pembangkitan tenaga listrik dan grid tenaga listrik, terutama green/low-carbon electricity; Penyediaan air baku dan sistem transmisi/distribusinya; Penyediaan akses telekomunikasi dan digital; Penyediaan pengelolaan limbah dan sampah industri; Fasilitas kesehatan bagi pekerja; Fasilitas pendidikan dan pelatihan tenaga kerja; Fasilitas hunian, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang layak bagi pekerja; dan Pusat layanan jasa dan kebutuhan pekerja. Pengembangan kepariwisataan dan ekosistem ekonomi kreatif yang holistik dengan pemenuhan paripurna aspek 6A (atraksi, aksesibilitas, amenitas, ancillary services, aktivitas, available packages); Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif. Penguatan pemasaran pariwisata melalui kolaborasi dengan media dan dunia usaha/asosiasi usaha. Peningkatan konektivitas menuju/dari kawasan strategis pariwisata dan ekonomi kreatif. Penguatan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang DUDI nasional yang berdaya saing di tataran global Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.

Penerapan Ekonomi berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas pertanian yang berkelanjutan melalui modernisasi pertanian dan implementasi teknologi (smart farming, teknologi sensor, modifikasi cuaca, dan lainnya). Penyediaan bibit dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar

ekspor/global. Penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi petani guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh petani, termasuk pengetahuan nilai & musim komoditas, pengetahuan metode pengembangbiakan dan perawatan, pengetahuan jenis tanah, cuaca, dan iklim, pengetahuan pengendalian hama & pemupukan, teknologi pascapanen, dan pemasaran pertanian melalui digital marketplace/platform. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha pertanian. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian. Pengembangan closed loop model pertanian melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi petani, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi pertanian. Pengembangan ekonomi biru berbasis keunggulan wilayah. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk perikanan dalam rangka penguatan ketahanan dan kemandirian pangan nasional, sekaligus upaya peningkatan kesejahteraan nelayan dan petambak. Peningkatan kapasitas dan akses informasi bagi nelayan dan petambak guna meningkatkan produktivitasnya melalui ilmu/rekayasa/teknologi pertanian terapan kontemporer yang dapat diimplementasikan oleh nelayan, termasuk pengetahuan perikanan modern, pengetahuan cuaca dan iklim maritim, pengetahuan jenis dan nilai komoditas perikanan, informasi daerah potensial penangkapan ikan, teknologi penyimpanan, pengawetan, dan pengolahan, dan pemasaran perikanan melalui digital marketplace/platform. Perluasan akses pembiayaan kredit usaha perikanan, terutama bagi nelayan dan petambak. Pengembangan closed loop model perikanan tangkap dan budidaya melalui penguatan kelembagaan dan pembiayaan koperasi nelayan & petambak, serta penguatan kolaborasinya dengan market, bank, dan asuransi perikanan. Penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas perikanan dan daya saing produk perikanan. Pengendalian dan pengawasan sumber daya perikanan dengan memanfaatkan teknologi monitoring, penginderaan jauh, dan pelaporan nelayan berbasis digital, disertai penerapan insentif dan disinsentif. Modernisasi kapal dan sarana produksi perikanan. Penyediaan instrumen

pengendali hama, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis, khususnya untuk pengembangan aktivitas perikanan budidaya. Penguatan ekosistem dan lansekap ekonomi hijau, antara lain perdagangan karbon, offsetting, dan pajak karbon.

Transformasi Digital meliputi Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital yaitu: (i) penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan broadband hingga menjangkau ke seluruh pelosok; (ii) peningkatan utilisasi dan pemanfaatan TIK di berbagai sektor prioritas melalui upaya meningkatkan digitalisasi di sektor strategis (utamanya untuk mendukung kawasan perairan dalam membantu perekonomian nelayan dan kepentingan pelayaran); serta (iii) peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan siber serta kemampuan SDM digital atau digital skill (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).

Integrasi Ekonomi domestik meliputi pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana kepelabuhanan pada pelabuhan pengumpul/pengumpan. Penyediaan layanan dan/atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan pelayaran logistik rutin, cepat, dan berbiaya rendah. Pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana bandar udara. Penyediaan layanan/dan atau peningkatan kualitas & kuantitas layanan penerbangan rutin dan berbiaya rendah yang menghubungkan Daerah. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri domestik dan global, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi dan kemitraan usaha. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis.

Perkotaan dan perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi meliputi penguatan infrastruktur perkotaan dan pengelolaan kawasan perkotaan untuk mewujudkan kawasan perkotaan inklusif, berkelanjutan, dan berketahanan. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan, salah satunya melalui pembentukan regulasi dan kelembagaan pengelolaan lintas wilayah dan lintas

pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah, termasuk kelembagaan pelayanan publik lintas wilayah (a.l. layanan air minum, layanan pengelolaan persampahan dan sanitasi, transportasi publik, dsb). Percepatan penyediaan infrastruktur air baku dan air minum pada kawasan perkotaan. Peningkatan ketahanan bencana melalui pendekatan hybrid (green & grey infrastructure) pada kawasan perkotaan. Pengembangan sistem pengelolaan sampah dan sanitasi terpadu perkotaan menuju zero solid waste city dan mendukung circular economy pada kawasan perkotaan. Peningkatan coverage dan kecepatan akses internet melalui penggelaran fixed connection dan/atau pembangunan infrastruktur mobile connection pada area-area weak coverage di kawasan perkotaan. Percepatan penyediaan infrastruktur energi rendah emisi berbasis jaringan gas perkotaan pada kawasan perkotaan. Penguatan pengelolaan jalan daerah dan jalan desa. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan perkotaan dan kawasan strategis lainnya.

- c. Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi tata kelola dilakukan melalui Penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di daerah. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dan masyarakat adat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan. Percepatan digitalisasi pelayanan publik dan peningkatan respon terhadap laporan masyarakat. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas aparatur daerah yang adaptif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan kualitas ASN pemerintah daerah menuju penyelenggaraan pemerintah daerah yang profesional dan bebas korupsi. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward, dan punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja. Penguatan peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang sehat. Penguatan integritas partai politik.
- d. Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi Keamanan lingkungan yang tangguh dan stabilitas ekonomi, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama yaitu:

Keamanan Lingkungan Yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial melalui penguatan keamanan dan ketertiban untuk mengurangi tingkat kriminalitas. Peningkatan keamanan dan penegakan hukum wilayah perbatasan, terutama pada perbatasan laut.

Stabilitas Ekonomi Makro melalui peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif & kreatif daerah (antara lain pinjaman daerah, KPBUD, CSR, jasa ekosistem, perdagangan karbon, dsb), peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional. Penguatan pengendalian inflasi daerah.

Ketangguhan Kepemimpinan Daerah dan Diplomasi meliputi Dukungan terhadap pengembangan pusat pendidikan & pelatihan militer/ pangkalan komposit/ pangkalan/ pos militer/ sarana dan prasarana pertahanan lainnya di Daerah.

- e. Dalam mengidentifikasi risiko yang berfokus pada transformasi Ketahanan Sosial Budaya, Pangan dan Lingkungan Hidup, terdapat beberapa aspek yang menjadi fokus utama yaitu:

Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju melalui penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat dengan berasaskan kepada Pancasila. Penguatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan.

Keluarga Berkualitas, Kesenjangan Gender, dan Masyarakat Inklusif melalui Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia, melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan.

Lingkungan Hidup Berkualitas melalui pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Pengelolaan risiko bencana

dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya seperti tsunami, dan gempa bumi maupun bahaya lainnya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan melalui peningkatan ketahanan air di kawasan rawan & rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air. Pengelolaan sampah terpadu hulu-hilir dan berbasis masyarakat dan integrasi pengelolaan sampah dengan pengembangan circular economy.

Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim melalui pengimplementasian pengembangan tata ruang berbasis wilayah kesatuan lansekap ekologis. Peningkatan upaya pelestarian hutan lindung dan ekosistem alami. Pengelolaan risiko bencana dengan meningkatkan kesiapsiagaan, penguatan kurikulum di setiap satuan pendidikan, sistem peringatan dini, kesadaran dan literasi masyarakat akan potensi bahaya seperti tsunami, dan gempa bumi maupun bahaya lainnya, serta mengembangkan mitigasi struktural dan non-struktural di daerah rawan bencana tinggi.

6.1.3. Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan, baik dari unsur pemerintah maupun nonpemerintah. Untuk mendorong keterlibatan yang lebih optimal, diperlukan sistem insentif yang efektif.

Bagi pelaku pembangunan dari unsur pemerintah, sistem insentif diintegrasikan dalam manajemen kinerja dan manajemen anggaran. Pemberian insentif didasarkan pada kinerja perangkat daerah dalam mencapai sasaran pembangunan daerah. Kinerja tersebut diukur berdasarkan beberapa aspek, antara lain: (1) Konsistensi perencanaan, termasuk keselarasan antara perencanaan jangka panjang, menengah, dan tahunan; (2) Konsistensi antara perencanaan dan pendanaan, guna memastikan implementasi program yang efektif; (3) Pencapaian indikator kerangka ekonomi makro, sebagai tolok ukur stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah; (4) Pencapaian indikator kinerja utama, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan kebijakan strategis; (5)

Pencapaian program prioritas, sesuai dengan target pembangunan daerah. Evaluasi kinerja secara periodik dan berbasis data. Contoh: Evaluasi kinerja perangkat daerah dalam pelaksanaan pembangunan dilakukan secara tahunan melalui sistem akuntabilitas kinerja (SAKIP), yang menjadi dasar pemberian insentif, baik dalam bentuk anggaran kinerja tambahan maupun insentif non-fiskal.

Sementara itu, bagi pelaku pembangunan dari unsur nonpemerintah, insentif dapat diberikan dalam bentuk dukungan regulasi, fasilitas kemudahan berusaha, serta insentif lainnya yang mendorong keterlibatan aktif dalam pembangunan daerah.

6.1.4. Mekanisme Perubahan

Dalam kondisi *force majeure* yang mencakup perubahan geopolitik, geoekonomi, bencana, atau penyimpangan signifikan dari tahapan pembangunan sebelumnya yang menghambat pencapaian sasaran jangka panjang, target RPJPD Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 dapat dimutakhirkan melalui RPJMD. Pemutakhiran target dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Perubahan terhadap RPJPD hanya dapat dilakukan melalui mekanisme revisi Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, guna menjamin legalitas dan konsistensi arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Penerapan kaidah pelaksanaan pembangunan didukung oleh transformasi digital melalui sistem elektronik terpadu serta tata kelola data yang terintegrasi dalam seluruh tahapan pembangunan. Langkah ini bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan efisiensi operasional serta ketangkasan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan RPJPD.
- 2) Meningkatkan kualitas kebijakan melalui pemanfaatan data referensi yang seragam, sehingga perencanaan pembangunan lebih akurat, terukur, dan berkelanjutan.

6.1.5. Komunikasi Publik

Komunikasi publik memiliki peran penting dalam memastikan transparansi, partisipasi masyarakat, serta efektivitas pelayanan pemerintah daerah. Melalui komunikasi yang baik, kebijakan dan program pemerintah dapat lebih mudah dipahami oleh masyarakat serta mendorong partisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kebijakan pembangunan.

Prinsip dasar komunikasi publik terdiri dari tiga aspek utama:

- 1) Struktur dan tata kelola komunikasi yang objektif, akuntabel, inovatif, dan profesional, terutama dalam koordinasi lintas sektor.
- 2) Penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik, serta mudah diakses dan dimanfaatkan oleh semua pihak dengan biaya yang terjangkau.
- 3) Keterlibatan seluruh kelompok masyarakat secara demokratis, berbasis data yang valid, serta dengan metode komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan publik yang beragam.

Komunikasi publik dalam RPJPD mengacu pada prinsip komunikasi dalam RPJPN, yaitu 'tidak ada yang tertinggal' (*no one left behind*) dan partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*). Dalam kerangka ini, diterapkan sistem umpan balik masyarakat (*feedback loop*) sebagai mekanisme yang memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan, tanggapan, maupun evaluasi terhadap kebijakan, program, dan pelayanan publik secara berkelanjutan. Sistem ini menjadi sarana penting untuk menjamin bahwa suara masyarakat benar-benar didengar dan dipertimbangkan dalam setiap tahapan pembangunan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pemerintah dan meningkatkan kualitas perencanaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan riil di lapangan

Pelaksanaan komunikasi publik melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Perangkat Daerah, pemerintah desa, dan masyarakat umum. Komunikasi dengan Perangkat Daerah dilakukan melalui musyawarah atau rapat koordinasi guna memastikan adanya masukan terhadap prioritas pembangunan. Komunikasi dengan pemerintah desa dilakukan secara berjenjang, mulai dari musyawarah desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten, guna membangun pemahaman dan meningkatkan partisipasi dalam pembangunan. Komunikasi dengan masyarakat umum, termasuk sektor swasta, media, akademisi, organisasi masyarakat sipil, perantau, pemuda, serta kelompok rentan (perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia), dilakukan melalui berbagai metode komunikasi yang memungkinkan mereka memahami serta berkontribusi dalam pembangunan dengan memberikan masukan, kritik, atau dukungan.

Komunikasi publik dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, menjamin akses informasi yang luas, jelas, tepat, cepat, dan objektif. Dengan demikian, komunikasi publik yang efektif dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih bermakna dalam penyusunan, pelaksanaan, serta pengendalian kebijakan pembangunan.

6.2. Pembiayaan Pembangunan

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045, diperlukan kapasitas pembiayaan yang memadai. Upaya peningkatan kapasitas pembiayaan dilakukan melalui inovasi dalam pendanaan, baik dengan memperluas sumber pembiayaan, menerapkan skema atau mekanisme baru, maupun mengoptimalkan peran sektor keuangan.

1. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Publik

Penguatan kapasitas pembiayaan sektor publik dilakukan melalui perluasan sumber pendanaan dan pengembangan inovasi skema pembiayaan yang mencakup: (a) Penguatan perencanaan pembiayaan, meliputi: (i). Penataan regulasi daerah dan pembentukan kelembagaan yang adaptif; (ii). Pemanfaatan teknologi digital dalam proses bisnis; (iii) Pengembangan mekanisme pelaksanaan (delivery mechanism) yang mendukung akses terhadap skema pembiayaan berdampak (impact investment); (b) Penguatan dan perluasan instrumen kerja sama pemerintah dan badan usaha, terutama dalam aspek regulasi, tata kelola, kelembagaan, utilitas, serta infrastruktur sosial; (c) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui skema daur ulang aset (asset recycling) guna meningkatkan efisiensi dan nilai tambah aset yang dimiliki.

2. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Nonpublik

Untuk mendukung pembangunan, pembiayaan sektor nonpublik ditingkatkan melalui pemanfaatan berbagai instrumen pendanaan jangka panjang, seperti: Dana pensiun, Asuransi, Instrumen di pasar modal, Dana abadi daerah

3. Penguatan Manajemen Investasi Publik

Peningkatan kapasitas pembiayaan, baik sektor publik maupun nonpublik, harus diiringi dengan manajemen investasi yang berkualitas agar penggunaan dana menjadi lebih optimal. Beberapa langkah strategis dalam penguatan manajemen investasi publik meliputi: (a) Penajaman identifikasi

investasi publik dalam setiap periode jangka menengah; (b) Penyempurnaan proses perencanaan, penyiapan, dan penilaian proyek investasi publik; (c) Penyelarasan prioritas investasi publik dengan kebutuhan dan skala pembangunan daerah; (d) Modernisasi sistem pemantauan dan pengendalian pelaksanaan investasi publik; (e) Peningkatan keterlibatan sektor swasta dan masyarakat dalam siklus investasi publik; (f) Penyempurnaan kerangka regulasi, tata kelembagaan, organisasi, serta peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen investasi publik; (g) Penguatan transparansi dan akuntabilitas dalam seluruh aspek investasi publik.

4. Strategi Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah

Untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mengantisipasi berbagai potensi guncangan keuangan di masa depan, pemerintah daerah akan mengembangkan strategi pengelolaan risiko fiskal secara sistematis dan adaptif. Sebagai bentuk mitigasi risiko fiskal, akan dikembangkan dashboard risiko fiskal yang memuat antara lain analisis sensitivitas terhadap fluktuasi pendapatan, eksposur terhadap kewajiban pinjaman daerah, risiko pembiayaan proyek strategis, serta potensi kewajiban kontinjensi. Dashboard ini akan menjadi alat bantu dalam pengambilan keputusan fiskal yang lebih prudent, transparan, dan akuntabel, sekaligus memperkuat kesiapan fiskal daerah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi di masa mendatang.

Melalui strategi ini, kapasitas pembiayaan dapat ditingkatkan secara optimal guna mendukung pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045.

6.3. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nias Selatan Tahun 2025-2045 disusun sebagai pedoman utama pembangunan daerah selama 20 tahun ke depan. Dokumen ini mencakup visi, misi, arah pembangunan, arah kebijakan, dan sasaran pokok daerah, yang dirumuskan berdasarkan regulasi dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS).

RPJPD ini selaras dengan RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara, serta mengakomodasi prinsip pengarusutamaan gender, inklusi sosial, ekonomi hijau, transformasi digital, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs),

serta mitigasi dan penanggulangan kebencanaan. Dokumen ini juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD dan RKPD Kabupaten Nias Selatan.

Penyusunan RPJPD ini telah melalui evaluasi dan mekanisme perubahan sesuai ketentuan yang berlaku, serta dikomunikasikan kepada publik melalui konsultasi publik, Musrenbang, dan pendampingan dengan Bappelitbang Provinsi Sumatera Utara. Selain itu, RPJPD ini membuka peluang pembiayaan pembangunan inovatif melalui sumber-sumber non-pemerintah dan menyesuaikan regulasi daerah yang terkait.

6.4. Saran

Keberhasilan pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Nias Selatan dalam mewujudkan visi “Nias Selatan Sejahtera, Berbudaya, Maju, dan Berkelanjutan” memerlukan dukungan dari berbagai faktor utama. Hal ini mencakup: (1) kepemimpinan daerah yang kuat, visioner, dan demokratis; (2) konsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah; (3) keberpihakan pembangunan kepada kesejahteraan rakyat; (4) partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dalam setiap tahapan pembangunan; serta (5) keseimbangan dan kesinambungan dalam perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.

Dukungan, komitmen, serta semangat gotong royong dari seluruh pihak di Kabupaten Nias Selatan sangat diperlukan untuk mewujudkan visi pembangunan tahun 2045. Keberhasilan ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam mewujudkan visi pembangunan Provinsi Sumatera Utara 2045 dan Indonesia Emas 2045.

Bupati Nias Selatan,

ttd

SOKHIATULO LAIA